



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201929824, 14 Februari 2019

## Pencipta

Nama : **Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si**  
Alamat : Kavling Sadang Rt 002 Rw 011 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, Bandung, Jawa Barat, 40624  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si**  
Alamat : Kavling Sadang Rt 002 Rw 011 Desa Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung 40624, Bandung, Jawa Barat, 40624  
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Tulis (Disertasi)**  
Judul Ciptaan : **PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) TAHUN 2004 (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat)**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 18 Desember 2007, di Jakarta

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000134828

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**

**PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) TAHUN 2004  
(Studi Kasus Provinsi Jawa Barat)**

**Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Seminar Hasil**

**DISERTASI**

**Oleh:  
Fauzan Ali Rasyid  
NPM: 890 221 0137**

**JAKARTA  
2007**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**

**PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) TAHUN 2004  
(Studi Kasus Provinsi Jawa Barat)**

**Diajukan Untuk Mengikuti Ujian Prapromosi**

**DISERTASI**

**Oleh:  
Fauzan Ali Rasyid  
NPM: 890 221 0137**

**JAKARTA  
2007**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) TAHUN 2004  
(Studi Kasus Provinsi Jawa Barat)**

**DISERTASI**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Doktor  
Dalam Bidang Ilmu Politik Universitas Indonesia  
Dipertahankan Dihadapan Sidang Akademik Terbuka  
Senat Guru Besar Universitas Indonesia  
Pada Hari Selasa, 18 Desember 2007  
Di Gedung AJB Kampus FISIP  
Universitas Indonesia  
Depok**

**Oleh:  
Fauzan Ali Rasyid  
NPM: 890 221 0137**

**PROGRAM PASCASARJANA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS INDONESIA  
J A K A R T A  
2007**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**

**PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) TAHUN 2004  
(Studi Kasus Provinsi Jawa Barat)**

**RINGKASAN DISERTASI**

*Promosi Doktor Pascasarjana Universitas Indonesia  
Selasa, 18 Desember 2007 di Gedung AJB Fisip-UI*

**Oleh:  
Fauzan Ali Rasyid  
NPM: 890 221 0137**

**JAKARTA  
2007**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Disertasi ini kupersembahkan kepada keluargaku tercinta dan tersayang  
Keluargaku yang penuh dengan kesabaran, pengorbanan dan kesetiaan  
mendampingi penulis untuk menyelesaikan studi  
Terkadang hak anak dan istri untuk mendapatkan kehidupan yang layak tertunda  
demi studi penulis  
Semoga pengorbanan dan perjuangan keluargaku mendapatkan ridha Allah SWT.  
Amin  
Semoga dengan selesainya studi ini dapat membawa kepada kehidupan keluarga  
yang lebih baik dan membawa kemashlahatan bagi bangsa dan negara. Amin

Kepada istriku Tercinta Eneng Nuraeni, M.Ag  
Dan kedua anakku tersayang  
Rosikhul Khoir Nurfauzan dan  
Saddam Nurfauzan

## **PERNYATAAN ORSINALITAS**

Disertasi ini adalah hasil karya cipta pribadi penulis sendiri yang dapat diklaim sebagai harta kekayaan intelektual. Seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk di dalam karya ini telah saya nyatakan dengan benar atas dasar kaidah-kaidah akademis.

Penulis,

Fauzan Ali Rasyid

**Lembar Persetujuan dan Pengesahan**

**PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) TAHUN 2004  
(Studi Kasus Provinsi Jawa Barat)**

**Disetujui dan disahkan Oleh:**

**Promotor:**

**Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA**

**CO-Promotor 1:**

**CO-Promotor 2:**

**DR. Burhan Djabir Magenda**

**DR. Chusnul Mar'iyah**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ilmu Politik  
Program Pascasarjana UI**

**Julian Aldrin Pasha, Ph.D**

NUP. 090 605 0091

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA  
JAKARTA  
2007**

## Abstrak

**Judul : Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2004 (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat)**  
**Halaman : (xi + 400)**  
**Kepustakaan : 200 buku, 13 Hasil penelitian dan makalah, 8 jurnal, dan 9 Peraturan perundang-undangan).**

Pemilihan umum secara langsung anggota DPD merupakan fenomena politik baru pasca runtuhnya rezim Orde Baru sebagai produk amandemen UUD 1945 tahun 2002. Penelitian ini mengambil kasus Jawa Barat. Fokus permasalahan penelitian adalah faktor-faktor penyebab kemenangan yang diraih oleh keempat anggota DPD Jawa Barat pada pemilihan umum tahun 2004. Penelitian ini bertujuan (1) Menggambarkan dan menganalisis proses pembentukan tim sukses oleh keempat calon anggota DPD Jawa Barat dan apa yang dilakukan tim sukses, sehingga tim sukses tersebut dapat menyentuh masyarakat sampai kepada lapisan masyarakat paling bawah atau di pelosok kota. (2) Menganalisis upaya keempat calon anggota DPD Jawa Barat menjadikan organisasi-organisasi masyarakat sebagai basis dukungan politik. (3) Menggambarkan dan menganalisis langkah-langkah keempat calon anggota DPD Jawa Barat melakukan kampanye sehingga dapat menarik simpatik dan kepercayaan masyarakat Jawa Barat untuk memilihnya.

Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif, yang mengandalkan konstruksi logika dan penggalan interpretatif berdasarkan data-data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi atau bahan-bahan literatur yang relevan dengan topik dan masalah studi ini. Dalam kaitan itu digunakan juga studi kasus sebagai *research strategy*. Analisis data yang akan digunakan adalah analisis kualitatif yang dilakukan melalui multi level analisis (*multi level analysis*) dan analisis historis-holistik.

Dalam menganalisis faktor-faktor kemenangan tersebut digunakan beberapa teori politik antara lain: Teori Demokrasi dan demokratisasi, Teori Komunikasi Politik, Teori Pengaruh Personalitas, Teori Sosial Kapital, Teori Aristokrat Lokal dan Teori Politik Etnis.

Temuan-temuan dalam studi ini dikemukakan sebagai berikut:

Temuan studi ini dapat terbagi kepada dua aspek. Pertama aspek kelembagaan DPD ditemukan bahwa, *pertama*, sistem parlemen Indonesia lebih menggunakan sistem bikameralisme lunak (*weak bicameralisme or soft bicameralisme*) bahkan sangat lunak dibandingkan dengan negara kesatuan yang menganut sistem bikameral. *Kedua*, pemisahan kelembagaan, baru pada tingkat institusi belum mencapai tingkat kewenangan, sehingga muncul ketidakseimbangan antar lembaga legislatif. *Ketiga*, lembaga legislatif Indonesia terdiri dari 3 kamar (*treecameralisme*) yakni DPR, DPD dan MPR, karena MPR memiliki tugas dan kewenangan sendiri.. Oleh karena itu untuk mewujudkan harapan reformasi adanya sistem *cek and balances* antar lembaga diperlukan kembali penyempurnaan.

Aspek kedua adalah dari segi faktor-faktor dominan yang mengantarkan kemenangan anggota DPD Jawa Barat adalah *pertama*, faktor-faktor yang mendukung kemenangan pemilihan anggota DPD di Jawa Barat, lebih dikarenakan faktor popularitas ketokohan, dukungan organisasi, primordialisme kedaerahan dan faktor isu politik. *Kedua*, faktor yang lebih dominan pada kemenangan pemilu adalah popularitas ketokohan, dukungan organisasi, primordialisme kedaerahan sedangkan isu kampanye belum menjadi daya tarik bagi pemilih. *Ketiga*, penggalangan politik yang dilakukan oleh para anggota DPD tidaklah terbatas pada satu pola, namun menggabungkan beberapa pola mobilisasi antara lain mobilisasi dengan variabel ketokohan/elit, variabel kegiatan keagamaan, variabel solidaritas organisasi, variabel primordialisme kedaerahan dan kekerabatan serta pola komunikasi langsung dengan konstituen. Tetapi yang lebih dominan adalah faktor kedaerahan kemudian faktor ketokohan dan jaringan organisasi.

Secara teoritis, studi ini menunjukkan relevansi terhadap beberapa teori yang digunakan yaitu teori Maswadi Rauf dan Dan Nimmo tentang artikulasi kepentingan politik dan pendekatan persuasif dalam komunikasi politik. Teori Miriam Budiardjo dan Suzanne Keller tentang sumber-sumber kekuasaan, elit strategis dan *the ruling class*. Teori Burhan Magenda tentang *networking politik*, kapital sosial dan aristokrat lokal. Teori Maurice Duverger dan Dahrendorf tentang solidaritas proximitas dan kuasi-kelompok sebagai kelompok strategis dan *pressure group*. Teori Clifford Gertz tentang nilai-nilai primordialisme. Studi ini juga merevisi teori Kart D. Jacson dan Hiroko Horikoshi tentang kewibawaan tradisional.

## KATA PENGANTAR

Saya panjatkan syukur al-hamdulillah ke hadirat Allah SWT., atas berkat ridha dan inayah-Nya saya dapat menyelesaikan disertasi ini sebagai salah satu tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada Program Doktor Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Shalawat dan salam senantiasa saya persembahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW., keluarga, shabat dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak langkahnya sampai yaumul akhir.

Selesainya studi yang penulis sajikan dalam bentuk disertasi, tentunya tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan dari lubuk hati yang paling dalam penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA., sebagai dosen dan promotor. Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA adalah seorang guru yang sekaligus sebagai bapak. Ia senantiasa menerapkan ketegasan, ketelitian dan membentuk percaya diri bagi mahasiswanya sehingga ia pantas untuk dijadikan suri tauladan sebagai guru yang senantiasa menjaga norma-norma akademik. Penulis mohon maaf, apabila selalu merepotkan dan mengganggu aktivitas bapak semoga seluruh amal bakti bapak dibalas Allah SWT.

Ucapan terimakasih pula kepada Bapak Dr. Burhan D. Magenda sebagai dosen dan co-promotor. Dr. Burhan D. Magenda adalah sosok guru yang dengan penuh kesabaran, memberikan dorongan dan rasa optimis membimbing penulis. Terimakasih penulis ucapkan kepada Ibunda Dr. Chusnul Mar'iyah sebagai dosen dan co-promotor. Dr. Chusnul Mar'iyah adalah sosok guru dan ibu bagi mahasiswanya. Ia senantiasa mendorong penulis untuk berkonsentrasi dan menyelesaikan studi. Dua kalimat yang tak dapat saya lupakan, pertama, kalau kamu menghormati ibu selesaikan disertasi. Kedua, kalimat yang senantiasa diulang-ulang diucapkan beliau adalah jangan menghilang. Dan kenangan yang tak terlupakan juga, penulis dibuatkan nasi goreng yang sangat enak dan nikmat

Selanjutnya, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Gumilar R. Sumantri (Rektor Universitas Indonesia), Bapak Julian Aldrin Phasa, Ph.D (Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Politik), dan Ibu Dra. Nurul Nurhandjati, MA (Sekretaris Program Pasca Sarjana Ilmu Politik) atas bantuan dan dorongannya untuk segera menyelesaikan studi tepat pada waktunya.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak/Ibu dosen Program Doktor Ilmu Politik Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia: Prof. Dr. Miriam Buadiardjo, Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin, MA., Prof. Dr. Rahman Zainuddin, Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA., Dr. Burhan D. Magenda, Dr. Chusnul Mar'iyah, Dr. Isbodroini Suyanto, MA., Dr. Dedy Nur Hidayat, Dr. Haryatmoko, Dr. Karlina Leksono, dan Dr. Noormalawati Rosman atas ilmu yang telah diberikannya, keteladanan dan bimbingannya, semoga mendapat imbalan pahala dari Allah SWT. Ucapan terima kasih penulis juga sampaikan kepada seluruh staf administrasi Program Pasca Sarjana Ilmu Politik: Mbak Herawati SE, Mbak Romlah, Mas Deny, Mbak Retno, Mbak Eva, SIP, MA., Pak Biwoso dan Pak Anto.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada civitas akademika UIN SGD Bandung yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Doktoral ini, terutama kepada Prof.Dr.H. Nanat Fatah Natsir (Rektor UIN SGD Bandung), Prof.Dr.H. Hendi Suhendi, MS (Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum), Dr.H. Mohammad Nadjib (Pembantu Rektor UIN), Dr.H. Oyo Sunaryo Mukhlas (Pembantu Dekan), Drs. Atang Abdul Hakim MA (Pembantu Dekan). Guru-guru penulis di UIN antara lain Prof.Dr.H. Rahmat Djatnika (almarhum), Prof.Drs. H.O. Taufiqullah, dan Prof.Drs.H. A. Djazuli serta rekan-rekan dosen UIN yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam pengantar ini.

Penulis ucapkan terimakasih pula kepada narasumber/informan dalam penulisan disertasi ini yang antara lain: Prof.Dr. Ginandjar Kartasasmita (Anggota DPD RI), Pra. Arief Natadiningrat (Anggota DPD RI), Prof.Dr. Mohammad Surya (Anggota DPD RI), K.H. Sofyan Yahya MA (Anggota DPD RI), H. Syafi'i (Ketua PB Paguyuban Pasundan), Drs. Nugraha Besoes (Staf Ahli MPR/DPD RI), Ir. Iyus Rustandi, M.Si, Drs. A.S. Padli, Sahiri Hermawan, SH., MH (Ketua Umum PGRI Jawa Barat), K.H. Yusuf Muhammad (Wakil Ketua PW NU Jawa Barat), Ir. Rudi Gunawan (Ketua HKTU Jawa Barat) atas bantuan merekalah penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

Penulis ucapkan pula terimakasih kepada senior dan rekan di keluarga besar HMI yang telah membantu baik moril maupun materil. Prof.Dr. Laode Kamaluddin (Presidium KAHMI Nasional), Dr. Asri Harahap (Presidium KAHMI Nasional), Tubagus Farih (Presidium KAHMI Nasional), Dr. Nur Sutrisno (Presidium KAHMI Nasional), Sahar L. Hasan (Presidium KAHMI Nasional), Dr. Harry Azhar Aziz (Anggota DPR RI), Drs. Imam Sahardjo (Ketua DPP PPP), Drs. Sujud Sirojuddin (Anggota DPR RI), Dr. Deding Ishak (Anggota DPR RI), Drs. Ferry Mursyidan Baldan (Anggota DPR RI), Drs. Sujana Sulaeman (Pengusaha), Aman Romansah, Viva Yoga Mauladi, M.Si. (Sekretaris Umum KAHMI Nasional), Anas Urbaningrum MA (Mantan Ketua Umum PB HMI), Taufiq Hidayat SH. (Mantan Ketua Umum PB HMI), Ir. Fakhruddin (Mantan Ketua Umum PB HMI), Drs. Khalis Malik (Mantan Ketua Umum PB HMI), Saan Musthafa, S.Ip (Mantan Ketua PB HMI), Ahmad Doli Kurnia. M.Si (Mantan Sekjen PB HMI), Zulkifli (Wasekjen PBB), Asep Wahyu Wijaya (Mantan Ketua Umum ISMAHI), Alfian Alfian (Direktur Akbar Tanjung Institut), Moh. Sa'dun (Cides), Ir. Gunawan (Pengusaha), Juffa Shadiq, S.Ag, Suwandi Idris, M.Si, Suparji MH, Kurnia Danuaji, S.Ip., Drs. Nuril Huda, Suratman MH., serta senior dan kawan-kawan yang mohon maaf tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis ucapkan terimakasih kepada rekan-rekan di program doktor Universitas Indonesia atas masukan dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan disertasi ini. Dr. Heriyandi Roni, Dr. Ahyar Asmu'i, Dr. Jayadi Nas, Dr. Anton Minardi M.Ag, Afan Sulaeman MA, Komarudin MA, Zulfikri MA, Lili Romli, M.Si., Sri zul MA, Mulyadi, M.Si, Adi, M.Si, Ujang Kamarudin, M.Si serta kawan-kawan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terakhir kepada semua pihak yang penulis belum sebutkan yang telah memberikan masukan, kritikan, dan saran selama ini, penulis ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya. Insya allah karya ilmiah ini bermanfaat dalam pengembangan studi Ilmu Politik, khususnya studi tentang Pemenangan Pemilu. Dalam disertasi ini tentunya terdapat berbagai kekuarangan dan kelemahan, oleh karena itu saran dan kritik demi perbaikan dan penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Amin.

Jakarta, Desember 2007

Fauzan Ali Rasyid

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORSINALITAS .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang Masalah .....	1
- Pokok Masalah .....	12
- Tujuan Penelitian .....	26
- Signifikansi Penelitian .....	27
- Kerangka Teori (Teori Komunikasi Politik, Teori Pengaruh Personalitas, Teori Sosial Kapital, Teori Aristoktar Lokal dan Teori Etnis) .....	27
- Alur Pikir .....	64
- Metode Penelitian .....	66
Jenis Penelitian.....	66
Sumber Data .....	67
Teknik Pengumpulan Data .....	67
Analisis Data.....	68
- Sistematika Penulisan dan Pembahasan .....	70

### BAB II KETERWAKILAN DAERAH DI MPR RI DAN PETA PPOLITIK LOKAL PROVINSI JAWA BARAT

- Dinamika Keterwakilan Daerah di MPR RI.....	72
- Model-Model Keterwakilan Wilayah dalam Parlemen.....	87
- Peta Politik Lokal Provinsi Jawa Barat.....	106
Profil Wilayah Provinsi Jawa Barat.....	106
Kekuatan-Kekuatan Politik di Jawa Barat.....	111
Islam.....	112
Menak.....	131
Militer (Siliwangi).....	143
Petani.....	149
Partai Politik.....	159

### BAB III DUKUNGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA PENCALONAN ANGGOTA DPD

- Biografi dan Ketokohan Keempat Anggota DPD Jawa Barat.....	164
Prof. Dr. Ir. H. Ginandjar Kartasasmita.....	165
Pangeran Raja Adipati Arief Natadiningrat, SE.....	167
Prof. Dr. H. Mohammad Surya.....	168
K.H. Sofyan Yahya, M.A.....	170
- Organisasi-Organisasi Sebagai Basis Dukungan.....	171
Paguyuban Pasundan.....	172
Kesultanan Cirebon.....	179
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).....	188
Nahdlatul Ulama (NU).....	194
- Alasan Dukungan dan Proses Penentuan Dukungan.....	201
- Peran Organisasi Kemsyarakatan.....	214
Koordinasi Intern Organisasi.....	214
Sosialisasi Ke Seluruh Elemen Organisasi dan Masyarakat.....	220

### BAB IV PEMBENTUKAN TIM SUKSES ANGGOTA DPD JAWA BARAT PADA PEMILU 2004

-Pembentukan Tim Sukses.....	226
Ginandjar Kartasasmita.....	227
Pangeran Arief Natadiningrat.....	241
Mohammad Surya.....	250
K.H. Sofyan Yahya.....	259
- Strategi Tim Sukses Mempengaruhi Pemilih.....	268
Ginandjar Kartasasmita.....	270
Pangeran Arief Natadiningrat.....	286
Mohammad Surya.....	301
K.H. Sofyan Yahya.....	313

### BAB V KAMPANYE ANGGOTA DPD JAWA BARAT PADA PEMILU 2004

- Ketentuan-Ketentuan Kampanye Pada Pemilu 2004.....	331
- Pelaksanaan Kampanye Anggota DPD Jawa Barat Pada Pemilu 2004.....	342
Ginandjar Kartasasmita.....	342
Pangeran Arief Natadiningrat.....	351
Mohammad Surya.....	359
K.H. Sofyan Yahya.....	367

## BAB VI PENUTUP

Kesimpulan.....	378
Implikasi Teoritis.....	384
DAFTAR PUSTAKA.....	397
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	410
BIODATA PENULIS	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Hasil Penghitungan suara .....	15
Tabel 2: Perolehan suara perkabupaten .....	26
Tabel 3: Sejarah DPD .....	86
Tabel 4: Monografi Jawa Barat.....	109
Tabel 5: Prosentasi perolehan suara per Kabupaten/Kota .....	330

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **Latar Belakang Masalah**

Studi tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini berawal dari sebuah perubahan sistem politik Indonesia. Perubahan mendasar hasil dari amandemen UUD 1945 adalah pembentukan DPD. Pembentukan DPD menyebabkan terdapat dua kamar dalam lembaga legislatif Indonesia meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam konstitusi. Lembaga legislatif yang memiliki dua kamar dalam kajian kelembagaan dikenal dengan nama bikameral. Sedangkan bila terdiri dari satu kamar dikenal dengan nama unikameral. Menurut Miriam Budiardjo, ada negara-negara yang badan legislatifnya terbagi menjadi dua kamar (*bikameralisme*) dan ada pula terdiri dari satu kamar (*unikameralisme*).<sup>1</sup>

Pada umumnya negara-negara federal memakai sistem dua kamar, karena mewakili kepentingan negara-negara bagian. Sedangkan negara kesatuan yang memakai sistem dua kamar didorong oleh pertimbangan bahwa satu kamar dapat mengimbangi dan membatasi kekuasaan dari kamar lain. Sistem satu kamar menimbulkan kekhawatiran akan memberikan peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan karena mudah dipengaruhi oleh situasi politik.<sup>2</sup>

Penyalahgunaan kekuasaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Budiardjo, pernah terjadi pada periode kekuasaan Orde Baru yang menggunakan lembaga legislatif sekedar sebagai pengesah kebijakan pemerintah. Fungsi

---

1 Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 180.

2 *Ibid.*, hlm. 180.

pengimbang dan pengawasan lembaga tersebut tidak dapat berjalan optimal sebagaimana yang telah digariskan oleh konstitusi.<sup>3</sup> Belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu tersebut dan didukung oleh keinginan untuk mengoreksi dan didorong semangat demokratisasi, maka dilakukan perubahan-perubahan struktur dan kelembagaan politik, termasuk pembentukan DPD sebagai lembaga politik baru.

Pembentukan DPD dimaksudkan untuk menciptakan sistem *checks and balances* di antara lembaga-lembaga yang mewakili rakyat dan lembaga yang mewakili kepentingan wilayah atau daerah.<sup>4</sup> Kepentingan daerah harus diakomodasikan dalam struktur politik berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga yang memiliki wakil-wakil yang dapat menjadi akses langsung bagi kepentingan-kepentingan daerah, sehingga terwujud integrasi di Indonesia baik integrasi teritorial maupun integrasi politik.

Nazaruddin Sjamsuddin menyatakan bahwa sejak 1950 Indonesia telah dihadapkan pada masalah integrasi, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan kata lain, sumber problem integrasi politik di Indonesia berkaitan erat dengan masalah teritorial dan perbedaan elite-massa, yang terakhir ini terutama dalam dimensi ideologi. Dalam hubungan ini, masalah yang dihadapi Indonesia segera setelah selesainya revolusi nasional, yakni sebagai suatu negeri yang sebelumnya belum pernah bersatu baik dalam arti kultural maupun politik, kecuali di bawah kekuasaan kolonial, meliputi dua dimensi. Dimensi pertama adalah

---

3 R. William Liddle, "Rejim Orde Baru" dalam Donald K. Emerson, *Indonesia Beyond Soeharto* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 65–121.

4 Risalah Rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI ke – 31 s/d ke 35 Tanggal 16 September 2001 Masa Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002. Buku Kedua Jilid 7 A (Jakarta: Sekretariat MPR RI), hlm. 80.

bagaimana membangun suatu “masyarakat teritorial yang homogen,” secara bersamaan dengan dimensi kedua, yakni “masyarakat politik yang berpartisipasi.” Kedua dimensi ini harus berjalan sekaligus, sebab keduanya memang bersifat isi-mengisi atau saling berkaitan.<sup>5</sup>

Pembentukan dan perekrutan anggota DPD diharapkan dapat memperkuat proses demokratisasi. Pembentukan DPD juga diharapkan pula dapat memberikan dampak penguatan posisi rakyat sebagai subjek politik dan tidak hanya sebagai objek politik. Berkaitan dengan hal tersebut, Samuel P. Huntington menyatakan bahwa perkembangan masyarakat modern dalam batas tertentu dapat dilihat dari semakin tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat, berbeda dengan sikap masyarakat tradisional yang non partisipan.<sup>6</sup>

Pernyataan Huntington di atas mengisyaratkan bahwa derajat partisipasi masyarakat yang semakin tinggi, menunjukkan kehendak masyarakat agar tidak diperlakukan sebagai objek politik. Oleh karena itu pemilihan secara langsung menjadi relevan untuk diwujudkan. Dalam pemilihan langsung rakyat mempunyai kedaulatan untuk menentukan wakil-wakilnya seraya memberikan legitimasi penuh kepada siapa yang dipilihnya. Rakyat berhak untuk menyatakan pendapat dan menentukan pilihannya sendiri. Pemberian hak politik rakyat tersebut merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat.

Menurut Maswadi Rauf, konsep kedaulatan rakyat adalah sebuah cara untuk memecahkan masalah yang rumit dalam demokrasi: rakyat berkuasa tetapi

---

<sup>5</sup> Nazaruddin Sjamsuddin, *Integrasi Politik di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 1989), hlm. 7-19

<sup>6</sup> Samuel P. Huntington, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 59.

sekaligus diperintah.<sup>7</sup> Pentingnya hak rakyat dalam sistem demokratis diformulasikan oleh Robert A. Dahl sebagai *rights are among the essential building blocks of a democratic process of government*.<sup>8</sup> Pemberian hak kepada rakyat adalah salah satu bahan utama dalam membangun suatu proses pemerintahan yang demokratis.

Maswadi Rauf juga menyatakan bahwa inti demokrasi adalah peranan yang besar dari rakyat dalam menentukan para penguasa politik, sehingga kewenangan penguasa politik tersebut dalam melahirkan keputusan-keputusan memiliki legitimasi. Sasaran yang ingin dicapai dengan adanya peranan rakyat seperti itu adalah agar pengaturan yang dijalankan oleh penguasa politik terhadap rakyat dapat berjalan sesuai dengan kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan penguasa politik sendiri.<sup>9</sup>

Salah satu bentuk saluran hak rakyat untuk berpartisipasi di dalam proses pemerintahan adalah melalui pemilihan umum (pemilu). Pemilu memberikan hak kepada rakyat untuk menentukan pejabat-pejabat yang menduduki jabatan-jabatan publik, termasuk dalam hal ini lembaga DPD. Chusnul Mar'iyah mengatakan bahwa proses lain dari pemilu adalah meningkatkan partisipasi warga negara dalam proses politik sehingga hasil pemilu dapat dipercaya dan

---

7 Lihat Maswadi Rauf, *Teori Demokrasi Dan Demokratisasi*. Naskah yang disampaikan pada upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. 1 November 1997, hlm. 7.

8 Lengkapnya konsep hak oleh rakyat dalam berpartisipasi dijelaskan dalam, Robert A Dahl, *On Democracy* (New Haven London: Yale University Press, 1998), hlm. 48-49.

9 Maswadi Rauf, *Indonesia dan Komunikasi Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 30.

mendapatkan legitimasi oleh masyarakat luas yang pada gilirannya stabilitas politik dapat terwujud.<sup>10</sup>

Meskipun anggota DPD dipilih langsung oleh rakyat untuk menjadi saluran aspirasi dan mewakili kepentingan daerah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan daerah di tingkat nasional, namun secara konstitusional hal tersebut masih jauh dari ideal. Sebab dilihat dari kewenangan yang dimilikinya, kedudukan dan kewenangan DPD tidak sekuat DPR. DPD hanya memiliki hak mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, dan penggabungan daerah, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain memiliki wewenang yang bersifat mengusulkan RUU tertentu kepada DPR, DPD juga diberi wewenang pengawasan secara sangat terbatas.<sup>11</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem legislasi yang ada di Indonesia saat ini adalah sistem bikameral yang lunak atau *soft bicameralism*.

Secara teoritis *bicameralism* seharusnya melahirkan dua kamar di legislatif yang memiliki kedudukan dan kewenangan yang sama atau disebut *strong bicameralism*. Sistem dua kamar memberikan harapan adanya *checks and balances* dapat terwujud. Maswadi Rauf menyatakan bahwa:

... kita mulai dengan fungsi legislatif, dengan kekuasaan legislatif. Pendapat yang mendasari bab ini adalah bahwa DPD mempunyai kedudukan yang seimbang dengan DPR. Ini berbeda sekali dengan yang dicantumkan dalam Lampiran TAP IX itu. Jadi kami mengusulkan suatu DPD yang merupakan lembaga legislatif, mempunyai hak yang sama dengan DPR dan terlihat dalam pelaksanaan setiap tugas lembaga legislatif.

---

<sup>10</sup> Chusnul Mar'iyah dalam Ari Pradhanawati, *Pilkada Langsung Tradisi Baru Demokrasi Lokal* (Surakarta: KOMPIP, 2005), hlm 48-65

<sup>11</sup> Lihat Pasal 22D Ayat (2) dan (3) UUD 1945 Perubahan ke- 4 dan Pasal 40-48 UU No. 22 Tahun 2003.

Kami menyebutnya sebagai bikameralisme yang kuat, *strong bicameralism*. Padahal di dalam Lampiran TAP IX itu, meskipun ada dua alternatif, keduanya masih tetap dikategorikan sebagai bikameralisme yang sangat lunak. Yang satu dikatakan lunak sekali, yang satunya agak begitu keras. Tetapi keduanya menunjukkan bahwa DPD itu tidak mempunyai fungsi legislatif.<sup>12</sup>

Pada dasarnya anggota DPD merupakan representasi daerah yang dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu. Anggota DPD adalah peserta pemilu perseorangan yang diadakan secara bersamaan dengan pemilihan anggota legislatif DPR dan DPRD. Ketentuan kursi DPR dan DPRD berdasarkan proporsional terbuka, sedangkan ketentuan pemenang untuk DPD berdasarkan perolehan urutan suara terbanyak di suatu provinsi. Setiap provinsi, terlepas dari besar kecil wilayah dan seberapa pun jumlah penduduknya mendapat jatah yang sama, yakni sebanyak 4 kursi.

Dalam rangka menegakkan azas independen sebagai peserta pemilu perseorangan dan non-partisan, seorang calon anggota DPD disyaratkan tidak boleh berasal dari partai politik. Walaupun pernah berhubungan dengan partai politik, maka dihitung sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun ke belakang dari tanggal pengajuan sebagai calon anggota DPD secara resmi ke KPU telah mengundurkan diri dari pengurus/anggota partai politik.<sup>13</sup> Ide untuk memisahkan

---

<sup>12</sup> Maswadi Rauf (Ketua Tim Ahli Bidang Politik MPR RI) yang disampaikan pada Rapat Pleno ke-14 Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR tanggal 10 Mei 2001 dalam Risalah Rapat Panitia *Ad Hoc* I BP MPR ke-11 s/d ke-15, Buku Kedua Jilid 3A (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2001), hlm. 236.

<sup>13</sup> Selain itu, seorang calon anggota DPD harus memiliki syarat dukungan dari masyarakat sesuai dengan jumlah penduduk suatu propinsi. Propinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000 orang, harus mendapatkan dukungan minimal 1.000 orang pemilih. Propinsi yang berpenduduk 1.000.000 orang sampai dengan 5.000.000 orang syarat minimal dukungan 2.000 orang. Propinsi yang berpenduduk 5.000.000 orang sampai dengan 10.000.000 orang, syarat minimal dukungan 3.000 orang. Propinsi yang berpenduduk 10.000.000 orang sampai dengan 15.000.000 orang syarat minimal dukungan 4.000 orang. Propinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 orang, seorang calon anggota DPD harus memperoleh dukungan minimal 5.000 orang.

calon anggota DPD dengan partai politik dimaksudkan agar calon-calon terpilih akan mewakili daerah dan benar-benar dapat dijaga independensinya sebagai wakil daerah.

Prasyarat independensi tersebut diharapkan akan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang benar-benar berasal dari daerah yang bersangkutan dan tidak menjadi anggota partai politik, serta dapat bersaing di dalam pemilihan tersebut. Ketentuan itu bertujuan agar para anggota DPD dapat memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah yang diwakilinya secara optimal dengan tidak dibebani oleh loyalitas ganda kepada suatu partai politik. Independensi juga dimaksudkan agar dapat merekrut tokoh-tokoh daerah yang non-partisan, sehingga benar-benar dapat membawa aspirasi dan memperjuangkan kepentingan daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah di dalam konsep negara kesatuan yang selama ini terkesan sangat terabaikan. Konsekuensi dari independensi calon anggota DPD mengharuskannya untuk mempersiapkan dan mengelola strategi kemenangan secara independen pula dalam menghadapi pemilihan umum.

Berkenaan dengan kondisi tersebut, maka aspek akseptabilitas dan popularitas kandidat menjadi penting. Burhan D Magenda menyatakan bahwa salah satu kritik yang sering ditujukan pada sistem pemilihan langsung adalah gejala '*personalized politics*' yang berpusat pada tokoh-tokoh.<sup>14</sup> Seorang kandidat anggota DPD juga harus mampu mengelola strategi kemenangan dan

---

Dukungan tersebut dibuktikan dengan tanda tangan dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya. Selain itu, dukungan harus tersebar di minimal 25% dari jumlah kabupaten/kota di propinsi yang bersangkutan Pasal 11 UU Pemilu No 2003.

<sup>14</sup> Burhan D Magenda, Pilkada dalam Kerangka Hubungan Pusat dan Daerah, Jurnal Politik, Mei 2005, hlm. 67-76.

membangun sikap serta persepsi pemilih agar memberikan pilihan terhadap dirinya. Di samping itu, seorang calon anggota DPD harus mengenal dan memahami masyarakat di daerah pemilihan secara komprehensif. Ketentuan persyaratan tersebut bertujuan agar para calon mempunyai pemahaman yang baik tentang masyarakat dan daerah pemilihan. Seorang calon anggota DPD harus berdomisili di daerah atau wilayah tersebut minimal 3 tahun secara berturut-turut atau pernah tinggal selama 10 tahun sejak usia 17 tahun.<sup>15</sup>

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dimaksudkan agar seorang calon anggota DPD sudah mengetahui kebutuhan daerah, aspirasi dan kepentingan daerah yang diperjuangkannya. Pembentukan lembaga DPD sesuai dengan kepentingan daerah sehingga pada gilirannya dapat mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat di daerah yang diwakili. Walden mengatakan bahwa dalam negara-negara yang demokrasiya sudah lama, calon harus menguasai isu-isu substantif yang perbedaannya harus jelas bagi pemilih.<sup>16</sup>

Aspek lain yang tidak kalah pentingnya bagi seorang calon anggota DPD adalah harus dikenal secara luas oleh masyarakat. Hal itu merupakan konsekuensi logis dari mekanisme pemilihan langsung dan yang memperbesar kemungkinan untuk memenangkan pemilihan. Popularitas ketokohan seseorang di suatu daerah tidak serta merta diterima oleh masyarakat di daerah. Setidaknya publikasi media massa, seperti koran, radio dan televisi juga akan membuatnya menjadi lebih dikenal oleh masyarakat.

---

<sup>15</sup> Lihat Pasal 63 UU Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu.

<sup>16</sup> Walden dalam Burhan D Magenda, *Op. cit.*, hlm. 73.

Seorang calon anggota DPD untuk meraih kemenangan dalam pemilu harus melakukan pendekatan terhadap kelompok-kelompok masyarakat baik kelompok berdasarkan pekerjaan, profesi, kedaerahan, keagamaan, maupun kelompok-kelompok kebudayaan. Pendekatan itu diperlukan karena dalam kelompok-kelompok itu terbangun solidaritas kelompok dan kelompok-kelompok itu merupakan bagian dari kantong-kantong massa pemilih. Solidaritas kelompok menurut Geertz akan semakin kuat apabila didasarkan pada ikatan-ikatan primordial.<sup>17</sup> Ikatan primordial terbentuk disebabkan persamaan agama, suku/ras, bahasa, asal daerah dan adat istiadat. Solidaritas dalam kelompok primordial menghasilkan fanatisme yakni kesetiaan yang amat kuat kepada kelompok dan anggota-anggota kelompok serta penghormatan yang tinggi terhadap nilai budaya kelompok. Para anggota kelompok primordial akan membela kelompok dan anggota kelompok dengan sepenuh hati dengan kesadaran dan tanpa paksaan.

Dengan demikian studi tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menarik untuk dikaji lebih dalam pada disertasi ini dengan beberapa alasan antara lain; *pertama*, DPD merupakan lembaga legislatif baru di parlemen Indonesia sebagai wujud dari reformasi kelembagaan politik. *Kedua*, belum ada penelitian yang berkaitan dengan pemenangan pemilu anggota DPD secara komprehensif. *Ketiga*, peserta pemilu DPD adalah perseorangan atau individual sehingga tidak ada mesin politik yang mengantarkannya. Hal tersebut akan mengandalkan potensi calon baik popularitas ketokohan maupun relasi politik. Selain itu seorang calon harus membentuk mesin politik (tim sukses) dalam waktu relatif singkat dengan

---

<sup>17</sup> Lihat Maswadi Rauf, *Konsensus dan Konflik Sebuah Penjajagan Teoritis* (Jakarta: Dikti Depdiknas, 2001) hlm 58-77. Lihat juga Juwono Sudarsono, *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik* (Jakarta: PT Gramedia, 1976) hlm 15-30

satu kepentingan calon itu sendiri. Jadi tidak bisa memadukan beberapa kepentingan. Tidak sebagaimana partai politik yang merupakan perpaduan kepentingan antara anggota yang menginginkan kekuasaan politik. *Keempat*, pemilu DPD membuka kembali kekuatan-kekuatan politik lokal, sehingga hampir di setiap provinsi diikuti oleh aristokrat lokal, tokoh agama, mantan politisi, kelompok profesi dan pengusaha.

Pemilihan anggota DPD Jawa Barat sebagai fokus kajian penelitian ini diikuti oleh calon-calon yang berasal dari kalangan adat, profesional, maupun agama. Basis kedaerahan dan jaringan sosial serta politik menjadi modal dasar bagi seorang calon untuk meraih kemenangan menjadi anggota DPD. Pilihan Jawa Barat menjadi fokus kajian dalam disertasi ini dengan beberapa alasan antara lain: *pertama*, provinsi Jawa Barat sebagai provinsi penyangga ibu kota negara sehingga Jawa Barat lebih dekat kepada kekuasaan negara. *Kedua*, pemilih di Jawa Barat merupakan pemilih kedua terbanyak di Indonesia setelah Jawa Timur. *Ketiga*, mobilisasi masyarakat Jawa Barat banyak berkiprah di ibu kota negara (Jakarta) sehingga arus informasi lebih cepat merebak di tengah masyarakat Jawa Barat.

Peserta pemilihan anggota DPD Jawa Barat berjumlah 42 orang. Dari 42 calon anggota DPD hanya dua peserta perempuan. Sementara komposisi dari segi kelompok umur menyebar merata. Sebanyak delapan orang (19%) masuk dalam kelompok umur 30-40 tahun; tujuh orang (16,6%) masuk dalam kelompok umur 41-50 tahun, dan 13 orang (30,9%) masuk dalam kelompok umur 51-60 tahun sementara yang masuk dalam kelompok 61-70 tahun 13 orang (30,9%) dan yang

berumur 75 tahun satu orang (2%). Jadi, secara umum komposisi calon anggota DPD ni didominasi oleh kelompok tua yang berkisar umur 51-70 tahun.

Dari segi latar belakang pendidikan, mayoritas calon anggota DPD adalah lulusan S1, yaitu sebanyak 19 orang (45%), disusul lulusan SMU dan akademi sebanyak 12 orang (28,5%) dan calon anggota DPD yang berpendidikan pascasarjana menempati urutan ke tiga sebanyak 11 orang (26%). Dengan demikian mayoritas calon anggota DPD Jawa Barat berpendidikan strata satu.

Latar belakang profesi para calon juga memberikan gambaran yang menarik. Sebanyak 8 orang (19%) calon anggota DPD memiliki profesi akademik sebagai dosen di PTN/PTS; sebanyak 4 orang (9,5%) adalah pensiunan pejabat di lembaga pemerintah dan 3 orang (7%) adalah purnawirawan TNI AD; satu orang (2,4%) dari anggota Polri aktif; kelapa desa satu orang (2,4%); dari profesi pengacara sebanyak 2 orang (4,8%); dari golongan swasta sebanyak 20 orang (47,6%) dan dari mantan anggota legislatif (MPR, DPR dan DPRD) sebanyak 11 orang (26%). Jadi, mayoritas calon anggota DPD adalah dari golongan swasta yang relatif merupakan muka baru dalam pentas politik.

Adapun yang terpilih dan ditetapkan menjadi anggota DPD adalah Ginandjar Kartasasmita, Mohammad Surya, Arief Natadiningrat, dan Sofyan Yahya. Dari keempat anggota DPD tersebut dua orang dari mantan aktifis politik atau bisa dikatakan muka lama yaitu Ginandjar Kartasasmita dan Mohammad Surya. Sedangkan 2 orang lagi adalah muka baru yang belum berkiprah dalam kancah politik yaitu Arief Natadiningrat dan Sofyan Yahya. Keberhasilan muka lama dengan menduduki posisi pertama seperti Ginandjar Kartasasmita menjadi

anggota DPD menimbulkan tanggapan dari masyarakat. Pengamat politik lokal dari Unpad, Indra Perwira dan Dede Mariana mengatakan:

“Inilah realitas politik yang ditunjukkan masyarakat. Secara faktual, dukungannya memang seperti itu. Apapun dasarnya kenyataan ini menunjukkan figur-figur seperti Ginandjar dan tokoh-tokoh lama lainnya lebih populer di mata masyarakat secara keseluruhan.”<sup>18</sup>

Lebih lanjut Perwira dan Mariana mengatakan bahwa tidak munculnya figur-figur muda secara signifikan dalam perolehan suara sementara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Jawa Barat (DPD Jabar) menjadi bukti masih lemahnya infrastruktur politik (jaringan komunikasi politik) mereka untuk menarik dukungan massa pemilih dalam jumlah besar.<sup>19</sup>

Munculnya anggota DPD yang merupakan perpaduan antara muka lama dengan muka baru dalam pentas politik nasional sebagai pemenang pemilihan anggota DPD Jawa Barat merupakan fenomena menarik di masa transisi era reformasi sebagai wujud dari keberhasilan minimalis demokratisasi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terhadap kemenangan yang dicapai keempat anggota DPD pada pemilu tahun 2004 dengan mengangkat kasus Provinsi Jawa Barat.

### **Pokok Masalah**

Kemenangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu tahun 2004 adalah isu yang menarik untuk dianalisis. Pemilihan anggota DPD yang dilakukan secara langsung dan pertama kali diadakan di Indonesia membuka ruang politik yang cukup besar bagi masyarakat non partai

---

<sup>18</sup> Harian Umum Pikiran Rakyat, 8 April 2004.

<sup>19</sup> *Ibid.*

untuk ikut berkiprah di kancah politik tanpa harus menjadi anggota partai politik tertentu.

Pemilu langsung memungkinkan kemenangan bagi orang-orang yang dikenal masyarakat atau populer dengan reputasi yang positif. Kandidat yang populer di provinsinya memiliki dua alasan untuk meraih kemenangan. *Pertama*, masyarakat pemilih telah mengenal wajah dan nama sehingga mudah mengingatnya. *Kedua*, masyarakat merasa bangga dan percaya untuk mewakili wilayahnya. Kepopuleran dapat diperoleh karena kandidat yang bersangkutan adalah mantan pejabat publik sehingga namanya sering terpublikasi kepada masyarakat melalui media massa. Kepopuleran juga dimiliki oleh seorang kandidat karena ia merupakan publik figur seperti pakar atau pengamat, mubaligh dan artis. Demikian pula kepopuleran seorang kandidat karena ia adalah pengusaha besar, tokoh agama, tokoh organisasi masyarakat atau tokoh politik.

Pemilihan anggota DPD Jawa Barat melahirkan kemenangan kandidat yang cukup populer yaitu Ginandjar Kartasmita, Moh. Surya, Sofyan Yahya, Arief Natadiningrat. Ginandjar Kartasmita berasal dari Kabupaten Sumedang. Ia merupakan politisi kawakan dari partai Golkar sebelum mencalonkan menjadi anggota DPD kemudian mengundurkan diri dari fungsionaris Golkar. Ia pernah menjabat menteri selama 4 periode di era Orde Baru dan jabatan terakhir sebagai wakil ketua MPR RI periode 1999-2004. Di masyarakat Jawa Barat nama beliau sudah tidak asing lagi. Ia sangat dikenal dan disegani di kalangan masyarakat dan elit lokal Jawa Barat.

Demikian pula dengan Arief Natadiningrat yang berasal dari Kota Cirebon. Ia merupakan keturunan Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon merupakan salah satu situs peninggalan kerajaan Islam di Jawa Barat yang masih lestari sampai sekarang. Kesultanan Cirebon disebut sebagai pembawa risalah Islam pertama di Jawa Barat yang diprakarsai oleh salah satu wali sanga, Sunan Gunung Djati atau Syarif Hidayatullah. Makam beliau masih didatangi oleh peziarah dari berbagai daerah terutama pada hari-hari besar Islam dan haul Syarif Hidayatullah. Pangeran Arief Natadiningrat adalah salah satu keturunan dari Sunan Gunung Djati sehingga ia sangat dikenal khususnya di masyarakat pantai utara Jawa Barat yaitu sekitar Cirebon, Kuningan, Indramayu dan Majalengka. Ia pun merupakan tokoh pemuda Cirebon dengan pernah menduduki ketua Kosgoro, ketua AMPI dan ketua umum KNPI Kota Cirebon.

Anggota DPD lainnya, Mohammad Surya, berasal dari Kabupaten Kuningan kemudian menetap di Bandung. Ia merupakan aktivis guru dengan menjadi fungsionaris PGRI. Ia sangat dikenal di kalangan guru di Jawa Barat. Ia pernah menjadi guru SR di Kuningan kemudian menjadi guru SPGB di Bandung dan terakhir sebagai Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Ia pun pernah menjadi Rektor Universitas Terbuka selama 10 tahun, mengajar diberbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta sehingga di kalangan akademisi nama beliau sudah tidak asing lagi. Nama beliau terpublikasi secara luas di masyarakat Jawa Barat karena pernah mengasuh acara psikologi keluarga di TVRI selama 5 tahun. Mohammad Surya pernah juga menjadi anggota DPRD Jawa Barat dari Golkar pada tahun 1997-1999.

Begitu pula K.H. Sofyan Yahya yang berasal dari Bandung. Ia adalah mubaligh kondang dan sesepuh Pondok Pesantren Darul Ma'arif Bandung sehingga dikenal sebagai seorang tokoh agama. Setiap daerah di Jawa Barat pernah ia kunjungi baik untuk berceramah maupun kunjungan organisasi yang ia pimpin. Ia merupakan aktivis Nahdlatul Ulama (NU) dengan menduduki jabatan sebagai ketua umum NU Jawa Barat bahkan sekarang menjadi wakil ketua PB NU. Ia juga adalah adik kandung ketua umum DPW PPP Jawa Barat yang sekarang menjabat sebagai wakil Gubernur Jawa Barat

Berdasar hasil perhitungan suara dalam pemilu DPD tahun 2004 dengan jumlah pemilih yang sah berjumlah 19.030.245 pemilih. Adapun perolehan suara Ginandjar Kartasasmita 1.869.767 suara atau sekitar 9,83%, Arief Natadiningrat memperoleh 1.666.685 suara atau 8,76%, Mohammad Surya memperoleh 1.551.876 suara atau 8,2%, sedangkan Sofyan Yahya memperoleh 1.179.439 suara atau sekitar 6,2%. Untuk lebih jelasnya jumlah perolehan suara masing-masing dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

**Tabel 1:**

**Daftar Hasil Penghitungan Suara Anggota DPD  
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 Provinsi Jawa Barat**

No.	NAMA CALON	JUMLAH SUARA SAH	PERINGKAT SUARA
1.	Prof.Dr.Ir.H.Ginandjar Kartasasmita	1.869.767	1
2.	Pra Arief Natadiningrat, SE	1.666.685	2
3.	Prof.Dr.H. Mohamad Surya	1.551.876	3
4.	KH. Sofyan Yahya, MA	1.179.439	4
5.	Dra.Hj.Popong Otje Djundjuran	931.541	5
6.	H. Muhamad Taufiq Ridlo, LC, DIPL	915.700	6
7.	Drs.H. Shiddiq Aminullah	914.286	7
8.	Drs. Walid Syaikhun	906.483	8

Sumber; KPU Jawa Barat 2004

Kepopuleran merupakan modal awal kemenangan seorang calon. Kepuperan itu perlu diorganisir dengan membentuk tim sukses. Tim sukses merupakan organisasi yang bersifat *ad hoc* atau sementara yang tujuannya untuk memenangkan calon dalam pemilu. Oleh karena itu, tim sukses sering juga diistilahkan dengan tim pemenangan. Pentingnya tim sukses bagi seorang calon antara lain *pertama*, untuk merancang langkah-langkah menuju kemenangan bagi seorang calon. *Kedua*, untuk menyelesaikan hal-hal administratif pencalonan yang telah ditetapkan oleh KPU sehingga calon tidak disibukkan oleh hal-hal demikian. *Ketiga*, merancang visi, misi dan program kerja calon yang akan ditawarkan kepada masyarakat pemilih. *Keempat*, mewakili calon apabila terjadi halangan atau pada waktu bersamaan ada pertemuan dengan masyarakat pemilih dengan tempat yang berbeda. *Kelima*, Mensosialisasikan calon kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk visi, misi dan program kerja calon. Dalam proses membentuk tim sukses, hal-hal yang perlu dilakukan oleh seorang calon antara lain rekrutmen pengurus, membentuk struktur organisasi, menyusun program dan penentuan target suara.

Dalam menganalisis pembentukan tim sukses akan digunakan teori organisasi kampanye karena tim sukses sering diistilahkan juga dengan tim pemenangan atau tim kampanye. Teori kampanye dikemukakan oleh Arnold Steinberg yang mengatakan bahwa organisasi kampanye politik tidak berdiri untuk selama-lamanya. Ia diciptakan untuk memilih seorang calon dan ia berhenti berfungsi pada hari pemilihan atau beberapa waktu sesudah itu. Teori ini

dimaksudkan untuk mengkaji proses pembentukan tim sukses serta efektifitasnya dalam pemenangan calon anggota DPD Jawa Barat.

Digunakan juga teori kekuasaan yang dikemukakan Miriam Budiardjo dan Suzanne Keller. Teori ini dimaksudkan untuk menganalisis rekrutmen tim sukses dan efektifitasnya dalam mempengaruhi pemilih. Miriam Budiardjo menyatakan bahwa sumber-sumber kekuasaan itu bisa berupa kedudukan, status kekayaan, kepercayaan, agama, kekerabatan, kepandaian, dan keterampilan. Teori yang dikemukakan Miriam Budiardjo relevan dengan teori yang dikemukakan Suzanne Keller.

Suzanne Keller mengemukakan bahwa dalam masyarakat modern jelas nampak tidak hanya satu dimensi kekuasaan, tetapi beberapa dimensi. Dalam setiap bidang kegiatan kemasyarakatan – baik di dalam maupun di luar pemerintahan – terdapat satu atau lebih elit khusus yang menonjol karena memiliki keahlian atau keterampilan di bidang tertentu; mereka oleh Suzanne Keller dinamakan "elite strategis". Misalnya ada elite politik, elite ekonomi, militer, dan pengetahuan, elite pendidikan, filsafat, dan agama, elite kesenian dan kesusastraan. Secara kolektif elite-elite ini dapat dinamakan "kelas berkuasa" (*ruling-class*) dalam masyarakat.

Organisasi-organisasi kemasyarakatan ikut berkepentingan dalam mengusung kandidat untuk menjadi anggota DPD. Calon yang diusung oleh salah satu organisasi memiliki peluang untuk memenangkan pemilu karena ada beberapa hal yang dapat dilakukan melalui organisasi antara lain mengambil keputusan dukungan dengan beberapa alasan dukungan, Menjadikan struktur organisasi

sebagai struktur tim sukses sehingga tidak perlu melakukan rekrutmen baru, dan organisasi dapat digunakan sebagai media sosialisasi dan basis pemilih. Organisasi-organisasi tersebut dapat dibagi kepada tiga kategori. *Pertama*, organisasi kedaerahan seperti Paguyuban Pasundan. *Kedua*, organisasi sosial keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam (PUI). *Ketiga*, organisasi profesi seperti PGRI, HKTI, Hipmi, Gapensi, Kadin.

Organisasi-organisasi itu mengukung salah satu kandidat. Paguyuban Pasundan mengukung Ginandjar Kartasasmita yang merupakan Ketua Dewan Pengaping (Dewan Pembina) Paguyuban Pasundan. Paguyuban Pasundan berdiri pada tahun 1914 atas prakarsa menak-menak Sunda yang sedang bersekolah di STOVIA Jakarta. Paguyuban Pasundan merupakan satu-satunya organisasi kedaerahan Sunda terbesar di Jawa Barat, yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial budaya. Di setiap kabupaten/kota bahkan sampai ke tingkat kecamatan terdapat sekolah Pasundan. Sekolah Pasundan yang ada di tiap kabupaten/kota mulai dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan SMU sedangkan di tingkat perguruan tinggi hanya terdapat di Kota Bandung dengan nama Universitas Pasundan (Unpas).

Organisasi keagamaan NU mengukung Ketua Umum DPW NU Jawa Barat K.H. Sofyan Yahya. NU merupakan organisasi keagamaan terbesar di Jawa Barat dengan berbasis pondok pesantren. Jumlah pondok pesantren di Jawa Barat tercatat sebanyak 1.534 pesantren. NU pun memiliki sekolah/madrasah formal yang bernaung dalam yayasan Darul Ma'arif dan yayasan al-Muslimin. Madrasah

ini berjenjang ditingkat tsanawiyah dan aliyah yang terdapat di setiap kabupaten/kota. Selain itu NU memiliki organisasi-organisasi otonom yang bernaung di bawah NU seperti Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) untuk tingkat sarjana, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) untuk tingkat mahasiswa, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) untuk pelajar putra, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) untuk pelajar putri dan Muslimat NU untuk ibu-ibu pengajian atau perkumpulan majlis ta'lim NU.

Organisasi PGRI mengusung Ketua Umum PGRI Pusat Moh. Surya. PGRI merupakan organisasi yang beranggotakan para guru mulai dari tingkat SD sampai SMU. PGRI memiliki kantor cabang di setiap kabupaten/kota bahkan sampai ke tingkat kecamatan. PGRI pun memiliki sekolah-sekolah PGRI mulai dari tingkatan taman kanak-kanak (TK) sampai ke tingkat SMU. Sekolah-sekolah tersebut ada di setiap kabupaten/kota sehingga menjadi garapan program tersendiri oleh PGRI cabang di setiap kabupaten/kota.

Organisasi-organisasi lainnya seperti Persis mengusung Ketua Umum DPP Persis Siddiq Amin, Muhammadiyah mengusung Wakil Ketua DPW Muhammadiyah Jawa Barat Sanusi Uwes. Arief Natadiningrat selain diusung keluarga besar kesultanan Cirebon juga diusung oleh Hipmi dan Gapensi. Ia merupakan anggota Dewan Pembina Hipmi Jawa Barat dan Ketua Dewan Pertimbangan BPC Gapensi Cirebon. Hipmi dan Gapensi merupakan organisasi para pengusaha muda yang memiliki kantor cabang di setiap kabupaten/kota di Jawa Barat.

Organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun profesi di atas menjadi basis dukungan oleh para kandidat. Peran organisasi-organisasi tersebut akan dikaji secara teoritis dengan menggunakan teori Dahrendorf yang mengemukakan teori kelompok strategis yang berawal dari kuasi-kelompok. Anggota-anggota kuasi kelompok cenderung menunjang kegiatan-kegiatan pemimpinnya yang muncul dari kalangan sendiri karena dianggap mewakili aspirasinya. Di gunakan juga teori *solidaritas proximitas* yang dikemukakan Maurice Duverger. Maurice Duverger mengatakan bahwa komunitas yang terbentuk melalui kesamaan dapat memiliki ikatan yang kuat antar individu sehingga dapat membentuk norma/nilai bersama yang dapat mengendalikan dan memberikan solidaritas yang utuh. Ia mengistilahkan dengan *solidaritas proximitas*. *Solidaritas proximitas* terbentuk berdasarkan teritorial, kelompok-kelompok berdasarkan korporat, dan kelompok-kelompok yang berdasarkan ideologis. Kedua teori tersebut dimaksudkan untuk mengkaji sejauhmana ikatan-ikatan organisasi mendukung kemenangan calon anggota DPD.

Selain itu akan dianalisis juga dengan menggunakan teori ikatan primordial yang dikemukakan Clifford Geertz. Clifford Geertz mengatakan bahwa solidaritas dalam kelompok primordial menghasilkan fanatisme yakni kesetiaan yang amat kuat kepada kelompok dan anggota-anggota kelompok serta penghormatan yang tinggi terhadap nilai budaya kelompok. Ikatan primordial adalah keterikatan seseorang terhadap kelompoknya yang didasarkan atas nilai-nilai yang *given* yang disebabkan hubungan darah dan persamaan dalam hal agama, suku, bahasa, asal daerah, dan adat istiadat. Teori ini dimaksudkan untuk mengkaji sejauhmana

ikatan primordial menunjang kemenangan calon anggota DPD, sebab realitasnya setiap anggota DPD menang di daerah asalnya.

Provinsi Jawa Barat terdiri dari 25 kabupaten/kota dengan jumlah pemilih 25.140.929 orang. Dengan wilayah yang cukup luas dan pemilih yang sekian banyak serta dengan geopolitik yang berbeda. Geopolitik Jawa Barat terbagi tiga bagian yakni *pertama*, priangan Timur yang mencakup Cirebon, Indramayu, Subang, Kuningan. *Kedua*, Priangan Tengah meliputi Bandung, Sumedang, Garut, Tasik, Ciamis, Purwakarta, Cianjur dan Sukabumi. *Ketiga*, Priangan Barat meliputi Karawang, Purwakarta, Bekasi, dan Bogor.

Pemilahan geopolitik itu berdasar sejarah Sunda, di mana setelah runtuhnya kerajaan Sunda, pusat kekuasaan Sunda terbagi kepada empat wilayah yakni Cirebon, Sumedang, Galuh dan Banten. Sumedang dan Galuh kemudian bersatu sehingga pusat kekuasaan Sunda menjadi tiga wilayah. Ketiga wilayah itu melahirkan bahasa dan budaya yang berbeda. Priangan Timur dan Barat berbahasa campuran antara Jawa dan Sunda sehingga melahirkan bahasa yang khas. Priangan Timur dan Barat juga berbeda bahasa Jawa-Sundanya karena Priangan Barat dipengaruhi juga logat Betawi (wilayah Jakarta dalam sejarahnya termasuk bagian dari kekuasaan kerajaan Banten) sehingga memunculkan bahasa khas masing-masing wilayah. Sedangkan Priangan Tengah disebut sebagai wilayah yang berbahasa asli Sunda (pemilahan geopolitik ini akan dibahas lebih rinci dalam bab III). Dengan masyarakat pemilih Jawa Barat yang sekian banyak dan geopolitik yang berbeda dibutuhkan pula konsentrasi suara yang akan menjadi basis dukungan kandidat, sehingga kampanye dapat lebih efektif dan efisien.

Kampanye merupakan wahana legal untuk mensosialisasikan calon, yang waktu dan wilayahnya dijadwalkan oleh KPU provinsi untuk pemilihan anggota DPD. Waktu kampanye yang sangat terbatas supaya lebih efektif diperlukan suatu strategi kampanye yang tepat oleh seorang calon atau tim sukses. Penerapan strategi kampanye harus diorientasikan kepada sosialisasi ketokohan calon. Kegiatan-kegiatan diarahkan agar merangsang perhatian masyarakat terfokus pada calon. Identifikasi dan pencitraan calon menjadi penting serta penyebarluasan pandangan calon kepada setiap kelompok masyarakat pada gilirannya ditujukan untuk mendorong masyarakat pemilih menuju ke tempat pemilihan dan memberikan suara bagi sang calon. Kandidat atau tim sukses dapat menentukan langkah-langkah untuk memanfaatkan masa kampanye antara lain menentukan bentuk kampanye, pelaku kampanye, dan isu/pesan kampanye.

Dalam mengefektifkan kegiatan kampanye diperlukan manajemen kampanye yang baik. Manajemen kampanye yang baik akan sangat berpengaruh pada ketepatan dan kecepatan popularitas calon. Ada beberapa tahapan dalam manajemen yang dapat diterapkan dalam manajemen kampanye. Tahapan tersebut adalah perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi, kontrol, dan evaluasi. Perencanaan dalam kampanye akan sangat menentukan bagaimana kampanye dikelola dalam rangka mencapai tujuan. Adanya perencanaan, kampanye diharapkan dapat dilaksanakan secara baik dan tepat sasaran.

Perencanaan meliputi penetapan program kerja, pengembangan isu-isu calon, media kampanye, waktu dan biaya. Setelah itu diorganisasikan dengan membuat struktur organisasi, mulai dari manajer kampanye sampai pada bidang-

bidang teknis kampanye, yaitu bidang kesekretariatan, bidang isu dan opini, bidang media massa, dan bidang pengumpulan dana. Organisasi kampanye juga harus memiliki struktur, mulai dari pusat sampai lapisan yang paling bawah (desa atau kelompok-kelompok masyarakat). Dalam pengorganisasian kampanye dibutuhkan pula pembagian kerja masing-masing bidang, sehingga tidak terjadi tumpang-tindih dalam pelaksanaannya. Di samping itu perlu juga diatur arus komunikasi internal organisasi mulai dari pengambilan keputusan sampai pada pelaksana teknis.

Tahapan selanjutnya, setelah dilakukan perencanaan dan pengorganisasian adalah pelaksanaan kerja (*actuating*). Pelaksanaan kerja dilakukan oleh masing-masing bidang dan struktur dalam organisasi tersebut sesuai dengan perencanaan program kerja dan pembagian kerja, supaya dalam pelaksanaan kampanye lebih efektif dalam mempengaruhi masyarakat pemilih. Kemudian tidak kalah pentingnya dalam manajemen kampanye adalah melakukan evaluasi dan pengawasan dari setiap kegiatan kampanye yang dilakukan, sehingga dapat diukur dan ditingkatkan efektifitas dan efisiensinya dalam mempengaruhi masyarakat pemilih. Sasaran dari manajemen kampanye itu sendiri adalah masyarakat pemilih.

Dalam mengkaji kampanye akan digunakan teori kampanye yang dikemukakan Maswadi Rauf. Maswadi Rauf mengatakan bahwa perubahan komunikasi adalah tujuan utama dari kampanye. Perubahan sikap, pendapat, dan tingkah laku komunikasi ingin dicapai melalui himbuan dan ajakan. Faktor penting di sini adalah membuat komunikasi tertarik sehingga mau secara sadar dan

sukarela menerima dan menuruti keinginan komunikator. Teori kampanye dimaksudkan untuk menganalisis sejauhmana pesan yang disampaikan kandidat mempengaruhi pemilih sehingga menjatuhkan pilihan kepadanya.

Selain itu digunakan juga teori persuasif yang dikemukakan Dan Nimmo dan Maswadi Rauf. Dan Nimmo mengatakan bahwa pendekatan persuasif dimaksud untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat pemilih dengan pendekatan dialog, menanamkan opini baru, dan usaha yang disadari untuk mengubah sikap, kepercayaan, atau perilaku orang melalui transformasi pesan. Pendapat Dan Nimmo relevan dengan pendapat Maswadi Rauf yang mengatakan bahwa salah satu kaidah terpenting dari demokrasi adalah digunakannya cara-cara persuasif dalam memperjuangkan aspirasi. Pendekatan secara koersif hanyalah akan merusak proses demokratisasi. Teori persuasif dimaksudkan untuk menganalisis bentuk kampanye yang dilakukan oleh calon anggota DPD Jawa Barat.

Teori-teori tersebut digunakan dengan menganalisis perolehan suara masing-masing calon anggota DPD Jawa Barat. Perolehan suara Ginandjar Kartasasmita tersebar di kota-kota besar yakni Kotamadya Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Bekasi dan menang telak di daerah tempat tinggalnya di Kabupaten Sumedang. Sedangkan Pangeran Arief Natadiningrat menang telak di kabupaten/kota yang mengelilingi Keraton Cirebon yakni Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan ditambah di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur.

Mohammad Surya menang suaranya di Kabupaten kelahirannya yaitu di Kabupaten Kuningan begitu pula di Kabupaten Majalengka yang bersebelahan dengan Kabupaten Kuningan. Ia pun menang di Kabupaten Subang, Cianjur dan Kabupaten Sukabumi. Sedangkan K.H. Sofyan Yahya menang di daerah-daerah santri yakni Kota Tasikmalaya dan Purwakarta ditambah dari Garut dan Cianjur yang bersaing ketat dengan Mohammad Surya. Perolehan suara K.H. Sofyan Yahya relatif merata di setiap Kabupaten/Kota, tetapi ia senantiasa berada dalam peraih kedua terbesar di Kabupaten/Kota yang dianggap sebagai basis NU.

Tidak mendapatkan suara mayoritas di Kabupaten/Kota sebagai basis NU lebih dikarenakan terjadi persaingan antara tokoh ormas keagamaan seperti yang terjadi di Tasikmalaya yang bersaing dengan Ketua Umum Persis, Siddiq Amin. Selain itu bersaing juga dengan tokoh-tokoh yang mengatasnamakan NU bahkan pengurus NU seperti HR. Maulany, Nanang Iskandar Ma'some dan Dindin S. Maolani. K.H. Sofyan Yahya juga kalah tipis di tempat kelahirannya yang bersaing ketat dengan Ginandjar Kartasasmita. Bandung juga tempat kelahiran Ginandjar Kartasasmita yang kemudian bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, selain itu Bandung merupakan pusat wilayah terbesar Paguyuban Pasundan sebagai organisasi penopang pencalonan Ginandjar Kartasasmita. Di samping itu mayoritas calon anggota DPD bertempat tinggal di Bandung. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2

**Hasil Perolehan Suara Per Kabupaten/Kota  
Anggota DPD Jawa Barat Pada Pemilu 2004**

NO	KOTA/ KABUPATEN	NAMA CALON DAN HASIL PEROLEHAN SUARA PER KABUPATEN/KOTA			
		Ginandjar Kartasasmita	Arief Natadiningrat	Moh. Surya	Sofyan Yahya
1	Kota Bandung	164.975	41.598	46.370	79.088
2	Cimahi	40.395	10.317	10.205	13.709
3	Kab. Bandung	223.835	104.154	119.565	167.182
4	Kota Sukabumi	16.081	9.322	12.076	5.228
5	Kab. Sukabumi	68.639	98.852	122.265	53.696
6	Cianjur	87.518	91.165	60.628	72.633
7	Bogor	138.687	144.760	106.548	53.808
8	Kota Bogor	59.154	25.203	23.382	11.973
9	Kota Depok	79.286	35.754	33.575	26.390
10	Kota Bekasi	76.852	61.316	41.277	31.068
11	Bekasi	109.568	52.217	26.436	28.450
12	Karawang	76.399	57.803	27.614	38.353
13	Purwakarta	35.485	20.998	30.453	38.019
14	Indramayu	39.809	84.341	72.692	76.458
15	Cirebon	22.010	375.902	42.802	48.687
16	Kota Cirebon	7.384	66.190	5.302	2.436
17	Subang	64.431	54.447	75.283	46.411
18	Sumedang	168.566	21.473	50.861	28.905
19	Majalengka	44.613	70.830	77.731	36.738
20	Kuningan	16.614	33.617	195.135	28.247
21	Kota Banjar	35.904	4.678	2.635	4.220
22	Ciamis	155.531	52.964	59.021	66.633
23	Garut	74.587	71.270	114.346	83.329
24	Tasikmalaya	35.511	62.975	172.651	102.644
25	Kota Tasikmalaya	27.933	14.540	23.023	35.134
26	JUMLAH	1.869.767	1.666.685	1.551.876	1.179.439

Sumber; KPU Jawa Barat 2004

Berdasarkan fenomena politik di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab kemenangan yang diraih oleh keempat kandidat tersebut di dalam pemilihan umum anggota DPD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004. (1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kemenangan mereka, (2) daerah-daerah mana saja yang secara

signifikan memberikan dukungan kepada mereka dan (3) tindakan apa yang mereka lakukan sehingga menarik minat pemilih untuk memberikan suara?

Dari uraian di atas, maka yang menjadi pokok masalah dari penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menyebabkan kemenangan keempat calon terpilih yakni Ginandjar Kartasasmita, Moh. Surya, Sofyan Yahya, Arief Natadiningrat. Guna memudahkan dan mempertajam analisis, pertanyaan penelitian tersebut diperinci ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembentukan tim sukses oleh keempat calon anggota DPD Jawa Barat dan apa yang dilakukan oleh tim sukses, sehingga dapat menyentuh masyarakat sampai kepada lapisan masyarakat paling bawah?
2. Apa upaya keempat calon anggota DPD Jawa Barat menjadikan organisasi kemasyarakatan sebagai basis dukungan politik?
3. Apa langkah-langkah keempat calon anggota DPD Jawa Barat dalam kampanye sehingga dapat menarik simpati dan dukungan masyarakat Jawa Barat?

### **Tujuan Penelitian**

Berangkat dari pokok masalah tadi, tujuan dari penelitian ini meliputi tiga hal, yaitu untuk:

1. Menggambarkan dan menganalisis proses pembentukan tim sukses oleh keempat calon anggota DPD Jawa Barat dan apa yang dilakukan tim sukses, sehingga tim sukses tersebut dapat menyentuh masyarakat sampai kepada lapisan masyarakat paling bawah atau di pelosok kota.

2. Menganalisis upaya keempat calon anggota DPD Jawa Barat menjadikan organisasi-organisasi masyarakat sebagai basis dukungan politik.
3. Menggambarkan dan menganalisis langkah-langkah keempat calon anggota DPD Jawa Barat melakukan kampanye sehingga dapat menarik simpatik dan kepercayaan masyarakat Jawa Barat untuk memilihnya.

### **Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan teoritik dan kegunaan praktis, yakni:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis bagi ilmu politik terutama kajian-kajian yang berkaitan dengan faktor-faktor kemenangan dalam pemilu langsung.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai referensi bagi para peneliti selanjutnya.
3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan utuh mengenai faktor-faktor kemenangan anggota DPD pada pemilu 2004 di Jawa Barat.

### **Kerangka Teori**

Berkaitan dengan tema dan permasalahan penelitian yang akan dibahas, penelitian ini menggunakan (1) Teori Demokrasi dan Demokratisasi (2) Teori Komunikasi Politik, (3) Teori Pengaruh Personalitas (4) Teori Sosial Kapital dan (5) Teori Aristokrat Lokal (6) Teori Politik Etnis.

Secara teoritik demokrasi selalu menjadi bahan perdebatan di kalangan ilmuwan, namun para teoritis belum mendapat kesepakatan tentang konsep teori yang baku. Bahkan Robert Dahl menulis bahwa "... *there is no democratic theory – there are only democratic theories*".<sup>20</sup> Para ahli umumnya mendefinisikan menurut sudut pandangnya masing-masing, sehingga sulit mendapatkan konsep teori yang dapat diterima semua pihak.

Davis Beetham & Kavin Boyle mengemukakan bahwa:

Demokrasi adalah bagian dari khazanah pembuatan keputusan kolektif. Demokrasi mengejawantahkan keinginan bahwa keputusan yang mempengaruhi perkumpulan secara keseluruhan harus diambil oleh semua anggotanya dan masing-masing anggota harus mempunyai hak yang sama dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan. Dalam kata lain, demokrasi mencakup prinsip kembar kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan kolektif dan kesamaan hak-hak dalam menjalankan kendali itu.<sup>21</sup> Schumpeter mengemukakan apa yang ia namakan "teori lain mengenai

demokrasi", yakni suatu prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.<sup>22</sup> Secara konvensional dapat disebut bahwa suatu negara dikatakan demokratis jika pemerintahannya terbentuk atas kehendak rakyat yang diwujudkan lewat pemilihan umum yang kompetitif untuk memilih orang-orang yang akan

---

<sup>20</sup> Robert Dahl sebagaimana dikutip Maswadi Rauf, "Teori Demokrasi dan Demokratisasi" dalam Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, di Salemba Raya 6, 1 November 1997, hlm 3

<sup>21</sup> David Beetham & Kevin Boyle, *Demokrasi: 80 Tanya Jawab* (Yogyakarta: Kanisius, 2000) hlm 19-20

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 5. Dapat dibaca pula pada tulisan Gutavo Esteva & Madhu Suri Prakash, "Demokrasi Radikal: Otonomi Lokal, Bukan Globalisasi", *Proyek-Proyek Demokrasi*, (Yogyakarta: Jurnal Ilmu Sosial Transformatif Wacana No II, 1999) hlm 30

menduduki jabatan publik, di mana hak-hak politis dan sipil dijamin oleh hukum.<sup>23</sup>

Pandangan konvensional tersebut berbeda dengan pandangan kontemporer yang cenderung lebih pragmatis. Juan J. Linz dan Alfred Stepan mengemukakan kriteria pokok yang pragmatis dalam demokrasi kontemporer, yakni:

Kebebasan hukum untuk merumuskan dan mendukung alternatif-alternatif politik dengan hak yang sesuai untuk bebas berserikat, bebas berbicara, dan kebebasan-kebebasan dasar lain bagi setiap orang, persaingan yang bebas dan anti kekerasan di antara para pemimpin dengan keabsahan periodik bagi mereka untuk memegang pemerintahan, dimasukkannya seluruh jabatan politik yang efektif di dalam proses demokrasi, dan hak untuk berperan serta bagi semua anggota masyarakat politik, apa pun pilihan politik mereka. Secara praktis, ini berarti kebebasan untuk mendirikan partai-partai politik dan menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan jujur pada jangka waktu tertentu tanpa menyingkirkan jabatan politis efektif apa pun dari akuntabilitas pemilihan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>24</sup>

Pandangan pragmatis lainnya dikemukakan oleh Huntington yang disebutnya sebagai definisi suatu sistem politik demokratis, yakni para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.<sup>25</sup> Pandangan seiring dikemukakan oleh Larry Diamond bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang mengakui kebutuhan minimum akan kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan kebebasan majelis

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 20

<sup>24</sup> Juan J. Linz dan Alfred Dtepan, "Defining and Crafting Democrtic Transition, Constitutions and Consolidation" dalam Juan J. Linz et al., *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat, Belajar Dari Kekeliruan Negara-Negara Lain* (Bandung: Mizan, 2001) hlm 26-27.

<sup>25</sup> Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga* (Jakarta: Grafiti, 2001) hlm 5-6

(*assembly*) dalam tatanan di mana terdapat kompetisi dan partisipasi secara bermakna.<sup>26</sup>

Secara prinsipil para ahli yang memberikan definisi dan ciri-ciri suatu sistem yang dikatakan demokratis tidak berbeda secara signifikan, tetapi saling melengkapi. Menurut Maswadi Rauf ada dua konsep dasar yang menjadi prioritas dalam mendefinisikan demokrasi yakni kebebasan/persamaan (*freedom/equality*) dan kedaulatan rakyat. Dua konsep dasar ini menjadi indikator utama dalam membangun tegaknya demokrasi.<sup>27</sup>

Maswadi Rauf lebih lanjut menguraikan bahwa konsep kebebasan dan persamaan di antara sesama manusia melahirkan beberapa persyaratan yang penekanannya pada individu, persetujuan sebagai dasar dalam hubungan antar manusia. Persamaan semua manusia, keanekaragaman, hak suara yang luas, dan kebebasan berbicara dan berkumpul. Konsep kedaulatan rakyat menghasilkan beberapa persyaratan demokrasi, yaitu negara sebagai alat, *rule of law*, pemilihan umum yang bebas, terbuka, adil, jujur, berkala, dan kompetitif, pemerintah yang tergantung pada parlemen, dan pengadilan bebas.<sup>28</sup>

Demokrasi diyakini sebagai sebuah mekanisme politik yang dapat melindungi kebebasan rakyat dengan memberikan tugas kepada pemerintah untuk melindungi rakyat dalam menikmati kebebasan. Demokrasi menuntut adanya partisipasi aktif dari rakyat dalam proses pengambilan kebijakan politik. Rakyat

---

<sup>26</sup> Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation* (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1999) hlm 8

<sup>27</sup> Maswadi Rauf, 1997, *Op.Cit.*, hlm 5

<sup>28</sup> *Ibid*

dilibatkan dalam pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga kepentingan rakyat dapat tercermin dalam kebijakan-kebijakan pemerintah.<sup>29</sup>

Menurut Chusnul Mar'iyah, seharusnya partisipasi warga dimasukkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di setiap tingkatan pemerintahan. Partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pemerintah menjadi hal penting, agar warga tersebut juga memiliki rasa memiliki atau terlibat dalam jalannya pemerintahan (*good governance*). Dengan demikian akan ditumbuhkan komunitas warga dan bangunan demokrasi pada tingkatan pemerintahan lokal.<sup>30</sup> Demikian halnya dalam pemilihan pejabat politik, rakyat atau kelompok-kelompok kepentingan yang ada diberi ruang politik yang luas dalam menyampaikan aspirasinya. Penyampaian aspirasi berkaitan erat dengan alur komunikasi politik yang dibangun dalam sistem demokrasi.

Para ilmuwan politik mengkaji komunikasi politik karena pesan-pesan yang disampaikan di dalam proses komunikasi tersebut bersifat politis. Artinya pesan-pesan tersebut berhubungan dengan kekuasaan politik, penguasa politik, dan keputusan politik.<sup>31</sup> Maswadi Rauf menyatakan bahwa komunikasi politik diartikan sebagai penyampaian pesan-pesan politik dari komunikator kepada komunikan dalam arti yang Luas. "Dalam arti yang luas" mengandung makna

---

<sup>29</sup> Maswadi Rauf, *Op.Cit.*, hlm 7

<sup>30</sup> Chusnul Mar'iyah, "Kekuasaan, Politik, dan Demokrasi di Perkotaan: Elitis atau Pluralis?" dalam Jurnal PSPK, Pemilu Lokal, (Jakarta: PSPK, 2002) hlm 21

<sup>31</sup> Maswadi Rauf, *Konsensus dan Konflik Politik sebuah Penajagan Teoritis* (Jakarta: Dikti Depdiknas, 2001), hlm. 131-144.

bahwa proses komunikasi tersebut dapat berlangsung di setiap lapisan masyarakat melalui saluran apa saja yang dapat dipergunakan dan tersedia.<sup>32</sup>

Gabriel Almond berpendapat lebih luas bahwa komunikasi politik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem politik.<sup>33</sup> Komunikasi politik adalah salah satu dari tujuh fungsi yang dijalankan oleh setiap sistem politik. Ia menyatakan : *All of the functions performed in the political system-political socialization and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, and rule adjudication are performed by means of communication.*<sup>34</sup>

Definisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik bukanlah fungsi yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya dijalankan. Fungsi komunikasi politik terdapat secara *inherent* di dalam setiap fungsi sistem politik. Komunikasi politik adalah proses yang menentukan keberhasilan fungsi-fungsi lainnya, sedangkan keberhasilan penyampaian pesan-pesan dalam setiap fungsi itu menentukan keberhasilan pelaksanaan fungsi bersangkutan.

---

<sup>32</sup> Maswadi Rauf, *Indonesia dan Komunikasi Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 28.

<sup>33</sup> Penjelasan tentang komunikasi politik sebagai salah satu fungsi yang dijalankan dalam setiap sistem politik dapat dilihat dalam Gabriel Almond, *Introduction: A Functional Approach to Comparative Politics* dalam *The Politics of the Developing Areas*, Gabriel Almond dan James Coleman (penyunting), (Princeton: NJ : Princeton UP, 1960), hlm. 45-52. Juga lihat Gabriel Almond dan G Bingham Powell, *Comparative Politics. A Develovmental Approach*, (Boston : Little Brown, 1966), hlm. 164-189; Gabriel Almond dan G. Bingham Powell, *System, Process, and Policy. Comparative Politics* (Boston : Little Brown, 1978), hlm. 14-166. Hal ini juga dibahas dalam Maswadi Rauf, *Komunikasi Politik. Masalah Sebuah Bidang Kajian dalam Ilmu Politik*, Makalah yang disajikan dalam Seminar Nasional IV AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia) yang diadakan di Ujung Pandang tanggal 8-9 Agustus 1990.

<sup>34</sup> Almond, *Op.Cit.*, hlm 22

Almond juga berpendapat bahwa arus komunikasi bisa mengalir dari bawah ke atas (dari masyarakat ke penguasa politik) dan dari atas ke bawah (dari penguasa politik ke masyarakat) *two way traffic communication*. Arus komunikasi politik dari bawah ke atas bermula dari anggota-anggota masyarakat yang menyampaikan tuntutan-tuntutan ataupun dukungan kepada penguasa politik. Almond membayangkan bahwa dalam setiap sistem politik selalu saja ada arus informasi yang mengalir dari masyarakat ke penguasa politik. Yang membedakan sistem politik yang satu dari yang lainnya adalah cara penyampaian informasi, frekuensi penyampaian, dan struktur atau lembaga yang terlibat di dalam arus informasi tersebut.<sup>35</sup>

Arus komunikasi dari atas ke bawah terjadi bila penguasa politik menyampaikan pesan-pesan politik kepada anggota masyarakat. Bagi Almond proses tersebut juga bersifat universal karena tidak ada penguasa yang tidak menyampaikan pesan-pesan kepada rakyat, baik itu dalam bentuk peraturan-peraturan maupun perintah-perintah.<sup>36</sup>

Maswadi Rauf menyatakan bahwa paling tidak ada dua indikator yang menunjukkan bahwa kajian komunikasi politik membahas arus ke atas (di samping, tentu saja arus ke bawah). Yang pertama adalah agregasi kepentingan, dan kedua adalah partisipasi politik.<sup>37</sup>

Agregasi kepentingan adalah salah satu fungsi universal yang dijalankan oleh setiap sistem politik. Fungsi agregasi bertujuan menghimpun kepentingan-

---

<sup>35</sup> Maswadi Rauf, *Konsensus dan Konflik Politik sebuah Penjajagan Teoritis*, Op.Cit, hlm. 131-144.

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Maswadi Rauf, *Indonesia Dan Komunikasi Politik*, Op. Cit., hlm 28-32

kepentingan yang ada di dalam masyarakat untuk kemudian dijadikan kebijaksanaan oleh berbagai struktur politik. Pemikiran yang mendasari fungsi agregasi adalah arus komunikasi yang bersumber dari masyarakat/rakyat. Sasarannya adalah penguasa politik. Penyampaian berbagai kepentingan yang berkembang di dalam masyarakat adalah suatu keharusan di dalam sistem demokratis.<sup>38</sup>

Indikator kedua adalah partisipasi politik. Partisipasi politik adalah fenomena baru yang berkembang sejalan dengan perkembangan sistem demokrasi di berbagai pelosok dunia, dimulai dari Eropa Barat. Sistem demokrasi tidak akan berarti apa-apa bila tidak ada partisipasi politik yang dijalankan oleh rakyat. Oleh karena itu partisipasi politik dapat dianggap sebagai prasyarat bagi pertumbuhan demokrasi yang sehat.<sup>39</sup>

Kajian partisipasi politik pada hakekatnya juga merupakan kajian komunikasi politik. Setidak-tidaknya ada dua hal yang dianalisis, yaitu analisis terhadap pesan (*content*) dan efektivitas komunikasi. Analisis isi (*content analysis*) dalam studi komunikasi telah dikembangkan oleh ilmuwan komunikasi. Analisis terhadap isi/pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi sangat penting untuk mengetahui apa saja yang disampaikan, sampai sejauhmana pesan-pesan itu dengan mudah bisa dipahami oleh si penerima, dan kenapa pesan-pesan itu dianggap perlu oleh komunikator.<sup>40</sup>

Analisis isi berkaitan erat dengan efektivitas komunikasi. Para ilmuwan politik kurang memperhatikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan efektif

---

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> *Ibid*

tidaknya komunikasi politik yang dijalankan, padahal ini penting bagi kajian komunikasi politik yang mendalam. Seperti halnya setiap komunikasi, komunikasi politik juga bertujuan untuk menghasilkan efektivitas, yaitu diterimanya pesan-pesan komunikasi oleh komunikan dengan pemahaman yang lebih kurang sama dengan komunikator.

Dari pendapat tersebut, suatu pesan yang dibuat atas dasar kesamaan pikiran dan makna akan lebih mudah dipahami oleh komunikan atau khalayak. Pesan yang disampaikan diharapkan dapat diterima dan berimplikasi kepada umpan balik yang positif. Dalam kaitannya dengan sosialisasi kandidat, masyarakat dapat mengetahui dan mengerti visi dan misi yang disampaikan oleh calon sehingga masyarakat dapat memberikan umpan balik positif berupa kesediaan untuk memilih calon yang bersangkutan.

Dalam proses komunikasi terdapat paling sedikit 3 unsur, yaitu sumber (*source*), pesan (*message*), dan tujuan (*destination*).<sup>41</sup> Seorang calon anggota DPD memiliki tujuan dalam melakukan komunikasi dengan konstituen, yaitu untuk mendapatkan dukungan dengan memberikan pesan terlebih dahulu. Pesan tersebut harus dapat menarik simpati konstituen. Proses komunikasi tersebut ditujukan agar konstituen dapat memahami dan memberikan kesan positif terhadap kandidat.

Komunikasi politik juga berkaitan dengan usaha mencapai kepentingan politik. Dalam konteks demikian komunikasi politik berlangsung antara satu pihak dengan pihak lain dengan tujuan mempengaruhi pihak lain agar mengikuti apa

---

<sup>41</sup> Santoso Sastropetro, *Propaganda Salah Satu Bentuk Komunikasi Massa* (Bandung: Alumni, 1988), hlm. 87.

yang menjadi tujuan kepentingan. Sebagaimana diungkapkan Maswadi Rauf bahwa artikulasi kepentingan sangat tergantung pada komunikasi politik. Tanpa adanya komunikasi politik. Artikulasi kepentingan adalah benda mati, karena artikulasi itu sendiri tidak ada.<sup>42</sup> Oleh karenanya dalam mewujudkan sebuah kepentingan politik akan sangat ditentukan oleh bentuk komunikasi politik yang dibangun oleh komunikator kepada komunikan yang ada.

Demikian pula dalam proses pencapaian kekuasaan politik yang dilakukan oleh seorang kandidat. Dalam menyampaikan pesan-pesan kandidat atau ketika melakukan komunikasi dengan konstituen dibutuhkan saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah alat dan sarana dalam rangka menyampaikan pesan untuk membangun popularitas kandidat. Di era kemajuan teknologi dan peran media massa yang menjangkau seluruh dimensi kehidupan, membangun sebuah popularitas adalah suatu keniscayaan.<sup>43</sup> Maswadi Rauf menegaskan bahwa saluran komunikasi yang dipergunakan bisa berbentuk media massa tetapi dapat juga berbentuk tatap muka atau pertemuan langsung yang kedua bentuk tersebut sama pentingnya.<sup>44</sup>

Dan Nimmo mengatakan bahwa komunikasi dapat terjadi dari satu sumber yang ditujukan kepada orang banyak yang dikenal sebagai komunikasi massa. Ada dua bentuk saluran komunikasi massa. Bentuk yang pertama terdiri atas komunikasi tatap muka seperti bila seorang kandidat politik berbicara di depan rapat umum atau ketika seorang presiden muncul di depan khalayak besar atau

---

<sup>42</sup> Maswadi Rauf, *Indonesia dan Komunikasi Politik*, *Op. Cit.*, hlm 23

<sup>43</sup> Santoso Sastropoetro, *Pendapat Publik, Pendapat Umum, dan Pendapat Khalayak Dalam Komunikasi Sosial* (Bandung: Remaja Karya, 1987), hlm. 15-24. Lihat juga Deddy Mulyana, *Ilmu Kominikasi* (Bandung: Rosda, 2004), hlm. 83.

<sup>44</sup> Maswadi Rauf, *Indonesia dan Komunikasi Politik*, *Op. Cit.*, hlm 33-34

reporter dalam konferensi pers. Bentuk yang kedua melalui saluran media massa seperti pidato kepresidenan ke seluruh negara (satu-kepada-banyak) melalui televisi.<sup>45</sup>

Komunikasi dapat pula berbentuk interpersonal yaitu bentukan dari hubungan satu-kepada-satu. Saluran ini berbentuk tatap muka. Seorang kandidat kepresidenan yang berjalan melalui orang banyak sambil berjabat tangan atau seorang kandidat yang melakukan kunjungan dari rumah ke rumah merupakan contoh saluran interpersonal (tatap muka).<sup>46</sup>

Selain itu, komunikasi politik bisa berupa komunikasi antara satu organisasi dengan khalayak luas. Komunikasi jenis ini bisa menggunakan media perantara atau langsung disampaikan kepada massa. Sekalipun perantara yang dilakukan dalam kerangka komunikasi organisasi dilakukan oleh satu orang tetapi pesan yang disampaikan adalah pesan organisasi.<sup>47</sup> Komunikasi yang dilakukan oleh para komunikan dalam mempopulerkan kandidat harus bersifat persuasif, karena akan mencerminkan kepribadian dari kandidat itu sendiri. Maswadi Rauf mengatakan bahwa salah satu kaidah terpenting dari demokrasi adalah digunakannya cara-cara persuasif dalam memperjuangkan aspirasi. Pendekatan secara koersif hanyalah akan merusak proses demokratisasi.<sup>48</sup>

Dan Nimmo mengatakan bahwa pendekatan persuasif dimaksud untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat pemilih dengan pendekatan dialog,

---

<sup>45</sup> Dan Nimmo, *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan, dan Media*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2004) hlm. 166-169

<sup>46</sup> Ibid

<sup>47</sup> Ibid

<sup>48</sup> Maswadi Rauf, dalam Kata Pengantar Eep Saefullah Fatah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesai, 1994), hlm. xvi.

menanamkan opini baru, dan usaha yang disadari untuk mengubah sikap, kepercayaan, atau perilaku orang melalui transformasi pesan. Dengan pendekatan tersebut serta dilakukan secara terus-menerus dengan berbagai model komunikasi diharapkan berdampak kepada konstituen yakni; *Pertama*, akan mengenal apa yang diinformasikan. *Kedua*, informasi yang diberikan akan tertanam. *Ketiga*, orang tersebut akan terpengaruh. *Keempat*, informasi akan diterima sebagai satu kebenaran. *Kelima*, propaganda yang disampaikan menimbulkan kesetiaan kepada seorang kandidat.<sup>49</sup>

Karakteristik persuasi ada tiga. *Pertama*, persuasi mengandung kepentingan yang akan dipenuhi. *Kedua* persuasi dialektis, berwujud suatu proses timbal balik. *Ketiga* melahirkan bentuk tanggapan. Tanggapan itu berupa tindakan yang berbeda bila tanpa ada persuasi.<sup>50</sup> Dengan demikian persuasi merupakan suatu cara pembicaraan politik. Dengan sadar atau tidak orang yang turut serta dalam politik bertujuan membuat orang lain bertindak dengan cara yang mungkin tidak akan dilakukannya jika tidak ada persuasi dengan mengubah persepsi, pikiran, dan pengharapannya.

Pandangan Maswadi Rauf, Gabriel Almond dan Dan Nimmo di atas relevan dalam menganalisis faktor kemenangan anggota DPD. Setidaknya ada empat hal yang harus di analisis. *Pertama*, pemanfaatan saluran komunikasi yang dilakukan oleh para kandidat baik melalui media massa maupun tatap muka langsung. *Kedua*, analisis isi pesan dan efektivitas komunikasi yang dilakukan oleh pada kandidat, sehingga melahirkan *feed back* positif berupa dukungan. *Ketiga*,

---

<sup>49</sup> Dan Nimmo, *Op. Cit*, hlm. 118.

<sup>50</sup> *Ibid.*

sejauhmana tehnik persuasif yang dilakukan oleh para kandidat, sehingga mampu mempengaruhi masyarakat pemilih. Salah satu bentuk dukungan dapat terlihat dari kehadiran para konstituen dalam kampanye kandidat sebagai salah satu bentuk komunikasi langsung/ komunikasi massa.

Kampanye dilakukan dengan tujuan memperkenalkan kandidat, visi, misi dan mengajak konstituen untuk memberikan suara kepadanya. Setiap calon anggota DPD memiliki kesempatan yang sama untuk berkampanye. Oleh karena itu kesempatan harus dapat dimanfaatkan secara baik dengan mengupayakan strategi kampanye yang efektif dan efisien. Kampanye politik merupakan salah satu bentuk dari komunikasi politik.<sup>51</sup> Rogers dan Story<sup>52</sup> mendefinisikan kampanye sebagai “serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu”.

Merujuk pada definisi di atas maka setiap aktivitas kampanye setidaknya harus mengandung empat hal: (1) tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu, (2) jumlah khalayak sasaran yang besar, (3) biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, dan (4) melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisir. Segala tindakan dalam kegiatan kampanye dilandasi oleh prinsip persuasi terutama mengajak dan mendorong publik untuk menerima atau melakukan sesuatu yang dianjurkan atas dasar kesukarelaan. Dengan demikian kampanye pada prinsipnya adalah contoh tindakan persuasi

---

<sup>51</sup> Maswadi Rauf, *Konsensus dan Konflik Politik sebuah Penajagan Teoritis*, *Op. Cit*, hlm. 131-144.

<sup>52</sup> Rogers, E.M., & Story J.D, *Communication Campaign.*, dalam C.R. Berger & S.H. Chaffee (Eds), *Handbook of Communication Science*, (New Burray Park, 1987).

secara nyata. Dalam ungkapan Perloff<sup>53</sup> dikatakan “ *Compaings generally exemplify persuasion in action*”.

Sasaran dari kampanye adalah khalayak. McQuail & Windahl mendefinisikan khalayak sasaran sebagai sejumlah besar orang yang pengetahuan, sikap, dan perilakunya akan diubah melalui kegiatan kampanye.<sup>54</sup> Perubahan sikap, persepsi, dan tingkah laku dari objek komunikasi (komunikant) ingin dicapai melalui himbauan dan ajakan. Faktor penting di sini adalah membuat komunikant tertarik sehingga mau secara sadar dan sukarela menerima dan menuruti keinginan komunikator. Oleh karena itu pemaksaan dan ancaman bukanlah cara-cara yang lazim digunakan dalam kampanye. Bahkan dapat dikatakan bahwa kampanye yang menggunakan kekerasan, paksaan, dan ancaman tidaklah dapat disebut sebagai kampanye yang sesungguhnya.

Dengan demikian kampanye pemilihan umum bertujuan mengubah atau memperkuat perilaku masyarakat dalam memilih kandidat atau partai politik.<sup>55</sup> Kampanye pemilu dapat merupakan komunikasi politik dari bawah ke atas bila isi kampanye tersebut mengadakan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah, baik dalam bentuk dukungan maupun kritik. Namun kampanye juga bisa merupakan arus komunikasi dari atas ke bawah bila yang berkampanye adalah para juru kampanye pendukung pemerintah.

Kampanye pemilu bisa pula merupakan arus komunikasi dari masyarakat ke masyarakat bila juru kampanye yang berbicara tidaklah merupakan bagian dari

---

<sup>53</sup> Perloff, Richard M, *The Dynamics of Persuasion* (New Jersey : L. Erlbaum Associates, 1993).

<sup>54</sup> McQuail & Windahl, *Communication Models: For the study of Mass Communication* (New York, 1993).

<sup>55</sup> Antar Venus, *Manajemen Kampanye* (Bandung: Simbiosis Rakatama Media, 2004), hlm. 9.

penguasa politik (partai oposisi). Juru kampanye seperti ini menghimbau anggota-anggota masyarakat untuk memberikan dukungan kepada partainya dan sebaliknya mengajak rakyat untuk tidak mendukung partai pemerintah. Dalam kampanye seperti ini juru kampanye yang tidak menjadi bagian dari penguasa politik berinteraksi dengan warga masyarakat dalam penyampaian pesan-pesan politik.

Jenis-jenis kampanye menurut Charles U. Larson<sup>56</sup> terbagi ke dalam tiga kategori. *Pertama, product-oriented campaigns* atau kampanye yang berorientasi pada produk (umumnya terjadi di lingkungan bisnis). *Kedua, candidate-oriented campaigns* atau kampanye yang berorientasi pada kandidat (umumnya dimotivasi oleh hasrat untuk meraih kekuasaan politik). *Ketiga, ideologically or course oriented campaigns* adalah jenis kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi perubahan sosial.

Di atas telah disinggung bahwa kampanye mempunyai dua unsur penting, yaitu pesan-pesan dan perubahan perilaku pemilih. Karena perubahan merupakan tujuan utama dari kampanye, maka isi, bentuk, dan cara penyampaian pesan memainkan peranan yang amat penting bagi tercapainya tujuan tersebut. Perubahan dapat terjadi bila pesan yang disampaikan mudah dimengerti oleh masyarakat pemilih. Terdapat teori yang dapat mengemas pesan agar lebih menarik bagi konstituen yaitu teori *political marketing*.

*Political marketing* merupakan usaha yang dilakukan oleh kandidat atau tim sukses dalam memasarkan kandidat kepada masyarakat pemilih. Teori

---

<sup>56</sup> Charles U. Larson dalam *Antar Venus, Ibid.*, hlm. 11.

*political marketing* merujuk kepada perilaku dunia bisnis dan perilaku tersebut ditransformasikan di dalam dunia politik yang bersifat kompetitif. Aplikasi dalam kompetisi politik adalah kandidat diidentikkan sebagai produk dan masyarakat pemilih sebagai konsumen.<sup>57</sup>

Setiap produsen mempunyai kesempatan yang sama dalam memasarkan produk dan konsumen bebas menentukan pilihan. Suatu perusahaan dapat menguasai pasar karena keberhasilan dalam menerapkan konsep-konsep *marketing*. Sasaran adalah menciptakan peluang agar perusahaan unggul dalam persaingan memenuhi kebutuhan (*need*) dan harapan (*expectation*) konsumen. Begitu pula dalam politik, kandidat merupakan produsen dan masyarakat bagaikan konsumen atau pasar. Seorang kandidat yang dapat memenuhi permintaan pasar dan memberikan kepuasan konsumen maka kandidat itu akan unggul dalam persaingan.

*Political marketing* lebih ditujukan bagi arena kompetisi politik. Oleh karena itu implementasi dari *political marketing* adalah strategi kampanye politik untuk membentuk serangkaian makna politis tertentu di dalam pikiran para pemilih. Serangkaian makna politis yang terbentuk dalam pikiran para pemilih menjadi orientasi perilaku yang akan mengarahkan pemilih untuk memilih kontestan tertentu. Makna politis inilah yang menjadi *output* penting *political marketing* yang menentukan, pihak mana yang akan dipilih oleh para pemilih.

Masyarakat pemilih akan lebih cepat terpengaruh apabila kandidat yang disodorkan lebih populer, sebab pemilu secara langsung memerlukan popularitas.

---

<sup>57</sup> Lihat Adman Nursal, *Political Marketing* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 3-51.

Popularitas terbentuk bisa dimungkinkan karena yang bersangkutan adalah seorang tokoh yang berpengaruh di tengah masyarakat. Pengaruh itu dapat tercipta karena seorang kandidat adalah seorang yang memiliki kedudukan, intelektual, tokoh agama atau tokoh adat. Miriam Budiardjo membahas secara mendalam tentang pengaruh dan kekuasaan dalam bukunya *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*.<sup>58</sup>

Suatu konsep yang selalu dibahas bersama dengan kekuasaan adalah pengaruh. Terdapat beberapa pendapat berkaitan dengan konsep kekuasaan dan pengaruh. Salah satu hal yang dipertanyakan ialah apakah kekuasaan dan pengaruh merupakan dua konsep yang berbeda atau apakah satu di antaranya merupakan konsep pokok dan yang lainnya merupakan bentuk khususnya. Dan jika yang terakhir dianggap benar, yang manakah merupakan pengertian pokok dan yang mana merupakan bentuk khusus.

Kebanyakan sarjana, termasuk Floyd Hunter dalam karyanya *Community Power Structure*, berpendapat bahwa kekuasaan merupakan pengertian pokok dan pengaruh merupakan bentuk khususnya.<sup>59</sup> Demikian pula pendapat Carl Friedrich dalam bukunya *An Introduction to Political Theory*.<sup>60</sup>

Akan tetapi Laswell dan Kaplan menganggap pengaruh sebagai konsep pokok dan kekuasaan sebagai bentuk khas dari pengaruh, sedangkan perbedaan adalah bahwa kekuasaan dapat menyelenggarakan sanksi, dan pengaruh tidak.

---

<sup>58</sup> Miriam Budiardjo, *Aneka Pemikiran Tentang Kekuasaan dan Wibawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1991), hlm 9-29

<sup>59</sup> Floyd Hunter, *Community Power Structure* (University of North Carolina Press, 1953), hlm. 164

<sup>60</sup> Carl Friedrich, *An Introduction to Political Theory* (New York: New York Harper and Row, 1967), hlm 124

Dikatakan oleh mereka bahwa: “Yang membedakan kekuasaan dari pengaruh pada umumnya adalah ancaman sanksi. Kekuasaan merupakan kasus khusus daripada penyelenggaraan pengaruh. Kekuasaan adalah proses untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan orang lain dengan sanksi yang berat (yang benar-benar dilaksanakan atau yang berupa ancaman) jika mereka tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang dimaksud” (*It is the threat of sanctions which differentiates power from influence in general. Power is a special case of the exercise of influence; it is the process of affecting policies of others with help of (actual or threatened) severe deprivation for non-conformity with the policies intended*).<sup>61</sup>

Robert Dahl seorang sarjana politik terkemuka, pada suatu ketika begitu terkesan oleh persamaan antara kekuasaan dan pengaruh, sehingga dia sempat membuat kejutan dalam dunia akademis. Dalam ulasannya mengenai kekuasaan yang pertama, *The Concept of Power* (1957), Dahl melihat kekuasaan sebagai konsep pokok dan mengatakan” A mempunyai kekuasaan atas B sejauh dia dapat menyebabkan B untuk berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak akan B lakukan” (*A has power over B to the extent that he can get B to do something that B would not otherwise do*).<sup>62</sup>

Akan tetapi, beberapa tahun kemudian, dalam bukunya yang baru *Modern Political Analysis* yang pertama kali diterbitkan dalam tahun 1963, Dahl memakai perumusan yang persis sama dengan yang dipakainya dalam tulisan terdahulu, akan tetapi istilah ”kekuasaan” diganti dengan istilah ”pengaruh”. Dengan

<sup>61</sup> Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, *Power and Society* (New Haven, Yale University Press, 1950), hlm. 76.

<sup>62</sup> Robert A. Dahl, *The Concept of Power, Behavioral Science*, 1957, hlm. 201-215

demikian definisinya berbunyi: "A mempunyai pengaruh atas B sejauh dia dapat menyebabkan B untuk berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak akan B lakukan" (*A has influence over B to the extent that he can get B to do something that B would not otherwise do*).<sup>63</sup>

Dalam tahun 1978, dalam edisi ketiga dari buku yang sama Dahl lebih menjabarkan lagi pemikirannya dengan mengatakan bahwa pengaruh dianggap sebagai istilah pokok dan kekuasaan sebagai bentuk khususnya atau yang disebutnya sebagai salah satu *influence term*. Dengan demikian definisinya berbunyi: "A mempunyai pengaruh atas B sejauh dia sedikit banyak mengubah tindakan-tindakan atau kecenderungan-kecenderungan B" (*A influences B to the extent that he changes B's actions or predispositions in some way*).<sup>64</sup> Dikatakan selanjutnya: "Pengaruh semacam ini, yang timbul jika satu pihak menyebabkan pihak lain menuruti kemauannya melalui bayangan akan adanya sanksi yang berat jika tidak patuh, sering disebut kekuasaan" (*Influence of this kind, when compliance is attained by creating the prospect of severe sanctions for non-compliance, is often called power*).<sup>65</sup> Jadi, dengan perubahan pandangan ini, Dahl kira-kira sama pendapatnya dengan Laswell dan Kaplan.

Sebagai tambahan dapat disebut pendapat Robert Biersted, bahwa pengaruh adalah "*persuasif*", sedangkan kekuasaan adalah "*koersif*". Sebagai contoh disebutkan bahwa Marx mempunyai pengaruh, tetapi tidak mempunyai

---

<sup>63</sup> Robert A. Dahl, *Modern Political Analysis* (Englewood Cliffs, NJ., Prentice Hall, 1963), hlm 40

<sup>64</sup> Dahl, *Op.Cit.*, edisi ke tiga, hlm. 29

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm 47

kekuasaan, sedangkan Stalin mempunyai pengaruh karena dia pertama-tama mempunyai kekuasaan.<sup>66</sup>

Sekalipun oleh sarjana-sarjana tersebut di atas diadakan perbedaan secara cermat antara kekuasaan dan pengaruh, akan tetapi pada kenyataannya dalam pembahasan selanjutnya perbedaan ini tidak begitu diperhatikan, dan kedua istilah dipakai silih berganti, seolah-olah sinonim.

Persoalan selanjutnya adalah bagaimana orang mendapatkan pengaruh atau kekuasaan. Pengaruh atau kekuasaan itu merupakan penghargaan masyarakat terhadap orang-orang yang dianggap cakap atau memiliki keahlian tertentu, atau kedudukan atau kekayaan. Miriam Budiardjo, menyatakan bahwa sumber-sumber kekuasaan itu bisa berupa kedudukan, status kekayaan, kepercayaan, agama, kekerabatan, kepandaian, dan keterampilan.<sup>67</sup> Pendapat seiring dikemukakan Charles F. Andrain yang menyebutnya sebagai sumber daya kekuasaan, yakni: sumber daya fisik, ekonomi, normatif, personal, dan keahlian.<sup>68</sup>

Orang yang memiliki pengaruh dalam masyarakat adalah sekelompok kecil yang sering disebut dengan elite. Lipset dan Solari menunjukkan bahwa elite adalah mereka yang menempati posisi di dalam masyarakat di puncak struktur-struktur sosial yang terpenting, yaitu posisi tinggi di dalam ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran dan pekerjaan-

---

<sup>66</sup> Robert Biersted, *An Analysis of Social Power*, American Sociological Review. Volume 15 Desember 1950, hlm 732

<sup>67</sup> Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hlm 13

<sup>68</sup> Charles F. Andrain, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hlm. 132.

pekerjaan.<sup>69</sup> Pernyataan seiring dikemukakan oleh Czudnowski bahwa elite adalah mereka yang mengatur segala sesuatunya, atau aktor-aktor kunci yang memainkan peran utama yang fungsional dan terstruktur dalam berbagai lingkup institusional, keagamaan, militer, akademis, industri, komunikasi, dan sebagainya. Field dan Higley menyederhanakannya dengan mengemukakan bahwa elite adalah orang-orang yang memiliki posisi kunci, yang secara awam dipandang sebagai sebuah kelompok. Merekalah yang membuat kebijakan umum, yang satu sama lain melakukan koordinasi untuk menonjolkan perannya.<sup>70</sup>

Konsep mengenai adanya elite yang berkuasa sebenarnya telah terdapat dalam tulisan-tulisan Vilfredo Pareto (1848-1923) dalam *The Mind and Society*, Gaetano Mosca (1858-1914) dalam *The Ruling Class* dan Robert Michels (1876-1936) dalam *Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy*. Pemikiran mereka merupakan reaksi terhadap teori Marx bahwa masyarakat yang akan timbul sesudah jatuhnya masyarakat kapitalis merupakan suatu masyarakat tanpa kelas sosial di mana tidak ada lagi kelas yang berkuasa atas kelas lain. Mereka mengemukakan bahwa dalam semua masyarakat- apakah pemerintahnya bersifat otoriter atau demokratis- di mana saja dan kapan saja, selalu terdapat suatu kelompok kecil yang berkuasa atas massa rakyat. Selalu ada unsur oligarkhi dalam kepemimpinan masyarakat. Kelompok kecil ini dinamakan "elite". Elite yang biasanya menonjol dibidang tertentu merupakan minoritas kecil yang terorganisasi rapih dan sangat kohesif. Massa

---

<sup>69</sup> Lipset dan Solari dalam J.W. Scoorl, *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang* (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 128.

<sup>70</sup> Field dan Higley sebagaimana dikutip Dwaine Marvick, dalam Adam Kuper & Jessica Kuper, *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 285.

rakyat merupakan mayoritas yang tak terorganisasi, apatis, dan cenderung untuk menerima kepemimpinan elite.<sup>71</sup>

Dalam dekade lima puluhan dan enam puluhan timbul suatu generasi baru sarjana pendukung teori elite. Seorang di antaranya, Suzanne Keller dalam bukunya *Beyond the Ruling Class: Strategic Elites in Modern Society*, melihat bahwa dalam masyarakat modern jelas nampak tidak hanya satu dimensi kekuasaan, tetapi beberapa dimensi. Dalam setiap bidang kegiatan kemasyarakatan – baik di dalam maupun di luar pemerintahan – terdapat satu atau lebih elite khusus yang menonjol karena memiliki keahlian atau keterampilan di bidang tertentu; mereka oleh Suzanne Keller dinamakan "elite strategis". Misalnya ada elite politik, elite ekonomi, militer, dan pengetahuan, elite pendidikan, falsafat, dan agama, elite kesenian dan kesusastraan. Secara kolektif elite-elite ini dapat dinamakan "kelas berkuasa" (*ruling-class*) dalam masyarakat.<sup>72</sup>

Berdasar uraian di atas, faktor ketokohan atau elit sangat mempengaruhi perilaku politik masyarakat sebagai mana studi yang dilakukan Liddle dan Mujani yang menyimpulkan bahwa faktor ketokohan menjadi tulang punggung untuk meraih suara. Ketokohan Habibie di Golkar menjelaskan mengapa proporsi pemilih Golkar di Sulawesi pada Pemilu 1999 sangat besar (67%) dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Begitu juga faktor ketokohan Megawati berperan

---

<sup>71</sup> Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hlm. 22

<sup>72</sup> Suzanna Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit-Penentu Dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm. 5-30

besar terhadap perolehan suara PDIP. Demikian juga faktor ketokohan Amien Rais dalam PAN dan Gus Dur dalam PKB.<sup>73</sup>

Kesimpulan yang sama juga terdapat pada hasil penelitian yang dilakukan J. Kristiadi tentang perilaku pemilih pada Pemilu 1987-1992 di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Studi yang dilakukan ini mengambil sampel masyarakat desa dan kota yang berbeda karakternya. Hasil yang diperoleh menyimpulkan bahwa interaksi sosial dalam masyarakat Indonesia masih paternalistis, terutama antara anggota dan pimpinan masyarakat. Pimpinan masyarakat, baik formal maupun informal, diperlakukan sebagai tokoh panutan dengan pengaruh dan derajat keterikatan yang berbeda-beda.<sup>74</sup>

Weber memberikan istilah dengan istilah otoritas tradisional yaitu tipe otoritas ini berlandaskan pada suatu kepercayaan yang mapan terhadap kekudusan tradisi-tradisi zaman dulu serta legitimasi status mereka yang menggunakan otoritas yang dimilikinya. Jadi alasan penting orang taat pada struktur otoritas itu ialah kepercayaan mereka bahwa hal itu sudah selalu ada. Mereka yang menggunakan otoritas termasuk dalam satu kelompok status yang secara tradisional menggunakan otoritas atau mereka dipilih sesuai dengan peraturan-peraturan yang dihormati sepanjang waktu.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Wiliam Liddle dan Mujani, Politik Aliran Memudar, Kepemimpinan Nasional Menentukan Pilihan Partai Politik, dalam *Harian Kompas* edisi Jum'at, 1 September 2000.

<sup>74</sup> Lihat J. Kristiadi, *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia: Suatu Studi Kasus Tentang Perilaku Pemilih di Kotamadya Yogyakarta dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada Pemilihan Umum tahun 1987-1992*, Disertasi, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 1994.

<sup>75</sup> Doyle Paul Johson, *Teori Sosiologu Klasik dan Modern* (di Indonesiakan oleh Robert M.Z. Lawang) (Jakarta: PT. Gramedia, 1988) hlm. 226-232

Dalam kasus Jawa Barat terdapat beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli, yang menunjukkan bahwa faktor ketokohan itu sangat signifikan mempengaruhi perilaku politik masyarakat, sebagaimana yang di kemukakan oleh Karl D. Jackson dalam karyanya *Kewibawaan Tradisional, Islam, Dan Pemberontakan Kasus Darul Islam Jawa Barat*. Ia mengambil sampel tiga desa di Kabupaten Garut yang menjadi penopang terhadap pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat.

Karl D. Jackson mengatakan bawa integrasi politik di kalangan orang Sunda bergantung kepada sistem hubungan kewibawaan tradisional yang menjiwai kehidupan sosial desa serta mempertalikan setiap desa dengan dunia politik daerah dan nasional yang ada di balik pintu gerbang desa. Boleh dikatakan semua orang desa Sunda terorganisasi ke dalam jaringan hubungan diadik (berpasangan) yang bersifat pribadi, menyebar, penuh perasaan dan lestari. Sekalipun hubungan ini pada mulanya bersifat sosial dan ekonomi, namun dapat mempunyai siratan-siratan politik yang mendalam apabila seorang tokoh kewibawaan tradisional tertentu atau para tetua desa sebagai kelompok, menjadi terlibat ke dalam politik luar desa. Berpangkal pada rasa kewajiban moral, para pengikut seorang tokoh kewibawaan tradisional akan menuruti perintahnya sekalipun tindakan-tindakan yang dikehendaki mungkin tampak bertentangan setidaknya-tidaknya bagi pengamat luar, dengan kepentingan-kepentingan ekonomi, kepercayaan agama atau nilai-nilai ideologi para pengikut.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Karl D. Jackson, *Kewibawaan Tradisional, Islam, Dan Pemberontakan Kasus Darul Islam Jawa Barat* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1990), hlm. 3

Kewibawaan tradisional sebagai sistem kekuasaan merupakan gejala yang ada di desa-desa Sunda pada umumnya.<sup>77</sup> Jackson menyamakan kewibawaan tradisional dengan *sistem patron klien*, walaupun hubungan dalam kewibawaan tradisional lebih emosional yang berbeda dengan *sistem patron klien* atau lebih jelasnya lebih bersifat bapak-anak. Jackson merujuk bahwa banyak kepustakaan yang menunjukkan bapakisme dan akibatnya atas perilaku politik Indonesia, di antaranya ditemui dalam tulisan Feith, Geertz, Koentjaraningrat, Selo Soemardjan.<sup>78</sup>

Begitu pula penelitian yang dilakukan Hiroko Hirokosi dalam bukunya “Kiyai dan Perubahan Sosial”, dengan melakukan penelitian terhadap Kiyai di Desa Cipari Kabupaten Garut Propinsi Jawa Barat yaitu Kiyai Yusuf Tajiri. Ia menjelaskan bahwa Kiyai menduduki posisi sentral dalam masyarakat Islam pedesaan dan menyatakan berbagai golongan hingga mampu melakukan tindakan kolektif, jika diperlukan. Dia mengambil peran sebagai poros hubungan antara umat dengan Tuhan. Pada pandangan sebagian besar pengikutnya, kiai adalah contoh muslim ideal yang ingin mereka capai. Dia seorang yang dianugrahi pengetahuan dan rahmat Tuhan. Sifat hubungan antara kiyai dengan masyarakat adalah kolektif. Kiai terkesan sebagai pemimpin simbolis yang tak gampang ditiru oleh orang biasa.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> Karl D. Jackson, *Ibid.*, hlm 263.

<sup>78</sup> Karl D. Jackson, *Ibid.* Lihat Feith (*The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, 1962, hlm 115), Geertz, (*The Religion of Java*, 1960, hlm 25-29); Koentjaraningrat, (*Villages in Indonesia*, 1967, hlm 279); Selo Soemardjan, (*Social Change in Jogjakarta*, 1962, hlm 138-139)

<sup>79</sup> Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, diterjemahkan oleh Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 232.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa saking besarnya pengaruh kiyai di mana para petani muslim selalu bertumpu pada kepemimpinan dan bimbingan mereka baik dalam masalah-masalah bersama maupun pribadi, dan para kiyai pun sangat tanggap terhadap harapan-harapan tersebut dengan bertindak sebagai pembela kepentingan masyarakat dan pewaris ortodoksi Islam. Sebagai kelompok, sebagian mereka telah memberikan dorongan bagi lahirnya semacam gerakan petani seperti laskar Hisbullah dan Sabilillah pada masa perang kemerdekaan (1945-1949), Gerakan Darul Islam (gerakan Negara Islam) 1948-1962, pemberontakan di luar Jawa (1958-1962) dan beberapa pemberontakan lainnya pada masa penjajahan. Pentingnya posisi kiyai ini banyak juga yang ditulis misalnya oleh Geertz dalam bukunya “ *The Javanese Kijaji : the Changing Roles of a cultural Broker* (1960).<sup>80</sup>

Pendapat Miriam Budiarjo, Karl Jakson dan Hirokosi di atas relevan untuk menganalisis ketokohan kandidat sebagai salah satu faktor yang memungkinkan kemenangan dalam pemilu yang sedikitnya terdapat dua hal yang dapat dianalisis. *Pertama*, analisis pengaruh kedudukan para kandidat baik sebagai pejabat Negara, birokrasi, pemimpin organisasi kemasyarakatan atau tokoh adat. *Kedua*, analisis terhadap posisi para kandidat di tengah elit-elit politik dan tokoh masyarakat, sehingga keberadaan para kandidat mudah diterima oleh para elit tersebut dan berdampak pada mobilisasi dukungan para pengikut elit yang kemungkinan terbangun dalam sosial kapital masing-masing.

---

<sup>80</sup> Hiroko Horikoshi, *Ibid.*, hlm. 4

Kemunculan elit-elit politik dalam percaturan politik tidak lepas dari proses-proses sosial yang membentuknya. Emile Durkheim menguraikan bahwa sebab-sebab suatu gejala dapat dibagi atas 2 macam: (1) sebab-sebab ateseden, dalam hal ini elit harus dipelajari sebagai perluasan dari kasta penguasa, aristokrasi, dan kelas-kelas penguasa yang menurut sejarah mandahului mereka, (2) sebab yang mengiringinya kekuatan-kekuatan yang terus beroperasi dan menjalankan pengaruhnya. Dalam hal ini, elit harus dipelajari dalam hubungan dengan kekuatan-kekuatan sosial yang mendorong perkembangan sosial.<sup>81</sup>

Selain itu pendapat Suzanne Keller yang menjelaskan bahwa golongan elite berkembang disebabkan oleh empat proses sosial yang utama: (1) pertumbuhan penduduk, (2) pertumbuhan spesialisasi jabatan; (3) pertumbuhan organisasi formal atau birokrasi; dan (4) perkembangan keragaman moral. Dengan berjalannya keempat proses itu, kaum elite pun menjadi semakin banyak, semakin beraneka ragam dan lebih bersifat otonom.<sup>82</sup>

Begitu pula Robert D. Putnam menyatakan pentingnya *networking politic*. Ia mengistilahkan dengan *social capital*. Kerangka *network* tidak hanya berkenaan dengan jaringan politik berupa parpol-parpol pendukung tetapi juga jaringan sosial, keluarga, dan organisasi penekan.<sup>83</sup> Burhan D. Magenda menguraikan lebih rinci bahwa di samping parpol dan organisasi kemasyarakatan (ormas) jaringan

---

<sup>81</sup> Durkheim dalam Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 118-145

<sup>82</sup> Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elit Perana elit Penentu dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm 87

<sup>83</sup> Robert D. Putnam, *Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society* (London: Oxford Preaa, 2002) dalam Burhan D. Magenda, Aspek-Aspek Politik Birokratik dan Ekonomi Perencanaan Otonomi Daerah di Indonesia, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol XIV, Nomor 2, Mei 2006 (Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, 2006) hlm 430-432

lain yang bisa dimanfaatkan adalah dimilikinya *social capital* berupa kelas sosial dan jaringan keluarga. Kelas sosial yang penting adalah kelompok adat dan aristokrat lokal yang menjalin hubungan *patron-client* secara tradisional dengan massa pemilih. Para tokoh agama masuk dalam kelompok ini. Kalangan aristokrat banyak yang terpilih menjadi anggota DPR dan DPD, seperti Sultan Ternate, Mudhafar Sjah beserta istri, Ratu Hemas dari Yogya, Aji Farida dari Kaltim, Yanti Baramuli dari Sulawesi Utara, serta tokoh-tokoh Nahdhatul Ulama (NU) dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.<sup>84</sup>

Lebih lanjut Robert D. Putnam mengatakan bahwa ada korelasi yang tinggi terhadap kekuasaan politik antara variabel-variabel minat terhadap politik, pengetahuan dan pengalaman politik, kecakapan dan sumber daya politik, partisipasi politik, kedudukan politik. Oleh karenanya warga negara yang berminat besar terhadap politik cenderung lebih banyak memiliki pengetahuan tentang masalah-masalah pemerintahan, memiliki banyak sumber-sumber politik seperti pendidikan, kekayaan, prestise politik dan sumber-sumber sosial-ekonomi. Sebab sumber-sumber tersebut memungkinkan untuk berpartisipasi aktif atau meraih kekuasaan politik.<sup>85</sup>

Pendapat Emile Durkheim, Suzanne Keller dan Robert D. Putnam di atas menunjukkan akan pentingnya sebuah proses sosial dan kelompok-kelompok sosial yang dapat berpengaruh terhadap munculnya elite politik atau berpengaruh terhadap proses menuju elite. Teori sosial kapital melihat manusia yang tidak bisa

---

<sup>84</sup> Burhan D. Magenda, *Ibid*

<sup>85</sup> Robert D. Putnam, *The Comparative Study of Political Elites* (Englewood Cliff, N.J: Prentice-Hall, 1976) dalam Mohtar Masoed dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik* (Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2001) hlm 76-94

lepas dari kelompok/komunitas dan senantiasa membutuhkan kelompok. Sosial kapital terlahir dari individu-individu yang berkelompok berdasarkan kesamaan suku, etnik, agama atau kepentingan untuk membentuk suatu komunitas yang dapat melindungi dan bekerjasama bagi kepentingan kelompoknya. Durkheim mengatakan bahwa solidaritas itu terbangun karena persamaan.<sup>86</sup> Maurice Duverger mengistilahkan dengan *solidaritas proximitas*; bentuk solidaritas melalui kesamaan.<sup>87</sup> Komunitas yang terbentuk ini dapat memiliki ikatan yang kuat antar individu sehingga dapat membentuk norma/nilai bersama yang dapat mengendalikan dan memberikan solidaritas yang utuh atas berbagai kejadian yang mengancam atau menghancurkan eksistensi kelompok tersebut, terutama ancaman dari luar.

Maurice Duverger menguraikan lebih lanjut tentang *solidaritas proximitas* ini dengan terbentuknya kelompok-kelompok yang berdasarkan teritorial, kelompok-kelompok berdasarkan korporat, dan kelompok-kelompok yang berdasarkan ideologis. Kelompok teritorial terbangun lebih disebabkan adanya solidaritas karena dekat yang merupakan varian dari solidaritas karena sama. Kedekatan merupakan keserupaan dengan kondisi-kondisi hidupnya yang serupa, dia menghasilkan kesamaan yang lain, ada yang tergantung pada kondisi-kondisi geografis (yang menyebabkan kesamaan morfologis, mores, dan cara hidup), yang lain hanya berasal dari hubungan langsung yang disebutkan oleh kedekatan (kesamaan dalam bahasa, fenomena imitasi). Kelompok-kelompok korporatif, sebagaimana kelompok-kelompok teritorial, maka kelompok-kelompok korporatif

---

<sup>86</sup> Durkheim, *Op. cit*

<sup>87</sup> Maurice Duverger, *Sosiologi Politik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 188-250

tergantung pada berbagai jenis solidaritas melalui kesamaan, solidaritas yang menyatukan orang-orang yang sekarang mengambil bagian – atau dulu mengambil bagian – pada jenis kegiatan yang sama. Kelompok-kelompok profesional adalah kelas dari kelompok korporatif yang paling penting, akan tetapi bukanlah satu-satunya. Dalam arti sempit, kelompok korporatif mempersatukan orang yang terlibat di dalam kegiatan profesional tertentu. Kelompok-kelompok para profesional ini kadang-kadang memainkan peranan penting pada tingkat-tingkat kompetisi politik tertentu.<sup>88</sup>

Selain itu ada kelompok-kelompok ideologi yaitu kelompok-kelompok dengan tubuh keyakinan ideologis yang sama. Gereja-gereja, sekte-sekte filosofis, “masyarakat intelektual” dan partai-partai politik merupakan kelompok-kelompok ideologis. Sebuah doktrin menjadi ideologi ketika suatu kelompok sosial menganutnya, ketika dia berhenti menjadi sebagai hanya bangunan intelektual dari seorang pemikir dan menjadi suatu ekspresi dari aspirasi, keinginan, dan keyakinan suatu kelompok orang (kelas, bangsa dan seterusnya). Sampai ke tingkat bahwa kelompok ini berbeda dari kelompok lain, dan mempunyai organisasi dan lembaga, dia merupakan kelompok ideologis.<sup>89</sup>

Solidaritas yang terbangun kerana kesamaan dapat melahirkan perasaan identitas bersama yang pada mulanya masih dihambat oleh adanya solidaritas dengan lingkungan sosial langsung, kelompok etnis, atau kelompok asal daerah. Tapi suatu kesadaran mengenai realitas sering muncul karena peristiwa-peristiwa dramatis, ketika masing-masing anggota kelompok mengalami tekanan yang sama

---

<sup>88</sup> *Ibid*

<sup>89</sup> Maurice Duverger, *Ibid*.

oleh kekuatan-kekuatan ekonomi, sosial dan politik, sehingga terbentuklah organisasi internal. Dahrendorf menamakan kelompok itu dengan istilah kuasi-kelompok.<sup>90</sup>

Kuasi-kelompok ini dengan cara demikian akan berubah menjadi kelompok strategis, karena secara strategis pula mereka mempunyai arti yang penting untuk perkembangan politik, situasi konflik, reformasi ataupun revolusi dalam masyarakat masing-masing. Secara aktif mereka mewakili tujuan politik atau ekonominya sendiri. Mereka cenderung menunjang kegiatan-kegiatan pemimpinnya yang muncul dari kalangan sendiri, atau pemimpin-pemimpin yang dianggapnya mewakili keinginan-keinginannya. Dengan demikian, kelompok strategis merupakan lahan untuk mengerahkan pemimpin-pemimpin politik dan sekaligus merupakan *Pressure Group* (yang berkuasa).<sup>91</sup>

Proses pembentukan kelompok tidak harus linier, tetapi dapat juga dihentikan sehingga menciptakan suatu keadaan yang membingungkan serta konflik yang berkepanjangan. Contoh untuk itu diberikan oleh Clifford Geertz. Dalam penelitiannya mengenai sejarah sosial sebuah kota di Jawa, ia menggambarkan terjadinya kelompok strategis dari kelompok-kelompok profesi. Ia lalu menganalisis, bagaimana kelompok yang dinamakannya sebagai pengelompokan-pengelompokan sosio-kultural tingkat pertama, mengalami perubahan, terpecah dan menjadi aliran semasa revolusi, ketidakstabilan politik

---

<sup>90</sup> Dahrendorf dalam Hans-Dieter Evers dan Tilman Schiel, *Kelompok-Kelompok Strategis* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), hlm 12

<sup>91</sup> Hans-Dieter Evers dan Tilman Schiel, *Ibid*, hlm 12. Mereka mengistilahkan kuasi-kelompok dengan nama kelompok strategis.

dan depresi ekonomi. Pembentukan kelompok strategis berarti modernisasi, sedangkan menguatnya sistem aliran merupakan suatu langkah mundur ke model tradisional tanpa benar-benar menciptakan suatu masyarakat tradisional yang terintegrasi. “Kedua-duanya, tradisi dan modernitas, kelihatannya semakin mundur, sebaliknya yang jelas tertinggal adalah sisa dari yang pertama dan salinan dari yang kedua. Jika dilihat dalam kaleidoskop, terlihat bahwa masa lalu telah sangat jauh tertinggal dan masa depan juga masih jauh di muka.”<sup>92</sup>

Penelitian terkenal oleh Barrington Moore (1969) memusatkan perhatiannya kepada bermacam-macam kelompok strategis: kelas tuan tanah, petani, administrasi pemerintahan dan borjuis perkotaan. Naiknya setiap golongan ke pusat kekuasaan dengan cara bertahap atau pun dengan revolusi membentuk kerangka munculnya sistem politik yang beraneka ragam dalam dunia modern. Penelitian yang dilakukannya mengenai Inggris, Prancis, Jerman, Amerika Serikat, Cina, Jepang, dan India, menyebabkan ia membedakan dunia modern dalam 3 arus utama: revolusi dari atas, dengan antara kelas terpelajar dan kaya dengan birokrasi, akan menimbulkan fasisme; revolusi borjuis yang dilakukan oleh borjuis perkotaan menimbulkan demokrasi model Barat; dan revolusi petani menimbulkan komunisme.<sup>93</sup>

Dalam konteks Indonesia, Burhan D. Magenda menjelaskan tentang aliansi kalangan adat dan dan priyayi. Ia mengambil salah satu contoh adalah penjelasan mengenai mengapa pemerintahan Orde Baru dapat bertahan begitu kuat secara politik. Ia menilai bahwa di antara kekuatan Orde Baru adalah dibangunnya

---

<sup>92</sup> Geertz, *The Social History of an Indonesian Town* (Cambridge Mass, 1965), hlm 152-160

<sup>93</sup> Barrington Moore dalam Hans-Dieter Evers dan Tilman Schiel, *Op. Cit.*, hlm 14

aliansi antara kaum adat seluruh Indonesia oleh kaum priyayi sehingga kelas aristokrat ini mendominasi politik Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Dominasi kaum adat ini, terutama di pedesaan lebih dimungkinkan oleh adanya *floating mass* yang membuat ikatan *patron-klien* terutama di pedesaan, tetap bertahan. Dengan adanya *floating mass* ini maka pola hubungan lama menyesuaikan diri dengan kenyataan-kenyataan baru yang datang, misalnya di bidang ekonomi dan politik. Namun karena birokrasi lokal tetap di tangan kaum adat, pola *patron klien* lama akan bertahan untuk jangka waktu yang lama.<sup>94</sup> Penilaian ini sangat berbeda dengan para peneliti Indonesia lainnya yang melihat bahwa kekuatan Orde Baru terletak pada TNI saja. Burhan D. Magenda membuka cakrawala baru dengan meluncurkan peran dari para kelas aristokrat dalam percaturan politik Indonesia.<sup>95</sup>

Dengan demikian proses menjadi elit atau bertahannya suatu elite dapat pula terbangun karena unsur *patron klien* sebagaimana yang dikemukakan oleh Burhan D. Magenda di atas. *Patron klien* merupakan fenomena yang banyak terjadi di Indonesia, karena masyarakat Indonesia mayoritas tinggal di pedesaan-pedesaan. Yang dimaksud dengan model *Patron klien* ini dikemukakan oleh Scott yang memberikan definisi kelompok patron-klien sebagai hubungan *dyadic* (dua orang) yang terdiri dari seorang dengan status sosio-ekonomi yang lebih tinggi (*patron*) yang menggunakan pengaruh dan sumber-sumber kebutuhan hidup (*resources*) yang dimilikinya untuk memberi perlindungan dan keuntungan bagi orang lain

---

<sup>94</sup> Burhan D Magenda, *Perubahan dan Kesenambungan dalam Pembelahan Masyarakat Indonesia*, Prisma No 4, 1990

<sup>95</sup> Mengenai aliansi kaum adat-priyayi ini, lihat Burhan D. Magenda, "The Surviving Aristocracies of Indonesia: Politics in Three Provinces of the Outer Islands", Disertasi PhD, Cornell University, 1989.

(*klien*) yang membalasnya dengan memberikan dukungan dan bantuan, termasuk pelayanan pribadi, bagi patron. Kelompok *patron-klien* bisa berbentuk hubungan seorang patron dengan beberapa orang klien. Bentuk kelompok *patron klien* seperti ini disebut kelompok patron-klien gugus (*patron-client cluster*). Kelompok patron-klien bisa juga berupa gabungan dari beberapa gugus patron klien yang dipimpin oleh seorang patron sebagai patron tertinggi. Di bawah patron tertinggi itu terdapat sejumlah klien yang merupakan patron kecil bagi sejumlah klien. Kelompok patron-klien seperti ini disebut sebagai kelompok patron-klien piramida (*patron-client pyramid*).<sup>96</sup>

Teori yang dikemukakan oleh Maurice Duverger, Geertz dan Burhan D Magenda menjadi relevan untuk menjelaskan penelitian ini, karena kemenangan anggota DPD Jawa Barat yang didukung oleh organisasi-organisasi tertentu, memungkinkan terjadi militansi kelompok atau pun terjadi aliansi antara kelompok strategis yang mungkin bermodel patron klien sebab masyarakat pemilih di Jawa Barat kebanyakan dari pedesaan. Sedikitnya dapat dinalisis tiga hal *pertama*, tingkat ikatan primordial yang terbangun dalam kelompok-kelompok, organisasi-organisasi serta daerah-daerah pendukung. *Kedua*, efektivitas ikatan primordial dapatkah menjadi mobilisasi dukungan. *Ketiga*, sejauhmana dukungan dari berbagai kelompok masyarakat menjadi jaringan politik atau infrastruktur politik bagi kemenangan seorang kandidat.

Pengelompokan masyarakat yang selalu diikat apa yang disebut oleh Clifford Geertz dengan ikatan-ikatan primordialisme (*primordial attachments*),

---

<sup>96</sup> Scott dalam Maswadi Rauf, *Konsensus dan Konflik Politik sebuah Penjajagan Teoritis*, Op. Cit hlm. 98-107.

seperti ikatan-ikatan kekerabatan, ras, bahasa, daerah asal, agama, suku bangsa. Atas dasar ikatan-ikatan itu pengelompokan-pengelompokan masyarakat Indonesia tumbuh dan berkembang, baik dalam organisasi-organisasi sosial informal dan formal, asosiasi-asosiasi, organisasi massa, pemerintahan, partai politik, maupun organisasi yang bergerak dalam bidang ekonomi.<sup>97</sup>

Burhan D. Magenda<sup>98</sup> mengatakan bahwa dalam hubungan etnik ini, ada tiga masalah yang juga harus diperhatikan. Masalah pertama merupakan akibat dari pembangunan yakni proses perpindahan penduduk dengan spesialisasi pekerjaan pada etnik tertentu, khususnya di bidang ekonomi sehingga muncul “kantong-kantong ekonomi” yang bersifat kesukuan dan eksklusif. Masalah kedua, yakni kantong-kantong etnik di daerah dan di kota-kota besar. Karena melemahnya peranan orpol dalam masa Orde Baru, maka ada kecenderungan bahwa organisasi etnik dan kedaerahan makin menguat dan menjadi substitusinya yang utama. Di kota kota besar, ikatan kantong etnik ini lazimnya juga diikuti oleh jenis pekerjaan yang sama sehingga menimbulkan *ethnic job* dengan segala implikasi sosial politiknya. Masalah yang ketiga adalah tentang *tribal minoritas* yang tertinggal dalam pembangunan.

Lebih lanjut Burhan D. Magenda mengatakan bahwa dalam kerangka hubungan etnis inilah adanya perbedaan antara "penduduk asli" dengan "pendatang" disuatu daerah yang kemudian dikembagkan sebagai konsep "putra daerah". Dinamika masalah putra daerah dan pendatang dapat menjadi konflik etnik untuk memperebutkan jabatan politik seperti gubernur dan bupati karena

---

<sup>97</sup> Clifford Geertz, *Op.Cit*

<sup>98</sup> Burhan D. Magenda, *Perubahan dan Kesenambungan dalam Pembelahan Masyarakat Indonesia*, Prisma Nomor 4, 1990

sering terjadi marjinalisasi putra daerah yang menimbulkan kecemburuan yang luas, misalnya di kalangan orang Dayak di Kalimantan dan suku-suku di Irian Jaya. Bahkan boleh dikatakan bahwa di era Reformasi, pemekaran kabupaten dan provinsi baru yang didasarkan pada pengelompokan etnik seperti terjadi tahun 1958 misalnya provinsi Gorontalo dan provinsi Banten.<sup>99</sup>

Karakteristik yang melekat pada satu kelompok etnis adalah tumbuhnya perasaan dalam satu kelompok (*sense of community*) di antara para anggotanya. Perasaan tersebut menimbulkan kesadaran akan perasaan hubungan yang kuat. Selain itu tumbuh pula perasaan “kekitaan” pada diri anggotanya maka terselenggaralah rasa kekerabatan. Frederik Barth mengatakan bahwa identitas etnis itu bersifat askriptif karena dengan identitas etnis maka seseorang diklasifikasikan atas identitasnya “yang paling umum dan mendasar” yaitu berdasarkan atas tempat atau asalnya.

Frederik Barth memandang identitas etnis sebagai hasil dari proses sosial yang konflik, manakala batasan-batasan simbolik terus-menerus membangun dan dibangun oleh manfaat mitologi, suatu hitungan sejarah dari bahasa dan pengalaman masa lampau. Pendekatan *Instrumentalisme* lebih menaruh perhatian pada proses manipulasi dan mobilisasi politik manakala kelompok-kelompok sosial tersebut tersusun atas dasar atribut-atribut awal etnisitas seperti kebangsaan agama, ras, dan bahasa.

Masalah etnis yang dalam kehidupan politik lazimnya dipandang hanya sekedar sebagai masalah masa lampau, sejak tahun 1970-an kembali tampil ke

---

<sup>99</sup> Burhan D. Magenda, Masalah "Putera Daerah" Dalam Integrasi Nasional, makalah dipresentasiokan pada Simposium Internasional "Globalization and Local Culture: A Dialectic Towards the New Indonesia", Padang, Indonesia, Universitas Andalas, 18-21 Juli 2001

atas pentas politik, yaitu ketika semakin meningkatnya konflik etnis atas suku bangsa dan adanya fakta ironik bahwa berbagai pertentangan itu tidak saja terjadi pada negara-negara berkembang atau dalam negara yang sedang dilanda krisis ekonomi, melainkan juga menerobos ke negara-negara di dunia yang ekonominya maju dan demokrasinya matang.<sup>100</sup>

Berkaitan dengan penelitian ini yang mengambil Provinsi Jawa Barat yang merupakan salah satu etnik di Indonesia yaitu etnik Sunda. Etnik Sunda terbagi lagi pada etnik priangan atau pasundan dan non priangan yang secara bahasa melahirkan cara berbahasa yang berbeda. Sunda Priangan dikenal dengan Bahasa Sunda yang halus dan asli sedangkan yang non-Priangan berbahasa Sunda kasar dan campur dengan Bahasa Jawa. Daerah yang termasuk Priangan antara lain Bandung, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, Cianjur, Ciamis, Purwakarta dan Sukabumi sedangkan daerah yang termasuk non-Priangan adalah Indramayu, Cirebon, Subang, Karawang, Bogor dan Bekasi.

Perbedaan ini secara politik melahirkan kecemburuan tersendiri, sebab elit-elit diluar dari Priangan dalam sejarah Jawa Barat belum pernah ada Gubernur Jawa Barat yang lahir dari non-Priangan, padahal sumbangan daerah terhadap APBD provinsi cukup besar seperti dari Cirebon, Bogor, Bekasi. Dengan kesenjangan politik ini muncul wacana pemekaran propinsi seperti yang terjadi pada propinsi Banten yang sebelumnya termasuk Jawa Barat, sekarang muncul Cirebon ingin membentuk propinsi sendiri. Realitas itu juga tidak lepas dari munculnya elit-elit baru di Jawa Barat termasuk pemilihan anggota DPD.

---

<sup>100</sup> Koentjaraningrat, *Masalah Kesukubangsaan Dan Integrasi Nasional* (Jakarta: UI Press, 1993) hlm 2

### **Alur Pikir**

Penelitian ini menggunakan alur pikir yang dimulai dari potensi calon anggota DPD Jawa Barat yang meliputi; ketokohan, popukaritas dan dana yang dimiliki calon. Potensi calon anggota DPD berkaitan erat dengan jaringan politik yang dimiliki calon seperti jaringan kepada partai politik, ormas, pers, elit/tokoh dan LSM atau kelompok-kelompok masyarakat.

Potensi calon dan jaringan politik calon anggota DPD akan sangat bergantung kepada kekuatan-kekuatan politik yang ada di Jawa Barat. Kekuatan-kekuatan politik tersebut antara lain; Islam, Menak, Militer (Siliwangi), dan partai politik. Kekuatan-kekuatan politik tersebut dapat mempengaruhi langsung masyarakat pemilih, sehingga seorang calon tetap harus memiliki jaringan terhadap kekuatan-kekuatan politik tersebut.

Seorang calon anggota DPD Jawa Barat untuk mengikuti pemilu DPD perlu mempersiapkan beberapa hal yang antara lain; pembentukan tim sukses, dana dan kampanye. Potensi calon dan jaringan yang dimiliki calon anggota DPD diorganisir melalui tim sukses untuk mempengaruhi pemilih dengan melakukan beberapa pendekatan antara lain: pendekatan ketokohan, keagamaan, organisasi dan pendekatan komunikasi langsung dengan masyarakat pemilih.

Pendekatan-pendekatan tersebut diharapkan akan mampu mempengaruhi pemilih, sehingga pada waktu pencoblosan pemilih dapat mencoblos calon anggota DPD tersebut. Dukungan pemilih yang dimobilisir dengan kekuatan politik melalui jaringan politik calonlah yang dapat membawa kemenangan

seorang calon anggota DPD Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema di bawah ini:

### **SKEMA ALUR PIKIR PENELITIAN**

## Metode Penelitian

Dalam bagian ini diuraikan metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian dibagi atas 4 bagian, yakni: *pertama*, jenis penelitian. *Kedua*, sumber data. *Ketiga*, tehnik pengumpulan data. *Keempat*, analisis data.

### Jenis data

Penelitian ini bersifat kualitatif,<sup>101</sup> yang mengandalkan konstruksi logika dan penggalian interpretatif berdasarkan data-data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi atau bahan-bahan literatur yang relevan dengan topik dan masalah studi ini. Pendekatan penelitian kualitatif umumnya meletakkan peneliti pada pandangan fenomenologis di mana peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan keterkaitannya terhadap orang-orang dalam situasi tertentu.<sup>102</sup>

Dalam kaitan itu digunakan juga studi kasus sebagai *research strategy*, sebagaimana dijelaskan oleh Nazir bahwa studi kasus adalah penelitian yang berkenaan dengan suatu periode tertentu atau khas dari keseluruhan personalitas. Umumnya peneliti ingin mempelajari latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit-unit yang menjadi subjek.<sup>103</sup> Menurut Denzin Guba studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasikan suatu kasus.<sup>104</sup>

Yang menjadi kasus dalam penelitian ini adalah kemenangan keempat anggota DPD Jawa Barat dalam Pemilihan Umum tahun 2004. Kasus ini berkaitan

---

<sup>101</sup> Albert Wijaya dalam Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990), hlm. 66.

<sup>102</sup> Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm 9

<sup>103</sup> Mon. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) hlm 66

<sup>104</sup> Agus salim (Penyunting0, *Teori dan Paradigma sosial dari Denzin Guba dan penerapannya*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001) hlm 43

dengan latar belakang kemenangan keempat anggota DPD, faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangannya, organisasi-organisasi di luar basis organisasi pendukung serta basis daerah konstituen masing-masing kandidat.

### **Sumber Data.**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data lapangan (data primer) dan data tertulis (data sekunder).

- (1) Data lapangan, yakni data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan, melalui wawancara, yang dilakukan kepada 4 orang anggota DPD Jawa Barat terpilih. Selain itu akan digali juga informasi dari orang-orang yang terlibat dalam upaya memenangkan keempat kandidat terutama dari Tim Sukses Kandidat, yaitu Noegraha Besoes, Iwan Koswadi, Sahiri Hermawan, K.H. Yusuf Muhammad.
- (2) Data tertulis/dokumentasi, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dokumentasi dan media cetak, seperti surat kabar, majalah, risalah-risalah rapat, keputusan dan lain-lain.

### **Teknik Pengumpulan Data.**

Dalam rangka pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Sumber lain yang akan dijadikan masukan adalah bahan kepustakaan dan peraturan-peraturan serta surat keputusan, surat kabar, majalah, hasil penelitian. Teknik pengumpulan informasi dimulai dengan penetapan nara sumber atau informan. Sumber informasi dalam penelitian ini di bagi menjadi:

- a) Informan yang menjadi calon anggota DPD sebagai informan utama. Nara Sumber tersebut adalah Ginandjar Kartasmita, Mohammad Surya, Pangeran Arif Natadiningrat, Sofyan Yahya.
- b) Tim sukses masing-masing kandidat, yaitu Noegraha Besoes, Iwan Koswadi, Sahiri Hermawan, K.H. Yusuf Muhammad.
- c) Organisasi-organisasi pendukung dan sumber lain yang dipandang dapat memberikan sumbangan informasi bagi penelitian ini, yaitu Paguyuban Pasundan, PGRI Jawa Barat, PW NU Jawa Barat, Kesultanan Cirebon.

### **Analisis data**

Analisis data yang akan digunakan adalah analisis kualitatif yang dilakukan melalui multi level analisis (*multi level analysis*) dan analisis historis-holistik. Hal ini didasarkan atas tiga pertimbangan utama. *Pertama*, metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan gejala yang kompleks. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>105</sup>

Analisis terhadap data kualitatif merupakan sumber data yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Penggunaan data kualitatif diharapkan dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam

---

<sup>105</sup> Lexy j. Moleong, *Op.Cit.* hlm 4

lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat.<sup>106</sup>

Multi level analisis digunakan untuk menganalisis faktor-faktor kemenangan anggota DPD Jawa Barat pada Pemilihan Umum tahun 2004 melalui berbagai tingkatan masalah. Pada level awal dilakukan analisis terhadap keempat pemenang anggota DPD, organisasi-organisasi pendukung utama, daerah-daerah yang menjadi basis dukungan serta langkah-langkah yang dilakukan oleh kandidat dalam mempersiapkan kemenangan pemilu.

Pada level kedua akan dianalisis pengaruh kandidat dan kelompok pendukung terhadap kelompok-kelompok strategis lain, elit-elit politik dan masyarakat pemilih. Apabila pada level kedua tersebut muncul suatu masalah yang membutuhkan kajian lebih lanjut akan dianalisis pada level ketiga sampai substansi masalah penelitian dapat terungkap dan terjawab. Dalam mengungkap dan menjawab substansi masalah penelitian juga digunakan analisis longitudinal yakni dengan menelusuri secara historis elit-elit politik yang muncul di Jawa Barat dan kelompok-kelompok strategis yang berpengaruh terhadap kemunculan elit, sehingga fenomena politik yang terjadi dapat dilihat secara holistik. Dengan demikian hakikat dari faktor-faktor kemenangan anggota DPD Jawa Barat dapat ditemukan.

---

<sup>106</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis data Kualitatif*, (Jakarta: UI-Press, 1992) hlm. 1-2. Lihat juga uraian secara rinci dan jelas tentang berbagai paradigma ilmu pengetahuan, pendekatan penelitian dan perbandingan model analisis kualitatif dan kuantitatif dalam Dedy Nur Hidayat, *Metode Penelitian Kualitatif* (kumpulan Bahan kuliah), (Jakarta: PPS UI, 2003).

## **Sistematika Pembahasan**

Untuk mendeskripsikan hasil penelitian ini dilakukan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini akan membahas latar belakang masalah dari disertasi ini. Di samping itu akan dibahas pokok permasalahan, maksud dan tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kerangka teoritis, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Keterwakilan Daerah di MPR dan Peta Politik Lokal Provinsi Jawa Barat. Bab ini akan membahas dinamika keterwakilan daerah, model-model keterwakilan daerah dan peta politik lokal Provinsi Jawa Barat yang meliputi profil Jawa Barat dan kekuatan-kekuatan politik lokal. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran realitas politik di Jawa Barat sehingga dapat memberikan kejelasan dalam menganalisis kemenangan keempat anggota DPD Jawa Barat.

Bab III: Dukungan Organisasi Kemasyarakatan pada Pencalonan Anggota DPD. Dalam bab ini akan diuraikan usaha-usaha kandidat menjadikan organisasi kemasyarakatan sebagai basis dukungan politik, alasan-alasan organisasi kemasyarakatan memberikan dukungan kepada salah satu kandidat DPD, dinamika penentuan dukungan politik di tengah tarik menarik kepentingan politik dan peran yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan tersebut. Dibahas pula kepentingan politik organisasi kemasyarakatan dengan memberikan dukungan kepada salah satu kandidat DPD. Uraian ini dimaksud untuk mendapatkan

gambaran dalam menganalisis tentang usaha-usaha kandidat dalam membentuk dukungan politik dari organisasi kemasyarakatan dan memanfaatkan organisasi tersebut untuk meraih kemenangan dalam pemilu.

BAB IV : Pembentukan Tim Sukses Calon Anggota DPD Jawa Barat Pada Pemilu 2004. Bab ini akan membahas langkah-langkah yang dilakukan oleh keempat anggota DPD Jawa Barat pada pemilu 2004 yang meliputi pembentukan tim sukses. Uraian ini dibutuhkan untuk menggambarkan dan menganalisis langkah-langkah yang dilakukan oleh keempat anggota DPD dalam meraih dukungan dan simpati dari masyarakat pemilih.

BAB V: Kampanye Politik Anggota DPD Jawa Barat pada Pemilu 2004. Bab ini akan membahas secara rinci dan komprehensif tentang kampanye yang dilakukan masing-masing anggota DPD selama masa kampanye. Pembahasan ini dibutuhkan untuk menganalisis bentuk kampanye dan isu kampanye atau isu politik sehingga dapat menarik dukungan masyarakat pemilih.

BAB VI: Penutup. Dalam bab ini akan diuraikan implikasi teoritik. Uraian ini dimaksudkan untuk mengetahui implikasi akademis dari studi penelitian yang dilakukan, baik berupa penemuan varian baru dari suatu konsep teori yang sudah ada, mendukung teori, menolak teori maupun mengajukan proposisi tertentu.



## **BAB II**

### **KETERWAKILAN DAERAH DI MPR RI**

#### **DAN PETA POLITIK LOKAL PROVINSI JAWA BARAT**

Dalam bab ini akan diuraikan perubahan-perubahan keterwakilan daerah dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI sejak awal kemerdekaan sampai kepada era reformasi. Perubahan itu mulai dari nama, susunan, kedudukan dan kewenangan perwakilan daerah sehingga dapat dianalisis dengan jelas pentingnya unsur perwakilan daerah dalam sistem keparlemen Indonesia serta dapat dianalisis perkembangan lembaga legislatif Indonesia dari masa ke masa.

Selain itu, akan dibahas pula peta politik lokal Jawa Barat. Pembahasan peta politik lokal Jawa Barat diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas dan rinci terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan anggota DPD Jawa Barat sebagai fokus kajian dalam penelitian ini. Sehingga pembahasan ini dapat memberikan bahan analisis terhadap jawaban pertanyaan penelitian.

Uraian tentang keterwakilan daerah dalam MPR dan peta politik lokal Jawa Barat meliputi 3 pembahasan. *Pertama*, dinamika keterwakilan daerah di MPR. *Kedua*, model-model keterwakilan wilayah dalam parlemen. *Ketiga*, Peta Politik Lokal Provinsi Jawa Barat

#### **Dinamika Keterwakilan Daerah di MPR**

Keterwakilan atas nama daerah atau wilayah dalam parlemen Indonesia telah ada sejak awal kemerdekaan. Dilihat dari kelembagaan terbagi kepada 2 kategori yaitu: *Pertama*, keterwakilan daerah dengan lembaga (kamar) tersendiri.

Hal ini terjadi pada masa RIS tahun 1949-1950 dan DPD hasil pemilu 2004. *Kedua*, keterwakilan daerah merupakan bagian dari MPR. Hal ini terjadi sejak terbentuknya MPRS sejak tahun 1959 sampai dengan berakhirnya masa Orde Baru tahun 2004. Dengan demikian parlemen Indonesia pernah menggunakan sistem bikameral dan pernah juga menggunakan sistem unikameral.

Maswadi Rauf mengatakan bahwa dilihat dari sejarah politik Indonesia modern, lembaga negara yang khusus mewakili kepentingan daerah bukanlah sebuah ide baru karena Indonesia pernah memiliki Senat semasa Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949-1950. Senat dibentuk karena Indonesia menggunakan bentuk negara federal. Setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk kembali pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan sendirinya Senat dihapus. Namun perlu dicatat bahwa Senat praktis tidak mempunyai kesempatan yang cukup banyak untuk bekerja karena munculnya berbagai kemelut politik yang menuntut dihapuskannya RIS dan dibentuknya kembali NKRI.<sup>1</sup>

Keterwakilan daerah berawal dari rekrutmen keanggotaan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh PPKI.<sup>2</sup> KNIP dibentuk pada tanggal 29 Agustus 1945 dengan beranggotakan pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan, pemuka-pemuka masyarakat dari daerah-daerah dan bekas anggota-anggota PPKI yang tidak diangkat menjadi

---

<sup>1</sup> Maswadi Rauf, *Hasil Seminar Nasional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Penguatan Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPD RI, 2006) hlm 57-64

<sup>2</sup> Lihat Deliar Noer dan Akbarsyah, *KNIP Parlemen Indonesia 1945-1950* (Jakarta: Yayasan Risalah, 2005)

menteri atau kepala daerah.<sup>3</sup> Jumlah seluruhnya 60 orang.<sup>4</sup> KNIP merupakan lembaga parlemen sementara karena parlemen tidak bisa dibentuk melalui pemilihan umum.<sup>5</sup> Dilihat dari kedudukannya KNIP berbeda dengan MPR. KNIP hanya lembaga konsultasi atau pembantu bagi presiden tidak memiliki kewenangan-kewenangan legislatif.

Pada tahun 1949-1950 Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS). Konstitusi RIS menyebutkan bahwa lembaga legislatif RIS terdiri dari dua majelis yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.<sup>6</sup> Senat mewakili daerah-daerah bagian. Setiap daerah bagian mempunyai dua anggota Senat.<sup>7</sup> Seluruh anggota

<sup>3</sup> Kirman dan Sunu, *Pergulatan Konstitusi RI*, (Solo: Pondok Edukasi, 2002), hlm. 66. Lihat juga Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti, 1995).

<sup>4</sup> Penjelasan tentang perkembangan perwakilan dalam parlemen Indonesia dikupas tuntas dalam Bintang R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988) hlm 79-166 dan Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991) hlm 173-207

<sup>5</sup> Terbentuknya KNIP oleh PPKI pada tanggal 29 Agustus 1945 yang berfungsi sebagai pembantu Presiden dengan berdasarkan Aturan Peralihan Pasal IV UUD 1945. KNIP ditetapkan melalui Maklumat Wakil Presiden No. X, tanggal 16 Oktober 1945, sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

<sup>6</sup> Konstitusi RIS Pasal 188

1. Konstituante dibentuk dengan jalan memperbesar Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih menurut pasal 111 dan Senat baru yang ditunjuk menurut pasal 97, dengan anggota-anggota luar biasa sebanyak jumlah anggota biasa majelis itu masing-masing.

Anggota-anggota luar biasa itu dipilih ataupun ditunjuk atau diangkat dengan cara yang sama sebagai anggota biasa. Ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi anggota-anggota biasa berlaku pula bagi mereka itu.

Pemerintah mengadakan persediaan, sekedar perlu dengan mupakat dengan daerah-daerah bagian, untuk menjamin supaya anggota-anggota luar biasa Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat dipilih, diangkat ataupun ditunjuk pada waktunya.

2. Rapat gabungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, keduanya dengan jumlah anggota dua kali lipat, itulah Konstituante.

3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ialah Ketua Konstituante, Ketua Senat ialah Wakil Ketua.

4. Yang ditetapkan dalam Pasal 87, 94, ayat 3 dan 4, 95 dan 105, berlaku demikian juga bagi Konstituante.

5. Rapat-rapat Konstituante terbuka bagi umum, kecuali jika dianggap perlu oleh Ketua menutup pintu ataupun jika sekurang-kurangnya dua puluh lima anggota menuntut hal itu. Drs.H.A.K. Pringgodigdo, SH., *Tiga Undang-Undang Dasar*, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1981) hlm 25

<sup>7</sup> Dalam Konstitusi RIS Bab III Ketentuan Umum Pasal 80,81 dan Pasal 85. Pada bagian 2 Pasal 80:<sup>7</sup>

(1) Senat mewakili daerah-daerah bagian

Senat berjumlah 32 orang. Sedangkan penetapan ketua Senat oleh Presiden berdasarkan pengajuan dari anggota Senat. Dewan Perwakilan Rakyat dengan jumlah anggota 146 orang, 49 orang di antaranya dari Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta.<sup>8</sup> RIS tidak berjalan lama, pada tahun 1950 Indonesia kembali ke negara kesatuan dengan memberlakukan UUD 1950.

Dalam UUD 1950 keterwakilan daerah tidak dikenal karena lembaga legislatif yang ada adalah DPRS. DPRS berjumlah 235 orang yang terdiri dari bekas anggota DPR dan bekas Senat, anggota BP KNI dan anggota DPA.<sup>9</sup> Di antara undang-undang yang dihasilkan DPRS adalah Undang-undang Pemilu tahun 1953 untuk memilih anggota DPR dan anggota Konstituante. Konstituante bertugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru Negara Republik Indonesia.

Begitu pula keterwakilan daerah tidak diikuti sertakan dalam Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum pertama tahun 1955.<sup>10</sup> Untuk memilih

- (2) Setiap daerah bagian mempunyai dua anggota dalam Senat
  - (3) Setiap anggota Senat mengeluarkan satu suara dalam Senat.
- Pasal 81.

- (1) Anggota-anggota Senat ditunjuk oleh pemerintah daerah bagian dari daftar yang disampaikan oleh masing-masing perwakilan rakyat dan yang memuat tiga calon untuk tiap-tiap kursi.
- (2) Apabila dibutuhkan calon untuk dua kursi, maka pemerintah bersangkutan bebas untuk menggunakan sebagai satu, daftar-daftar yang disampaikan oleh perwakilan rakyat untuk kembar itu.
- (3) Dalam pada itu daerah-daerah bagian sendiri mengadakan peraturan-peraturan yang perlu untuk menunjuk anggota-anggota dalam Senat.

Pada pasal 85 ayat (1) Presiden mengangkat Ketua Senat dari anjuran yang dimajukan oleh Senat dan yang memuat sekurang-kurangnya dua orang baik dari antaranya sendiri maupun tidak.

.H.A.K. Pringgodigdo, SH., *Ibid.*, hlm 43-45

<sup>8</sup> Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hlm 190

<sup>9</sup> Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991) hlm 190-191 dan Bintang Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988) hlm 91

<sup>10</sup> Lihat Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, second edition. (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1971), Herbert Feith, *The Indonesian Election of*

anggota Konstituante, setiap 150.000 pemilih mempunyai satu wakil di Konstituante.<sup>11</sup> Anggota Konstituante berjumlah 466 orang.<sup>12</sup>

Keterlibatan kembali keterwakilan daerah di parlemen juga terjadi pasca Dekrit Presiden tahun 1959 yang membubarkan Konstituante dan membentuk MPRS. Anggota MPRS dari utusan daerah berjumlah 94 orang pada Sidang Umum I tahun 1960. Setiap daerah diwakili 3 sampai 5 orang dengan proses pemilihan dicalonkan oleh DPRD dan diputuskan oleh Presiden Soekarno.<sup>13</sup> Pada Sidang Umum II dan Sidang Umum III tahun 1963-1965 di masa Demokrasi Terpimpin jumlahnya menjadi 97 orang. Kemudian pada masa Demokrasi Pancasila tahun 1966 yakni setelah pemberontakan G 30 S/PKI dapat diatasi, dilakukan pembersihan terhadap anggota MPRS yang terlibat dalam kudeta tersebut kemudian disusun keanggotaan MPRS baru. Pada Sidang Umum I, utusan daerah bertambah menjadi 110 orang kemudian pada sidang istimewa tahun 1967 menjadi 118 orang dan pada Sidang Umum V tahun 1968 menjadi 117 orang.<sup>14</sup>

---

1955. (Ithaca: Modern Indonesia Project, 1971), dan Harold Crouch, *Militer dan Politik*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1986)

<sup>11</sup> Lihat UUD 1950 pasal 135 ayat 1. Konstituante terdiri dari sejumlah Anggota yang besarnya ditetapkan berdasarkan atas perhitungan setiap 150.000 jiwa penduduk warga-negara Indonesia mempunyai seorang wakil. H.A.K. Pringgodigdo, SH., *Op.Cit.*, hlm 26

<sup>12</sup> Jumlah anggota Konstituante menurut Bintang Saragih berjumlah 466 dalam buku *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988), menurut Adnan Buyung Nasution 514 yang dari partai politik dalam buku *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, *Op. Cit.*, hlm. 28-33

<sup>13</sup> Lihat Daniel S. Lev, *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957-1959* (Ithaca: modern Indonesian Project, 1966), Adnan Buyung Nasution, *Op. Cit.*, Joenarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1966), dan Padmo Wahjono, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).

<sup>14</sup> Lihat Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hlm 202-205

Keterwakilan daerah lebih berkembang lagi pada era Orde Baru dengan membentuk fraksi tersendiri yaitu Fraksi Utusan Daerah (FUD). Pada waktu pemilu 1971 jumlah anggota utusan daerah berjumlah 130 orang. Pada pemilu 1977 dan Pemilu 1982 jumlah anggota utusan daerah berjumlah 140 orang mewakili 27 provinsi. Setiap provinsi diwakili 4 orang sampai 7 orang utusan daerah dengan dasar perhitungan untuk setiap Daerah Tingkat I yang berpenduduk:

- (a) kurang dari 1 juta orang mendapat 4 orang utusan daerah;
- (b) 1 juta orang sampai 5 juta orang mendapat 5 orang utusan daerah,
- (c) 5 juta orang sampai 10 juta orang mendapat 6 orang utusan daerah,
- (d) 10 juta orang ke atas mendapat 7 orang utusan daerah

Pada pemilu 1987 sampai pemilu 1999 jumlah anggota utusan daerah bertambah menjadi 147 orang dengan dasar perhitungan yang sama seperti di atas ditambah dengan poin (d) penduduk 10 juta sampai 15 juta mendapat wakil 7 orang utusan dan (e) 15 juta ke atas mendapat wakil 8 orang utusan. Proses pengisian anggota MPR dari utusan daerah adalah DPRD I mengadakan pemilihan anggota MPR untuk utusan daerah kemudian hasil pemilihan tersebut ditetapkan oleh Presiden. Utusan daerah tersebut termasuk Gubernur/KDH. Hal ini berlangsung mulai tahun 1969 sampai dengan jatuhnya rezim Orde Baru tahun 1998 bahkan sampai pada masa awal era reformasi yakni anggota MPR hasil pemilu tahun 1999.

Berakhirnya Orde Baru pada awalnya menguatkan keberadaan utusan daerah dengan munculnya Undang-undang nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan

dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD. Fraksi Utusan Daerah berjumlah 135 orang dari 27 provinsi. Setiap provinsi diwakili 5 orang utusan daerah. Proses pengisiannya dipilih oleh DPRD I. Gubernur tidak lagi secara langsung menjadi utusan daerah. Pada sidang umum MPR tahun 1999 anggota Fraksi Utusan Daerah (FUD) dimasukkan kepada partai-partai asalnya tetapi pada tahun 2001 FUD kembali diakui MPR.

Pada tahun 2002 terjadi amandemen UUD 1945 yang mengubah struktur lembaga negara di mana unsur perwakilan daerah diwadahi dalam lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bersama anggota DPR merupakan bagian dari MPR. Dalam perdebatan di rapat-rapat Komisi Konstitusi terdapat tiga alasan yang menyebabkan perlunya penyesuaian terhadap susunan, kedudukan, dan kekuasaan MPR menjadi suatu lembaga perwakilan rakyat dengan dua kamar (bikameral) yaitu:

- 1) Kebutuhan dalam pembenahan sistem ketatanegaraan sehubungan dengan berbagai permasalahan dalam sistem MPR yang lama. Anggota MPR yang bukan anggota DPR – yaitu utusan daerah dan utusan golongan – tidak berfungsi efektif dan tidak jelas orientasinya untuk mewakili rakyat daerah dan golongan. MPR mempunyai kekuasaan yang rancu dalam sistem presidensial karena dapat menjatuhkan presiden dengan mekanisme sidang istimewa.
- 2) Kebutuhan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat daerah secara struktural. Dengan adanya dewan yang secara khusus merepresentasikan wilayah-wilayah, maka diharapkan kepentingan masyarakat di daerah akan dapat diakomodasikan melalui institusi formal di tingkat nasional.
- 3) Kebutuhan bagi reformasi Indonesia saat ini untuk memulai menerapkan sistem *checks and balances* dalam rangka memperbaiki kehidupan ketatanegaraan dan mendorong demokratisasi. Dengan adanya lembaga perwakilan rakyat dengan dua kamar, maka

diharapkan lembaga ini akan mampu menjalankan fungsi legislasi dan fungsi kontrolnya dengan lebih baik.<sup>15</sup>

Dengan demikian, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) paling tidak menggambarkan dua hal yaitu: *Pertama*, sistem pemerintahan semakin demokratis karena sebelumnya aspirasi daerah diperjuangkan oleh utusan daerah di MPR yang keanggotaannya diangkat oleh Presiden bukan melalui proses pemilihan umum. Keanggotaan DPD dipilih oleh rakyat di daerah yang diwakilinya melalui pemilu sehingga anggota DPD merupakan representasi dari rakyat daerah provinsi yang diwakilinya. *Kedua*, kewenangan DPD dibanding dengan FUD lebih luas dan rinci yaitu di bidang legislasi, bidang pengawasan dan bidang anggaran.

Dengan demikian proses pemilihan perwakilan daerah tidak lagi melalui DPRD tetapi melalui pemilihan umum langsung yang dilakukan pertama kali pada tahun 2004. Jumlah anggota tiap provinsi ditetapkan sama sebanyak 4 orang dan ditetapkan pula bahwa jumlah keseluruhan anggota DPD tidak boleh lebih dari sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ) anggota MPR.<sup>16</sup> Calon anggota DPD harus independen dan berasal dari daerah/ provinsi yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Secara konseptual, ketentuan UUD 1945 yang mengatur keberadaan DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia itu antara lain dimaksudkan untuk :

1. Memperkuat ikatan-ikatan daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan daerah-daerah.

---

<sup>15</sup> Lihat Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2004) hlm 135-143.

<sup>16</sup> Lihat UU Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 33 ayat 2

<sup>17</sup> Lihat UU Pemilu Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 63

2. Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijaksanaan nasional berkaitan dengan negara dan daerah-daerah.
3. Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut bahwa pembentukan DPD sebagai lembaga untuk mewadahi keterwakilan daerah di parlemem Indonesia dapat dilihat dari berbagai alasan paling tidak 4 alasan yakni: *Pertama*, pasca Orde Baru terjadi uporia demokratisasi sehingga muncul aspirasi bahwa seluruh keanggotaan MPR harus dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Hal ini menghilangkan anggota MPR yang diangkat karena mengandung unsur ketidakadilan politik. *Kedua*, adanya Fraksi Utusan Daerah tidak memberikan kepuasan politik bagi aspirasi daerah bahkan banyak anggota FUD yang tidak memiliki hubungan kedaerahan di provinsi yang bersangkutan. *Ketiga*, adanya gagasan membentuk lembaga pembanding di parlemen sehingga MPR terdiri dari dua kamar (dari sistem unikameral menjadi sistem bikameral). *Keempat*, munculnya kelompok-kelompok independen yang menginginkan berkiprah di legislatif tanpa melalui partai politik. Oleh karenanya, muncul anggota independen.

Dengan alasan-alasan tersebut terbentuklah lembaga perwakilan daerah yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan kamar tersendiri dan memiliki kewenangan tersendiri pula. Anggota DPD<sup>18</sup> merupakan representasi daerah yang

---

<sup>18</sup> Lihat Tim Sekjen MPR, *Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR. 2003), Tim Hukum DPR RI, *Ruang Lingkup dan Mekanisme Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah* (Jakarta: Setjen DPR RI, 2004)

dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.<sup>19</sup> Setiap provinsi jumlahnya sama 4 orang.<sup>20</sup> Anggota DPD merupakan peserta pemilu perseorangan.<sup>21</sup> Seorang calon anggota DPD disyaratkan bukan pengurus partai politik<sup>22</sup> sekurang-kurangnya 4 tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon sehingga lebih mencerminkan netralitas dan personifikasi individual.

Selain itu, seorang calon anggota DPD harus memiliki syarat dukungan dari masyarakat sesuai dengan jumlah penduduk suatu provinsi. Provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000 orang, seorang calon anggota DPD harus mendapatkan dukungan minimal 1.000 orang pemilih. Provinsi yang berpenduduk 1.000.000 orang sampai dengan 5.000.000 orang syarat minimal dukungan 2.000 orang. Provinsi yang berpenduduk 5.000.000 orang sampai dengan 10.000.000 orang syarat minimal dukungan 3.000 orang. Provinsi yang berpenduduk 10.000.000 orang sampai dengan 15.000.000 orang syarat minimal dukungan 4.000 orang dan provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 orang, seorang calon anggota DPD harus memperoleh dukungan minimal 5.000 orang. Dukungan tersebut dibuktikan dengan tanda tangan dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya. Selain itu, dukungan harus tersebar minimal 25% dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Lihat UUD 1945 Pasal 22C.

<sup>20</sup> Lihat UU Pemilu No. 12 Tahun 2003 Pasal 52

<sup>21</sup> Lihat UUD 1945 Pasal 22E ayat 4.

<sup>22</sup> Lihat UU Pemilu Nomor 12 tahun 2003 Pasal 63 ayat b, dan lihat juga persyaratan lain calon anggota DPD dalam Pasal 60.

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 11

Sedangkan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak atau ranking tertinggi dari hasil pemilu.<sup>24</sup> Apabila terdapat suara yang sama ditetapkan suara yang lebih merata di seluruh kabupaten/kota. KPU menetapkan anggota DPD terpilih.

Kewenangan DPD sebagai perwakilan wilayah di tingkat nasional di antaranya berkaitan dengan persoalan kedaerahan yang meliputi 5 kewenangan<sup>25</sup> yaitu: *pertama*, DPD dapat mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan perimbangan keuangan pusat dan daerah.<sup>26</sup> *Kedua*, DPD ikut membahas bersama DPR atas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diajukan oleh pemerintah atau hak inisiatif DPR.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Pasal 109 menyebutkan:

- (1) Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di provinsi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perolehan suara calon terpilih keempat terdapat jumlah suara yang sama, maka calon yang memperoleh dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya diseluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (3) Tata cara pelaksanaan penetapan calon terpilih anggota DPD ditetapkan oleh KPU

<sup>25</sup> Lihat Pasal 22D UUD 1945 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD

<sup>26</sup> Lihat Pasal 42 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD

<sup>27</sup> *Ibid*, Pasal 43

*Ketiga*, DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.<sup>28</sup> *Keempat*, DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.<sup>29</sup> *Kelima*, DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama.<sup>30</sup>

Pengawasan yang dapat dilakukan oleh DPD antara lain: (a) menerima dan membahas hasil-hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK sebagai bahan untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu; (b) meminta secara tertulis kepada Pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang tertentu; (c) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang tertentu; dan (d) mengadakan kunjungan kerja ke daerah untuk melakukan monitoring/pemantauan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.<sup>31</sup>

Selain DPD memiliki kewenangan, DPD juga memiliki hak yang diatur dengan undang-undang. Hak tersebut terdiri dari hak kelembagaan DPD dan hak anggota DPD.<sup>32</sup> Hak DPD sesuai dengan kewenangan DPD sebagaimana disebutkan di atas. Sedangkan hak sebagai anggota DPD adalah (a)

---

<sup>28</sup> *Ibid*, Pasal 44

<sup>29</sup> *Ibid*, Pasal 45

<sup>30</sup> *Ibid*, Pasal 46

<sup>31</sup> *Ibid*, penjelasan Pasal 46 ayat (2)

<sup>32</sup> *Ibid*, Pasal 48 dan Pasal 49

menyampaikan usul dan pendapat.<sup>33</sup> (b) memilih dan dipilih; (c) membela diri; (d) imunitas.<sup>34</sup> (e) protokoler,<sup>35</sup> dan (f) keuangan dan administratif.

DPD dilengkapi juga dengan alat kelengkapan DPD yang bertujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas DPD.<sup>36</sup> Alat kelengkapan DPD terdiri dari enam alat kelengkapan yaitu: *Pertama*, Panitia Ad Hoc (PAH). *Kedua*, Badan Kehormatan DPD. *Ketiga*, panitia musyawarah. *Keempat*, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU). *Kelima*, Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) dan *Keenam*, Panitia Kerjasama Antar-Lembaga (PKA-L) Perwakilan. Perkembangan keterwakilan daerah di parlemen Indonesia mulai dari awal kemerdekaan sampai hasil amandemen UUD 1945 keempat dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Hak anggota DPD untuk mendapatkan keleluasaan menyampaikan suatu usul dan pendapat baik kepada pemerintah maupun kepada DPD sendiri sehingga ada jaminan kemandirian sesuai dengan panggilan hati nurani serta kredibilitasnya. Oleh karena itu setiap anggota DPD tidak dapat diarahkan oleh siapapun di dalam proses pengambilan keputusan, namun demikian tata cara penyampaian usul dan pendapat dimaksud tetap dengan memperhatikan tatakrama, etika, dan moral serta sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat. Lihat penjelasan Pasal 49 huruf a UU No. 22 Tahun 2003.

<sup>34</sup> Hak imunitas atau hak kekebalan hukum anggota DPD adalah hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPD dengan pemerintah dan rapat-rapat DPD lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lihat penjelasan Pasal 49 huruf d UU No. 22 Tahun 2003.

<sup>35</sup> Yang dimaksud dengan hak protokoler adalah hak anggota DPD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya. Lihat penjelasan Pasal 49 huruf e UU No. 22 Tahun 2003.

<sup>36</sup> Lihat Pasal 98 ayat 3 Undang-Undang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD Nomor. 22 Tahun 2003

<sup>37</sup> T.A. Legowo, dkk., *Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia Studi Dan Analisis Sebelum Dan Setelah Perubahan UUD 1945 (Kritik, Masalah, dan Solusi)*, (Jakarta: Formappi dan AusAID, 2005) hlm 130-131

**Tabel 3**  
**Sejarah Perwakilan Daerah**

<b>Periode</b>	<b>Bentuk Negara</b>	<b>Nama Badan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
Pasca kemerdekaan (1945-1949)	Republik	Badan Pekerja Komite Nasional	25 orang : 17 orang dipilih sidang, 8 orang dipilih dari daerah	Anggota dari daerah inilah merupakan cikal bakal terbentuknya unsur daerah dalam lembaga negara.
RIS (1949)	Republik Indonesia Serikat (RIS)	Senat	Setiap daerah bagian diwakili 2 orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan konstitusi UUD RIS di mana susunan lembaga-lembaga negara berubah</li> <li>• Anggota Senat ditunjuk oleh Pemerintah Daerah bagian</li> <li>• Salah satu syarat telah berusia 30 tahun ke atas.</li> </ul>
UUDS (1950)	Kesatuan	Dihapuskan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsekuensi digunakan UUDS – yang disahkan Presiden Soekarno tahun 1950 – struktur kelembagaan berubah.</li> <li>• Lembaga legislatif hanya DPR</li> <li>• Senat di hapus karena tidak ada daerah-daerah bagian dalam negara kesatuan.</li> </ul>
Pasca Dekrit Presiden (1959-1969)	Republik	Utusan Daerah	94 orang (PP No 150/159)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur kelembagaan negara mengikuti UUD 1945 (Dekrit 5 Juli 1959)</li> <li>• Dibentuk MPRS (Sebelum MPR) terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan.</li> <li>• Setiap daerah diwakili 3-5 orang di mana pencalonan dilakukan oleh DPRD dan diputuskan oleh Presiden Soekarno</li> </ul>
Orde Baru (1969-1999)	Republik	Utusan Daerah	131 orang (27 provinsi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai dengan UU No 16/1969 mekanisme pemilihan anggota berubah</li> <li>• UD di MPR terdiri dari Gubernur dan anggota lain yang dipilih oleh anggota DPRD melalui pemilihan</li> </ul>

				<p>yang sangat ketat (<i>Litsus</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebagian besar berasal dari Golkar karena mayoritas DPRD telah dikuasai Golkar.</li> <li>• Setiap provinsi ditetapkan 4-7 orang</li> <li>• Di MPR perwakilan daerah ditambah di Fraksi Utusan Daerah (F-UD)</li> </ul>
Reformasi (1999-2004)	Republik	Utusan Daerah	135 orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berakhirnya Orde Baru menguatkan keberadaan utusan daerah (UU No 4/1999 tentang susduk MPR, DPR, DPRD)</li> <li>• Penentuan anggota lewat proses pemilihan DPRD (tanpa intervensi penguasa lagi)</li> <li>• Setiap provinsi mengirim 5 anggota (seluruh anggota MPR 700 orang)</li> <li>• SU MPR 1999 menghapuskan F-UD, anggota UD dimasukkan kepada parta-partai asalnya</li> <li>• ST MPR 2001 F-UD kembali diakui MPR</li> </ul>
Amandemen UUD 1945 (sejak 2004)	Republik	Menuju Dewan Perwakilan Daerah	Setiap provinsi diwakili 4 orang (berjumlah 128 orang dari 32 provinsi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Amandemen UUD 1945 selesai tahun 2002 yang mengubah struktur lembaga negara</li> <li>• Unsur perwakilan daerah diwadahi dalam Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bersama DPR merupakan bagian dari MPR</li> <li>• Proses pemilihan tidak lagi melalui DPRD tapi melalui Pemilu 2004 dan dipilih langsung oleh rakyat</li> <li>• Namun fungsinya tidak sekuat DPR (terutama dalam legislasi)</li> <li>• Jumlah keseluruhan anggota tidak boleh dari sepertiga anggota MPR</li> <li>• Calon anggota harus independen</li> </ul>



### **Model-Model Keterwakilan Wilayah dalam Parlemen**

Sistem perwakilan dalam parlemen merupakan bagian dari perkembangan demokrasi yang semula berbentuk demokrasi langsung kemudian berkembang menjadi demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Perkembangan ini tidak merubah makna dari demokrasi itu sendiri karena rakyat tetap terlibat dalam pengambilan keputusan politik walaupun bersifat perwakilan yakni dengan memberikan kekuasaan politik pada wakilnya. David Held menyatakan bahwa dalam alam demokrasi sejak dulu (klasik) sampai modern keterlibatan rakyat menjadi satu hal yang mutlak.<sup>38</sup>

Demokrasi perwakilan ini seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin banyak dan kompleks sebagaimana dikatakan Thomas Mayer bahwa Sistem perwakilan merupakan perkembangan dari sistem demokrasi langsung ke demokrasi tidak langsung. Alasan mengapa diperlukan mekanisme perwakilan adalah karena pertimbangan efisiensi yaitu, karena banyaknya jumlah penduduk dan luasnya wilayah geografis yang tidak mudah dijangkau. Dalam demokrasi perwakilan mempercayakan sepenuhnya pengambilan keputusan di tingkat parlemen oleh wakil-wakil yang dipilih.<sup>39</sup>

Dalam sistem keparlemenan di dunia, dikenal dua istilah yang biasa digunakan oleh negara-negara demokrasi yaitu unikameral dan bikameral. Unikameral adalah sistem parlemen satu kamar sedangkan bikameral adalah

---

<sup>38</sup> David Held, *Models of Democracy, Second Edition*, (California: Stanford University Press, 1996). Dalam buku tersebut Held menyebut terdapat 9 (sembilan) model demokrasi yang kesemuanya menunjukkan bahwa terdapat keterlibatan atau partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan khususnya melalui lembaga perwakilan.

<sup>39</sup> Thomas Meyer, *Demokrasi, Sebuah Pengantar Untuk Penerapan*, (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2002) hlm. 13.

sistem parlemen dua kamar.<sup>40</sup> Dari kedua sistem tersebut terdapat beberapa perbedaan substansial meskipun di antara keduanya tidak lebih baik dari yang lain. Pilihan penggunaan satu sistem sangat tergantung kepada kondisi dari masing-masing negara. Tetapi, memang terdapat kelebihan dan kelemahan dari dua sistem tersebut. Pada intinya, kedua sistem tersebut merupakan sistem perwakilan tidak langsung dari rakyat. Ada yang mewakili orang dan ada yang mewakili ruang. Bikameralisme adalah sebuah desain lembaga atau institusi dalam bentuk dua majelis dalam lembaga perwakilan.<sup>41</sup>

Sistem bikameralisme merupakan salah satu dari klasifikasi sistem keparlemenan yang ada di dunia. Seperti yang dikemukakan Arend Lijphart dalam bukunya *Patterns of Democracy* bahwa bikameralisme merupakan sebuah dikotomi dari kategori sistem keparlemenan di dunia yang ditandai oleh adanya dua kamar (*chambers*) yang memiliki nama masing-masing. Kamar pertama atau biasa disebut *lower house* biasanya selalu lebih penting dari kamar kedua (*upper house*).<sup>42</sup>

Selanjutnya, Lijphart menyatakan bahwa terdapat kecenderungan dari bikameralisme ini. Secara original, fungsi yang paling penting dari kamar kedua atau *upper house* yang dipilih dari basis terbatas adalah melayani sikap

---

<sup>40</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 180.

<sup>41</sup> Samuel C. Patterson and Anthony Mughan, *Senates, Bicameralism in The Contemporary World*, (Columbus: Ohio State University Press, 1999), hlm. 1

<sup>42</sup> Arend Lijphart, *Patterns of Democracy, Government Forms and Performance in Thirty-six Countries*, (New Haven and London : Yale University Press, 1999), hlm. 201.

konservatif yaitu agresifitas dari kamar pertama yang biasanya anggotanya dipilih secara lebih demokratis.<sup>43</sup> Secara kategoris, Lijphart membagi ke dalam tiga kecenderungan bikameralisme yaitu:

*Pertama*, kamar kedua memiliki kecenderungan menjadi lebih kecil daripada kamar pertama. Meskipun dalam kasus Inggris *House of Lord* memiliki lebih dari 1000 anggota tetapi tidak lebih kuat dalam hal legislasi dibandingkan dengan *House of Commons*. Dalam hal ini terdapat beberapa kategori seperti yang dikemukakan Patterson dan Mughan bahwa ada negara yang kamar keduanya memiliki anggota dengan kisaran antara 100 hingga 200, ada yang memiliki anggota lebih dari 200.

*Kedua*, Periode keanggotaan dari kamar kedua biasanya lebih panjang dibandingkan dengan kamar pertama. Kamar pertama biasanya memiliki periode mulai dari dua hingga 5 tahun sementara kamar kedua periodenya berkisar antara 4 hingga 9 tahun (tetapi di Inggris dan Kanada keanggotaannya seumur hidup), sementara di Rusia dan Jerman periode keanggotaannya tidak pasti (*indefinite*) tetapi tidak juga seumur hidup.

*Ketiga*, ciri umum dari kamar kedua ini adalah pemilihan atau seleksi anggotanya yang tidak lebih demokratis atau terkesan membingungkan karena basisnya tidak berdasarkan *popularly elected* tetapi lebih kepada perwakilan kepentingan baik sosial, ekonomi maupun teritori.

Selain terdapatnya kecenderungan dalam sistem bikameralisme, Lijphart juga menegaskan bahwa terdapat dua model utama dari

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

bikameralisme yaitu: (1) Bikameralisme kuat (*strong bicameralisme*); dan (2) Bikameralisme lunak (*weak bicameralisme*). Aspek pertama dari bikameralisme adalah kekuasaan formal berdasarkan konstitusi yang dimiliki dua kamar tersebut. Pola umum adalah bahwa kamar kedua cenderung menjadi subordinat dari kamar pertama. Jika ada Rancangan Undang-undang yang berasal dari kamar kedua biasanya dapat diatasi (*overridden*) oleh kamar pertama dan dalam sistem keparlemenan seperti ini, kabinet bertanggungjawab kepada kamar pertama. Selanjutnya, secara faktual politik, kamar kedua memiliki seleksi keanggotaan yang berbeda dengan kamar pertama. Jadi, tidak hanya bergantung kepada kekuasaan formal yang dimiliki tetapi juga model seleksinya. Semua kamar pertama memiliki keanggotaan yang dipilih langsung oleh pemilih tetapi anggota sebagian besar kamar kedua di dunia dipilih secara tidak langsung (biasanya oleh legislatif daerah) atau juga berdasarkan keturunan atau kelompok masyarakat tertentu, sebagian lagi diangkat atau ditunjuk. Oleh karena itu, kamar kedua tidak menjadi lebih demokratis legitimasinya dibanding kamar pertama.<sup>44</sup>

Secara historis, sistem keparlemenan bikameral sangat berakar kepada sejarah masa lalu di mana terjadi stratifikasi masyarakat khususnya kelas atas pada masa abad pertengahan dan ini merefleksikan dari adanya semangat bersama masyarakat abad pertengahan. Kondisi ini berkembang di Inggris Raya di mana banyak kaum bangsawan, tuan tanah serta para pendeta yang dalam

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 26

perkembangan demokrasi di Inggris memiliki peran penting dalam proses berakhirnya abad kegelapan.<sup>45</sup>

Dalam teori umum, Patterson dan Mughan menyebutkan bahwa terdapat dua fungsi utama yang dijalankan oleh kamar kedua (*second chambers*) atau juga *upper house* atau di banyak negara disebut Senat dan nama lain. Kamar kedua dianggap dapat memungkinkan adanya differensiasi politik dan mereka menyediakan adanya wewenang untuk memberikan pendapat dalam pembuatan kebijakan yang memungkinkan mencegah kesalahan, menunda tindakan hingga adanya alternatif yang memuaskan atau menunda keputusan hingga pihak-pihak yang terlibat mencapai konsensus. Sehingga dengan demikian, teori bikameralisme menggaris bawahi dua aspek yaitu perwakilan (*representation*) maupun kewenangan untuk memberikan opini (*redundancy*).

Dalam sistem parlemen dua kamar terdapat sebuah tuntutan bagi adanya keterwakilan. Menurut Patterson dan Mughan secara teoritis satu kamar disusun berdasarkan anggota yang dipilih secara populer yakni mewakili warga negara secara langsung. Kamar yang lain dengan basis perwakilan yang berbeda yakni, dapat memberikan suara kepada kepentingan kelas-kelas sosial, kepentingan ekonomi atau perbedaan teritorial. Basis paling umum secara konstitusional bagi adanya Senat atau kamar kedua adalah menyediakan keterwakilan berdasar teritorial.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Anthony Mughan and Samuel Patterson, *Op.Cit*, hal. 2.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm 9

Secara umum, sistem federal adalah sistem yang paling kondusif untuk penerapan bikameralisme. Senat bertindak sebagai lembaga perwakilan federal (*federal house*) yang memiliki anggota terpilih yang mewakili negara bagian atau provinsi. Sementara untuk negara kesatuan (*unitary nations*) memiliki kecenderungan menerapkan sistem parlemen unikameral. Tetapi hal tersebut bukan berarti bahwa pertimbangan teritorial tidak direfleksikan dalam struktur parlemen di negara kesatuan.<sup>47</sup> Contoh negara kesatuan yang menggunakan sistem bikameral adalah Perancis dan Italia.

Menurut Miriam Budiarjo, Negara Kesatuan yang memakai sistem dua kamar (majelis) biasanya terdorong oleh pertimbangan bahwa satu majelis dapat mengimbangi dan membatasi kekuasaan dari majelis lain. Dikhawatirkan bahwa sistem satu kamar memberi peluang untuk menyalahgunakan kekuasaan oleh karena mudah dipengaruhi oleh situasi politik.<sup>48</sup> Majelis atau kamar kedua memiliki wewenang kurang daripada majelis atau kamar pertama.

Fokus selanjutnya dalam teori bikameralisme yang dikemukakan Patterson dan Mughan adalah *redundancy*. Nilai *redundancy* diartikan sebagai keikutsertaan *upper house* untuk memberikan pendapat (*second opinion*) dalam formulasi kebijakan yang dibuat oleh parlemen. Contoh negara yang memiliki Senat dengan fungsi seimbang dalam hal *redundancy* adalah Amerika Serikat dan Italia karena undang-undang harus disetujui oleh dua kamar yang ada. Tetapi di Inggris berbeda keadaannya karena *House of Lords* lebih sebagai subordinasi dari *House of Commons*. *House of Lords* hanya diberdayakan dalam

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm 10

<sup>48</sup> Miriam, *Op.Cit.*, hlm 180

hal revisi, memberikan pertimbangan kembali, atau menunda sebuah peraturan perundangan dan sebaliknya aturan konstitusional yang dibuat *upper house* dapat ditolak atau dikesampingkan oleh *lower house*.<sup>49</sup>

Dalam pembahasan tentang perlunya kehadiran kamar kedua, seorang ahli yang juga pernah menjabat sebagai ketua komisi tentang status *upper house* di Inggris, Lord Bryce menyatakan bahwa "keuntungan dari pembagian lembaga perwakilan ke dalam dua cabang adalah bahwa salah satu dapat mengawasi ketergesa-gesaan dan mengoreksi kesalahan dari lembaga yang lainnya".<sup>50</sup> Sehingga tercipta mekanisme pengawasan dari satu cabang parlemen (*upper* atau *lower*) atas yang lain. Adanya keikutsertaan kamar kedua (*second chamber* atau *upper house*) untuk memberikan pendapat (*second opinion*) yang terdapat dalam sistem bikameralisme didasarkan atas berbagai pertimbangan. Pertimbangan utama didasarkan atas adanya sebuah peran revisi yang dilakukan oleh *upper house*. Kamar kedua ini berperan memberikan kontribusi kepada performance legislatif melalui kapasitasnya untuk mereview dan merevisi. Dalam kaitan ini, *upper house* dapat mengoreksi kesalahan dalam pembuatan undang-undang yang dibuat oleh *lower house* atau DPR, memberikan pemikiran tentang aturan-aturan hukum dan mengawasi pengaruh dari kelompok-kelompok kepentingan.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm 12

<sup>50</sup> Sebagaimana dikutip Patterson dan Mughan, *Op.Cit.*, hlm 13

Pertimbangan lain adalah adanya keinginan untuk mengurangi agresifitas DPR (*lower*) dalam hal isu-isu kebijakan terkini. Selain itu, pertimbangan yang tidak kalah pentingnya adalah pentingnya kamar kedua untuk mencegah korupsi atau perebutan kekuasaan oleh lembaga lain baik oleh eksekutif atau oleh kepentingan khusus. Dalam pengalaman Amerika Serikat, kehadiran Senat sebagai kamar kedua dalam sistem bikameralisme diarahkan untuk mendinginkan situasi dari adanya kekhawatiran dalam praktek sistem keparlemenan tunggal yang cenderung menimbulkan *oligarki* kekuasaan. Kondisi ini disadari oleh para ahli terkesan menimbulkan intervensi dari lembaga *upper* dalam hal hubungan normal dari tanggung jawab politik dengan *lower*, lembaga demokratis lainnya serta eksekutif. Tetapi hal tersebut merupakan konsekuensi dari upaya menciptakan mekanisme *checks and balances* antar lembaga.

Perkembangan demokrasi modern memang menunjukkan adanya kebutuhan hadirnya lembaga-lembaga politik yang menjalankan proses demokrasi itu sendiri. Jika pada masa Romawi belum ada lembaga semacam parlemen nasional yang terdiri dari wakil-wakil yang dipilih, maka pada masa modern itu kehadiran lembaga perwakilan menjadi sebuah syarat. Dahl menyebut bahwa dalam sistem demokrasi ada tiga buah lembaga politik yang mendasar yaitu: sebuah parlemen nasional yang terdiri dari para wakil yang dipilih dan pemerintahan setempat yang juga dipilih oleh rakyat yang pada akhirnya tunduk kepada pemerintahan nasional.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Robert Dahl, *Perihal Demokrasi*, ( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm 24

Salah seorang pemikir politik masa lalu yang kemudian dikenal dengan teori Trias Politica-nya, Montesquieu dalam *L'esprit des Lois*, menegaskan bahwa diperlukan lembaga-lembaga yang secara terpisah menjalankan fungsi tertentu. Ahli Perancis ini menyebutkan bahwa prinsip pemisahan kekuasaan tersebut adalah untuk menjamin kebebasan atau *liberty* rakyat tetapi dijalankan oleh lembaga-lembaga yang kompeten.<sup>52</sup>

Lembaga perwakilan atau legislatif memiliki fungsi utama membuat undang-undang, Montesquieu menyebut ada dua lembaga (*house*). Yang pertama adalah untuk menampung perwakilan rakyat secara umum dan kedua untuk menampung orang-orang terhormat seperti karena keturunan, status sosial atau kekayaan mereka. Di antara dua lembaga ini masing-masing dapat saling mengoreksi. Lembaga yang berisi perwakilan rakyat dapat mengoreksi kesalahan atau menentang kesalahan yang dibuat para kaum terhormat, sebaliknya lembaga yang berisi orang terhormat mempunyai hak untuk mengawasi kesalahan yang dilakukan rakyat. Penjelasan Montesquieu tentang hal ini dipengaruhi oleh pengalaman Inggris yang memiliki *House of Lords* dan *House of Commons*.

Perkembangan munculnya lembaga perwakilan sebagai sebuah refleksi pelaksanaan demokrasi banyak terdapat di negara-negara Barat (Eropa). Para ahli seperti Robert Dahl mengawali pembahasannya tentang lembaga perwakilan tersebut dengan menceritakan berbagai praktek di Eropa. Dahl menyebut bangsa Viking misalnya yang merupakan nenek moyangnya sendiri melakukan praktek

---

<sup>52</sup> Lee Cameron Mc Donald, *Western Political Theory, Part 2 From Machiavelli To Burke*, (Pamona College, 1962), hlm 377-379.

demokrasi perwakilan dengan membentuk sebuah Dewan setempat yang bersidang untuk membicarakan hukum yang disebut *Ting*. Praktek ini berkembang sekitar tahun 500 Masehi hingga 1000 Masehi.<sup>53</sup> *Ting* secara khusus diadakan di lapangan terbuka dan ditandai oleh batu tegak yang besar. Dalam pertemuan *Ting* itu, orang-orang yang merdeka ini menyelesaikan perselisihan antar mereka, mendiskusikan hukum, menerimanya atau menolaknya; menyetujui atau menolak perubahan agama dan bahkan juga memilih dan menyetujui seorang raja yang biasanya diminta bersumpah untuk setia kepada hukum yang telah disetujui *Ting*.

Selanjutnya, keberadaan dewan setempat atau *Ting* dalam bangsa Viking berkembang dan dipertahankan dalam waktu lama ketika bangsa ini melakukan ekspansi ke negara tetangga seperti Islandia. Perkembangannya adalah munculnya parlemen nasional di kemudian hari yang pada tahun 930 M mereka telah menciptakan semacam *Ting* tingkat tinggi yaitu, *Alting* atau Majelis Nasional yang tetap merupakan sumber hukum Islandia untuk jangka waktu tiga abad lamanya. Perkembangan ini mempengaruhi berubahnya majelis-majelis lokal menjadi majelis nasional

Sebagaimana diketahui, perkembangan selanjutnya menampakkan adanya parlemen perwakilan secara berangsur-angsur khususnya di Eropa. Ini dapat terlihat dalam sejarah parlemen Inggris masa abad pertengahan. Awalnya parlemen yang ada di Inggris berasal dari majelis yang diundang untuk

---

<sup>53</sup> Robert Dahl, *Op.Cit*, hlm 25-27

bersidang sewaktu-waktu saja jika situasi menghendakinya di masa pemerintahan Edward I dari tahun 1272 sampai 1307.

Perkembangan mutakhir kehadiran parlemen di negara Eropa (Barat) berlaku pada abad 18 di mana sistem konstitusional menemukan tempatnya. Di Inggris, raja dan parlemen masing-masing telah dibatasi oleh kekuasaan yang lain. Di dalam parlemen kekuasaan kaum aristokrat yang turun temurun dalam Dewan para *Lord (House of Lords)* telah diimbangi oleh kekuasaan rakyat dalam Dewan Rakyat (*House of Commons*). Sedangkan undang-undang yang dibuat raja dan parlemen ditafsirkan oleh hakim-hakim yang pada umumnya walaupun tidak selalu bebas baik dari raja maupun parlemen.

Sistem saling mengimbangi antar kekuasaan ini dikenal sebagai sistem *checks and balances* menjadi sebuah kekuatan sosial terpenting di negeri Inggris tersebut. Model Inggris mengilhami para perumus konstitusi Amerika Serikat untuk menciptakan sebuah republik dengan aspek-aspek terbaik dari sistem Inggris. Seperti diketahui bahwa bangsa Amerika merupakan kaum imigran dari Inggris yang merasa tidak dapat menikmati sistem kerajaan yang memiliki aspek-aspek buruk. Tetapi diakui bahwa Inggris memberikan pelajaran berharga tentang perimbangan kekuasaan meskipun konstitusinya tidak tertulis dengan raja atau ratu sebagai sentralnya.

Dalam sejarah munculnya lembaga parlemen moderen di dunia, Inggris memang merupakan negara yang dianggap sebagai negara awal yang menciptakannya. Parlemen dalam bentuknya sekarang bermula di Inggris di penghujung abad ke-12 dengan munculnya *Magnum Concilium* sebagai dewan

kaum feodal. Ia dinamakan parlemen karena sebagai wadah para baron dan tuan tanah untuk membahas segala sesuatu termasuk kesepakatan untuk meningkatkan kontribusi mereka bagi kerajaan.<sup>54</sup> Sampai akhir abad ke-14 barulah parlemen dimanfaatkan oleh Raja Inggris sebagai badan konsultasi untuk pembuatan undang-undang. Kemudian di awal abad ke-15, parlemen berfungsi sebagai badan pembuat hukum walaupun dari segi keanggotaannya lembaga tersebut belum sepenuhnya sebagai badan perwakilan rakyat. Parlemen yang sekaligus sebagai badan pembuat hukum dan badan perwakilan rakyat yang dibentuk lewat pemilihan (*House of Commons*) baru muncul pada abad ke-18 di Inggris.<sup>55</sup>

*House of Lord* di Inggris merupakan kamar kedua yang paling tua di dunia dengan perjalanan sejarah yang panjang. Bahkan dapat dikatakan bahwa *House of Lords* merupakan kamar tertua di dunia. Kemunculannya sangat berakar kepada sejarah masa lalu di mana terjadi stratifikasi masyarakat terutama kelas atas atau ningrat atau tuan tanah pada abad pertengahan. Kondisi tersebut muncul di Inggris sebagai refleksi dari semangat untuk perubahan di mana banyak kaum bangsawan, tuan tanah serta para pendeta yang dalam perkembangan demokrasi di Inggris memiliki peran dalam proses berakhirnya abad kegelapan.

Dalam kondisi seperti itu, maka periode keanggotaannya adalah seumur hidup dengan jumlah anggota yang sangat besar. Dalam catatan Putterson dan

---

<sup>54</sup> Lembaga ini terus ada hingga sekarang yang dinamakan *House of Lords* seperti yang sudah dijelaskan di awal.

<sup>55</sup> J. Soedjati Djiwandono (Pengantar), *Demokrasi, Panduan Bagi Pemula*, (Jakarta: The Ridep Institute, 2002), hlm 35

Mughan terdapat sekitar 1.067 anggota *House of Lords*. Dari 1.067 anggota yang berasal dari keturunan bangsawan dan tuan tanah berjumlah 633 anggota, 408 anggota dari kelompok umum dan sekitar 26 anggota dari para pendeta yang berpengaruh di Inggris Raya.

Kebesaran *House of Lords* yang berisikan para bangsawan dan keturunan bangsawan tidak diimbangi dengan kekuasaan yang dimilikinya. Secara umum *House of Lords* hanya diberdayakan dalam hal revisi, memberikan pertimbangan kembali atau menunda sebuah peraturan perundang-undangan dan sebaliknya aturan konstitusional yang di buat *House of Lords* dapat ditolak atau dikesampingkan oleh *House of Commons (Lower House)*.<sup>56</sup>

Berbeda dengan Inggris model Amerika Serikat Sebagaimana disinggung di muka bahwa dalam sistem parlemen di Amerika Serikat terdapat dua kamar yaitu, Senat dan *House of Representatives (DPR)* yang memiliki kedudukan seimbang khususnya dalam hal kekuasaan legislatif. Ini sesungguhnya merupakan karakteristik yang tidak lazim dalam sistem bikameral karena biasanya kamar kedua (Senat) tidak sekuat dibanding kamar pertama atau *House*.

Senat Amerika Serikat memiliki anggota 100 senator (dua orang dari tiap negara bagian) yang *popularly elected* di negara bagian masing-masing tanpa melihat perbedaan jumlah atau populasi penduduk di tiap negara bagian. Semua negara bagian, besar dan kecil diwakili oleh 2 (dua) orang senator. Jumlah negara bagian di Amerika Serikat adalah 50. Ini berlawanan dengan DPR (*House of Representatives*) yang keanggotaannya didasarkan kepada populasi atau jumlah

---

<sup>56</sup> Donald Shell, To evise and Deliberate, The British House of Lords, dalam Samuel Patterson and Anthony Mughan, *Op.Cit*, hlm. 199-224.

penduduk. Namun ada persamaannya antara senator dengan anggota DPR yaitu kebanyakan sama-sama berasal dari kalangan partai politik, meskipun tidak lagi menjadi dominan ketika sudah menjadi senator.

Secara teori dan praktek politik di Amerika Serikat, kehadiran Senat dalam sistem bikameralisme di Amerika Serikat merupakan komponen yang esensial dalam pandangan tentang pemisahan kekuasaan negara. Hal itu dikemukakan oleh James Madison yang ditulis dalam Federalist no.51,

*"in republican government the legislative power necessarily predominates. The remedy for this inconveniency is to divide the legislature into different branches; and to render them, by different modes of election and different principles of action, as little connected with each other as the nature of their common dependence on the society will admit".*<sup>57</sup>

Ketika diadakan pertemuan di Philadelphia tahun 1787 untuk membicarakan pembentukan konstitusi baru bagi Amerika Serikat, hampir semua delegasi dalam konvensi tersebut tertarik dengan sistem perwakilan bikameral secara nasional (di tingkat federal). Selanjutnya, serangkaian rencana (*plan*) yakni *New Jersey Plan*, *Virginia Plan* menyatakan bahwa bentuk Kongres adalah bikameral dengan Senat dipilih oleh anggota-anggota DPR. Lalu berdasarkan kompromi *Connecticut* diambil kesepakatan oleh delegasi tentang Kongres bahwa untuk DPR dilakukan pemilihan berdasarkan suara terbanyak (*popularly elected*), dan Senat didasarkan kepada keseimbangan perwakilan negara bagian dengan dua senator terpilih oleh masing-masing

---

<sup>57</sup> Dalam Barbara Sinclair, *Coequal Partner. The US Senate*, dalam Samuel Patterson and Anthony Mughan, *Senates....., Op.cit*, hal. 33. Lihat C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern* (Bandung: Nusamedia, 2004) hlm 293-295 dan lihat juga Indra J. Piliang dan Bivitri Susanti, *Untuk Apa DPD RI* (Jakarta: Kelompok DPD RI, 2006) hlm 102-105

lembaga legislatif. Selanjutnya sejak tahun 1913 dua senator dipilih berdasarkan *popularly elected* secara langsung dengan cara sepertiga dipilih tiap dua tahun. Adapun periode keanggotaannya adalah 6 (enam) tahun.

Kekuasaan yang dimiliki oleh Senat sebagai bagian dari Kongres relatif kuat dan seimbang dengan *House* (DPR). Senat memiliki kekuasaan dalam pembuatan undang-undang yang di dalamnya termasuk untuk mengajukan inisiatif undang-undang. Juga memiliki kekuasaan untuk konfirmasi terhadap pejabat yang ditunjuk Presiden seperti Jaksa Agung dan menteri-menteri. Selain itu Senat juga memiliki kekuasaan meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional. Satu kekuasaan Senat yang kuat adalah dalam hal memecat presiden untuk kasus kejahatan tingkat tinggi dan perbuatan tercela.

Untuk kekuasaan yang terakhir, terjadi beberapa kali dan kasus terakhir ketika Presiden Clinton menghadapi kasus perselingkuhan dengan Monica Lewinsky meskipun akhirnya tidak berakhir dengan pemecatan sang Presiden.

Lain halnya dengan Inggris dan Amerika Serikat yang merupakan negara federal yakni Perancis. Perancis adalah salah satu negara kesatuan yang menggunakan sistem bikameral dalam sistem parlemennya.<sup>58</sup> Penggunaan sistem bikameral di Perancis melalui perjalanan yang sangat panjang yang dimulai sejak tahun 1795 sebagai akibat atau hasil dari eksekutif sistem *single house* yang cenderung tidak demokratis. Di bawah sistem monarki atau *Empire*, lembaga *house* tunggal ini menjadi aristokratik dan memiliki kekuatan dalam memoderasi kehidupan politik Perancis. Guna lebih mendemokratisasikan kehidupan politik

---

<sup>58</sup> Jean Mastias, *A Problem of Identity: The French Senate*, dalam Samuel Patterson and Anthony Muhan, *Op.cit*, hlm. 162-198 dan lihat C.F. Strong, *Op. Cit.*, hlm 288

Perancis yang monarki tersebut, maka upaya untuk menciptakan lembaga yang mampu menyeimbangkan hal tersebut dilakukan.

Senat Perancis terdiri dari 321 anggota dengan beragam cara pemilihan. Sepertiga dipilih secara tidak langsung setiap 3 tahun. Senator dipilih berdasarkan *popularly elected* melalui *electoral colleges* di setiap departemen. Jumlah kursi didasarkan atas populasi departemen tersebut. Pemilihan berdasarkan mayoritas dalam departemen dengan 4 senator atau kurang (departemen dengan populasi kecil). Pemilihan dengan perwakilan berimbang (*proportional representation*) dengan 5 atau lebih senator bagi departemen yang memiliki populasi besar. Sistem pemilihan yang demikian memang agak rumit bagi sebuah lembaga seperti Senat. Tetapi memang di Perancis keanggotaan senatnya berisikan para senator yang dipilih mewakili departemen-departemen serta teritori di luar Perancis daratan serta warga negara Perancis yang tinggal di luar Perancis. Hal tersebut sesuai dengan konstitusi kesatuannya. Adapun periode keanggotaannya adalah 9 tahun.

Dengan komposisi dan cara seleksi keanggotaannya yang seperti itu, Senat Perancis menjadi tidak memiliki posisi seimbang dengan lembaga perwakilan lainnya (kamar pertama). Secara umum posisi Senat Perancis adalah subordinat kepada Majelis Nasional (*General Assembly*) tetapi dengan pengaruh yang cukup kuat khususnya dalam kaitan dengan *organics laws* dan *financial bills*. Senat juga dapat berinisiatif atau mengajukan amandemen/ perubahan tetapi keputusan akhir tetap di tangan *lower house*. Juga Senat dapat melakukan penyelidikan atas perilaku yang

menyimpang dan terlibat dalam penyelesaiannya tetapi Senat tidak dapat membubarkan pemerintah.

Begitu pula dengan Italia yang sama dengan Perancis dalam bentuk negara yaitu negara kesatuan tetapi hampir sama dengan Amerika Serikat dalam hal posisi Senat dalam sistem parlemennya. Dua kamar yang ada yaitu *The Chambers of Deputies* sebagai kamar pertama dan Senat sebagai kamar kedua memiliki posisi yang sejajar atau *coequal* dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan.

Senat Italia memilih anggota Senatnya dengan cara yang bervariasi yaitu melalui pemilihan langsung sebanyak 315 anggota, 9 anggota diangkat oleh Presiden, 2 anggota merupakan *ex officio* yang berasal dari mantan presiden. Dari jumlah anggota yang dipilih langsung tersebut (315 anggota) ditentukan sebanyak 75 % merupakan suara mayoritas dari pemilihan itu sementara 25 % sisanya dilakukan dengan sistem proportional representation sehingga total anggota Senat Italia adalah 326. Adapun periode keanggotaannya adalah 5 tahun.

Seperti yang disampaikan di atas bahwa kedudukan sejajar antara dua kamar tersebut sangat jelas tergambar. Senat Italia, melalui komisi-komisi memiliki kekuasaan mengundangkan peraturan perundang-undangan. Selain itu perdana menteri dan kabinet yang akan menjalankan tugas pemerintahan harus dikonfirmasi pada kedua kamar tersebut baik *chambers of deputies* maupun Senat.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Claudio Lodici, *Parliamentary Autonomy: The Italian Senato*, dalam Samuel Patterson and Anthony Mughan, *Op.Cit.*, hlm. 225-259 dan lihat C.F. Strong, *Op. Cit.*, hlm 290

Berdasarkan model keterwakilan wilayah dan pengalaman beberapa negara di atas, kedudukan DPD dalam parlemen Indonesia dapat dianalisis antara lain: *Pertama*, kedudukan DPD seperti *House of Lords* di Inggris atau Senat di Prancis karena DPD tidak memiliki kewenangan legislasi. DPD hanya memiliki hak mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan daerah. Selain memiliki wewenang yang bersifat mengusulkan RUU tertentu kepada DPR, DPD juga diberi wewenang pengawasan secara sangat terbatas.<sup>60</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem legislasi yang ada di Indonesia saat ini adalah sistem bikameral yang lunak atau *soft bicameralism*. Dalam hal ini DPD dapat dikatakan sebagai lembaga subordinat dari DPR. Hal ini senada *House of Lords* di Inggris dan Senat di Prancis yang hanya lebih sebagai subordinasi dari *House of Commons*. *House of Lords* hanya diberdayakan dalam hal revisi, memberikan pertimbangan kembali, atau menunda sebuah peraturan perundangan dan sebaliknya aturan konstitusional yang dibuat *upper house* dapat ditolak atau dikesampingkan oleh *lower house*.<sup>61</sup>

Berdasarkan teori yang dikemukakan Lijhart, Patterson dan Mughan kedudukan DPD masih relevan dengan teori bikameralisme walaupun termasuk pada kategori *weak bicameralism*. Tetapi DPD masih memiliki fungsi yang lebih yakni aspek pengawasan walaupun terbatas pada bidang pelaksanaan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hal ini dapat menunjukkan terdapat fungsi legislatif lainnya pada DPD. Begitu

---

<sup>60</sup> Lihat Pasal 22D Ayat (2) dan (3) UUD 1945 Perubahan ke- 4 dan Pasal 40-48 UU No. 22 Tahun 2003.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

pula fungsi pendidikan politik DPD dapat melakukannya sebab hal ini belum diatur secara jelas mekanismenya dalam undang-undang politik.

*Kedua*, dari aspek rekrutmen. DPD dipilih secara langsung oleh masyarakat dengan demikian menjadi anggota DPD lebih ditonjolkan aspek *popularly elected*. Hal ini sesuai dengan model Senat di Amerika Serikat sebab kalau model *House of Lords* di Inggris sistem rekrutmennya lebih menonjolkan kelas masyarakat yaitu bagi aristokrat, tuan tanah dan pendeta. Walaupun pada kenyataannya yang terpilih menjadi anggota DPD adalah para elit, aristokrat lokal dan para kiai tetapi mereka tidak otomatis sebagaimana dalam *House of Lords*. Mereka mengikuti pemilu langsung dan dipilih oleh rakyat untuk menjadi anggota DPD. *Ketiga*, DPD mewakili wilayah atau teritorial. Hal ini relevan dengan Senat yang mewakili negara bagian walaupun Indonesia bukan negara federal tetapi dalam negara kesatuan dapat digunakan sistem kamar kedua dengan mewakili wilayah seperti Prancis dan Italia.

Berdasar implementasi model *House of Lords* dan *Senat* serta dilengkapi dengan teori bikameralisme bahwa DPD merupakan model perpaduan atau jalan tengah dari model *House of Lords* dan *Senat*. Begitu pula DPD merupakan perpaduan atau jalan tengah dalam pemilahan teori bikameralisme antara *strong bicameralism* dan *weak bicameralism*. Dengan demikian muncullah DPD sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 yang kemudian lebih diperinci lagi dalam UU Susduk dan UU Pemilu tahun 2003.



### **Peta Politik Lokal Provinsi Jawa Barat**

Pembahasan peta politik lokal Provinsi Jawa Barat dimaksudkan untuk menggambarkan situasi dan kondisi politik di Jawa Barat. Uraian ini diharapkan dapat memperjelas analisis akan faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan pemilihan anggota DPD Jawa Barat pada pemilu 2004. Pembahasan ini meliputi: *Pertama*, profil wilayah Provinsi Jawa Barat. Dan *kedua*, Kekuatan-kekuatan politik lokal di Jawa Barat

### **Profil Wilayah Provinsi Jawa Barat**

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dari 33 provinsi di seluruh Indonesia. Jawa Barat diidentikkan dengan etnis Sunda. Posisi wilayahnya sangat strategis, yakni sebagai penyangga Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Hampir seluruh wilayah Ibu kota Negara di kelilingi dan berbatasan langsung dengan wilayah Jawa Barat. Bandung yang menjadi Ibu kota Provinsi Jawa Barat dan juga pusat kebudayaan Sunda terletak hampir di tengah-tengah wilayah Jawa Barat. Posisi wilayahnya yang sangat strategis menyebabkan Provinsi Jawa Barat senantiasa menjadi tempat pelaksanaan berbagai kegiatan baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.

Secara geografis, Provinsi Jawa Barat terletak di antara 5°50' – 7° 50' Lintang Selatan dan 104° 48' – 108° 48' Bujur Timur. Wilayah Jawa Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah di sebelah Timur, Laut Jawa dan Daerah Khusus Ibu kota Jakarta di sebelah Utara, Selat Sunda di sebelah Barat dan Samudra Hindia di sebelah Selatan. Sungai Cilosari dan Sungai Citanduy

merupakan batas alam antara Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Jawa Tengah. Tampak sekali wilayah Jawa Barat dikelilingi laut kecuali di bagian Timur. Memang wilayah ini merupakan bagian Pulau Jawa yang bentuknya memanjang arah barat-timur dengan panjang pulau sekitar 1.000 km. Jawa Barat sendiri panjangnya 265 km dan lebarnya antara 150-175 km. Jika dibandingkan, maka luas Jawa Barat sekitar 2,46% dari luas seluruh wilayah Indonesia atau 27% dari luas Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pulau kelima terbesar daripada pulau-pulau di Kepulauan Nusantara setelah Irian, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Pulau Jawa berada pada posisi bagian Selatan Kepulauan Nusantara dilihat dari arah utara-selatan dan di bagian tengah dilihat dari arah barat-timur.

Kondisi geografis Jawa Barat yang memiliki lahan yang subur yang berasal dari endapan vulkanis serta banyaknya aliran sungai menyebabkan sebagian besar dari luas tanahnya digunakan untuk pertanian. Hal ini menyebabkan Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebagai lumbung pangan nasional. Jawa Barat yang beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 188.63 mm.

Secara ekonomis, Provinsi Jawa Barat mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. PDRB Jawa Barat pada tahun 2002 atas dasar harga berlaku mencapai 214 konstan yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga dan inflasi mencapai 59.713 milyar rupiah. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka masing-masing sebesar 10,94 persen dan 3,27 persen. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2002 sebesar 56 persen. Mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 49,67 persen.

Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah seluas 3.710.035 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 16 kabupaten dan 9 kota, mencakup sekitar 535 kecamatan, 1724 kelurahan dan 3.939 desa. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Jawa Barat pada tahun 2002 sebanyak 500.228 orang. Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk sebesar 38.175.571 jiwa. Untuk mendapat gambaran lebih jelas dapat di lihat tabel 4 berikut.

**Tabel 4**  
**Nama Kabupaten/Kota, luas wilayah, Jumlah penduduk,**  
**dan jumlah pemilih pada Pemilu 2004<sup>62</sup>**

NO	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Jumlah Pemilih
1	Kab. Bogor	3.065,52	3.896.054	2.483.394
2	Kab. Sukabumi	3.867,16	2.170.582	1.422.558
3	Kab. Cianjur	3.460,82	2.048.495	1.343.133
4	Kab. Bandung	2.954,02	4.020.002	2.696.854
5	Kab. Garut	3.045,33	2.206.750	1.413.680
6	Kab. Tasikmalaya	2.740,33	1.589.786	1.087.044
7	Kab. Ciamis	2.520,54	1.521.094	1.082.860
8	Kab. Kuningan	1.117,00	1.036.166	737.506
9	Kab. Cirebon	974,00	2.040.895	1.351.221
10	Kab. Majalengka	1.210,00	1.165.853	823.457
11	Kab. Sumedang	1.421,82	1.022.766	723.832
12	Kab. Indramayu	1.935,27	1.653.366	1.137.365
13	Kab. Subang	1.863,00	1.376.050	971.865
14	Kab. Purwakarta	971,72	748.790	500.365
15	Kab. Karawang	1.578,45	1.902.567	1.301.797
16	Kab. Bekasi	1.082,68	1.869.585	1.250.628
17	Kota Bogor	112,74	804.549	564.912
19	Kota Sukabumi	48,44	269.142	185.602
20	Kota Bandung	168,06	2.193.268	1.620.217
21	Kota Cirebon	37,36	276.463	191.357
22	Kota Bekasi	201,55	1.821.909	1.350.026
23	Kota Depok	212,24	1.335.237	932.504
24	Kota Cimahi	4.440,50	472.705	341.050
25	Kota Tasikmalaya	18.578,70	570.725	390.872
26	Kota Banjar	13.382,10	162.772	112.876
<b>JUMLAH</b>		<b>3.710.035,00</b>	<b>38.175.571</b>	<b>26.016.975</b>

<sup>62</sup> Sumber dari Monografi Jawa Barat tahun 2002 dan tentang pemilih dari KPU Jawa Barat

Tabel 4 menunjukkan bahwa luas wilayah Provinsi Jawa Barat sampai tahun 2003 adalah 3.710.035 Km<sup>2</sup>. Luas wilayah tersebut terbagi dalam 25 wilayah kabupaten/kota. Kabupaten yang paling luas wilayahnya adalah Kabupaten Sukabumi yakni 3.867,16 km<sup>2</sup>, Kabupaten Cianjur seluas 3.460,82 km<sup>2</sup>, Kabupaten Bogor seluas 3.065,52 km<sup>2</sup> dan Kabupaten Garut seluas 3.045,33 km<sup>2</sup>. Sedangkan daerah yang wilayahnya paling sempit adalah Kota Cirebon yang luasnya hanya 37,36 km<sup>2</sup>, Kota Sukabumi seluas 48,44 km<sup>2</sup> dan Kota Bogor yang luasnya 112,74 km<sup>2</sup>.

Dilihat dari jumlah penduduk, tabel 4 menunjukkan bahwa sampai tahun 2003, Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk sebesar 38.175.571 jiwa dengan jumlah pemilih pada pemilu 2004 sebesar 26.016.975 jiwa. Wilayah paling padat jumlah penduduknya adalah Kabupaten Bandung, yakni 4.020.002 jiwa, kemudian Kabupaten Bogor sebesar 3.896.054 jiwa dan Kabupaten Garut sebesar 2.206.750 jiwa. Daerah yang kepadatannya sangat rendah adalah Kabupaten Sukabumi yang jumlah penduduknya hanya sebesar 2.126.404 jiwa, kemudian Kabupaten Cianjur sebesar 1.993.727 jiwa dan Kabupaten Subang sebesar 1.352.354 jiwa. Jumlah rumah tangga pada tahun 2002 di Jawa Barat mencapai 10.104.044 rumah tangga tertinggi berada di wilayah Kabupaten Bandung yaitu 1.172.020 rumah tangga disusul Kabupaten Bogor sebesar 695.365 rumah tangga dan ketiga terbesar adalah Kota Bandung sebesar 611.240 rumah tangga.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid*

Berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan bahwa setiap kabupaten/kota memiliki luas dan tingkat kepadatan penduduk yang berbeda. Terdapat kabupaten/kota yang wilayahnya luas tetapi kepadatan jumlah penduduknya rendah misalnya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut. Terdapat pula kota yang sempit wilayahnya tetapi kepadatan jumlah penduduknya tinggi seperti, Kabupaten Bandung yang memiliki jumlah penduduk sebesar 4.020.002 jiwa, Kota Bandung sebesar 2.193.268, Kota Bekasi sebesar 1.821.909 jiwa dan Kabupaten Cirebon yang memiliki jumlah penduduk sebesar 2.040.895 jiwa.<sup>64</sup>

Kondisi itu menunjukkan bahwa di wilayah Provinsi Jawa Barat tidak terjadi penyebaran penduduk yang merata di setiap kabupaten/kota. Wilayah kota besar seperti Bandung, Bogor, Depok dan Bekasi lebih padat jumlah penduduknya. Begitu pula kabupaten/kota industri seperti Kabupaten Bandung, Karawang dan Kabupaten Cirebon memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi dibandingkan dengan wilayah kabupaten yang berpotensi pertanian seperti Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya. Masyarakat lebih memilih wilayah yang secara ekonomis lebih terbuka untuk mencari lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Suatu hal yang beralasan kalau pemerintah wilayah kabupaten/kota besar dan kabupaten/kota industri senantiasa diperhadapkan pada masalah urbanisasi besar-besaran dan menuntut perluasan wilayah perkotaan. Di tahun 2002 kepadatan penduduk Jawa Barat mencapai 3.012 orang perkilometer persegi. Kota Bandung

---

<sup>64</sup> *Ibid*

masih merupakan daerah terpadat yaitu sebesar 12.762 orang perkilometer persegi. Sedangkan yang terendah Kabupaten Cianjur hanya sebesar 629 orang perkilometer persegi.

Provinsi Jawa Barat yang merupakan provinsi penyangga Ibukota Negara senantiasa dihadapkan pada tingkat urbanisasi yang cukup tinggi dari provinsi-provinsi lain baik bertujuan untuk bekerja maupun untuk bersekolah di perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat atau di Jakarta dengan mengambil tempat tinggal di Jawa Barat seperti di Bandung, Bogor, Depok dan Bekasi.

Penyebaran penduduk yang tidak merata di Provinsi Jawa Barat berpengaruh terhadap jumlah penduduk yang memiliki hak pilih dalam pemilu 2004 sebagaimana tertulis dalam tabel 4 di atas. Masyarakat pemilih terbesar terdapat di Kabupaten Bandung yang merupakan kabupaten terbesar jumlah penduduknya dengan jumlah pemilih sebesar 2.696.854 pemilih. Disusul Kabupaten Bogor sebesar 2.483.394 pemilih, Kota Bandung jumlah pemilih sebesar 1.620.217 pemilih dan Kabupaten Cirebon sebesar 1.351.221 pemilih. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki jumlah pemilih terkecil adalah Kota Banjar sebesar 112.876 pemilih, Kota Cirebon sebesar 191.357 pemilih dan Kota Sukabumi sebesar 185.602 pemilih.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid*

### **Kekuatan-Kekuatan Politik Lokal di Jawa Barat**

Dalam bagian ini akan diuraikan kekuatan-kekuatan politik yang ada di Jawa Barat. Uraian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan pengetahuan tentang kekuatan-kekuatan politik di Jawa Barat. Kekuatan-kekuatan politik dimaksud adalah individu atau kelompok yang dalam kedudukannya dapat mempengaruhi konstalasi politik dan kebijakan politik di Jawa Barat. Kekuatan-kekuatan politik dapat dikatakan juga sebagai kelompok-kelompok strategis atau kelompok-kelompok kepentingan. Dalam uraian ini meliputi Islam, militer (Siliwangi), menak Sunda dan petani.

#### **Islam**

Islam merupakan agama yang banyak dianut masyarakat Jawa Barat (Sunda). Hal ini terbukti dari jumlah penduduk 38.175.571 jiwa yang beragama Islam sebesar 34.884.290 orang. Yang beragama Kristen 637.560 orang, beragama Hindu sebesar 280.470 orang dan yang beragama Budha 109.104 orang. Jumlah tempat peribadatan pada tahun 2002 tercatat antara lain, tempat peribadatan umat Islam 157.548 buah yang terdiri dari 43.041 buah mesjid, 90.075 buah langgar dan 24.432 mushollah. Tempat peribadatan agama lainnya berjumlah 1.703 buah yang terdiri dari gereja Protestan 1.317 (77,33 persen), gereja Katholik 201 (11,80 persen), pura Hindu 21 (1,23 persen) dan vihara Budha 164 (9,64 persen).

Orang Sunda mengaku bahwa agama yang dianut dari leluhurnya adalah agama Islam tetapi hal ini masih dalam perdebatan. Hal ini menurut pengakuan

dan kepercayaan orang Kanekes atau orang Baduy yang merupakan orang Sunda asli. Mereka berada di pedalaman Serang Banten. Orang kanekes mempercayai bahwa leluhur mereka mempunyai hubungan langsung dengan Adam dan Hawa yang dalam agama Islam sebagai Manusia dan Nabi pertama. Agama yang mereka anut disebut Sunda Wiwitan.<sup>66</sup>

Dalam menguraikan Islam di Jawa Barat dalam pembahasan ini terbagi kepada tiga fase yaitu *pertama*, fase masuknya Islam di tatar Sunda dan penyebarannya. *Kedua*, fase munculnya Islam radikal dengan terjadinya gerakan Darul Islam (DI/TII) dan *ketiga*, fase gerakan persuasif Islam meliputi organisasi Persatuan Islam (Persis) dan Persyarikatan Ulama.

### **Awal Masuknya Islam di Jawa Barat**

Sejarah masuknya Islam di Tatar Sunda berawal dari seorang pemeluk agama Islam yang pertama kali di tanah Sunda adalah Bratalegawa putera kedua Prabu Guru Pangandiparamarta Jayadewabrata atau Sang Bunisora penguasa kerajaan Galuh. Ia memilih hidupnya sebagai saudagar besar, biasa berlayar ke Sumatera, Cina, India, Srilangka, Iran, sampai ke negeri Arab. Ia menikah dengan seorang muslimah dari Gujarat bernama Farhana binti Muhammad. Melalui pernikahan dengan seorang muslimah ini, Bratalegawa memeluk agama Islam, kemudian menunaikan ibadah haji dan mendapat julukan Haji Baharudin. Sebagai

---

<sup>66</sup> Edi S. Ekadjati, *Kebudayaan Sunda (Suatu Pendekatan Sejarah)*, Op.Cit., hlm 72-77

seorang yang pertama kali menunaikan ibadah haji di kerajaannya ia pun di kenal dengan sebutan Haji Purwa.<sup>67</sup>

Sementara itu di Karawang terdapat sebuah pesantren di bawah pimpinan Syekh Quro sebagai penyebar dan guru agama Islam pertama di daerah Karawang. Syekh Quro nama aslinya adalah Syekh Hasanuddin putra Syekh Yusuf Sidik, seorang ulama yang datang dari negeri Campa (daerah Vietnam sekarang). Ia datang di Pulau Jawa sebagai utusan pada abad ke-14 sezaman dengan kedatangan Syekh Datuk Kahpi menumpang kapal yang dipimpin Laksamana Cheng Ho dalam perjalanannya menuju Majapahit. Dalam pelayarannya itu, armada Cheng Ho tiba di Pura Karawang. Syekh Hasanuddin beserta para pengiringnya turun di Karawang dan bertempat tinggal di sana. Di Karawang ia menikah dengan Ratna Sondari, putri Ki Gedeng Karawang, dan membuka pesantren yang diberi nama pondok Quro yang khusus mengajarkan al-Qur'an, karena itulah Syekh Hasanuddin kemudian dikenal dengan nama Syekh Quro. Syekh Quro bermukim di Karawang sampai wafat dan dimakamkan di Desa Pulo Kalapa Kecamatan Wadas Karawang.<sup>68</sup>

Sumber lain yang menunjukkan datangnya Islam pertama kali di Jawa Barat dibawa Syekh Nurjati yang disebut pula Syekh Datuk Kahpi, Syekh Idofi, atau Syekh Nuruljati, seorang ulama yang berasal dari Arab (Persi). Ia datang sebagai utusan Raja Persi bersama 12 orang pengikutnya sekitar abad ke-14, pada masa Ki Gedeng Jumajanjati. Atas ijin dan kebaikan penguasa pelabuhan itu, Syekh

---

<sup>67</sup> Pembahasan Islam di Jawa Barat lihat Yuyus Suherman, *Sejarah Perintisan Penyebaran Islam di Tatar Sunda* ( Bandung: Pustaka, 1995) dan lihat Nina Lubis dkk., *Sejarah Tatar Sunda* ( Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, 2003) Jilid 1 hlm 155-239

<sup>68</sup> *Ensiklopedi Sunda* (Bandung: Pustaka Jaya, 2000) hllm 639

Nurjati kemudian menetap dan bermukim di Pasambangan di bukit Amparan Jati dekat pelabuhan Muarajati, kurang lebih lima kilometer sebelah Utara Kota Cirebon sekarang. Ia kemudian menjadi guru agama Islam dan mendirikan pesantren yang tumbuh menjadi sebuah pesantren yang cukup ramai. Pesantren Muarajati lebih berkembang lagi ketika datangnya Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Djati dari Mesir.<sup>69</sup>

Tokoh Syarif Hidayatullah<sup>70</sup> (1448-1568) yang lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati (SGJ) sejauh ini dianggap sebagai tokoh penyebar agama Islam di tanah Sunda dan penegak kekuasaan Islam pertama di Cirebon. Dalam perjalanannya ke Cirebon ia singgah di Pasai dan tinggal bersama Maulana Ishak, kemudian tiba di pelabuhan Muara Jati (Cirebon) lalu melanjutkan perjalanan ke Desa Sembung-Pasambangan dekat Giri Amparan Jati pada tahun 1475.<sup>71</sup> Pembahasan lebih lanjut tentang Syarif Hidayatullah akan diuraikan dalam pembahasan bab IV yang berkaitan dengan Kesultanan Cirebon.

Di daerah pedalaman Sunda Islamisasi dilakukan oleh kerajaan Sumedanglarang di mana pada tahun 1530 Masehi Sumedanglarang ditaklukan kerajaan Cirebon. Raja Sumedanglarang yang menganut agama Islam adalah Ki Gedeng Sumedang atau dikenal dengan nama Pangeran Santri yang berkedudukan sebagai bawahan Cirebon. Kemudian diteruskan oleh putranya yaitu Pangeran

---

<sup>69</sup> Dadan Wildan, *Sunan Gunung Jati antara Fiksi dan Fakta: Pembedaan Islam dengan Pendekatan Struktural dan Kultural*, (Bandung : Humaniora Press, 2002), hlm. 25-29

<sup>70</sup> Menurut naskah-naskah tradisi Cirebon ia lahir di Mesir tahun 1448, ayahnya bernama Syarif Abdullah seorang bangsawan Mesir yang dianggap keturunan Nabi Muhammad SAW dan ibunya Rarasantang, putri Prabu Siliwangi yang menikah dengan gadis muslim Subanglarang. Syarif Abdullah menikahi Rarasantang ketika Rarasantang menunaikan ibadah haji ke Mekkah.

<sup>71</sup> Lihat Pangeran Sulaeman Sulendraningrat, *Nukilan Sedjarah Tjirebon Asli* (Cirebon: Pustaka Cirebon, 1968), hlm. 7, lihat juga Sharon Siddique, *Relics of the Past? A Sociological Study of the Sultanates of Cirebon, West Java*. (Disertasi, 1977), hlm 64-65

Angkawijaya dengan gelar Geusan Ulun Sumedanglarang. Kekuasaan Geusan Ulun meliputi Sumedang, Garut, Tasikmalaya dan Bandung.<sup>72</sup>

Dengan demikian peyebaran Islam di Jawa Barat dari arah utara oleh kerajaan Cirebon sebagai titik awal masuknya Islam ke tatar Sunda kemudian dari arah selatan oleh kerajaan Banten yaitu oleh Sultan Hasanuddin yang merupakan putra dari Sunan Gunung Jati Cirebon sedangkan untuk daerah pedalaman yang meliputi daerah priangan melalui kerajaan Sumedanglarang sebagai bawahan kerajaan Cirebon.

### **Gerakan Politik Islam Radikal**

Gerakan politik Islam secara radikal di Jawa Barat yakni adanya peristiwa pemberontakan Darul Islam (DI/TII) yang diprakarsai Kartosoewiryo pada tahun 1948-1968.<sup>73</sup> Kartosoewiryo dilahirkan di Jawa Timur pada tanggal 7 Pebruari 1905. Ia putra seorang tokoh pegawai rendah pangreh praja Belanda. Ia memperoleh pendidikan dan kepandaian berbahasa Belanda dengan tamat dari sekolah rendah Eropa (*Europese Lagere School*) dan belajar pada sekolah dokter Hindia-Belanda (*Nederlands-Indische Artsen School*, NIAS) di Surabaya.<sup>74</sup>

Pada tahun 1926 ia diusir dari sekolah kedokteran itu karena kegiatan-kegiatan politik radikal kiri. Pada tahun 1927 ia menjadi anggota Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). H.O.S. Tjokroaminoto, pendiri kharismatik gerakan massa

---

<sup>72</sup> Yoseph Iskandar, *Op.Cit.*, hlm 294-304

<sup>73</sup> Pembahasan lebih konfrehensif tentang DI/TII lihat Karl D. Jackson, *Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan Kasus Darul Islam Jawa Barat* (Jakarta: Grafiti, 1990), Hiroko Horikoshi, *Kiyai dan Perubahan Sosial* ( Jakarta: P3M, 1987). Dan lihat juga Van Dijk, C.Q., *Darul Islam, Sebuah Pemberontakan* (Jakarta: Grafiti, 1993).

<sup>74</sup> Pinardi, *Sekarmadji Maridjan Kartosoewiryo*, (Jakarta, PT Badan Penerbit Aryaguna, 1964) hlm. 20-21

Indonesia yang pertama yakni Sarekat Islam. Ia menjadi ayah angkat dan pelindung Kartosoewiryo.<sup>75</sup> Setelah mengabdikan dua tahun sebagai sekretaris pribadi Tjokroaminoto dari tahun 1927 sampai 1929, Kartosoewiryo sakit parah dan tetirah ke desa asal istrinya di Malangbong Garut, Jawa Barat. Ayah mertuanya seorang kiyai setempat yang terkenal bernama Ardiwisastra. Jadi melalui perkawinannya Kartosoewiryo memperoleh akses ke dalam jaringan luar para kiyai di daerah itu yang dua dasawarsa setelah itu akan mengabdikan sebagai jantung Darul Islam.

Pada tahun 1929 ia menjadi komisararis PSII untuk Jawa Barat dan dua tahun kemudian menjadi sekretaris umum PSII. Setelah wafatnya Tjokroaminoto pada tahun 1934, PSII compang-camping dikoyak-koyak persaingan antara berbagai faksi di dalam tubuhnya. Kartosoewiryo dipilih sebagai wakil ketua partai pada tahun 1936 dan menjadi salah seorang juru bicara utama bagi nonkooperasi menyeluruh dengan lembaga-lembaga pemerintahan Belanda.

Dalam suatu kasus, Kartosoewiryo dikeluarkan dari partai dan pada bulan Maret 1940 Komite Pembela Kebenaran (KPK) yang pernah didirikannya pada waktu aktif di partai muncul sebagai partai politik baru. Sekaligus Kartosoewiryo mendirikan lembaga Suffahnya di Malangbong.<sup>76</sup> Lembaga itu adalah sebuah pesantren, di mana para santri tinggal selama empat sampai enam bulan. Cara hidup menekankan pertarikan, mengendalikan diri sendiri, persamaan dan ketekunan beragama. Hak milik perseorangan dikumpulkan, kerja keras dituntut

---

<sup>75</sup> Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 1985) hlm 55

<sup>76</sup> Nama Suffah mengacu kepada lembaga yang ada pada masa Rasulullah, di mana para murid diajar Rasulullah sendiri mengenai cara-cara melakukan dakwah Islam. Lihat Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1982)

dari semua orang (bahkan dari Kartosoewiryo sekalipun) dan pelajaran diberikan di dalam pokok acara sedemikian beragam seperti bahasa Belanda, astronomi dan aliran tasawuf Islam yang diikuti Kartosoewiryo sepanjang kariernya.<sup>77</sup>

Pada masa pendudukan Jepang pada mulanya menghentikan semua kegiatan partai, termasuk KPK. Maka lembaga Suffah menjadi pesantren konvensional dan tidak berpolitik. Namun pada tahun 1945 misi politik Lembaga suffah dibangkitkan kembali ketika lembaga itu menjadi tempat melatih (dengan bantuan Jepang) seksi pemuda Laskar Masyumi, yang dikenal sebagai Hizbullah. Jumlah orang yang dilatih boleh jadi kurang dari 2000 orang, tetapi pentingnya mereka bagi Darul Islam diperbesar oleh jumlah pengikut-pengikut yang jauh lebih besar, yang para santrinya terbukti mampu mengerahkannya dari desa-desa asal mereka di Priangan dan Jawa Tengah. Tokoh-tokoh utama Darul Islam seperti Kamran, Zainal Abidin dan Oni semuanya pernah di KPK atau dilatih pada lembaga Suffah. Pada tanggal 24 April 1962 Imam NII terluka dalam suatu tembakan. Ia tertawan pada tanggal 4 Juni dan diadili pada bulan Agustus. Pada tanggal 12 September (pada sidang peradilan yang berkaitan) hakim ketua mengumumkan bahwa Kartosoewiryo tidak akan dapat memberikan kesaksian karena ia telah ditembak mati.<sup>78</sup>

Kartosoewiryo mula-mula memproklamasikan Negara Islam pada 14 Agustus 1945, tetapi kemudian memberikan dukungannya kepada Republik yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Hatta.<sup>79</sup> Sosok

---

<sup>77</sup> Pinardi, *Op. Cit.*, hlm. 27-28 dan lihat Deliar Noer, *Ibid.*, hlm 148-149

<sup>78</sup> Karl D. Jackson, *Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan Kasus Darul Islam Jawa Barat* (Jakarta: Grafiti, 1990) hlm 30-32

<sup>79</sup> Boland, *Op.Cit.*, hlm 57

nasionalnya diakui ketika koalisi kekuatan-kekuatan politik kaum muslimin, Masyumi, direorganisasikan sebagai partai politik pada bulan November 1945. Pada waktu itu Kartosoewiryo diangkat menjadi anggota Dewan Pimpinan Partai dan kemudian menjadi komisarisnya untuk Jawa Barat.

Kemunculan pemberontakan DI/TII paling tidak ada dua faktor yang melatar belaknginya yaitu *pertama*, terjadinya kekosongan politik di masa awal kemerdekaan dengan munculnya agresi militer ke I dan II Belanda dilanjutkan dengan perjanjian Linggarjati dan Renville, di mana secara politis sangat merugikan Indonesia sehingga muncul kekecewaan bagi Kartosoewiryo di Jawa Barat yang harus meninggalkan Jawa Barat hijrah ke Yogyakarta. Kekecewaan itu sekaligus sebagai kesempatan bagi Kartosoewiryo untuk melaksanakan niatnya mendeklarasikan Negara Islam di Jawa Barat bahkan di Indonesia.

Pada awalnya Keputusan Kartosoewiryo untuk meneruskan perjuangan bersenjata melawan Belanda secara diam-diam didukung Republik, khususnya para anggota Masyumi. Pada bulan November 1947 Masyumi Daerah Jawa Barat di bawah Kartosoewiryo bertindak mengkoordinasikan usaha-usaha mengusir Belanda dengan usaha mendirikan Negara Islam. Konferensi yang diadakan di Gunung Cupu, Jawa Barat bagian Tenggara, mendirikan badan-badan koordinasi untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan militer Hizbullah dan Sabilillah melawan Belanda di Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu Majelis Umat Islam dibentuk untuk mengkoordinasikan semua organisasi Muslimin di Jawa Barat, dan untuk meneruskan perjuangan bersenjata melawan pasukan kolonial. Semua pasukan tempur menjadi bagian Tentara Islam Indonesia (TII) dan

pasukan-pasukan pilihan dihimpun dalam Pahlawan Darul Islam (PADI). Pada bulan Mei 1948 Kartosoewiryo mengumumkan dirinya sendiri sebagai Imam, membentuk kabinet, mempersiapkan Undang-Undang Dasar serta merencanakan struktur sipil dan militer bagi negara baru itu.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Dasar pada tanggal 27 Desember 1948, Negara Islam Indonesia didirikan secara formal sebagai kesatuan politik yang terpisah. Selama periode ini Darul Islam bergerilya menentang tentara Belanda dan Negara Pasundan yang didalangi Belanda. Pasukan-pasukan militer Pasundan dan Belanda terkurung di kota-kota dan jalan-jalan utama, sedangkan Darul Islam menguasai pedesaan selaku satu-satunya kekuatan besar nasionalis yang tidak meninggalkan Jawa Barat. Akibat terpenting Persetujuan Renville adalah membuat jihad Kartosoewiryo satu-satunya gerakan kemerdekaan yang dapat dipercaya di Jawa Barat untuk satu setengah tahun terakhir revolusi Indonesia. Jadi memberikan kepada Darul Islam bulan-bulan berharga untuk menegakkan legitimasi tentara dan pemerintahan sipilnya.

Pangkalan-pangkalan terpenting Darul Islam adalah di Keresidenan Priangan yang meliputi kabupaten Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya dan Ciamis, tiga kabupaten terakhir yang merupakan wilayah-wilayah teras dukungan bagi gerakan itu.<sup>80</sup> Kantong-kantong kekuatan Darul Islam terdapat pula di sekitar Bogor, di dekat Indramayu di pantai utara dan lewat perbatasan Jawa Tengah.<sup>81</sup>

Dengan dukungan politik yang dipelihara selama tak hadirnya para pembesar Republikein dari Jawa Barat, dan sebagai tanda keengganan

---

<sup>80</sup> Sadjidiman, *Sejarah Militer Angkatan Darat* (1958)

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm 22

Kartosowiryo untuk menerima syarat-syarat kemerdekaan yang diperoleh Republik dari Belanda, pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosowiryo membuat pengumuman formal eksistensi Negara Islam yang meliputi seluruh Indonesia. Sejak aksi polisional kedua dan seterusnya Kartosowiryo menganggap Jawa Barat sebagai wilayah *de facto* NII. Ketika Divisi Siliwangi dari Tentara Nasional Indonesia kembali ke Jawa Barat selama awal 1949, kedatangan mereka dianggap sebagai pelanggaran yang mencolok mata kewibawaan Negara berdaulat, maka bentrokan pun tidak dapat dielakkan.

Faktor kedua kuatnya niat Kartosowiryo mendirikan Negara Islam Indonesia adalah potensi bagi pengerahan laskar Islam diberi dorongan oleh keterpencilan, terlalu kurang diwakili dan kekecewaan mengenai tujuan-tujuan Islam selama perdebatan di Konstituante serta manuver-manuver politik pada awal revolusi. Di bawah pengawasan Jepang pimpinan politik masyarakat Islam muncul sebagai kekuatan politik baru yang tegas. Namun, ketika rencana-rencana Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, jubah pimpinan nasional diserahkan kepada para pemimpin sekuler atau Islam sekedar sebutan saja. Sedangkan pemimpin yang saleh, yang mewakili struktur-struktur pengerahan keagamaan Jawa pedesaan, dilorot ketidakberdayaan politik. Orang-orang seperti Soekarno dan Hatta-lah di kalangan angkatan yang lebih tua yang paling berpengaruh dalam menentukan warna Undang-Undang Dasar 1945 yang pada dasarnya tidak teokratis. Jelaslah bahwa kekuatan-kekuatan Islam ortodoks

telah kalah dalam perjuangan mereka untuk menjadikan terang-terangan bersifat Islam serta bertanggungjawab untuk memaksakan syari'at Islam.<sup>82</sup>

Dengan kedua faktor itulah seorang Kartosoewiryo mendeklarasikan Negara Islam Indonesia di Jawa Barat yang menunjukkan kekecewaan kepada para pemimpin Republik atas kegagalan mereka dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui perundingan-perundingan dengan pihak Belanda yang senantiasa merugikan Indonesia. Selain itu juga aspek keterwakilan golongan Islam dalam konstituante yang tidak menunjukkan keseluruhan elemen Islam terwakili dalam konstituante serta aspirasi politik golongan Islam yang kurang terakomodir secara baik dalam sidang-sidang konstituante walaupun pada akhirnya konstituante mengalami kegagalan dalam menentukan UUD sehingga diakhiri dengan lahirnya Dekrit Presiden tahun 1959.

### **Gerakan Politik Islam Persuasif**

Dalam uraian gerakan Islam persuasif di Jawa Barat tertuju pada dua organisasi pembaharuan yaitu Persis dan Persyarikatan Ulama dengan alasan yakni: *Pertama*, organisasi itu berdiri di Jawa Barat. *Kedua*, organisasi keagamaan tersebut lebih mengedepankan pendekatan persuasif dengan cara membentuk organisasi modern. *Ketiga*, kedua organisasi tersebut terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik bahkan menjadi partisipan partai politik.

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm 17

## Persyarikatan Ulama

Persyarikatan Ulama pada awalnya merupakan organisasi sosial keagamaan. Ia bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial tetapi karena tuntutan pada masa itu, pendiri Persyarikatan Ulama yaitu K.H. Abdul Halim bergabung dalam partai Sarekat Islam pada tahun 1918 kemudian ia bergabung pula dalam MIAI bersama-sama dengan organisasi Islam lainnya. Pada zaman penjajahan Jepang Persyarikatan Ulama bergabung dalam Masyumi begitu pula setelah pasca kemerdekaan. K.H. Abdul Halim adalah salah satu Kiyai yang terakomodir dalam BPUPKI yang dibentuk Jepang sehingga berkat jasa-jasanya mendapatkan bintang Maha Putra dari Presiden Soeharto pada tahun 1992. Pada tahun 1952 Persyarikatan Ulama berubah nama menjadi Persatuan Umat Islam (PUI).<sup>83</sup>

Persyarikatan Ulama merupakan gerakan pembaharuan yang berdiri di daerah Majalengka Jawa Barat, dimulai pada tahun 1911 atas inisiatif Haji Abdulhalim yang lahir di Cibelerang Majalengka tahun 1887. Kedua orang tuanya berasal dari keluarga yang taat beragama (ayahnya adalah seorang penghulu di Jatiwangi), sedangkan famili-familinya tetap mempunyai hubungan yang erat secara keluarga dengan orang-orang dari kalangan pemerintah.<sup>84</sup>

Halim memperoleh pelajaran agama pada masa kanak-kanak dengan belajar di berbagai pesantren di daerah Majalengka sampai ia berumur 22 tahun, ketika ia pergi ke Mekkah untuk naik haji dan untuk melanjutkan pelajarannya. Selama tiga tahun berada di Mekah Halim juga mengenal tulisan-tulisan Abduh dan Jamal al-

---

<sup>83</sup> Lihat PW PUI Jawa Barat, *Sejarah Singkat Persatuan Umat Islam (PUI)*, (2006) dan Darun Setiady, dkk., *Revitalisasi Peran PUI dalam Pemberdayaan Umat* ( Bandung: PW PUI Jawa Barat, 2006) hlm 251-279

<sup>84</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1982) hlm 80-84

Din al-Afghani, yang menjadi pokok pembicaraan bersama kawan-kawannya. Di Mekkah inilah ia pertama kali mengenal Kiyai Haji Mas Mansyur yang kemudian menjadi ketua Muhammadiyah.<sup>85</sup>

Pada tahun 1911 Halim kembali dari Mekkah kemudian mendirikan sebuah organisasi bernama *Hayatul Qulub*. *Hayatul Qulub* bergerak di bidang ekonomi dan pendidikan. Anggota-anggotanya mulanya enampuluh orang, umumnya terdiri dari pedagang dan petani. Organisasi ini juga bermaksud untuk membantu anggota-anggotanya yang bergerak di bidang perdagangan dalam persaingan dengan pedagang-pedagang Cina.<sup>86</sup>

*Hayatul Qulub* tidaklah berlangsung lama, persaingan dengan para pedagang Cina yang kadang-kadang menyebabkan perkelahian (perang mulut serta juga secara fisik), dianggap oleh pemerintah sebagai penyebab kerusuhan. Sekitar tahun 1915 organisasi tersebut dilarang setelah tiga atau empat tahun bergerak. Tetapi, kegiatan-kegiatan *Hayatul Qulub* terus berjalan. Kegiatan di bidang pendidikan dilanjutkan oleh sebuah organisasi baru yang disebut *Majlisul Ilmi*.<sup>87</sup> Pada tahun 1916 didirikan lembaga pendidikan yang bersifat modern dengan nama *Jam'iyat I'anat al-Muta'allimin*. Untuk memperbaiki mutu sekolahnya Halim berhubungan dengan Jamiat Khair dan Al-Irsyad di Jakarta.<sup>88</sup>

Organisasi tersebut yang kemudian diganti menjadi Persyarikatan Ulama, diakui secara hukum oleh pemerintah pada tahun 1917 dengan bantuan O.S. Tjokroaminoto, Presiden Sarekat Islam. Pada tahun 1924 organisasi tersebut

---

<sup>85</sup> *Ibid*

<sup>86</sup> Lihat PW PUI Jawa Barat, *Sejarah Singkat Persatuan Umat Islam (PUI)*, *Op.Cit.*, hlm 2-4

<sup>87</sup> *Ibid*

<sup>88</sup> Hasan Ma'arif Ambary dalam Darun Setiady, dkk., *Revitalisasi Peran PUI dalam Pemberdayaan Umat*, *Op.Cit.*, hlm 251-255

secara resmi meluaskan daerah operasinya ke seluruh Jawa dan Madura, dan pada tahun 1937 ke seluruh Indonesia.<sup>89</sup>

Dalam kenyataannya Persyarikatan Ulama tetap merupakan sebuah organisasi daerah Majalengka. Ia tidak semata-mata membatasi diri pada bidang pendidikan. Ia juga membuka sebuah rumah yatim yang diselenggarakan oleh Fathimiyah, bagian wanita dari organisasi tersebut (nama yang diambil dari nama anak Nabi), didirikan pada tahun 1930. beberapa buah perusahaan juga berada di bawah pengawasan organisasi itu: dua setengah hektar tanah yang dibeli pada tahun 1927 untuk pertanian, sebuah percetakan dalam tahun 1930-an dan sebuah perusahaan tenun didirikan tahun 1939. Untuk segala keperluan dibidang perusahaan ini semua guru-guru Persyarikatan Ulama di Majalengka diwajibkan membeli saham. Perhatian di bidang ekonomi ini juga dicerminkan dalam kurikulum dari lembaga pendidikan yang didirikan oleh Persyarikatan Ulama, bernama Santi Asrama. Lembaga ini didirikan tahun 1932 di samping madrasah-madrasah yang biasa yang telah didirikan di banyak tempat di daerah tersebut.<sup>90</sup>

Persyarikatan Ulama juga sangat aktif dengan kegiatan-kegiatan Sarekat Islam kira-kira dari tahun 1918 sampai tahun 1933, termasuk dalam masalah-masalah perburuhan. Ia tidak pula menolak untuk mengambil contoh lembaga-lembaga pendidikan bukan Islam seperti, yang diakuinya, *Shantiniketan* kepunyaan Tagore, untuk memperbaiki sekolahnya sendiri.<sup>91</sup>

Pada umumnya Halim berusaha untuk menyebarkan pemikirannya dengan toleransi dan penuh pengertian. Dikemukakan bahwa ia tidak pernah mengecam

---

<sup>89</sup> Deliar Noor, *Op.Cit*

<sup>90</sup> *Ibid*

<sup>91</sup> *Ibid*

golongan tradisi ataupun orang lain atau organisasi lain yang tidak sepaham dengan dia. Tablighnya lebih banyak merupakan anjuran untuk menegakkan etika di dalam masyarakat bukan merupakan kritik tentang pemikiran ataupun pendapat orang lain.

### **Persatuan Islam**

Persatuan Islam (Persis) didirikan di Bandung pada permulaan tahun 1920-an. Pada mulanya Persis pun bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial keagamaan tetapi karena tuntutan pada masa itu seperti halnya Persyarikatan Ulama, Persis pun bergabung dalam Sarekat Islam yang telah beroperasi di kota ini semenjak tahun 1913. Kemudian bergabung pula dalam MIAI. Pada masa Jepang bergabung dalam Partai Masyumi begitu pula pada masa pasca kemerdekaan bergabung dalam Masyumi dengan tokohnya Moh. Natsir. Pada masa Orde Baru Persis bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kemudian pada masa reformasi bergabung dengan Partai Bulan Bintang (PBB) dan pada pemilu 2004 ketika PBB terpecah Persis mencabut dukungan kepada PBB yang berakibat turunnya suara PBB.

Persis pada umumnya kurang memberikan tekanan bagi kegiatan organisasi sendiri. Ia tidak terlalu berminat untuk membentuk banyak cabang-cabang atau menambah sebanyak mungkin anggota. Pembentukan sebuah cabang bergantung semata-mata pada inisiatif peminat dan tidak didasarkan kepada suatu rencana yang dilakukan oleh pemimpin pusat. Tetapi pengaruh dari organisasi Persis ini jauh lebih besar daripada jumlah cabang atau pun anggotanya. Pada

tahun 1923 hanya kira-kira selusin anggota yang berpartisipasi dalam sembahyang berjamaah pada hari Jum'at yang diselenggarakan oleh Persis di Bandung, tetapi pada tahun 1942, pada saat invasi Jepang ke Indonesia sembahyang berjamaah seperti ini dilakukan tidak kurang dari pada di enam buah mesjid yang diikuti oleh 500 orang.

Persis memperoleh dukungan dan partisipasi dari dua tokoh yang penting, yaitu Ahmad Hassan yang dianggap sebagai guru Persis dan Mohammad Natsir yang bertindak sebagai juru bicara dari organisasi tersebut dalam kalangan kaum terpelajar.<sup>92</sup>

Ahmad Hasan dilahirkan di Singapura tahun 1887. Ia adalah seorang yang berasal dari keluarga campuran Indonesia dan India. Ayahnya, Ahmad juga bernama Sinna Vappu Maricar adalah seorang penulis dan seorang ahli dalam Islam dan kesusastraan Tamil. Ibu Hassan berasal dari keluarga sederhana di Surabaya tetapi sangat taat beragama.<sup>93</sup>

Kemudian Hassan mengunjungi Bandung untuk mempelajari cara-cara menenun pada suatu lembaga tekstil pemerintah. Di Bandung Hassan tinggal pada Haji Muhammad Junus salah seorang pendiri Persis. Dengan demikian tanpa sengaja Hassan mendapatkan dirinya pada pusat kegiatan agama. Di Bandung ia mendirikan perusahaan tenun. Perusahaan ini kemudian gagal dan terpaksa ditutup. semenjak itulah Hassan mengabdikan dirinya pada bidang agama dalam lingkungan Persis.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Deliar Noor, *Ibid*

<sup>93</sup> Hendi Suhendi, *Solidaritas Keagamaan Jama'ah Persis, Disertasi (Bandung: Unpad, 2005) hlm 87-108*

<sup>94</sup> *Ibid*

Mohammad Natsir lahir di Alahan Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 1908. Ia adalah seorang anak pegawai pemerintah. Ia pergi ke Bandung pada tahun 1927 untuk melanjutkan studinya pada *Algemene Middelbare School* (setingkat SMA sekarang) setelah ia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertamanya (HIS dan Mulo) di daerah Minangkabau. Di daerah ini ia pernah belajar pada sebuah sekolah agama di Solok yang dipimpin oleh seorang yang bernama Tuanku Mudo Amin seorang pengikut dan kawan dari Haji Rasul. Ia juga mengikuti pelajaran secara teratur yang diberikan oleh Haji Abdullah Ahmad di Padang. Dapatlah dikatakan bahwa Natsir telah mengenal ajaran-ajaran pembaharu ini semenjak ia kecil.<sup>95</sup>

Di Bandung minat Natsir tentang agama berkembang. Pada tahun 1929 ia menjadi anggota Jong Islamieten Bond cabang Bandung, di mana ia juga memberikan pelajaran kepada sesama anggota lain. Kemudian ia mengajar Islam di Hollands Inlandse Kweekschool (HIK, sekolah guru) dan Mulo di Bandung. Disebabkan oleh turut sertanya ia secara teratur di dalam sidang Jum'at yang diadakan oleh organisasi Persis, Natsir mempunyai hubungan yang rapat dengan tokoh-tokoh Persatuan Islam. Ia pun mengikuti kelas khusus yang diselenggarakan Hassan untuk anggota-anggota muda Persis, yang belajar di berbagai sekolah menengah Belanda.<sup>96</sup>

Majalah Persis yang bernama *Pembela Islam* memberikan kesempatan pula kepada Natsir untuk mengeluarkan pendapatnya, sedemikian rupa perhatian Natsir kepada studi tentang Islam, sehingga ia menolak tawaran dari pemerintah

---

<sup>95</sup> Deliar Noor, *Op. Cit*

<sup>96</sup> *Ibid*

Belanda untuk sebuah beasiswa yang akan mengantarkannya belajar ke sekolah tinggi hukum di Jakarta atau ke sekolah tinggi ekonomi di Rotterdam di negeri Belanda.

Persis memberikan perhatian yang besar pada kegiatan-kegiatan pendidikan, tabligh serta publikasi. Dalam bidang pendidikan Persis mendirikan sebuah madrasah yang mulanya dimaksudkan untuk anak-anak dari anggota Persis. Tetapi kemudian madrasah ini diluaskan untuk dapat menerima anak-anak di luar anggota Persis. Kursus-kursus dalam masalah agama untuk orang-orang dewasa mulanya juga dibatasi pada anggota-anggota saja. Hassan dan Zamzam mengajar pada kursus-kursus ini. Persis menyelenggarakan Pendidikan Islam mulai dari sekolah: Taman Kanak-kanak, HIS (keduanya tahun 1930), sekolah Mulo (1931) dan sebuah sekolah guru (1932).<sup>97</sup>

Di samping Pendidikan Islam, Persis juga mendirikan sebuah pesantren (disebut Pesantren Persis) di Bandung pada bulan Maret 1936 untuk membentuk kader-kader yang mempunyai keinginan untuk menyebarkan agama. Usaha ini terutama merupakan inisiatif Hassan dan juga merupakan sifat eksperimen. Pesantren ini dipindahkan ke Bangil, Jawa Timur, ketika Hassan ke sana dengan membawa 25 dari 40 siswa dari Bandung.

Dalam aspek publikasi Persis menerbitkan beberapa majalah. Majalah *Pembela Islam* yang terbit di Bandung dari tahun 1929 sampai tahun 1933. Majalah ini menyebarkan pemikiran-pemikiran Persis sendiri. Sirkulasinya mencapai jumlah 2000 eksemplar, majalah ini tersebar sampai ke Sulawesi,

---

<sup>97</sup> Deliar Noor, *Ibid*

Kalimantan, dan Minangkabau. Majalah ini tersebar juga di Malaya dan Muangthai.<sup>98</sup>

Dalam bulan November 1931 Persis juga menerbitkan *Al-Fatwa*, sebuah majalah berbahasa Indonesia dan dicetak dengan huruf Jawi. *Al-Fatwa* mempunyai sirkulasi sekitar 1000 eksemplar dan banyak dibaca di Sumatera dan Kalimantan. Kira-kira 100 langganan terdapat di Malaya. Publikasi *Al-Fatwa* ini terhenti setelah menerbitkan 20 nomor. Sebuah majalah lain *Al-Lisaan* yang diharapkan menggantikan *Pembela Islam* terbit bulan Desember 1935. sirkulasinya kira-kira 2000 eksemplar juga dan berhenti ketika Jepang masuk di Indonesia.

*Al-Takwa*, sebuah majalah dalam bahasa Sunda, dipimpin oleh E. Abdurrahman dan Qomaruddin diterbitkan dalam bagian kedua tahun 1930-an. Isinya sama dengan *Al-Lisan*, sirkulasinya 1000 eksemplar. *At-Taqwa* ini pun terhenti setelah 20 nomor. Majalah *Soal Jawab* yang diterbitkan pada tahun 1930-an mengemukakan artikel-artikel dalam bentuk jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dimajukan oleh para pembacanya yang pada umumnya berkenaan dengan agama.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Deliar Noor, *Ibid*

<sup>99</sup> *Ibid*



## Menak

Menak merupakan kedudukan tinggi stratifikasi sosial di Jawa Barat. Menak identik dengan elit.<sup>100</sup> Dalam masyarakat Sunda terdapat tiga (3) stratifikasi sosial yaitu menak, Santana dan cacah. Istilah menak untuk menyebut semua orang yang sangat dihormati baik para bangsawan maupun para pejabat tinggi. Nama yang biasa dipakai kaum menak antara lain raden, ningrat, kusumah, prawira, suria, dan nagara. Selain itu ada golongan bangsawan rendah yang disebut Santana yang antara lain digelari asepe, ujang, dan agus. Golongan Santana adalah golongan bangsawan kecil yang merupakan keturunan dari perkawinan antara seorang raden dengan golongan yang lebih rendah. Golongan bangsawan dan Santana ini adalah keturunan raja-raja terdahulu atau keturunan raja-raja kemudian di wilayah Sunda. Selain itu adalah golongan cacah atau somah yaitu golongan masyarakat kecil. Golongan Santana berada di antara golongan menak dan golongan cacah (cacah kuricah) atau somah (rakyat kecil).

---

<sup>100</sup> Pengertian Menak lihat Nina Lubis, *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942* (Bandung, Pusat Studi Kebudayaan Sunda, 1998) hlm1-18 yang antara lain mengambil pengertian dari Van Vollenhoven seorang ahli Hukum Adat menjelaskan bahwa sebutan menak yang pernah dipergunakan dalam tradisi Jawa, di daerah Sunda dipergunakan untuk menyebut semua orang yang sangat dihormati baik para bangsawan maupun para pejabat tinggi. Selanjutnya ia juga menyatakan bahwa ada golongan bangsawan rendah (*klenen adel*) yang disebut Santana yang antara lain digelari asepe, ujang, dan agus. Golongan bangsawan dan Santana ini adalah keturunan raja-raja terdahulu atau keturunan raja-raja kemudian di wilayah Sunda. Di samping itu, istilah menak, Santana dan cacah dapat ditemukan juga dalam daftar kata yang dimuat dalam buku *Adatrecht bundel* (Panitia Hukum Adat yang diketuai Snouck Hurgronje. Dalam daftar kata itu disebutkan bahwa menak dapat diartikan sebagai: a. golongan masyarakat tertinggi; b. golongan bangsawan tinggi yang berhak atas title raden; c. golongan yang tertinggi pangkatnya; d. golongan penguasa. Golongan Santana adalah golongan bangsawan kecil yang merupakan keturunan dari perkawinan antara seorang raden dengan golongan yang lebih rendah. Gelar golongan ini dapat dibedakan antara asepe, mas, dan ujang. Golongan Santana berada di antara golongan menak dan golongan cacah (cacah kuricah) atau somah (rakyat kecil). Menurut Zoetmoelder, kata menak berasal dari bahasa Jawa Kuno yang artinya “bangsawan”.

Menak adalah keturunan dari raja-raja Sunda tetapi dalam perjalanannya menak mengalami pasang surut karena tataran Sunda terjadi fluktuasi kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa Barat. Sejarah Tatar Sunda dimulai dengan Kerajaan Tarumanegara, Selama beberapa abad pusat kerajaan berpindah-pindah, dimulai dari Kerajaan Galuh (Ciamis sekarang), kemudian pindah ke Pakuan Pajajaran (daerah Bogor sekarang). Setelah Kerajaan Sunda runtuh, wilayah kekuasaannya yang hampir meliputi seluruh Provinsi Jawa Barat sekarang ditambah sebagian Jawa Tengah, terbagi-bagi ke dalam empat pusat kekuasaan yaitu Banten, Cirebon, Sumedanglarang, dan Galuh yang setelah kepindahan pusat kerajaan ke Pakuan Pajajaran masih tetap eksis sebagai kerajaan kecil. Sekitar tahun 1620 Sumedanglarang menyerah kepada Mataram. Kekuasaan Mataram atas Priangan berakhir dengan adanya perjanjian antara Mataram dengan VOC. Dari kekuasaan VOC berpindah pada kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda.<sup>101</sup>

Perjalanan itu membawa perubahan kepada kekuasaan menak yang semula merupakan raja-raja di Jawa Barat kemudian setelah di bawah kekuasaan Mataram kurang lebih dua abad raja-raja Jawa Barat berubah menjadi bupati kemudian setelah Mataram menyerahkan wilayah Jawa Barat kepada VOC berpindah lagi pada Hindia Belanda, Kemudian pada Inggris dan kepada Hindia kembali kedudukan tertinggi para menak adalah bupati.

Pewarisan jabatan bersifat turun temurun bagaikan jabatan raja. Sejak zaman kerajaan Sunda jabatan raja biasanya diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak laki-laki tertua dari permaisuri (kecuali bila calon putra mahkota

---

<sup>101</sup> Tetang Menak telah ditulis dengan panjang lebar oleh Nina Lubis dalam penelitian Disertasi yang kemudian menjadi sebuah buku yaitu Nina H. Lubis, *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942. Op.Cit.*, hlm 56-111

tidak memenuhi syarat). Setelah Kerajaan Sunda runtuh, Sumedanglarang dan Kerajaan Galuh sebagai pusat politik yang baru juga menganut prinsip yang sama. Kedudukan Nalendra (Raja) Sumedanglarang diwariskan secara turun temurun, demikian juga kedudukan penguasa di Galuh. Pada masa kekuasaan Mataram para penguasa di Priangan diangkat menjadi “mantra agung” oleh Sultan Mataram dan berkedudukan sebagai kepala rakyat setempat. Jabatan sebagai kepala rakyat ini pada mulanya bisa dicabut atau dialihkan kepada orang lain sesuai dengan kehendak raja, tetapi lama-kelamaan jabatan ini dapat diwariskan demi menjaga kelangsungan pemerintahan.<sup>102</sup>

Setelah kekuasaan Sultan Mataram berakhir, prinsip pewarisan jabatan tersebut mendapat dukungan pemerintah kolonial sejak masa VOC hingga Pemerintah Hindia Belanda. Adanya dukungan ini disebabkan pemerintah kolonial menyadari bahwa kepala rakyat memiliki otoritas tradisional. Rakyat pribumi mempunyai anggapan khusus tentang wibawa dan tradisi pemimpin mereka.<sup>103</sup> Adapun jabatan-jabatan yang lebih rendah dari Bupati, seperti patih, wedana, asisten-wedana, mantra dan jaksa, seringkali tidak langsung bersifat turun temurun. Kaum menak yang lebih rendah menduduki jabatan-jabatan tersebut secara formal dengan surat pengangkatan dari Pemerintah Hindia Belanda.<sup>104</sup>

Dalam perkembangan sejarah, konsep tentang kekuasaan dalam tradisi Sunda mengalami perubahan-perubahan baik karena faktor intern maupun ekstern.

---

<sup>102</sup> Soeria Nata Atmadja dalam Nina Lubis, *Ibid*

<sup>103</sup> *Ibid*

<sup>104</sup> Edi S. Ekadjati (ed), *Wawacan Carios Munada* (Bandung: Fakultas Sastra Unpad, 1993) hlm

Dalam tradisi Sunda sebelum pengaruh Mataram masuk, konsep yang bertalian dengan asal-usul dan pelegitimasi kekuasaan tersirat dalam naskah *Amanat dari Galunggung*. Dalam naskah ini dinyatakan bahwa seseorang dapat menjadi penguasa disuatu daerah apabila ia menguasai *kabuyutan* di daerah tersebut. *Kabuyutan* (mandala) adalah tempat keramat atau tempat suci yang mempunyai fungsi sebagai pekuburan leluhur atau tempat pemujaan. *Kabuyutan* merupakan tempat yang harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan apabila mendapat serangan dari musuh. Menurut ungkapan ini, kekuasaan berasal dari sesuatu yang keramat, adikodrati, sedangkan kekayaan hanyalah atribut kekuasaan.<sup>105</sup>

Setelah kekuasaan Mataram berakhir, konsep kekuasaan berubah. Dalam berbagai sumber historiografi tradisional banyak disebut konsep *pulung* atau wahyu sebagai asal kekuasaan. Misalnya, dalam *sejarah sukapura* disebutkan bahwa seseorang itu bisa menjadi bupati bila dititisi *pulung* bupati terdahulu, sedangkan dalam roman sejarah Pangeran Kornel disebutkan bahwa seseorang bisa berkuasa apabila *katibanan nurbuat* atau *nampi wahyu* (dijatuhi nurbuat atau menerima wahyu). Konsep wahyu dikenal dalam tradisi Jawa antara lain sebagai pertanda rahmat atau kurnia dari Yang Maha Kuasa bagi kedudukan raja yang sering digambarkan sebagai bola cahaya biru, hijau, atau putih yang menyilaukan. Akan tetapi, dalam sumber yang ditulis Sastrahadiprawira tadi, istilah *pulung*, wahyu, atau *nurbuat* diartikan sebagai anugerah Tuhan. Konsep tersebut tidak memiliki bentuk fisik seperti dalam tradisi Jawa.

---

<sup>105</sup> Nina Lubis, Op.Cit., hlm 56-68

Pengaruh Islam sebenarnya secara eksplisit dapat dilihat dalam konsep *cahaya nurbuat*. Konsep ini secara implisit terdapat dalam sebuah surat dari hoofddjaksa Garut kepada Bupati Sumedang tahun 1883; "... *salat ta'at salat hajat, njaeta noediteda, moega pantjer Oeyoat Taloenn, diganjar tjahja nurbuat...*" (artinya;... salat taat salah hajat, itulah yang dimohon, semoga pokok Uyut Talun, dianugerahi cahaya nurbuat...). Jadi bisa ditangkap maknanya demikian, anugerah berupa cahaya nurbuat itu bisa diperoleh berkat sembahyang sunat yang dilakukan yaitu taat (?) dan shalat hajat.<sup>106</sup>

Dalam suatu sumber disebutkan bahwa seseorang sah menjadi penguasa apabila, ia *terusing ratu, menak rembesing kusumah* (keturunan ratu, menak titisan bangsawan) artinya ia adalah keturunan leluhur yang agung dan tak ternoda. Konsep di atas tidak ada bedanya dengan konsep *terahing kusumah, rembesing madu, wijining atapa, tedhaking andana warih* (turunan bunga, titisan madu, benih pertapa, turunan mulia) yang dikenal dalam tradisi Mataram.<sup>107</sup> Ungkapan ini tidak lain dari prinsip kharisma yang ada pada tokoh berwibawa, tokoh unggul. Kaum menak yang duduk dalam jabatan pemerintahan tradisional, jelas diangkat oleh pemerintah kolonial (artinya kekuasaan berasal dari pemerintah kolonial) sehingga mereka memiliki kekuasaan meskipun semu.

Dalam *Wawacan Sajarah Galuh*, penguasaan Mataram atas Priangan tidak disinggung sama sekali, sedangkan dalam *Babad Sumedang* disebutkan bahwa *Panembahan Senopati* menguasai Pasundan tanpa peperangan. Dalam sumber lain

<sup>106</sup> Memed Sastrahadiprawira, *Pangeran Kornel* (Bandung: Rahmat Cijulang, 1986) hlm 36-91

<sup>107</sup> Soemarsaid Moertono, *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985) hlm 62. Lihat juga G. Moedjanto, *Konsep Kekuasaan Jawa* (Yogyakarta: Kanisius, 1987) hlm 26

disebutkan bahwa masuknya kekuasaan Mataram ke Priangan diibaratkan sebagai angin topan meniup pepohonan sehingga pohon-pohon itu roboh tak berdaya.<sup>108</sup>

Lain halnya ketika Priangan jatuh ketangan VOC. Untuk pembenaran penguasaan VOC atas Priangan dalam *Wawacan Sajarah Galuh* diceritakan sebuah ramalan yang bersipat *post-eventum*; ”kekuasaan orang Belanda itu tidak dapat ditolak karena sudah diramalkan oleh seorang *ajar* (pendeta)”. Penguasa asing ini dianggap sebagai ratu adil yang akan memberikan pembalasan kepada Raja Jawa yang menyakiti hati cucu Prabu Siliwangi.<sup>109</sup> Dalam sumber dari zaman kerajaan Sunda dinyatakan bahwa seseorang bisa menjadi penguasa atau raja bila ia putra dewata. Dalam naskah *Carita Parahiyangan, Batara Danghyang*, penguasa galunggung menyatakan demikian; *Ja beunang ku ai (ng) kawisesa, turut carekeng, ja ai (ng) wenang nuduh tan katuduh. Ja ai (ng) anak dewata*” (artinya; “Tetapi bila dapat aku kuasai turutlah perintahku, karena aku berhak memerintah, tidak diperintah. Aku ini anak dewata”).<sup>110</sup>

Dari pernyataan di atas jelas bahwa raja menganggap dirinya sebagai keturunan dewa, artinya konsep “dewaraja” melekat dalam diri seorang penguasa. Upaya pelegitimasian kekuasaan semacam ini merupakan hal yang lumrah dilakukan para raja pendiri dinasti. Meskipun penguasa Galunggung di atas menyatakan diri sebagai anak dewa, anehnya dalam silsilah pada bagian awal naskah, yang berada di puncak silsilah bukanlah dewa, melainkan seorang *resi guru* (pendeta), artinya seorang manusia. Meskipun hal ini bisa dianggap sebagai

<sup>108</sup> Sastrahadiprawira, *Op. Cit.*, hlm 14

<sup>109</sup> Edi S. Ekadjati, *Wawacan Sejarah Galuh* (Bandung: EFEO, 1977) hlm 2-3

<sup>110</sup> Atja dan Saleh Danasmita, *Amanat dari Galunggung* (Bandung: Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat, 1981) hlm 47-49

suatu hal yang rancu, bisa dipahami bila ditafsirkan bahwa si penulis naskah mencoba bersikap realistis.

Pada masa sesudah agama Islam berpengaruh kuat, tokoh dewa digantikan oleh tokoh-tokoh manusia yang bersipat histories legendaries atau tokoh-tokoh besar yang dihormati masyarakat seperti Nabi. Misalnya, dalam *Carita Purwa Caruban Nagari* diceritakan bagaimana Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Djati) dilegitimaskan sebagai penguasa Cirebon sekaligus sebagai penyebar agama Islam di Jawa Barat. Silsilahnya dibuat demikian; dari pihak ayah, Sunan Gunung Djati adalah keturunan ke-22 Nabi Muhammad s.a.w., dan dari pihak ibu, ia adalah cucu Prabu Siliwangi, Raja Padjadjaran yang legendaris. Ada cara lain untuk melegitimasi kekuasaan, yaitu dengan pemberian pusaka atau gelar untuk membuktikan adanya kesinambungan antara penguasa baru dan lama. Misalnya, dalam *Carita Purwaka Caruban Nagari*, diceritakan bahwa Prabu Siliwangi, Raja Padjadjaran merestui putranya, Pangeran Cakrabuana menjadi Penguasa Caruban (nantinya menjadi Cirebon) dengan cara mengirimkan tanda keprabuan dan memberi gelar penobatan, Sri Mangana.<sup>111</sup>

Ada cara lain lagi untuk melegitimasi kekuasaan. Dalam *Sajarah Sukapura* secara implisit dikemukakan pelegitimasi kekuasaan VOC dan Pemerintah Hindia Belanda atas Priangan. Menurut penulis naskah tersebut, ada beberapa alasan untuk taat kepada Kompeni (orang Belanda). *Pertama*, mereka tidak perlu merasa bersalah kalau taat kepada orang asing sebab yang menyerahkan mereka kepada Kompeni adalah Sunan Mataram, penguasa

---

<sup>111</sup> Atja, *Carita Purwaka Caruban Nagari* (Bandung: Ikatan Karyawan Museum, 1972) hlm 10 dan lihat juga M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991) hlm 57

Priangan sebelumnya. *Kedua*, berada di bawah Kompeni, keadaan menjadi lebih baik karena tidak perlu lagi “tugurtundan” (menjaga keamanan dan mengangkut barang atau orang) di Mataram yang jaraknya sangat jauh. *Ketiga*, tidak ada tuntutan atau permintaan kecuali menghiasi atau memperindah daerah sendiri. *Keempat*, pekerjaan dibagi-bagi sesuai dengan kekuatan masing-masing. *Kelima*, tidak perlu mengeluarkan upeti dua kali. Dulu, selain menyerahkan upeti kepada penguasa setempat, rakyat juga harus menyerahkan upeti ke Mataram. Setelah Mataram tidak berkuasa, upeti hanya untuk penguasa setempat saja. *Keenam*, keamanan terpelihara karena ada polisi.<sup>112</sup>

Perintah Kompeni hanyalah menanam kopi dan hasilnya pun dibeli. Tentu saja masih harus diperdebatkan, apakah alasan ini dikemukakan secara sungguh-sungguh atau sekedar menyenangkan yang menjadi atasan. Bila melihat bahwa penulisnya adalah seorang Wedana di Manonjaya yang mendapat title “Kanduruan” dari Pemerintah Hindia Belanda sebagai penghargaan atas jasa-jasa pengabdianya, bukan tak mungkin alasan pembenaran kekuasaan VOC itu untuk menyenangkan atasan.<sup>113</sup>

Simbol kekuasaan kaum menak seperti telah dikemukakan, berbagai simbol dipergunakan dalam berbagai aspek kehidupan menak, termasuk soal kekuasaan dan kedudukan. Kekuasaan acapkali dikiaskan dengan kata “payung”. Misalnya, ketika kedudukan Bupati Sumedang diisi oleh keturunan Bupati Parakanmuncang karena putra tertua Bupati Sumedang yang berhak atas jabatan itu masih kecil, dikalangan menak Sumedang ada istilah “*payung direbut batur*” artinya

---

<sup>112</sup> Nina Lubis, *Op.Cit.*, hlm 60

<sup>113</sup> *Ibid*

kekuasaan direbut orang lain. Putera Bupati Sumedang yang kelak terkenal sebagai Pangeran Kornel setelah dewasa menikah dengan putri Bupati Parakanmuncang. Akan tetapi, ia terpaksa lari ke Cianjur karena tidak disukai oleh mertuanya. Ternyata ia bernasib baik, ia diangkat menjadi *cutak* cikalong. Ketika saudaranya menjemput ke Cianjur, ia menyatakan “*satungtung teu acan dipayungan bodas pulas emas moal nete Sumedang*” (selama belum dipayungi payung putih seleret emas ia tidak akan menginjak Sumedang). Kata “payung putih” di sini diasosiasikan dengan “payung kebesaran” atau “*songsong*” yang merupakan regalia atau alat-alat pusaka milik seorang bupati yang derajatnya paling tinggi. Pada zaman Mataram payung kebesaran ini disebut *payung bawat*. Sejak tahun 1820 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan tentang kelengkapan upacara yang boleh dimiliki para pejabat pribumi sesuai dengan tingkatan jabatannya. Salah satu regalia yang penting adalah *payung*.<sup>114</sup>

Besarnya kekuasaan seorang raja terhadap rakyatnya dilukiskan dengan kata-kata; “raja adalah pemilik jiwa raga serta yang menentukan hidup mati seseorang”. Oleh karena itu, kekuasaan seorang raja tidak boleh dilawan bila tidak ingin celaka. Atasan wajib dipuja dan dihormat. Hal ini tercermin dalam ungkapan “*guru ratu wong atua karo*”,<sup>115</sup> artinya harus taat kepada guru yang memberikan ilmu, taat kepada ratu (penguasa) yang *murba* (menguasai) negara, dan taat kepada orang tua. Rakyat wajib ngawula kepada penguasa sehingga bupati juga sering disebut *pangawulaan dalem*. Sebaliknya, penguasa juga wajib dilindungi

---

<sup>114</sup> Sastrahadiprawira, *Op. Cit.*, hlm 39

<sup>115</sup> R.A.A. Martanagara, *Babad Sumedang*, edisi Edi S. Ekadjati dan Said Raksakusumah (Bandung: Fakultas Sastra Unpad, 1981) hlm 4

rakyat.<sup>116</sup> Di sini tampak bahwa ada hubungan timbal balik yang perlu dijaga antara penguasa dengan yang dikuasai karena keduanya saling melengkapi dan saling membutuhkan. Hal ini bisa dianalogikan dengan konsep *kawula-gusti* dalam tradisi Jawa.<sup>117</sup>

Besarnya kekuasaan Raja Sunda dalam kacamata penulis tradisional abad ke-19 dapat diukur dengan istilah yang terdapat dalam *babad limbangan*. Dalam sumber ini Raja Pajajaran disebut *Ratu Murba Wisesa* (*murba* artinya menguasai dan *wisesa* artinya kekuasaan tertinggi). Istilah *murbawisesa* juga dikenakan kepada bupati selaku penguasa kabupaten. Dengan kekuasaan seperti ini diharapkan bahwa seorang bupati bisa menjadi “*tunggul payung sadayana para wargi*” (tempat berlindung semua sanak saudara) atau bisa “*ngauban baraya*”(melindungi sanak keluarga). Seorang bupati bukan hanya menjadi penguasa wilayah, melainkan juga menjadi pemilik wilayah itu, termasuk penghuninya. Apabila bupati menghendaki sesuatu, misalnya ternak, wanita atau sekedar hasil bumi, tak ada seorangpun yang dapat menghalanginya. Dalam tradisi lisan dikenal ungkapan; “*kutu-kutu walang taga, serebuk samerang bulu, eta kabeh kagungan ratu*” (macam-macam kutu, bubuk kecil sebesar bubuk padi, itu semuanya kepunyaan ratu).<sup>118</sup>

Besarnya kekuasaan *menak* bukan diukur dari luasnya wilayah yang dikuasai, melainkan dari jumlah *cacah* yang dimilikinya. Jadi dalam hal ini *cacah* dianggap sebagai harta benda. Di kalangan menak dikenal suatu tradisi yang disebut *nyanggrah*, yaitu memaksakan kehendak kepada rakyat jelata. Bilamana

---

<sup>116</sup> *Ibid*

<sup>117</sup> Soemarsaid Moertono, *Op.Cit.*, hlm 25

<sup>118</sup> Nina Lubis, *Op.Cit.*, 62-63

menginginkan sesuatu, siapapun tidak bisa menolak. Misalnya saja bila menak ingin menyanggrah wanita, cukup dengan meminta kepada orang tuanya untuk tidak mengawinkan sigadis atau langsung membawa sigadis ke ibu kota. Tradisi *nyanggrah* ternyata bukan hanya dilakukan oleh bupati saja, kaum menak di bawah pun bisa melakukan hal itu. Yang disanggrahi bukan hanya anak gadis, melainkan juga ternak dan harta benda lainnya. Bila seorang menak menginginkan kuda milik rakyatnya, cukup ia menggunting bulu suri kuda tersebut dan itu berarti kuda sudah menjadi miliknya.<sup>119</sup>

Perubahan terjadi ketika pemerintah Hindia Belanda menjalankan politik etis. Fungsi bupati dicoba dibersihkan dari tradisi lama. Mereka harus dianggap hanya sebagai salah satu mata rantai dalam dunia birokrasi. Karena itu, mereka perlu lebih mendapatkan pendidikan demi tuntutan efisiensi yang lebih tinggi dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada mereka. Pemerintah Belanda menyediakan pendidikan bagi putra-putra kepala pribumi. Ternyata pendidikan ini bagai pedang bermata dua. Di samping menghasilkan tenaga-tenaga pribumi terdidik, pendidikan Barat juga menghasilkan suatu generasi yang memiliki jiwa baru, antara lain jiwa demokrasi yang diimpor dari Barat. Nilai-nilai baru ini selanjutnya menghasilkan suatu kesadaran berbangsa dan melahirkan organisasi-organisasi pergerakan di antaranya adalah Organisasi Paguyuban Pasundan yang didirikan oleh para menak berpendidikan Barat (akan dibahas dalam Bab III)

Dampak dari pendidikan itu di kalangan putra-putra kaum menak sendiri mulai timbul kecenderungan lain; mereka lebih memilih pendidikan gaya Barat

---

<sup>119</sup> *Ibid*

seperti H.B.S. dan perguruan tinggi lainnya bila dibandingkan dengan pendidikan khusus kejuruan untuk para calon amtenar (OSVIA). Setelah lulus, kaum menak muda ini lebih senang memilih pekerjaan-pekerjaan bebas yang bukan pegawai negeri. Sementara itu kaum muda dari kalangan bukan menak, banyak yang memilih pendidikan OSVIA agar nantinya dapat duduk dalam jabatan birokrasi. Mereka inilah yang nantinya dianggap sebagai pendatang baru dikalangan kaum menak lama.

Perkembangan ini telah membawa gamang/samar perkembangan menak di Jawa Barat. Birokrasi tidak lagi menjadi unsur utama turun temurun menak. Putra-putra menak lama banyak terjun di dunia pergerakan kemerdekaan seperti Paguyuban Pasundan. Akan tetapi masih dapat dikenal putra-putra keturunan menak lama yang merupakan keturunan raja-raja Sunda dari gelar kebangsawanannya seperti menggunakan gelar kusuma, ningrat, suria dan nagara. Walaupun tidak memiliki wilayah dan kedudukan sebagaimana menak sebelumnya. Di Jawa Barat yang masih dikenal melalui situs-situs sejarah kerajaan hanya terdapat di Keraton Cirebon, Keraton Sumedanglarang dan Keraton Galuh di Ciamis. Banten pada tahun 2002 memisahkan diri menjadi provinsi tersendiri.

Kaum *menak* yang menjadi pejabat birokrasi, pada umumnya harus memiliki otoritas tradisioal yang mereka peroleh karena kelahiran (keturunan). Jadi, pada umumnya mereka memiliki kepemimpinan tradisional. Di antara para bupati di Priangan yang terkenal ada yang disebut-sebut memiliki kemampuan luar biasa.

Akan tetapi hal itu tidak cukup untuk mengkategorikannya sebagai pemimpin kharismatik.

Sebagai akibat pendidikan Barat yang diperkenalkan sejak pertengahan abad ke-19 dan semakin intensif lagi pada awal abad ke-20, di Jawa lahir golongan masyarakat baru yaitu kaum intelektual atau golongan cendekiawan. Di antara kaum cendekiawan ini terdapat kaum menak yang disebut sebagai menak intelektual. Sebagian di antara mereka ada yang ikut dalam pergerakan nasional. Tokoh-tokoh ini memiliki sifat kepemimpinan yang berbeda dari tokoh-tokoh *menak birokrat*. Oleh karena itu masalah kepemimpinan kaum *menak* dapat dibedakan antara kepemimpinan kaum *menak* yang duduk dalam birokrasi tradisional dan kepemimpinan kaum *menak intelektual*.

### **Militer (Siliwangi)**

Divisi Siliwangi adalah divisinya rakyat Jawa Barat yang tumbuh dari haribaan warga Jawa Barat. Siliwangi merupakan nama yang diberikan kepada tentara Divisi Jawa Barat. Siliwangi diresmikan menjadi organisasi atau susunan militer Jawa Barat semenjak tanggal 20 Mei 1946.<sup>120</sup> Pemberian nama itu diilhami oleh kebesaran Jawa Barat di masa lampau di mana Prabu dan keprabuan Siliwangi beroleh ketenaran. Prabu Siliwangi merupakan raja kerajaan Padjadjaran yang merupakan kerajaan Sunda terbesar. Pada masa Prabu Siliwangi rakyat Jawa Barat mengalami kemasyhuran dan kesejahteraan sehingga Siliwangi menjadi mitos masyarakat Jawa Barat akan kebesarannya.

---

<sup>120</sup> Sudjono Dirdjosisworo, *Siliwangi Dari Masa Ke masa* (Bandung: Kodam III Siliwangi, 1994) hlm 9-43

Sejarah Divisi Siliwangi tidak dapat dipisahkan dari sejarah Proklamasi 17 Agustus 1945 dari rakyat Indonesia. Jatuh banggunya Divisi Siliwangi bertautan dengan jatuh banggunya Proklamasi 17 Agustus 1945. Divisi Siliwangi itu lahir sebagai akibat daripada Proklamasi rakyat Indonesia, seperti halnya divisi-divisi lainnya di berbagai-bagai tempat di wilayah Tanah Air. Dilahirkanlah sebagai suatu keharusan yang tidak boleh tidak harus ada. Berdirinya Divisi Siliwangi dengan berpangkal tolaknya Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai organisasi pendahulunya yang berdiri pada tanggal 22 Agustus 1945.

Pendahulu Divisi Siliwangi ialah pasukan-pasukan bersenjata warga Jawa Barat yang dibentuk, disusun, bergerak di Jawa Barat sebelumnya. Badan-badan perjuangan atau badan-badan kelaskaran yang tercatat di Jawa Barat pasca kemerdekaan antara lain:<sup>121</sup>

- a. Pemuda Republik Indonesia (PRI) bermarkas di toko Ciyoda (sekarang toko Kota Tujuh) Bandung di bawah pimpinan Suprpto. Organisasi ini semula bernama Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia (PPPI) yang bermarkas di Jalan Tamblong.
- b. Angkatan pemuda Indonesia (API) cabang Bandung dibentuk antara lain oleh Astrawinata, Maulana, Wasito, Heru Sutrisno. Markasnya terletak di Jalan Lengkong Besar No. 74 Bandung.
- c. Lasykar Wanita Indonesia (Lasywi) dibentuk atas inisiatif Ibu Aruji Kartawinata pada tanggal 12 Oktober 1945. Anggota berjumlah kurang lebih 300 orang terdiri dari Pasukan Tempur, Palang Merah, Penyelidikan dan perbekalan. Di antara para tokohnya dapatlah disebutkan Nona Sabariah, Nona Isbandiah, Nona Jaja, Nona Hermiati, Nona Nani Ramani, Nona Suteja, Nona Setiasih, Ny. Atikah Natamiganda.
- d. Hizbullah dengan tokohnya antara lain Kamran, Husinsyah, Utarya, Gofar Ismali, H. Junaedi, Zaenal Abidin, Kadar Solihat, Syahbandar, Aminuddin Hamzah, Arustandi, Ahim, Samsuddin Hamid dan Mokhtar.

---

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm 23

- e. Sabillillah dengan tokoh-tokohnya antara lain Isya Anshari, Ismail Napu, H. Jaenuddin, Ajengan Toha, A. Mokhtar dan Kiyai Yusuf Tajiri.
- f. Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia (BPRI) yang merupakan cabang dari PBRI Surabaya. Anggotanya sebagian besar bekas anggota Pasukan Pelopor di masa pendudukan tentara Jepang yang dipimpin oleh Duyeh Suharsa. Sesudah Proklamasi, Pelopor sebahagian menjadi BPRI yang dipimpin oleh Suryadi dan Rivai.
- g. Barisan Banteng Republik Indonesia (BBRI) di Bandung antara lain dipimpin oleh Anwar Sutan Pamuncak dan Ido Garnida. Bagian tempur dipimpin antara lain oleh Rakhmat Sulaeman, Ben Alamsyah, Jojon, Tirtaatmadja, Toha, Jonjon, Isak. Markasnya semula di sekitar Banceuy akan tetapi kemudian dipindahkan ke Bojonggaok (Babakan Ciparay) di sekitar Situ Aksan Bandung.
- h. Barisan Berani Mati antara lain dipimpin oleh Effendi.
- i. Pemuda Indonesia Maluku (PIM) dengan tokohnya antara lain Pellaupessy, Andries, Leo Lopulisa, G. Latumahena.
- j. Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS) dengan tokoh-tokohnya antara lain Karundeng, Rapimpandey, dan Kadongan.
- k. Laskar Rakyat, antara lain di bawah pimpinan Emma Bratakusumah.
- l. Pasukan Istimewa, didirikan oleh pemuda-pemuda asal Tapanuli. Pimpinannya berada di tangan Pakpahan, Hutauruk, Josef Simanjuntak, Ali Nafiah yang bermarkas di Ciateul Bandung.
- m. Pasukan Garuda Putih dibawah pimpinan Sinaga.
- n. Pasukan Beruang merah (BMP) dikepalai oleh Abdullah Saleh bermarkas di Cigereleng Bandung.
- o. Barisan Merah Putih (BP) dipimpin antara lain oleh Nukman Abdullah Rais, Nukman dan A. Saat bermarkas di Ciateul Bandung.
- p. Polisi Istimewa (PI) dipimpin oleh M. Harswono, Danu Sutoyo bermarkas di Kebonjati.
- q. Angkatan Muda PTT (Sutoko), dan A.M. Kota Besar Bandung, antara lain dengan tokoh-tokohnya Ir. Juanda dan Suprayogi.
- r. Angkatan Muda Kereta Api dipimpin A. Supian dan Akhmad Tirto.

Kesemua Badan Kelaskaran itu berjuang bahu membahu dengan Komite Nasional Indonesia Jawa Barat dan kemudian juga dengan BKR. Mengenai pembentukan BKR di Jawa Barat ini A.H. Nasution dalam bukunya *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia* Jilid I, tertulis: "...KNI dibentuk tiga buah. Satu untuk Jawa Barat (R. Oto Iskandardinata), satu untuk Priangan (Hamdan), dan satu untuk kota (Syamsuridzal). Maka BKR-pun ada pula tiga tingkat. " BKR sepenuhnya diserahkan kepada opsir PETA di bawah pimpinan Aruji Kartawinata.

Seiring dengan perubahan BKR menjadi TKR pada tanggal 5 Oktober 1945 dengan lahirnya maklumat Pemerintah RI. Tentara Keamanan Rakyat (TKR) itu dibagi dalam Komandemen-komandemen yang di dalamnya terdapat beberapa Divisi. Komandemen Jawa Barat meliputi wilayah Jawa Barat dan Jakarta Raya. Nama resmi dari Komandemen Jawa Barat adalah Komandemen I Jawa Barat yang berkedudukan di Purwakarta dengan Panglimanya adalah Didi Kartasasmita dengan pangkat Jenderal Mayor, sedangkan Abdul Haris Nasution dengan pangkat Kolonel ditetapkan sebagai Kepala stafnya.

Komandemen I Jawa Barat berdasarkan ketetapan Markas Tertinggi TKR membawahi 3 divisi yaitu:

1. Divisi I yang meliputi keresidenan-keresidenan Banten dan Bogor dengan berkedudukan di Serang di bawah pimpinan Kyai Haji Syam'un dengan pangkat kolonel.
2. Divisi II meliputi keresidenan-keresidenan Jakarta dan Cirebon berkedudukan di Linggarjati di bawah pimpinan Asikin dengan pangkat kolonel.
3. Divisi III meliputi keresidenan Priangan berkedudukan di Bandung di bawah pimpinan Aruji Kartawinata dengan pangkat kolonel.<sup>122</sup>

Pada tanggal 7 Januari 1946 Tentara Keamanan Rakyat (TKR) tersebut diubah namanya menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Sebutan singkatannya tetap TKR. Perubahan nama itu ialah dengan Penetapan Pemerintah No. 2/S.D./1946. Umur Tentara Keselamatan Rakyat itu tidak panjang. Pada tanggal 25 Januari 1946 Pemerintah mengubah nama tersebut menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) berdasarkan Maklumat Pemerintah RI.

---

<sup>122</sup> *Ibid*

Reorganisasi tersebut di atas, buat Jawa Barat berarti peleburan Komandemen I Jawa Barat dengan ketiga Divisinya menjadi satu Divisi dengan sebutan Divisi I. Dengan tidak mengubah nama resmi Komandemen I Jawa Barat yaitu Divisi Siliwangi yang ditetapkan sebagai tanda pengenal dan kebesaran TRI Jawa Barat pada tanggal 20 Mei 1946 itu. Dengan panglima pertama Divisi baru tersebut yaitu Kolonel A.H. Nasution dengan pangkat Jenderal Mayor.

Keterlibatan Siliwangi dalam kancah politik di Jawa Barat seiring dengan keterlibatan militer dalam kancah politik nasional. Gubernur Jawa Barat sebagai jabatan politik senantiasa diisi oleh mantan-mantan Panglima Kodam Siliwangi yang berasal dari Jawa Barat seperti Aang Kunaefi, Mashudi, Solihin GP, Yogi S. Memet, dan R. Nuriana. Pada masa reformasi barulah Gubernur Jawa Barat dipilih dari golongan sipil yaitu Dani Setiawan mantan Sekwilda Jawa Barat.

Berturut-turut mantan Pangdam Siliwangi menjadi Gubernur menjadikan Siliwangi sebagai bagian dari kekuatan politik yang diperhitungkan di Jawa Barat yang merupakan bagian dari keterlibatan militer dalam politik secara nasional. Siliwangi sebagai bagian dari kekuatan politik di Jawa Barat mengembangkan lebih jauh dengan membentuk organisasi keluarga Siliwangi yang terbentuk dalam wadah Angkatan Muda Siliwangi (AMS).

Awal keterlibatan Siliwangi dalam politik Jawa Barat seiring dengan awal keterlibatan militer dalam politik di Indonesia. Keterlibatan militer dalam bidang politik dan ekonomi mendapat angin segar pada masa transisi dari Demokrasi Liberal ke Demokrasi Terpimpin (1957-1959).

Daniel S. Lev mengemukakan bahwa keterlibatan Angkatan Darat yang begitu cepat dalam politik didukung oleh pemberlakuan darurat perang serta kondisi ekonomi yang buruk pada masa-masa sekitar tahun 1957.<sup>123</sup>

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 muncul tuntutan yang kuat untuk terjadi reformasi ABRI maka ABRI melakukan reformasi sebagaimana tercantum dalam dokumen yang dikeluarkan Mabes TNI bulan Juni 1999, konsep pemikiran reformasi internal ABRI dilandasi oleh empat paradigma baru peran sosial politik ABRI (yang kemudian merubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia), yaitu :

1. Merubah posisi dan metode tidak selalu harus di depan.<sup>124</sup>
2. Merubah dari konsep menduduki menjadi mempengaruhi.<sup>125</sup>
3. Merubah dari cara-cara mempengaruhi secara langsung menjadi tidak langsung. Hal ini dilakukan untuk menghindari pelibatan TNI yang berlebihan.
4. Kesiapan untuk melakukan *political and role sharing* (kebersamaan dalam pengambilan keputusan penting kenegaraan dan pemerintahan) dengan komponen bangsa lainnya. Jalinan dan pembagian peran dengan mitra sipil akan menempatkan peran masing-masing institusi secara fungsional.

---

<sup>123</sup> Daniel S. Lev mengemukakan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada Angkatan Darat di bawah keadaan darurat memperluas kewenangan dan pengaruhnya ke bidang-bidang non-militer di mana hampir seluruh lembaga sipil di bawah kendali militer. Daniel S. Lev, *Transition to Guided Democracy in Indonesia 1957-1959* (Itaca-Newyork: Cornel University Press, 1964) hlm 75

<sup>124</sup> Mabes TNI, *Paradigma Baru Peran TNI* (Jakarta: Mabes TNI, 1999) hlm 22 :

“Hal ini mengandung arti bahwa kepeloporan dan keteladanan TNI dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dulu amat mengemuka dan secara kondisi objektif memang diperlukan pada masa itu, kini dapat berubah untuk memberi jalan guna dilaksanakan oleh institusi fungsional. Posisi dan metode tidak selalu di depan dirasakan mampu menyikapi realitas politik yang ada, namun sebagai pilar dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa TNI tetap menjunjung tinggi ketertiban politik dan kepastian hukum.”

<sup>125</sup> Ibid, hlm 22 :

“Jika dulu penugasan di luar struktur TNI mencakup lingkup yang amat luas, pada masa mendatang lingkup tersebut makin diperkecil, dan dibatasi pada posisi yang memiliki nilai strategis serta mengurangi keterlibatannya dalam kegiatan politik praktis. Mempengaruhi tidak berkonotasi intervensi tetapi lebih bermakna kontribusi pemikiran yang konstruktif.”

Perubahan itu salah satunya terjadi di Jawa Barat di mana biasanya Gubernur Jawa Barat selalu mantan Panglima Kodam III Siliwangi pada pemilihan gubernur tahun 2003 berubah dengan terpilihnya Dani Setiawan mantan Sekwilda Jawa Barat yang didukung Partai Golkar, PPP, dan PAN. Sedangkan lawannya adalah mantan Pangdam III Siliwangi yaitu Mayjen Tayo Tarmadi yang didukung PDIP dan PKB. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pemisahan Golkar dengan TNI bahkan fraksi TNI abstain.

Dengan perubahan itu tidak berarti bahwa peran TNI dalam politik praktis hilang sama sekali, sebab dengan sekian lamanya TNI berkiprah dalam politik dengan menggunakan dwifungsinya itu telah mengakar kuat di tengah masyarakat sehingga bisa saja perubahan itu terjadi karena di tengah transisi demokratisasi politik Indonesia. Di mana sewaktu-waktu dapat bangkit kembali militer dalam kancah politik Indonesia.

### **Petani**

Provinsi Jawa Barat merupakan lumbung padi nasional karena daerah Jawa Barat adalah daerah agraris dari luas wilayah 3.710.035 Hektar sebagian besar merupakan areal pertanian yaitu sekitar 1.792.320 Hektar dengan produksi padi sawah sekitar 9.166.872 Ton pada tahun 2002 yang mengalami penurunan pada tahun 2003 dengan luas panen sekitar 1.664.586 Hektar dengan produksi padi pada tahun yang sama sekitar 8.776.889 Ton. Di tambah dengan pertanian padi ladang dengan luas sekitar 119.842 Hektar dengan produksi padi ladang sekitar 295.491 Ton. Daerah-daerah yang menjadi lokomotif padi seperti Kabupaten

Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Inderamayu, dan Kabupaten Cirebon.

Hal itu didukung dengan kondisi geografis Jawa Barat di mana kawasan utara merupakan daerah berdataran rendah, sedangkan kawasan selatan berbukit-bukit dengan sedikit pantai serta dataran tinggi bergunung-gunung ada di kawasan tengah.

Selain itu, Jawa Barat yang memiliki lahan yang subur yang berasal dari endapan vulkanis serta banyaknya aliran sungai menyebabkan sebagian besar dari luas tanahnya digunakan untuk pertanian. Hal ini menyebabkan Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebagai lumbung pangan nasional. Jawa Barat yang beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 188.63 mm.

Penduduk Jawa Barat mayoritas bekerja dibidang pertanian dengan jumlah sekitar 4.619.414 orang atau sekitar 31,81% dari penduduk yang bekerja di Jawa Barat menurut lapangan usaha, sehingga hal ini apabila dilihat dari kacamata politik merupakan sebuah kekuatan politik yang cukup besar apabila petani dapat dikelola menjadi sumber kekuatan politik.

Dalam sejarah Jawa Barat dikenal bahwa mata pencaharian utama penduduk Priangan pada mulanya berladang atau *ngahuma*; baru kemudian bersawah.<sup>126</sup> Sejak zaman Kerajaan Sunda, orang sunda dikenal bermata pencaharian sebagai peladang.<sup>127</sup> Hingga pertengahan abad ke-19, berladang masih merupakan pola yang umum di pedalaman Jawa Barat. Usaha bersawah sebenarnya juga sudah

---

<sup>126</sup> D.H. Burger, *Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia* (Jakarta: Pradnja Paramita, 1970) hlm 119

<sup>127</sup> Saleh Danasasmita et.al., *Sewaka Darma; Sanghyang Siksakandang Karesian, Amanah dari Galunggung* (Bandung: Proyek Sundanologi, 1987) hlm 100

digalakan pada waktu Mataram melebarkan kekuasaannya ke Priangan. Di beberapa daerah koloni dibuat pesawahan. Seorang pejabat VOC bernama Juliaen dan Silva melaporkan bahwa ketika ia pada tanggal 5 Juni 1641 bersama enam orang Jawa melakukan perjalanan dari Banten menyusuri Kali Krawang, ia melihat penduduk di beberapa kampung di pinggir kali yang menimbun padi dalam jumlah banyak. Pesawahan baru dibuka secara luas di berbagai daerah seperti Ciawi (Bogor), Bandung, Garut, Cianjur dan Sumedang.<sup>128</sup>

Kehidupan perekonomian di Priangan pada abad ke-17 ini tidak bisa dilepaskan dari perkebunan kopi.<sup>129</sup> Pada tahun 1706 VOC memerintahkan kepada para kepala pribumi di Jawa untuk menanam kopi di Jawa. Aria Wiratanu dari Cianjur tercatat sebagai kepala pribumi pertama yang menyetorkan kopi ke Batavia. Para bupati Priangan yang menjadi pemasok kopi. Kejayaan berakhir pada 1 Januari 1917, ketika kopi Jawa tidak mampu lagi bersaing dengan produk dari Negara lain sehingga penanaman kopi dihentikan.<sup>130</sup>

Pada abad ke-19, penduduk di daerah pegunungan selain bekerja diperkebunan kopi, ada juga yang bekerja di *onderneming* (perkebunan) kina, teh, karet, kelapa, cokelat, lada, dan serat nenas. Perkebunan kina yang terletak diketinggian antar 1.000-1.8000 m mulai dibangun pada awal abad ke-19. Jumlah perkebunan di Priangan meningkat sejak diberlakukannya Undang-undang Agraria tahun 1870 yang membuka pintu bagi modal swasta. Pada akhir abad ke-19 perkebunan teh semakin marak. Pada tahun 1902 di Jawa Barat tercatat ada 81

---

<sup>128</sup> J.A. Van Der Chijs dan Raden Kartawinata, *Babad Tanah Pasundan*, transliterasi Edi S. Ekadjati, ed. (Bandung: Fakultas Sastra Unpad, 1994) hlm 149

<sup>129</sup> Nina Lubis, *Op.Cit.*, hlm 27-28

<sup>130</sup> *Ibid*

buah perkebunan teh di samping 60 perkebunan kina. Perkebunan teh terbaik ada di Pangalengan dan di sekitar Gunung Patuha, sedangkan perkebunan kina milik pemerintah yang cukup berarti di Kabupaten Bandung, Tasikmalaya dan Ciamis.<sup>131</sup>

Dalam sejarah Jawa Barat terkenal pula dengan pemberontakan petani. Pada masa penjajahan Jepang seperti pemberontakan petani pernah terjadi pada bulan Pebruari 1944 di Tasikmalaya yang diprakarsai oleh Kiai Zaenal Mustafa sebagai pemimpin Pondok Pesantren Sukamanah. Pesantren Sukamanah didirikan oleh kiyai Zainal Mustafa pada tahun 1927 merupakan salah satu pusat pengajaran Islam di pedesaan yang terletak di Desa Cimerah, Kecamatan Singaparna. Pesantren ini merupakan salah satu pesantren terkenal dan terbesar di wilayah Priangan Timur dengan sekitar 900 santri yang datang dari berbagai bagian wilayah Jawa Barat.<sup>132</sup>

Motif pemberontakan menurut Benda berdasarkan sebuah laporan polisi setempat, menyatakan bahwa pemberontakan tersebut berlangsung setelah adanya pengumuman pemerintah supaya seluruh padi termasuk yang dicadangkan untuk bibit dan konsumsi rumah tangga harus diserahkan kepada pemerintah. Penafsiran serupa dibuat oleh seorang pejabat *Shumubu* dalam laporannya: "Penyebab penting ialah bahwa pemerintah memberikan prioritas

---

<sup>131</sup> Robert Van Niel, *Munculnya Elit Modern Indonesia* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984) hlm 42-43 dan hlm 213-214

<sup>132</sup> Aiko Kurasawa, *Mobilisasi dan Kontrol Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945* (Jakarta: PT Gramedia, 1993) hlm 457-469

kepada penyerahan padi melebihi zakat yang menurut ajaran agama harus didahulukan”.<sup>133</sup>

Namun Togashi,<sup>134</sup> yang menyelidiki kasus tersebut, menyatakan bahwa penyerahan padi merupakan penyebab lebih kecil bagi timbulnya pemberontakan tersebut, bertentangan dengan penafsiran yang diterima secara umum. Sebaliknya, Benda juga menyatakan bahwa sebuah dekret Sucboka Priangan, Yang memerintahkan pendaftaran ulama pada kantor keresidenan, mungkin merupakan salah satu faktor pendorong pemberontakan K. Z. Mustafa ini.

Dalam pemberontakan itu yang meninggal mencapai ratusan orang. Dari pihak para santri 89 orang meninggal dalam pertempuran tersebut dan sekitar 700 sampai 800 ditangkap bersama dengan K. Zainal Mustafa dan diangkut ke Tasikmalaya. K.H. Zainal Musthafa diadili di pengadilan militer di Jakarta, dihukum mati dan dieksekusi pada tanggal 25 Oktober.

Selain itu terjadi pemberontakan petani di Indramayu. Indramayu merupakan daerah pertanian yang terkemuka dengan beras sebagai tanaman utamanya. Iuas seluruh kabupaten adalah 203.652 hektar, di antaranya merupakan persawahan seluas 113.232 hektar atau 65,5% sewaktu pendudukan Jepang. Daerah ini merupakan gudang beras Jawa, bersama dengan daerah Karawang, Bekasi, dan daerah Jember, Banyuwangi.<sup>135</sup>

Pemberontakan di Indramayu pertama kali pecah di Desa Kaplongan di Kecamatan Karangampel (di ujung Barat Indramayu) atau sekitar 30

---

<sup>133</sup> *Ibid*

<sup>134</sup> *Ibid*

<sup>135</sup> *Ibid*, hlm 471-492

kilometer sebelah Utara Cirebon. Pemberontakan tersebut sekitar bulan April 1944. Kemudian, seperti reaksi berantai menyebar ke petani-petani di daerah perbatasan Kecamatan Sindang dan Lohbener. Pemberontakan ini sering dirujuk oleh masyarakat setempat sebagai pemberontakan Cidempet, karena diprakarsai oleh petani Desa Cidempet, dan melibatkan dua belas desa tetangga di perbatasan kedua kecamatan tersebut. Daerah ini sekitar 15 kilometer sebelah Barat daya kota Indramayu.

Setelah ledakan besar di daerah tersebut, pemberontakan meluas ke Kecamatan Lohsarang, Siliyeg, dan Kertasemaya, dan akhirnya mencapai ujung Barat Indramayu yaitu Desa Bugis di Kecamatan Anjatan. Desa Bugis terletak di perbatasan Barat Kabupaten Indramayu dan berseberangan dengan sungai Cipunegara Kabupaten Subang. Pemberontakan di Desa Bugis terjadi pada bulan Juni 1944.

Pemberontakan berlangsung antara bulan April dan Agustus 1944, sewaktu musim panen besar dan mengambil bentuk perlawanan terhadap wajib serah padi. Di desa-desa Indramayu, petani diperintahkan untuk menyerahkan kuota padi per hektar yang sangat tinggi berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Lebih jauh lagi, para petani menderita akibat kegagalan panen yang serius pada musim penghujan tahun 1944.<sup>136</sup>

Menganalisis pemberontakan tersebut, bisa dicatat beberapa hal penting antara lain: *Pertama*, sifat dasar pemberontakan-pemberontakan tersebut benar-benar spontan. Tidak ada dukungan organisasi, bersifat nonpolitis,

---

<sup>136</sup> *Ibid*

serta tidak direncanakan, jika dilihat dari cara petani bergerak serta dari perkembangan pemberontakan. *Kedua*, penyebab pemberontakan adalah kemarahan petani atas permintaan padi. Namun, harus dicatat bahwa tidak seorang pun berani memberontak pada tahap awal, ketika hanya kuota tetap per hektar yang diminta. Pemberontakan tersebut muncul pada tahap akhir ketika sisa padi pun harus diserahkan, karena hal ini mengancam kelangsungan hidup mereka sendiri.

*Ketiga*, prakarsa pemberontakan diambil oleh petani kaya, yang terutama berada di luar kalangan penguasa desa. Di Kaplongan, Haji Aksan adalah pemilik sekitar 20 hektar sawah. Dan tujuh dari dua belas orang yang ditangkap di sana adalah petani kaya. Di Cidampit, Haji Madrias dan seluruh tokoh utama lainnya dalam pemberontakan tersebut memiliki 20 sampai 100 hektar sawah. Mudah dipahami bahwa petani-petani yang lebih kaya, aktif dalam pemberontakan, ketika tahap kedua permintaan padi lebih tertuju kepada petani kaya. Tetapi hal ini juga mempengaruhi nasib banyak petani tak bertanah, karena kehidupan petani tanpa tanah tergantung pada beberapa orang pemilik tanah kaya. Sebagai akibatnya, pemberontakan tersebut didukung oleh para petani tak bertanah.

*Keempat*, kebencian petani selalu diarahkan kepada pamong desa dan pangreh praja rendahan. Sebab pejabat desa bekerja sebagai agen-agen pemerintah dan bukan sebagai pemimpin rakyat.

Pada masa Orde Baru kekuatan politik petani dihimpun dalam suatu wadah yaitu Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) pada tahun 1973

di Jakarta. Terbentuknya HKTI merupakan peleburan dari organisasi-organisasi tani yang antara lain Warga Tani Kosgoro, Tani MKGR, Pertanu, Petani, Perta, Kata Pancasila, Gertami, Gertasi, Pertakin, dan Sakti.<sup>137</sup>

HKTI terbentuk diseluruh Indonesia termasuk Provinsi Jawa Barat. HKTI bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu kehidupan petani, masyarakat pedesaan dan pelaku-pelaku agribisnis lainnya melalui pembangunan sistem agribisnis kerakyatan. HKTI Jawa Barat terdiri dari 25 cabang atau sebanyak kabupaten/kota di Jawa Barat. Tingkat organisasi kecamatan disebut anak cabang dan ditingkat desa terdapat struktur organisasi ranting. Dalam HKTI selain struktur organisasi inti terdapat struktur organisasi pendukung yang antara lain terdapat Badan Khusus Pemuda Tani, Badan Khusus Wanita Tani, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum serta Lembaga Litbang.<sup>138</sup>

Di Jawa Barat organisasi tani selain HKTI terdapat pula organisasi tani lainnya seperti Serikat Petani Pasundan yang bergerak banyak di wilayah Priangan. Ada juga organisasi Federasi Serikat Petani Indonesia (FPSI). Organisasi-organisasi tersebut memiliki tujuan yang sama untuk memperjuangkan hak-hak para petani untuk kesejahteraan kehidupan para petani.

Gerakan politik yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tani tersebut dapat terlihat pada peringatan hari tani (24 September 2006) dimana dilakukan demonstrasi besar-besaran pada tanggal 19 September 2006 di

---

<sup>137</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Umum HKTI Jawa Barat Ir. Rudi Gunawan pada tanggal 11 Desember 2006

<sup>138</sup> Profil HKTI Jawa Barat tahun 2006

gedung DPR RI untuk menuntut penolakan akan impor beras yang dirasakan akan memiskinkan kaum tani selain itu tema sentral yang diusung adalah pembaharuan undang-undang agraria yang dirasakan banyak merugikan bahkan menghilangkan lahan para petani serta penyelesaian kasus sengketa tanah di seluruh daerah di Indonesia. Demonstrasi itu dilakukan oleh beberapa organisasi tani yang antara lain FPSI, SPP, Serikat Petani Banten (SPB) Petani Karawang, Petani Bogor dan Petani Cirebon.<sup>139</sup>

SPP melakukan gerakan pembelaan kepada para petani di antaranya di Desa Margaharja Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis. Petani Desa Margaharja yang tanah garapannya tergusur oleh perhutani sehingga terjadi konflik berlarut-larut padahal petani telah menggarap tanah tersebut semenjak leluhur mereka tetapi perhutani mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah perhutani. Konflik itu memuncak terutama pada tahun 2001 sekitar 2 SSK aparat kepolisian datang untuk mengusir masyarakat dari lahan garapannya. Upaya tersebut mendapatkan perlawanan sengit dari masyarakat yang mengakibatkan seorang petani terluka akibat terkena tembakan di paha kanannya. Walaupun banyak sekali upaya intimidasi dan penangkapan yang dilakukan oleh perhutani dengan aparat keamanan, hal tersebut tidak menjadikan semangat masyarakat mengendur. Bahkan akibatnya kekompakan dan solidaritas untuk mempertahankan lahan garapan semakin kuat sampai sekarang.<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> Pembaruan Tani, edisi 32-Oktober 2006

<sup>140</sup> Ibid

Kasus pembelaan tanah petani terjadi pula di Kabupaten Indramayu Kecamatan Tukdana Desa Sukamulya di mana terjadi sengketa atas lahan petani seluas 48 ha yang diklaim oleh seorang pemilik tanah bernama Suhana dengan menggunakan dokumen palsu. Di pengadilan Suhana menang sampai ke tingkat kasasi di MA, tetapi masyarakat dapat memberikan fakta baru bahwa dokumen Suhana adalah palsu sehingga pihak kejaksaan dapat menahan Suhana dan kawan-kawan atas pemalsuan tersebut.

Aksi yang dilakukan oleh Front Petani Penggarap Lumbung Padi Indramayu (FPPLPI) dengan cara berdemonstrasi besar-besaran di kejaksaan kemudian melakukan pembakaran atas gubug-gubug yang dibangun Suhana. Petani membangun posko gerakan petani dan menjaga ketat lahan 48 ha tersebut sehingga Suhana tidak dapat menguasainya. Dengan perjuangan yang bertahun-tahun itu akhirnya dimenangkan oleh para petani dan mengakibatkan suhana menjadi terpidana kasus pemalsuan atas dokumen tanah tersebut.<sup>141</sup>

Kedua kasus sengketa tanah di atas merupakan sebagian kecil dari beberapa kasus yang melibatkan para petani untuk bergerak membela hak-hak petani. Walaupun gerakan petani lebih kepada mempertahankan kehidupan atau tanah mereka tetapi hal itu menunjukkan bahwa kepedulian petani atas kondisi yang tengah terjadi di antara mereka. Mungkin kasus pembelaan petani yang lebih besar harus diperjuangkan secara politik di antaranya adalah tentang impor beras, harga pupuk, harga gabah dan undang-undang agraria yang lebih memihak kepada mereka.

---

<sup>141</sup> Harian Pikiran Rakyat tanggal 11 November 2006

## Partai Politik

Partai politik sebagai kekuatan politik dapat dilihat dari setiap pemilu mulai dari pemilu 1955 sampai dengan pemilu 2004. Pada pemilu 1955<sup>142</sup> diikuti oleh Parpol dan Perorangan, peraih suara terbanyak di Jawa Barat adalah Masyumi yang berhasil mengumpulkan 26,5 %, disusul oleh PNI dengan persentase 22,1 %, PKI (10,9 %), NU (9,7 %), serta PSII dan Perti (masing-masing 5,7 %).

Jika dijumlahkan, persentase perolehan suara keseluruhan partai-partai Islam adalah 41,9 %. Walaupun angka ini belum dapat menempatkan partai-partai Islam tersebut sebagai peraih mayoritas, tetapi dengan melihat persentase yang cukup tinggi bahkan kurang lebih sama dengan persentase secara nasional, hal ini menunjukkan bahwa aspek ke-Islam-an merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan politik di Jawa Barat, khususnya pada masa itu.

Hasil Pemilu pada tahun 1971 yang diikuti 10 partai politik adalah Sekber Golkar yang untuk daerah Jawa Barat mampu mengumpulkan 7.625.797 (76,12%) dari 10.017.708 suara sah yang masuk. Hal ini berarti Golkar sekaligus meraih suara mayoritas. Kemudian disusul oleh NU yang meraih 1.310.679 (13,08%). Parmusi (399.730/3,99%), PSII (304.989/3,04%) dan PNI (172.551/1,72%), sedangkan 5 partai lainnya, yaitu Perti, Perkindo, Partai Katholik, Murba, dan IPKI hanya mampu meraih suara masing-masing 55.315,

---

<sup>142</sup> Data pemilu 1955 untuk Provinsi Jawa Barat berdasarkan Laporan Panitia Pemilu Provinsi Jawa Barat. Data itu diperoleh di Badan Arsip Nasional Jakarta.

12.013, 40.679, 10.042 dan 69.913 suara, yang jika dijumlahkan suara yang diraih kelima partai itu dipersentasikan hanya 2,05%.<sup>143</sup>

Adapun hasil Pemilu Tahun 1977 yang diikuti 3 partai politik adalah: Golkar berada di posisi teratas dengan meraih 7.925.7289 (66,27%) dari 11.595.500 suara yang sah. PPP di urutan kedua dengan meraih 3.413.310 (28,54%) dan PDI menempati tempat ketiga dengan perolehan suara 620.462 (5,19%).

Dalam Pemilu tahun 1982<sup>144</sup> diperoleh hasil suara masing-masing OPP sebagai berikut: Golkar berhasil meraih 8.596.458 suara (63,34%) dari 13.572.006 suara yang sah, disusul kemudian oleh PPP yang meraih 3.687.132 (27,16%) suara dan PDI meraih 1.288.416 (9,5%).

Dalam Pemilu 1987<sup>145</sup> rekapitulasi perolehan suara di Jawa Barat untuk masing-masing OPP sebagai berikut: Golkar memperoleh 11.347.051 (71,3%) dari 15.911.962 suara yang sah, sekaligus semakin memperkokoh posisi pertama. Disusul kemudian oleh PDI yang memperoleh 2.376.065 (14,9% diposisi kedua, sedangkan PPP tergeser ke posisi ketiga dengan hanya memperoleh 2.197.846 (13,8%).

---

<sup>143</sup> Data pemilu 1971 untuk Provinsi Jawa Barat berdasarkan Laporan Panitia Pemilu Provinsi Jawa Barat. Data itu diperoleh di Badan Arsip Nasional Jakarta.

<sup>144</sup> Data pemilu 1982 untuk Provinsi Jawa Barat berdasarkan Laporan Panitia Pemilu Provinsi Jawa Barat. Data itu diperoleh di Badan Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat.

<sup>145</sup> Data pemilu 1987 untuk Provinsi Jawa Barat berdasarkan Laporan Panitia Pemilu Provinsi Jawa Barat. Data itu diperoleh di Badan Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pemilihan Umum yang dilaksanakan tahun 1992.<sup>146</sup> Dalam Pemilu kali ini, Golkar Jawa Barat meraih 13.387.007 (70,49%) dari 18.993.272 (14,93%) dan PDI dengan 2.796.952 suara (14,58%) di urutan ketiga.

Dalam Pemilu kali ini PPP mulai bangkit kembali di Jawa Barat, walaupun hasil yang diraihnya tidak menyolok, tetapi cukup menggembirakan paling tidak PPP dapat meraih kembali kedudukannya di posisi kedua setelah sempat digeser PDI dalam Pemilu 1987. Memang selisih perolehan suara antara PPP dan PDI dalam Pemilu 1982 tidak jauh berbeda, tapi jelas PDI mengalami penurunan persentase perolehan suara yaitu dari 14,9% menjadi 14,58. Hal yang sama juga dialami oleh Golkar yang mengalami penurunan persentase dari 71,3% menjadi 70,49%.

Pemilu 1997<sup>147</sup> Di Jawa Barat Golkar masih menjadi partai peraih suara mayoritas untuk tingkat nasional (DPR RI) Golkar mendapatkan 16.709.824 suara, disusul PPP yang mendapatkan suara 6.003.471 dan ketiga ditempati PDI yang meraih suara 387.938 suara. Adapun di tingkat provinsi (DPRD) Jawa Barat Golkar meraih 16.518.351 suara, PPP meraih 5.991.973 suara dan PDI meraih suara terendah yaitu 383.043 suara.

Pemilu 1999<sup>148</sup> PDIP muncul sebagai pemenang dalam pemilu 1999 baik ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Di Jawa Barat PDIP meraih

---

<sup>146</sup> Data pemilu 1992 untuk Provinsi Jawa Barat berdasarkan Laporan Panitia Pemilu Provinsi Jawa Barat. Data itu diperoleh di Badan Arsip Daerah Provinsi Jawa Barat.

<sup>147</sup> Data pemilu 1977 untuk Provinsi Jawa Barat berdasarkan Laporan Panitia Pemilu Provinsi Jawa Barat. Data itu diperoleh di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat.

<sup>148</sup> Data pemilu 1999 untuk Provinsi Jawa Barat berdasarkan Laporan Panitia Pemilu Provinsi Jawa Barat. Data itu diperoleh di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat.

5.397.235 suara atau 32,21% untuk tingkat DPR RI dan untuk DPRD I meraih 5.387.993 suara atau 32,20% dengan demikian PDIP berada pada urutan pertama disusul Partai Golkar pada urutan kedua dengan meraih 4.009.344 suara atau 23,93 % untuk DPR RI dan untuk DPRD I meraih 4.010.294 suara atau 23,97 %. Peraih suara ketiga PPP dengan meraih 2.581.929 suara atau 15,14% untuk DPR RI dan untuk DPRD I meraih 2.581.713 suara atau 15,43%.

Peraih suara keempat di Jawa Barat adalah PAN yang memperoleh 1.248.817 atau 7,45% untuk DPR RI dan untuk DPRD I memperoleh 1.220.622 atau 7,30%. Kelima adalah PKB dengan memperoleh 1.132.522 suara atau 6,76% untuk DPR RI dan untuk DPRD I memperoleh 1.138.538 suara atau 6,80%. Keenam yaitu PBB dengan perolehan 642.804 suara atau 3,81% untuk DPR RI dan untuk DPRD I memperoleh 648.578 suara atau 3,88%. Ketujuh adalah Partai Keadilan (PK) yang memperoleh 444.810 suara atau 2,06% untuk DPR RI dan untuk DPRD I memperoleh 455.224 suara atau 2,42%. Kedelapan adalah Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yang memperoleh 182.045 suara atau 1,09% untuk DPR RI dan untuk DPRD I memperoleh 181.473 suara atau 1,08%. Partai-partai yang lainnya hanya memperoleh dibawah 1%.

Pemilu 2004<sup>149</sup> Pemilu di Jawa Barat pada tahun 2004 diikuti 24 partai politik sebagaimana di provinsi lain. Sedangkan peserta pemilu perseorangan diikuti oleh 42 orang untuk memilih anggota DPD. Pemilihan anggota DPD dimenangkan oleh Ginandjar Kartasasmita pada urutan pertama disusul Pangeran Arief Natadiningrat pada urutan kedua. Ketiga adalah Mohammad Surya dan

---

<sup>149</sup> Data pemilu 2004 untuk Provinsi Jawa Barat berdasarkan Laporan Panitia Pemilu Provinsi Jawa Barat. Data itu diperoleh di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat.

keempat Sofyan Yahya. Kemenangan keempat anggota DPD ini akan di bahas lebih lanjut dalam disertasi ini.

Pada pemilu 2004 terjadi perubahan suhu politik dengan kembalinya kemenangan bagi partai Golkar yang memperoleh 5.777.935 suara atau 27,90% sehingga menduduki urutan *pertama* disusul pada urutan *kedua* yaitu PDIP dengan meraih 3.640.703 suara atau 17,58%. Urutan *ketiga* diraih PKS yang merupakan pembaharuan dari Partai Keadilan (PK) pada pemilu 1999 dengan memperoleh 2.407.982 suara atau 11,63%. *Keempat* adalah PPP dengan memperoleh 2.186.373 suara atau 10,56%. *Kelima* yaitu Partai Demokrat dengan memperoleh 1.610.093 suara atau 7,78%. *Keenam* adalah PKB dengan memperoleh 1.080.554 suara atau 5,22%. *Ketujuh* adalah PAN dengan memperoleh 1.064.257 suara atau 5,14%. *Kedelapan* adalah PBB dengan memperoleh 612.735 suara atau 2,96%. *Kesembilan* yaitu PKPB yang memperoleh 431.847 suara atau 2,09%. *Kesepuluh* adalah PBR dengan memperoleh 388.801 suara atau 1,88% dan *kesebelas* adalah PDS yang memperoleh 242.466 suara atau 1,17%. Sedangkan partai yang lainnya memperoleh suara di bawah 1%.

### **BAB III**

#### **DUKUNGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

#### **PADA PENCALONAN ANGGOTA DPD**

Bab ini akan menguraikan dukungan politik organisasi kemasyarakatan pada pencalonan anggota DPD. Pembahasan ini meliputi, *pertama*, tentang biografi dan ketokohan keempat anggota DPD terpilih Jawa Barat. *Kedua*, organisasi-organisasi sebagai basis dukungan. *Ketiga*, alasan-alasan organisasi-organisasi pendukung. *Keempat*, peran organisasi Kemasyarakatan terhadap kemenangan anggota DPD Jawa Barat.

Pemaparan tersebut dimaksudkan untuk menggambarkan secara rinci latar belakang anggota DPD Jawa Barat sehingga dapat terlihat aspek ketokohan dan peran mereka di tengah masyarakat Jawa Barat. Di samping itu untuk menggambarkan organisasi-organisasi sebagai basis dukungan bagi keempat anggota DPD tersebut. Organisasi-organisasi tersebut juga dapat berfungsi sebagai jaringan komunikasi antara anggota DPD dengan pemilih. Lebih jauh lagi bab ini untuk menjawab pertanyaan tentang alasan-alasan organisasi memberikan dukungan kepada keempat anggota DPD Jawa Barat.

#### **Biografi dan ketokohan Keempat Anggota DPD Jawa Barat**

Di dalam uraian ini akan menggambarkan biografi dan ketokohan keempat anggota DPD Jawa Barat yang terpilih pada Pemilu 2004. Keempat anggota DPD tersebut adalah Prof. Dr. Ir. H. Ginandjar Kartasasmita, Pangeran Raja Adipati

Arief Natadiningrat, SE, Prof. Dr. H. Mohammad Surya, dan K.H. Sofyan Yahya, MA. Lebih lanjut dibahas pula visi dan misi mereka mencalonkan menjadi anggota DPD Jawa Barat pada pemilu 2004.

**Prof. Dr. Ir. H. Ginandjar Kartasasmita.**

Ginandjar Kartasasmita dilahirkan di Bandung pada tanggal 9 April 1941. Sekolah beliau mulailah dari tingkat dasar sampai SMU ditamatkan di Jakarta kemudian ia meraih gelar Insinyur tahun 1960 dari ITB. Ia melanjutkan studi di Tokyo University for Agriculture and Technology Chemical Engineering Jepang dengan meraih gelar sarjana Kimia Teknik tahun 1965. Gelar sarjana Administrasi Negara ia peroleh dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi LAN pada tahun 1980. Tiga gelar Doktor Honoris Causa diraih dari Takushoku University, Northeastern University pada tahun 1994 dan pada tahun 1995 ia memperoleh Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada tahun 1995 ia memperoleh gelar Guru Besar ilmu administrasi negara dari Universitas Brawijaya, Malang.<sup>1</sup> Ginandjar juga merupakan perwira militer, tepatnya TNI AU. Pangkat terakhirnya Marsekal Madya TNI.

Awal karir Ginandjar Kartasasmita dimulai dari menjabat kepala bagian penelitian pada tahun 1968-1971, biro analisa dan perundang-undangan sekretariat kabinet. Pada tahun 1976 diangkat menjadi asisten Sekretaris Negara urusan

---

<sup>1</sup> Profil anggota DPD RI dapat dilihat dalam buku Sekretariat Jenderal MPR/DPD RI, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia & Profil Anggota DPD RI 2004-2009* (Jakarta: SetJen MPR/DPD RI, 2005) hlm 125-130. Dilengkapi juga dengan hasil wawancara dengan Nugraha Besoes (Ketua Tim Sukses Ginandjar Kartasasmita) yang ditunjuk oleh Ginandjar Kartasasmita untuk menjadi informan mewakili beliau dalam penelitian disertasi ini. Wawancara dengan Nugraha Besoes dilakukan pada tanggal 15 November 2006 bertempat di Gedung PSSI Jakarta.

administrasi pemerintahan. Selanjutnya ia menjadi asisten Menteri Sekretaris Negara urusan administrasi pemerintahan dan administrasi pemerintahan non departemen pada tahun 1978-1983.

Ginandjar Kartasasmita diangkat untuk pertama kalinya menjadi menteri yakni Menteri Muda urusan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri pada tahun 1983-1988. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (1985-1988), Menteri Pertambangan dan Energi (1988-1993) dan Ketua Bappenas pada tahun 1993-1998. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri sekaligus merangkap ketua Bappenas (Maret 1998-Mei 1998) dan Menteri Negara Koordinator bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri pada awal era reformasi (Mei 1998-September 1999).

Aktivitas politik Ginandjar sejak menjadi anggota MPR sekaligus anggota BP MPR pada tahun 1982. Pengabdianya di MPR terus berlanjut dengan menduduki beberapa jabatan, antara lain anggota MPR merangkap ketua PAH I BP MPR (selama dua periode, sejak 1987-1997), Ketua Fraksi Golkar (1997-1999) dan terakhir Wakil Ketua MPR dari unsur Fraksi Partai Golkar (1999-2004).

Keterlibatan Ginandjar di dunia perguruan tinggi dalam bentuk sebagai penyantun. Untuk hal ini, antara lain tercatat sebagai Anggota dan Pj. Ketua Dewan Penyantun Universitas Pancasila, Ketua Penyantun Universitas Dharma Persada (1991-sekarang), Anggota Dewan Penyantun Universitas Padjajaran (1995-sekarang) dan Ketua Dewan Penyantun Universitas Pasundan.

Ginandjar Kartasasmita telah merumuskan visinya sebagai anggota DPD yakni mewujudkan lembaga perwakilan yang berwibawa, kuat, modern dan mampu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dan daerah dalam bingkai NKRI. Selain itu visi beliau adalah mewujudkan kehidupan masyarakat dan daerah yang demokratis, maju, sejahtera, dan adil.

### **Pangeran Raja Adipati Arief Natadiningrat, SE.**

Pangeran Raja Adipati Arief Natadiningrat, SE., dilahirkan di Cirebon pada tanggal 5 September 1965. Dia adalah anggota DPD Provinsi Jawa Barat urutan ke-2 dengan perolehan suara sebanyak 1.666.685.<sup>2</sup> Ia menyelesaikan jenjang pendidikan dasar di SD Negeri Pengampon 3 Cirebon tahun 1971-1977. SMP Negeri 1 Cirebon pada Tahun 1978-1981. SMA Negeri 2 Cirebon tahun 1981-1984. lalu kuliah di Universitas Islam Nusantara Bandung tahun 1984-1990. Selain itu, Pangeran Arief juga mengikuti beberapa pendidikan informal di antaranya, pada tahun 1993 mengikuti diklat pimpinan objek wisata Garut, Rakonkor wilayah tujuan wisata di Cirebon dan pembangunan pariwisata se-Jabar pada tahun 1994, instruktur orientasi pembinaan anggota baru Ikatan Mahasiswa warga Cirebon IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2001. Ia menerima berbagai penghargaan misalnya, meraih penghargaan Figur Pimpinan Terbaik Daerah Bidang Sosial dari Tri Dharma Indonesia tahun 2003.

Visi dan misi Pengeran Arief Natadiningrat sebagai anggota DPD RI adalah memperjuangkan daerah dan masyarakat Jabar di tingkat nasional dalam kerangka

---

<sup>2</sup> Lihat Sekretariat Jenderal MPR/DPD RI, *Ibid.*, hlm 130-133. Dilengkapi hasil wawancara dengan Pra Arief Natadiningrat pada tanggal 7 November 2006 bertempat di Gedung DPD RI Jakarta.

cita-cita negara Republik Indonesia yang Adil, makmur, dan sejahtera. Sedangkan misi beliau adalah *pertama*, memperjuangkan otonomi daerah yang ideal. *Kedua*, menyeimbangkan keuangan pusat dan daerah dengan adil. *Ketiga*, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan masyarakat daerah. *Keempat*, menyempurnakan fungsi, tugas, dan wewenang DPD. Dan *kelima*, memperjuangkan visi dan misi provinsi Jabar.

Aktivitas Pangeran Arief Natadiningrat selama ini bekerja sebagai Direktur CV. Giyanti dan PT. Cirebon Raya Internasional ini banyak menimba pengalaman di dunia organisasi di antaranya, sebagai Wakil Ketua Hipmi Kota Cirebon, menjadi Ketua DPD KNPI Kota Cirebon, sebagai Pendiri Koperasi Pemuda “Bina Muda” Kota Cirebon, juga Ketua Dewan Pembina Lembaga Kebudayaan Cirebon.

### **Prof. Dr. H. Mohammad Surya**

Mohammad Surya dilahirkan di Kuningan 8 September 1941.<sup>3</sup> Ia menamatkan pendidikan formal di SR Citangtu Kuningan (1948-1954), SGB Kuningan (1954-1958), SGA Kuningan (1959-1962), Sarjana Muda IKIP Bandung (1962-1965), Sarjana IKIP Bandung (1966-1968), Doktor IKIP Bandung (1975-1979). Di samping itu juga mengikuti beberapa pendidikan informal antara lain, Pendidikan Kesehatan Jiwa, Depkes di Bandung tahun 1969, Educational Innovation and Technology, INNOTECH-SEANED di Manila Phillipine tahun 1974, Educational and Vocational Guidance, UNESCO di Santa Barbara-USA

---

<sup>3</sup> Lihat Sekretariat Jenderal MPR/DPD RI, *Ibid.*, hlm 133-136. Dilengkapi hasil wawancara dengan Prof. Dr. H. Mohammad Surya pada tanggal 5 Januari 2007 bertempat di Gedung DPD RI Bandung.

tahun 1979, Integrated Primary Curriculum, UNESCO di Seoul Korea Selatan tahun 1980, Union Educator, ILO di Australia tahun 1982, Pendidikan Jarak Jauh, East-West Centre di Jakarta tahun 1983, Value Education, INNOTEC-SEAMED di Manila-Phillipine tahun 1985, Educational Counseling, Bank Dunia di Columbus Ohio, USA tahun 1986-1987, Educational Technology and Communication, Bank Dunia di Bloomington Indiana, USA tahun 1989.

Aktivitas organisasi Mohammad Surya antara lain anggota PGRI (1958-sekarang), Ketua Umum PB PGRI (1998-Sekarang), anggota HMI (1963-1968), anggota Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) (1975-sekarang), anggota Korpri (1970-2004).

Karir beliau dimulai sebagai guru SD Citangtu Kuningan (1958-1962), guru SMAN II Bandung (1966-1973), dosen IKIP Bandung (1966-sekarang), Kepala Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Universitas Terbuka Bandung (1984-1994), dosen tamu Univesity Brunei Darussalam (1994-1996), anggota DPRD Tingkat I Provinsi Jawa Barat (1997-1999), anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) (2001-2004), Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Bandung (1977-1980), Ketua Jurusan Psikologi Pendidikan, FIP IKIP Bandung (1980-1989).

Visi Mohammad Surya menjadi anggota DPD adalah memperjuangkan kepentingan daerah dalam kerangka pembangunan nasional. Sedangkan misi beliau adalah *pertama*, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPD dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pengalaman dan kemampuan yang

dimiliki. *Kedua*, menjadi wakil masyarakat Jawa Barat dalam memajukan daerah. *Ketiga*, menjadi wakil dunia pendidikan dalam mewujudkan pendidikan nasional.

### **K.H. Sofyan Yahya, M.A.**

K.H. Sofyan Yahya dilahirkan di Bandung pada tanggal 27 Juli 1955.<sup>4</sup> Ia menyelesaikan pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah Bandung pada tahun 1968, PGAP 4 tahun di Bandung tahun 1972, PGAN enam Tahun di Bandung tahun 1974, dan Universitas Islam Bandung pada tahun 1976-1977. Ia melanjutkan studinya di King Saud University Riyadh Saudi Arabia, lulus pada tahun 1986. Sedangkan jalur pendidikan informal yang pernah diikutinya adalah pesantren salafiah Bandung tahun 1974-1975, kursus bahasa Inggris di Bandung tahun 1975 dan Kursus Bahasa Arab di Bandung pada tahun 1975.

K. H. Sofyan Yahya banyak berkecimpung dalam kancah organisasi di lingkungan NU antara lain, sebagai Sekretaris PC-IPNU Kabupaten Bandung (1971-1973) dan Ketua Keluarga Mahasiswa NU di Riyadh Saudi Arabia (1980-1982), Sekretaris PW LKKNU Jawa Barat (1988-1993), dan Khatib PWNU Jawa Barat (1999-2005). Organisasi lain yang ditekuninya antara lain Dewan Pengaping Paguyuban Pasundan (2001-2006). Sedangkan aktivitas dalam bidang pekerjaan adalah sebagai guru MI Salafiah di Bandung (1975-1977), Tenaga Musiman (Temus) di KBRI Jeddah Saudi Arabia (1984-1985) dan guru pesantren Darul Ma'arief Bandung (1988-sekarang).

---

<sup>4</sup> Lihat Sekretariat Jenderal MPR/DPD RI, *Ibid.*, hlm 136-139. Dilengkapi hasil wawancara dengan K.H. Sofyan Yahya pada tanggal 7 November 2006 bertempat di Gedung DPD RI Jakarta.

K. H. Sofyan Yahya merumuskan visi sebagai anggota DPD RI adalah terbangunnya tatanan masyarakat yang bermoral, berdaya, berkeadilan dan demokratis. Visi ini tidak lepas dari visi Jawa Barat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No 1 Tahun 2003 dan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2004 yaitu, Jawa Barat dengan iman dan taqwa sebagai provinsi termaju di Indonesia dan mitra terdepan Ibu Kota Negara tahun 2010.

K. H. Sofyan Yahya merumuskan visi sebagai anggota DPD RI adalah terbangunnya tatanan masyarakat yang bermoral, berdaya, berkeadilan dan demokratis. Visi ini tidak lepas dari visi Jawa Barat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No 1 Tahun 2003 dan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2004 yaitu, Jawa Barat dengan iman dan taqwa sebagai provinsi termaju di Indonesia dan mitra terdepan Ibu Kota Negara tahun 2010.

### **Organisasi-Organisasi Sebagai Basis Dukungan**

Dalam uraian ini akan dikemukakan organisasi-organisasi yang menjadi basis dukungan keempat anggota DPD Jawa Barat. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran bagaimana jaringan organisasi atau struktur organisasi digunakan untuk media komunikasi antara anggota DPD Jawa Barat dengan masyarakat pemilih. Selain itu akan tergambarkan pula bagaimana kebesaran organisasi yang menjadi basis dukungan sehingga cukup efektif sebagai media menjaring pemilih dalam pemilu.

Organisasi-organisasi yang mendukung keempat anggota DPD tersebut, mungkin lebih banyak tetapi dalam pembahasan ini hanya akan disebutkan empat organisasi yaitu *Pertama*, Organisasi Paguyuban Pasundan. *Kedua*, Kesultanan Cirebon. *Ketiga*, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan *keempat*, Nahdlatul Ulama (NU).

## Paguyuban Pasundan

Paguyuban Pasundan<sup>5</sup> didirikan oleh siswa-siswa Stovia asal Sunda yang mulai digagas pada tahun 1913.<sup>6</sup> Tepatnya berdiri Paguyuban Pasundan pada tanggal 20 Juli 1913 dan mendapat status badan hukum pada tanggal 9 Desember 1914 No. 46.<sup>7</sup> Dengan ketua pertama D.K. Ardiwinata dan Iskandar Brata sebagai Sekretaris.

Pada tahun 1919 Paguyuban Pasundan merubah platform perjuangannya melalui kongres tahun 1919 dengan mendeklarasikan sebagai partai politik. Kader-kader pinilih Paguyuban Pasundan menduduki kursi Dewan Rakyat (Volksraad). Di dalam Volksraad. Pada tahun 1921-1924, wakil Paguyuban Pasundan di dalam Dewan Rakyat ialah Kosasih Soerakoesoemah, R. Otto Koesoemah Soebrata dan R. Idih Prawiradipoetra.

Ketika bulan September 1926 dibentuk “Persatoean Indonesia” (Persatuan Indonesia) dengan tujuan untuk mempersatukan berbagai aliran politik di kalangan pergerakan nasional. Paguyuban Pasundan menjadi anggota bersama-sama Syarikat Islam (SI), Muhammadiyah, Jong Islamieten Bond (JIB), Persatuan Minahasa, Sarekat Ambon, dan Sarekat Madura. Pada masa itu pengurus Paguyuban Pasundan di bawah kepemimpinan R. Otto Koesoema Soebrata (putra seorang mantan Bupati Ciamis juga sebagai anggota Voklsraad).

---

<sup>5</sup> Pembahasan Paguyuban Pasundan dilengkapi hasil wawancara dengan H.A. Syafe’i selaku Ketua Paguyuban Pasundan pada tanggal 13 Desember 2006 di Sekretariat PB Paguyuban Pasundan

<sup>6</sup> Lihat Memed Erawan dkk, *Paguyuban Pasundan Kiprah Perjuangannya dari Zaman ke Zaman (1914-2000)* (Bandung: PB Paguyuban Pasundan, 2000) hlm 56-75. Memed Erawan, *Paguyuban Pasundan Di Tengah-Tengah Kancah Perjuangan Bangsa* (Bandung: Mandalawangi, 1991) dan lihat juga Suharto, *Pagoejoeban Pasoendan 1927-1942 Profil Pergerakan Etno-Nasionalis* (Bandung: Satya Historika, 2002)

<sup>7</sup> Ketetapan Kongres Paguyuban Pasundan Ka-40 Tahun 2005. Pasal 1

Kemudian pada tanggal 17-18 Desember 1927 di Bandung diadakan rapat pembentukan Badan Federasi yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 8 organisasi politik termasuk Paguyuban Pasundan. Badan Federasi tersebut diberi nama “Permoefakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia” (PPPKI). Ketika Kongres Pemuda ke-2 yang kemudian melahirkan ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.

Sejak Paguyuban Pasundan dipimpin oleh R. Oto Iskandar Di Nata tahun 1924 perhatian organisasi kepada bidang politik lebih ditingkatkan. Perjuangannya semakin militan guna memperoleh kursi di Dewan Kabupaten, Dewan Provinsi dan Volksraad. Pendirian Paguyuban Pasundan tetap kokoh ketika usaha-usaha untuk membentuk fusi partai terus dikumandangkan oleh Budi Utomo dengan membentuk Partai Indonesia Raya (Parindra) bersama dengan Persatuan Bangsa Indonesia pada tahun 1935. Kemudian ikut melebur juga dalam Parindra antara lain: Sarekat Sumatra, Perkumpulan Tirtayasa Banten, Sarekat Celebes (Sulawesi) demikian juga tokoh-tokoh terkenal seperti Moh. Husni Thamrin (Ketua Kaum Betawi), Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo, dan Mr. Soenarjo

Pada masa awal kemerdekaan Paguyuban Pasundan berubah menjadi Partai Kebangsaan Indonesia (PARKI) seiring dengan keluarnya maklumat pemerintah tentang kebebasan mendirikan partai-partai politik. PARKI berdiri berdasarkan hasil Kongres Paguyuban Pasundan yang diadakan di Bandung pada tahun 1949.

Perubahan Paguyuban Pasundan menjadi PARKI dengan alasan antara lain: *pertama*, mengubah kata “Pasundan” agar dapat mengikuti perubahan zaman atau situasi zaman, Karena Paguyuban Pasundan di zaman dulu dianggap merupakan

organisasi kedaerahan, padahal perjuangannya adalah untuk mencapai Indonesia merdeka. PARKI bertujuan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang bersatu dan berdaulat.

*Kedua*, karena merasa nama Paguyuban Pasundan telah dicemari oleh Partai Rakyat Pasundan (PRP) yang bertentangan dengan kehendak dan perjuangan Paguyuban Pasundan dan ingkar dari kehendak rakyat Jawa Barat. Salah satu hasutan yang dikemukakan PRP adalah bahwa perjuangan PRP adalah sama dengan perjuangan Paguyuban Pasundan, bahkan PRP disebut-sebut sebagai kelanjutan dari Paguyuban Pasundan.

PRP merupakan usaha dari Belanda untuk merebut kembali Indonesia dengan meruntuhkan pemerintahan Indonesia. Belanda di bawah Van Mook mendorong berdirinya Negara Pasundan Kartalegawa dengan terlebih dahulu membentuk Partai Rakyat Pasundan (PRP) tanggal 18 November 1946. PRP didirikan oleh seorang bangsawan Sunda bernama Raden Aria Muhammad Musa Suria Kartalegawa, mantan Bupati Garut (1929-1944). Beliau merupakan salah seorang anak dari Haji Muhammad Musa Kartalegawa, Kepala Penghulu Garut, seorang yang mengetahui banyak tentang masyarakat Sunda dan mempunyai hubungan baik dengan seorang Belanda, pengusaha perkebunan berpengaruh dan berpendidikan, bernama K.F. Holle. Keenam belas anak-anak Kepala Penghulu itu berhasil menjadi pegawai tinggi pangrehpraja.

Suria Kartalegawa dilahirkan di Garut tanggal 26 Oktober 1907, meninggal tanggal 12 Maret 1978. Dalam pengabdianya ia sangat setia kepada pemerintah Belanda, sehingga ia pernah dijanjikan menjadi Bupati untuk tujuh keturunan. Hal

inilah yang menyebabkan ia berupaya sekuat tenaga untuk meraih harapan yang telah dijanjikan Belanda terhadap dirinya yaitu kedudukan tinggi dan terhormat. Selain itu Suria Kartalegawa sebagai orang Sunda asli merasa memiliki hak tradisional untuk memimpin Jawa Barat. Akan tetapi untuk daerah Jawa Barat yang merupakan wilayah Republik Indonesia ternyata oleh pemerintah pusat diangkat seorang gubernur yang bukan orang Sunda.

Berdasar itu Suria Kartalegawa membentuk PRP dengan tujuan mencapai kesempurnaan dan kemuliaan Negara Pasundan yang merdeka berdaulat dan berdasarkan demokrasi (kerakyatan) dalam ikatan federasi dan termasuknya Negara Pasundan sebagai Negara (tidak sebagai daerah dari Republik Jawa dan Sumatra) dari Negara Indonesia Serikat untuk sementara waktu dalam lingkungan kerajaan Belanda. PRP berusaha melakukan pendekatan dengan Ratu Belanda dengan mengirim telegram tanggal 6 November 1946 yang meminta kepada Ratu untuk memperhatikan daerah Sunda. Kemudian Menteri Jonkman atas nama Ratu Belanda memerintahkan Van Mook tertanggal 14 Desember 1946 untuk memperhatikan PRP dan memberikan fasilitas serta dukungan terhadap PRP. Pada tanggal 4 Mei 1947 Kartalegawa memproklamasikan Negara Pasundan tetapi tidak mendapat respon positif dari masyarakat Jawa Barat sehingga Negara Pasundan Kartalegawa tidak dapat diteruskan.

Berdirinya Negara Pasundan erat hubungan dengan Perundingan Linggarjati. Setelah Negara Pasundan Kartalegawa tidak mendapat respon muncul Negara Pasundan Konferensi Jawa Barat. Negara ini terbentuk karena dilakukan beberapa kali mengadakan konferensi tokoh masyarakat Jawa Barat atas rekayasa dari

pemerintah Hindia Belanda dalam rangka memecah belah Negara Republik Indonesia. Konferensi pertama diadakan di Kota Bandung pada tanggal 13-18 Oktober 1947 yang dihadiri 50 orang pemuka-pemuka dari berbagai golongan di masyarakat Jawa Barat. Dalam konferensi tersebut dibentuk Panitia Penghubung (*Contact Commissie*) yang menjadi jembatan antara Pemerintah Hindia Belanda dengan rakyat. Tugasnya untuk mempersiapkan konferensi selanjutnya untuk membentuk pemerintahan sendiri. Dalam tugasnya dibantu oleh pemerintah sipil Jawa Barat yang dipegang oleh suatu badan yang disebut *Recombe (Regering Commissaris Bestuurs Aangelegenheden)*.

Pada tanggal 16-20 Desember 1947 diadakan konferensi kedua yang berlangsung di Bandung. Peserta konferensi sebanyak 159 orang dari 170 orang yang diundang terdiri atas 117 orang dari kalangan pribumi, 18 orang dari bangsa Cina, 16 orang peserta bangsa Belanda, dan 8 orang peserta bangsa Arab. Konferensi ketiga diadakan pada tanggal 23 Pebruari sampai dengan 4 Maret 1948 di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 100 orang peserta terdiri atas 53 orang peserta bangsa pribumi hasil pemilihan, 14 orang peserta bangsa pribumi yang diangkat oleh *Recombe Jawa Barat*, 11 orang peserta bangsa Belanda, 8 orang peserta bangsa Cina, 3 orang peserta bangsa Arab, dan 11 orang peserta Panitia Persiapan.

Dalam setiap konferensi terdapat tiga pendapat yaitu:

1. Kelompok Federalis tetap menginginkan secepatnya berdiri suatu negara di Jawa Barat.
2. Kelompok Republikan tidak menghendaki penetapan kenegaraan, sebelum diadakan plebisit.
3. Menghendaki suatu pemerintahan sementara di Jawa Barat.

Dalam konferensi ketiga diputuskan berdiri Negara Jawa Barat karena yang tidak setuju hanya 36%. Pembentukan Negara Jawa Barat ditetapkan dalam sidang konferensi yang diakui sebagai sidang Dewan Perwakilan Rakyat (Parlemen) Sementara, tanggal 26 Desember 1948. Dalam sidang Parlemen tanggal 4 maret 1948 dipilih Wali Negara yaitu R.A.A.M. Wiranatakusumah. Pada waktu itu beliau sedang menjabat ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Republik Indonesia dan berada di Yogyakarta. R.A.A.M. Wiranatakusumah dengan mendapat ijin dari Presiden RI Soekarno menerima jabatan itu kemudian ia menunjuk R. Adil Puradiredja (tokoh Paguyuban Pasundan) sebagai formatur kabinet (Perdana Menteri). Negara pasundan kedua ini tidak berlangsung lama pada tanggal 17 Desember 1949 dalam sidang parlemen mengeluarkan pernyataan tentang keikhlasan untuk meletakkan jabatan, apabila keamanan dalam negeri telah terjamin. Pernyataan itu dikeluarkan setelah penyambutan dalam upacara pengambilan sumpah dan janji Presiden RIS di Yogyakarta. Dengan demikian Negara Pasundan kedua dibubarkan dan bergabung kembali dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan adanya hasutan tersebut maka anggota Paguyuban Pasundan berkeinginan untuk menghidupkan kembali organisasinya yang pada waktu zaman Jepang berkuasa tidak diijinkan beroperasi sehingga terjadi kefakuman organisasi sampai pada awal kemerdekaan. Menghidupkan kembali Paguyuban Pasundan diharapkan agar masyarakat tidak salah memberikan penilaian terhadap Paguyuban Pasundan, apalagi waktu itu situasi politik sedang kacau tidak menentu. Dalam upaya itu dibentuklah panitia yang beranggotakan Ir.

Juanda, R. Moh. Enoch, Ahmad Natanegara, dan King Nata Wijaya. Sebagai penasehat hukum diangkat Prof. Dr. Mr. Kusumaatmaja. Panitia ini bertugas untuk menyusun anggaran dasar organisasi yang sesuai dengan UUD RI. Pada tanggal 3 Mei 1947 atas nama Pengurus Besar Paguyuban Pasundan panitia tersebut menyatakan menghidupkan kembali Paguyuban Pasundan. Dengan pernyataan itu berdirilah kembali Paguyuban Pasundan di tiga tempat yaitu di Bandung, Yogyakarta dan Jakarta. Kemudian untuk meningkatkan perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI dirubahlah Paguyuban Pasundan dengan Partai Kebangsaan Indonesia (PARKI) pada tahun 1949 dengan alasan sebagaimana disebutkan di atas.

Terbentuknya PARKI melahirkan kemelut yang berkepanjangan dalam tubuh PARKI. Kemelut itu berpangkal pada kegagalan PARKI pada pemilu tahun 1955. Hal tersebut dijadikan alasan yang kuat untuk mengubah nama PARKI kembali menjadi Paguyuban Pasundan. Pada tahun 1956 diadakan kongres luar biasa untuk menyelesaikan kemelut tersebut. Maka akhirnya pada tanggal 29 Nopember 1959 atas hasil referendum, PARKI mengubah namanya kembali ke asal yaitu "Paguyuban Pasundan." Paguyuban Pasundan bergerak dalam bidang pendidikan, sosial dan budaya terutama budaya Sunda. Dengan sifat organisasi seperti itu Paguyuban Pasundan memiliki falsafah: "*Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh*".<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Ketetapan Kongres Paguyuban Pasundan Ka-40 Taun 2005

## Kesultanan Cirebon

Kesultanan Cirebon berdiri atas prakarsa Syarif Hidayatullah. Kebesaran kesultanan Cirebon ditunjang pula oleh kondisi wilayah Cirebon.<sup>9</sup> Pada abad ke-15 dan 16 Masehi Negeri Cirebon merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Lokasinya di pantai utara perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat kini, membuatnya berperan sebagai pelabuhan dan “jembatan” antara kebudayaan Jawa dan Sunda sehingga tercipta suatu kebudayaan yang khas.<sup>10</sup>

Syarif Hidayatullah<sup>11</sup> merupakan pendiri dinasti raja-raja Cirebon dan Banten. Syarif Hidayatullah dilahirkan di Mekah (tanah Arab) dari ibu seorang keturunan raja Sunda bernama Rarasantang yang dikenal pula dengan sebutan Syarif Mudaim dan ayahnya seorang penguasa lokal di Mesir bernama Sultan Mahmud atau Syarif Hidayat kemudian lebih dikenal dengan nama Syarif Hidayatullah. Ia dibesarkan dan dididik secara Islami di tanah Arab.

Setelah dewasa, Syarif Hidayatullah kemudian ia berangkat dengan kapal laut menuju tanah leluhur ibunya dengan tujuan akan menyebarkan agama Islam. Dalam perjalanannya ke Cirebon ia singgah di Pasai dan tinggal bersama Maulana

---

<sup>9</sup> Dilihat dari sudut etimologi, istilah Cirebon berasal dari dua macam yaitu (1) caruban, dan (2) ci dan rebon. Perubahan dan makna istilah caruban tertera dalam naskah *Carita Purwaka Caruban Nagari* bahwa caruban yang berubah menjadi carbon, lalu carbon, dan akhirnya Cirebon mengandung makna campuran yaitu tempat yang didiami oleh penduduk dari berbagai bangsa, agama, bahasa, aksara, dan pekerjaan. Sementara ci dan rebon berasal dari cai dalam bahasa Sunda berarti air dan rebon yakni jenis udang berukuran kecil sebagai bahan pembuat terasi (Ensiklopedi Sunda, 2001: 166). Dalam sumber Portugis, berdasarkan berita Tome Pires, Cirebon disebut dengan Cherimon atau Cheroboan yang menggambarkan bahwa Cirebon adalah sebuah pelabuhan yang indah dan selalu ada empat sampai lima kapal yang berlabuh di sana .

<sup>10</sup> Tome Pires dalam Nina H. Lubis, dkk., *Op. Cit.*, hlm 170-172

<sup>11</sup> Tentang kisah Syarif Hidayatullah yang lebih lengkap dan komprehensif lihat disertasi Dadan Wildan, *Cerita Sunan Gunung Jati; Keterjalinan Antara Fiksi dan Fakta (Suatu Kajian Pertalian Antarnaskah, Isi, dan Analisis Sejarah dalam naskah-naskah Tradisi Cirebon)* (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2001).

Iskak kemudian singgah pula di Banten dan Ampel Jawa Timur.<sup>12</sup> Ketika tiba di pelabuhan Muara Jati (Cirebon) ia melanjutkan perjalanan ke Desa Sembung-Pasambangan dekat Giri Amparan Jati pada tahun 1475. Di desa tersebut ia mengajarkan agama Islam menggantikan Syekh Datuk Kahfi yang telah meninggal dunia.

Berkat kepandaian dan kecerdikannya dalam ilmu agama dan penyesuaian dirinya dengan kehidupan masyarakat setempat ia berhasil meng-Islamkan penduduk di daerah itu. Lebih-lebih setelah ia menikah dengan gadis setempat yaitu: (1) Nyai Pakungwati, putri Raden Walangsungsang dan (2) Nyai Babadan, putri Ki Gedeng Babadan. Walaupun tidak bersamaan waktunya, Syarif Hidayatullah menikah pula dengan (3) Nyai Kawung Anten (adik bupati Banten) dan berputra antara lain Maulana Hasanuddin, (4) Syarifah Baghdadi (adik Pangeran Panjunan), (5) Ong Tien Nio (putri keturunan Cina), dan (6) Nyai Tepasari putri Ki Gedeng Tepasari dari Majapahit yang berputra antara lain Pangeran Pasarean. Pada masa itu, pernikahan menjadi salah satu sarana yang baik dalam memperlancar dan mempercepat proses Islamisasi di Pulau Jawa.

Setelah beberapa lama tinggal di Dukuh Sembung, ia memperluas medan dakwahnya hingga ke Banten. Beberapa waktu lamanya Syarif Hidayatullah tinggal di Banten mengajarkan dan mengembangkan syiar Islam. Sepulangnya dari Banten pada tahun 1479, Syarif Hidayatullah dinobatkan menjadi *Tumenggung* oleh Pangeran Cakrabuwana yang dikenal pula dengan sebutan Haji Badullah Iman dengan gelar *Tumenggung Syarif Hidayatullah bin Maulana*

---

<sup>12</sup> Sharon Siddique, *Relics of the Past? A Sociological Study of the Sultanates of Cirebon, West Java*. (Disertasi, 1977), hlm 64-65

*Sultan Muhammad Syarif Abdullah* yang disambut oleh para wali tanah Jawa dengan memberikan gelar *Panetep Panatagama Rasul* di Tanah Sunda atau *Inggang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purba Panetep Panatagama Awlya Allah Kutubid zaman Khalifatur Rasulullah Saw.*<sup>13</sup> Sejak itulah Caruban Larang dari sebuah negeri mulai dikembangkan mejadi sebuah kesultanan dengan nama Kesultanan Cirebon.<sup>14</sup>

Syarif Hidayatullah tampil sebagai kepala pemerintahan di Cirebon antara tahun 1479 sampai dengan 1568 atau selama 89 tahun.<sup>15</sup> Pada masa pengembangan Kesultanan Cirebon yang dilakukan oleh Syarif Hidayatullah terdapat keberhasilan terutama dalam bidang pemerintahan dan politik yang terbagi pada 9 aspek sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. wilayah bawahan kerajaan Cirebon hingga tahun 1530 masehi sudah meliputi separuh dari Provinsi Jawa Barat sekarang termasuk Provinsi Banten dengan jumlah penduduk saat itu kurang lebih 600.000 orang yang sebagian besar masih beragama non-Islam.
2. pelabuhan-pelabuhan penting di pantai Utara Jawa Barat seluruhnya sudah dapat dikuasai oleh Kerajaan Cirebon.
3. Masjid jami di ibukota, masjid-masjid di berbagai wilayah bawahannya, serta langgar-langgar di pelabuhan telah selesai dibangun.
4. keraton Pakungwati, kediaman resmi Sunan Gunung Djati sudah disesuaikan dengan fungsi dan posisinya sebagai bangunan utama pusat pemerintahan kerajaan yang berdasarkan Islam.
5. tembok keliling keraton berikut beberapa pintu gerbang, pangkalan perahu kerajaan, pos-pos penjagaan keamanan, istal kuda kerajaan, bangunan untuk kereta kebesaran kerajaan, dan pedati-pedati untuk

---

<sup>13</sup> Lihat Pangeran Sulaeman Sulendraningrat, *Nukilan Sedjarah Tjirebon Asli* (Cirebon: Pustaka Cirebon, 1968), hlm. 7, lihat juga Sharon Siddique, *Relics of the Past? A Sociological Study of the Sultanates of Cirebon, West Java*. (Disertasi, 1977), hlm 64-65

<sup>14</sup> Salana, *Sultan Cirebon* (Cirebon: Gunungjati Cirebon, 1995) hlm 179

<sup>15</sup> R.H. Unang Sunardjo, *Ibid.*, hlm 34-35

<sup>16</sup> R.H. Unang Sunardjo, *Ibid.*, hlm 38-40

- mengangkut barang, serta *sitiinggil*, bangunan untuk pengadilan (*pancaniti*), dan alun-alun telah selesai dibangun dan diperindah.
6. tembok keliling ibukota meliputi areal seluas kurang lebih 50 hektar dengan beberapa pintu gerbang dan pos *jagabaya* telah selesai dibangun dan dikerjakan selama kurang lebih tiga tahun.
  7. jalan besar utama menuju pelabuhan Muara Jati dan jalan-jalan di ibukota serta jalan-jalan yang menghubungkan ibukota dengan wilayah-wilyah bawahannya telah selesai dibangun.
  8. pasukan *jagabaya* jumlahnya sudah cukup banyak, organsasinya sudah ditata dengan komandan tertingginya dipegang oleh seorang *tumenggung* yang disebut *tumenggung jagabaya*.
  9. dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat kerajaan maupun di wilayah bawahan telah diatur dalam tata aturan pemerintahan yang cukup rapi. Sunan Gunung Djati telah melakukan penyeragaman gelar-gelar jabatan.

Sejak tahun 1528 Masehi, Syarif Hidayatullah memusatkan perhatiannya hanya kepada penyebaran agama Islam di Tatar Sunda. Oleh karena itu, ia mempercayakan urusan pemerintahan kepada putranya, Pangeran Pasarean (1528). Namun, Pangeran Pasarean, walaupun telah mewakili Syarif Hidayatullah selama kurang lebih 18 tahun, tidak sampai menduduki tahta kerajaan karena tewas di Demak pada tahun 1546. Selanjutnya pemerintahan kesultanan Cirebon diwakili oleh Fadhillah Khan, menantu Syarif Hidayatullah.

Pada tahun 1568 Syarif Hidayatullah wafat dan dimakamkan di Astana Gunung Sembung yang kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Djati, maka terjadilah kekosongan jabatan pimpinan tertinggi kerajaan Islam Cirebon. Pada mulanya calon kuat pengganti Sunan Gunung Djati ialah Pangeran Dipati Carbon, putra Pangeran Pasarean, cucu Sunan Gunung Jati. Ia telah menduduki jabatan penting dalam birokrasi pemerintahan Kerajaan Islam Cirebon sehingga namanya pun berubah dari Pangeran Sawarga menjadi Pangeran Dipati Carbon. Namun, Pangeran Dipati Carbon meninggal lebih dahulu pada tahun 1565.

Kekosongan kekuasaan itu, diisi oleh Fadhilah Khan sampai meninggal pada tahun 1570 Masehi. Ia dimakamkan berdampingan dengan makam Sunan Gunung Djati di Gedung Jinem Astana Gunung Sembung. Meskipun telah memerintah Cirebon menggantikan Sunan Gunung Djati, Fadhilah tidak diberi gelar apa pun baik Susuhunan, Pangeran maupun Panembahan. Ia hanya disebut *Wong Agung Pase* atau *Ratu Bagus Pase* yang berarti orang besar dari Pasai.

Sepeninggal Fadhillah Khan tahta kerajaan jatuh kepada cicit Sunan Gunung Djati, yaitu Pangeran Emas putra tertua Pangeran Dipati Carbon atau cicit Sunan Gunung Djati. Pangeran Emas kemudian bergelar Panembahan Ratu I dan memerintah Cirebon selama kurang lebih 79 tahun (1570-1649). Dasar pertimbangan tahta ini jatuh ke tangan Panembahan Ratu I adalah Panembahan Ratu I mempunyai kedudukan kuat dilihat dari pertalian darah. Setelah Panembahan Ratu I meninggal dunia pada tahun 1649, pemerintahan Kesultanan Cirebon dilanjutkan oleh cucunya yang bernama Pangeran Rasmi atau Pangeran Karim karena ayah Pangeran Rasmi, yaitu Pangeran Seda Ing Gayam atau Panembahan Adiningkusumah meninggal lebih dahulu. Pangeran Rasmi kemudian menggunakan nama gelar ayahnya almarhum, yakni Panembahan Adiningkusuma yang kemudian dikenal pula dengan sebutan Panembahan Ratu II (1649-1662/1667).<sup>17</sup>

Pada masa pemerintahannya, ia mengalami masalah ketika diminta oleh Amangkurat I (1645-1677) Raja Mataram —yang juga mertuanya—untuk mendekati Banten dan membujuknya supaya bergabung dengan Mataram serta

---

<sup>17</sup> Nina H. Lubis, dkk., *Sejarah Tatar Sunda*, Jilid I (Bandung: Lembaga Penelitian Unpad, 2003) hlm 167-173

menghentikan serangannya kepada Belanda yang menjadi sahabat baik Amangkurat I karena Amangkurat I mengetahui bahwa Banten dan Cirebon pada awalnya adalah satu rumpun keturunan dari Sunan Gunung Djati. Permintaan itu dilaksanakan oleh Panembahan Ratu II. Beberapa kali diadakan pembicaraan dengan Sultan Ageng Tirtayasa di Banten tetapi tidak membuahkan hasil. Bahkan Sultan Banten menghimbau agar Cirebon lebih baik bersekutu dengan Banten daripada dengan Mataram, serta memperingatkan bahwa melihat perilaku Amangkurat I terhadap Cirebon dapat kehilangan kedaulatannya. Sebagai akibat gagalnya membujuk Sultan Banten, Amangkurat I menilai Pangeran Adiningkusuma telah mengecawakannya dan dituduh bersekutu dengan Banten.

Pada tahun 1662, Amangkurat I mengundang Panembahan Adiningkusumah untuk datang ke Mataram, di samping untuk menghormatinya juga mempertanggung jawabkan sikapnya terhadap Banten dan juga Mataram. Disertai oleh kedua orang putranya, Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya memenuhi undangan tersebut. Namun, setelah upacara penghormatan selesai, mereka tidak diperkenankan kembali ke Cirebon, melainkan harus tetap tinggal di ibukota Mataram dan diberi tempat kediaman yang layak serta tetap diakui sebagai penguasa Cirebon. sesungguhnya mereka telah menjadi tahanan terhormat (tahanan politik). Ia menetap di sana sampai meninggal dunia pada tahun 1667 dan kemudian dikenal dengan sebutan Panembahan Girilya. Sejak Panembahan Adiningkusuma dan kedua putranya berada di ibukota Mataram,

pemerintahan sehari-hari di Cirebon dilaksanakan oleh Pangeran Wangsakerta yang tidak ikut serta ke Mataram antara tahun 1662-1667.<sup>18</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, ketika terjadi pemberontakan Trunajaya terhadap Mataram pada tahun 1667 dan Trunajaya berhasil menguasai keraton Mataram, Pangeran Wangsakerta dibantu Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten berusaha membebaskan Pangeran Martawijaya dan Kartawijaya dari tahanan Mataram. Kedua Pangeran Cirebon itu akhirnya dapat dibebaskan dari Mataram dan kembali ke Cirebon melalui Banten. Tatkala Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya berada di Banten, Sultan Banten mengangkat kedua Pangeran itu sebagai sultan di Cirebon dan menetapkan pembagian wilayah serta rakyat masing-masing. Pangeran Martawijaya menjadi Sultan Sepuh dan Pangeran Kartawijaya sebagai Sultan Anom. Sementara itu Pangeran Wangsakerta diangkat menjadi Panembahan Cirebon, tetapi tidak memiliki wilayah kekuasaan dan keraton secara formal.<sup>19</sup>

Gelar kepala negara Cirebon, sejak putra Panembahan Girilya naik tahta pada tahun 1677, berubah dari gelar Panembahan menjadi Sultan sebagaimana digunakan oleh Sultan Keraton Kasepuhan, yaitu Pangeran Martawijaya dengan gelar *Sultan Sepuh Abil Makarimi Muhammad Samsudin* (1667-1703) dan Sultan Kanoman, yaitu Pangeran Kartawijaya dengan gelar *Sultan Anom Abil Makarimi Muhammad Badrudin* (1667-1723). Gelar Sultan ini diberikan oleh Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten karena keduanya pun ditarik menjadi Sultan Cirebon di ibu kota Banten. Sebagai Sultan, mereka mempunyai kekuasaan penuh; mempunyai

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Nina H. Lubis, dkk., *Ibid.*, hlm 196

wilayah kekuasaan, rakyat, dan keraton masing-masing. Adapun putra lelaki lain Panembahan Girilya, yaitu Pangeran Wangsakerta tidak diangkat menjadi Sultan, melainkan hanya sebagai Panembahan Cirebon dengan gelar Pangeran *Abdul Kamil Muhammad Nasarudin* atau *Panembahan Tohpati* (1677-1713). Ia tidak memiliki wilayah kekuasaan dan keraton sendiri. Tempat tinggalnya hanya berupa rumah besar yang terletak di sebelah Timur keraton Pakungwati.

Pembagian di Kesultanan Cirebon terhadap tiga orang, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Panembahan Cirebon (1677), serta masuknya pengaruh Kompeni ke Cirebon (1681). Ternyata memunculkan persaingan di antara para pejabat tinggi keraton Cirebon, bahkan menjurus sampai ke persaingan keras dan konflik. Untuk meredakan persaingan keras itu, semua pihak minta bantuan kepada Kompeni untuk menyelesaikannya.<sup>20</sup>

Pada tanggal 4 Desember 1685, 8 September 1688, dan 4 Agustus 1699 diadakan perjanjian kesepakatan bersama di antara mereka yang disaksikan oleh para pejabat Kompeni. Dalam teks perjanjian itu jelas dinyatakan bahwa Gubernur Jenderal Kompeni dan *Raad van Nederlands Indie* bertindak sebagai pemrakarsa dan pelindung Kesultanan Cirebon dengan perantaraan masing-masing Kapten Francois Tack, Johannes de Hartog, dan Komisaris Kompeni di Cirebon. Pernyataan tersebut jelas menunjukkan pengakuan masuknya pengaruh Kompeni ke dalam kekuasaan Kesultanan Cirebon. Perjanjian tahun 1688 dan 1699 dimaksudkan secara tersurat untuk memperbaiki persahabatan antara tiga bersaudara keluarga Keraton Cirebon, yaitu Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan

---

<sup>20</sup> *Ibid*

Pangeran Adipati Tohpati atau Panembahan Cirebon. Dari naskah perjanjian itu dapat diketahui adanya tingkatan kedudukan di antara ketiganya. Dalam hal ini, Sultan Sepuh berada pada tingkatan paling atas, disusul oleh Sultan Anom, baru kemudian Penembahan Cirebon. Dalam urutan kedudukan tersebut termasuk pula putra mahkota masing-masing.

Pada saat VOC berhasil menanamkan dominasinya di Cirebon sejak tahun 1681, keterpisahan Cirebon dengan perdagangan laut semakin jauh. Isi perjanjian 7 Januari 1681 antara Cirebon dengan VOC yang sangat mempengaruhi perjalanan Cirebon sebagai kota dagang adalah bahwa Kompeni mendapatkan hak monopoli impor pakaian, kapas, opium, dan monopoli ekspor seperti lada, kayu, gula, beras, dan produk lain apa pun yang dikehendaki oleh Kompeni yang semuanya itu bebas dari bea impor yang sebelumnya pernah dikenakan oleh keraton sebesar 2% dari nilai barang. Perjanjian itu juga mengatur bahwa pelayaran pribumi harus mendapatkan lisensi dari VOC dan sangat dibatasi. Tidak semua kapal boleh masuk, kecuali atas izin dari VOC. Tanaman lada yang diusahakan di wilayah Cirebon diatur oleh Kompeni dan Kompeni pula yang menentukan harganya.

Dengan adanya perjanjian tersebut, maka baik secara politis maupun militer Cirebon telah berada di bawah perlindungan langsung dari kompeni. Selanjutnya keraton semakin berorientasi ke dalam (*inward orientation*) dengan mengembangkan kehidupan kesenian, kerohanian, gaya hidup, dan upacara-upacara keraton yang adiluhung dengan landasan ekonomi agraris yang berpusat di keraton.

Dengan munculnya pusat bisnis baru di sekitar pelabuhan Cirebon, maka Kota Cirebon lama yang berpusat di keraton semakin jauh dari aktivitas ekonomi perdagangan. Sumber-sumber Belanda yang berbicara mengenai periode 1700-an melaporkan bahwa Kota Cirebon, digambarkan sebagai Kota Pribumi atau *Indis (de Inlandsche Stad)* atau dipandang sebagai *het geminachte strandnest* (kota pantai yang dilecehkan). Hal itu mengesankan bukan hanya letak Kota Cirebon lama yang memang agak jauh dari pelabuhan, tetapi juga tidak lagi menjadi pusat aktivitas ekonomi perdagangan yang mulai bergeser ke arah daerah pelabuhan tempat kompeni memusatkan aktivitasnya. Meskipun begitu, karena faktor ekologis yang dipandang kurang sehat, orang-orang Belanda enggan bertempat tinggal menetap di Cirebon.<sup>21</sup> Akhirnya kekuasaan sultan-sultan Cirebon dihapuskan oleh Gubernur Jenderal Daendels pada tahun 1809.<sup>22</sup>

### **Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)**

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berdiri dalam Kongres pertama Guru Indonesia di Surakarta pada tanggal 25 November 1945. Deklarasi pendirian organisasi yang berprofesi guru ini tiga bulan setelah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945. Pendirian PGRI dilatarbelakangi dengan semangat untuk mengisi kemerdekaan yang dalam Pembukaan UUD 1945 tercantum kalimat “mencerdaskan kehidupan Bangsa.” Mencerdaskan kehidupan

---

<sup>21</sup> Nina H. Lubis, dkk., *Ibid.* hlm 201-203

<sup>22</sup> *Ibid*

Bangsa berarti memberikan ruang yang cukup luas bagi warga negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan dalam segala jenjang pendidikan.<sup>23</sup>

Kebebasan akan berpendidikan ini muncul seiring dengan peralihan kekuasaan dari pihak kolonial ke pemerintahan Indonesia. Pada masa kolonial dunia pendidikan terkotak-kotak yang disebabkan perbedaan kelas sosial, agama, suku, dan ras sehingga ada sekolah untuk kelas pribumi, sekolah untuk orang Asia Timur dan sekolah untuk orang Asing (Belanda dan Eropa). Sekolah untuk orang pribumi pun hanya diperuntukkan bagi putra-putra birokrat atau tuan-tuan tanah sehingga rakyat biasa tidak dapat mengikuti sekolah formal. Pengkotak-kotakan itu berdampak kepada model pendidikan yang hanya menciptakan pegawai rendahan dalam birokrasi pemerintahan kolonial untuk kepentingan kolonial itu sendiri terutama sekolah-sekolah untuk pribumi.

Selain itu pasca kolonialisme itu terjadi ketidak menentuan sistem pengelolaan pendidikan termasuk nasib para guru karena belum terbentuk pemerintahan yang stabil di antaranya belum ada satu departemen yang mengelola pendidikan atau departemen pendidikan versi Indonesia. Indonesia pada awal kemerdekaan lebih terkonsentrasi pada pengaturan kekuasaan politik yang pada waktu itu belum berhenti terjadinya rongrongan dari pihak Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia pasca kolonial Jepang.

Dengan kondisi seperti itu guru-guru dari berbagai lapisan pendidikan mengadakan kongres pertama di Surakarta untuk menyelamatkan dunia

---

<sup>23</sup> Uraian ini dilengkapi hasil wawancara dengan ketua PGRI Jawa Barat H. Sahiri Hermawan, SH.MH. di Sekretariat PGRI Jawa Barat pada tanggal 17 Oktober 2006

pendidikan dengan membentuk organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tiga bulan setelah kemerdekaan RI tepatnya tanggal 25 November 1945.

PGRI yang lahir pada era perjuangan menjadikan jatidiri organisasi PGRI sebagai organisasi perjuangan.<sup>24</sup> PGRI pun sebagai organisasi profesi karena yang hadir pada kongres pertama itu adalah yang berprofesi guru serta sasaran dari terbentuknya organisasi ini adalah untuk mempersatukan seluruh guru di Indonesia yang pada waktu itu masih terjadi gonjang-ganjing pengelolaan dunia pendidikan. Selain itu organisasi ini akan berkiprah dalam mempertahankan proklamasi dengan mengembangkan dunia pendidikan versi Indonesia dan untuk kepentingan bangsa Indonesia.

Organisasi PGRI pun berjati diri sebagai organisasi ketenagakerjaan karena dengan terbentuknya PGRI maka organisasi ini berkewajiban mempersiapkan tenaga kerja guru, yang pada waktu itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Dengan diraihnya kemerdekaan berimplikasi semua warga negara Indonesia bebas dan berhak mendapatkan jaminan pendidikan. Adanya jaminan pendidikan dibutuhkan sekolah-sekolah yang lebih banyak di seluruh pelosok Indonesia. Dengan banyaknya sekolah maka dibutuhkan banyak guru yang pada masa itu karena sekolah terbatas maka guru pun sedikit. Oleh karenanya PGRI menjadikan organisasi ini sebagai organisasi ketenagakerjaan yang sasarannya mempersiapkan tenaga-tenaga guru untuk kepentingan Indonesia.

Heterogenitas sekolah dan latarbelakang para guru pada waktu itu, supaya tidak menimbulkan efek negatif perpecahan dan arogansi yang berlandaskan

---

<sup>24</sup> Lihat AD/ART PGRI Pasal 3

kelas, suku dan ras maka organisasi ini dibentuk dengan bersifat unitaristik yaitu organisasi yang tanpa memandang perbedaan ijazah, tempat bekerja, kedudukan, suku, laki/perempuan, agama, dan asal-usul.<sup>25</sup> Dengan sifat organisasi seperti ini diharapkan dapat menyatukan visi dan misi pendidikan untuk kepentingan Indonesia bukan lagi kepentingan kolonial atau orang asing yang ada di Indonesia pada era kolonial.

Organisasi PGRI pun bersifat independen. Sebagai organisasi yang berprofesi guru supaya pendidikan tidak terkotak-kotak kembali maka organisasi PGRI mengambil sikap independen karena pada waktu itu di masa awal kemerdekaan para politisi semarak mendirikan partai-partai politik sebagai upaya mengisi pemerintahan yang baru terbentuk dan merupakan intruksi dari presiden Soekarno yang mempersilahkan untuk membentuk partai-partai politik sehingga dapat diselenggarakan pemilu yang demokratis untuk mengisi transisi kepemimpinan nasional pasca peralihan kekuasaan.

Selain itu PGRI pun tidak berpolitik praktis yang tidak terikat dan/atau mengikatkan diri pada kekuatan organisasi/partai politik manapun. Dalam upaya menciptakan pendidikan yang berorientasi pengembangan sumberdaya manusia Indonesia PGRI berusaha menjaga agar guru tidak dimanfaatkan untuk pengembangan salah satu partai politik apalagi terbawa pada salah satu ideologi politik tertentu sehingga itu akan merusak dari profesi guru dan harapan dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan diterapkan hanya untuk kepentingan nasional sehingga lebih mengembangkan cinta terhadap tanah air Indonesia bukan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 4

ideologi/isme atau partai politik tertentu. Sehingga, PGRI memiliki dan melandasi kegiatannya pada semangat demokrasi, kekeluargaan, keterbukaan, dan tanggung jawab etika, moral serta hukum.

Jatidiri dan Sifat organisasi PGRI tersebut menjadikan berdirinya PGRI memiliki tujuan antara lain *pertama*, mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. *Kedua*, berperan serta aktif mencapai tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. *Ketiga*, berperan serta mengembangkan sistem dan pelaksanaan pendidikan nasional. *Keempat*, mempertinggi kesadaran dan sikap guru, meningkatkan mutu dan kemampuan profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya. *Kelima*, menjaga, memelihara, membela, serta meningkatkan harkat dan martabat guru dan tenaga kependidikan melalui peningkatan kesejahteraan anggota serta kesetiakawanan.<sup>26</sup>

Kepentingan nasional yang menjadi fokus sasaran pendirian PGRI maka struktur yang terbentuk sebagai wujud dari pemerataan dan pengawasan dalam dunia pendidikan yang berskala nasional. Struktur itu ditingkat nasional berdiri Pengurus Pusat PGRI yang berkantor di Ibu Kota Negara yaitu Jakarta. Di setiap provinsi didirikan PGRI provinsi, di setiap kabupaten/kota didirikan PGRI kabupaten/kota, di setiap kecamatan didirikan PGRI cabang dan terakhir PGRI

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal 6

ranting yang wilayahnya bisa berdasarkan administratif desa/kelurahan atau lingkungan kerja/satuan pendidikan/gugus sekolah.<sup>27</sup>

Organisasi yang berskala nasional dengan membentuk struktur sampai pada wilayah terbawah di tingkat desa/kelurahan bahkan sampai pada satuan pendidikan setiap struktur PGRI memiliki tugas dan fungsi<sup>28</sup> yang sama yaitu *pertama*, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. *Kedua*, membela, mempertahankan, mengamankan dan mengamalkan Pancasila. *Ketiga*, mempertahankan dan melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Keempat*, meningkatkan integrasi bangsa serta menjaga tetap terjamin dan terpeliharanya keutuhan kesatuan dan persatuan bangsa. *Kelima*, melaksanakan dan mengembangkan sistem pendidikan nasional. *Keenam*, membina dan bekerja sama dengan himpunan profesi dan keahlian sejenis di bidang pendidikan yang secara sukarela menyatakan diri bergabung dan/atau bermitra dengan PGRI. *Ketujuh*, mempersatukan semua guru dan tenaga kependidikan di semua jenis, jenjang, dan satuan pendidikan guna meningkatkan pengabdian dan peran serta di dalam pembangunan nasional.

Selain itu, tugas dan fungsi PGRI di seluruh lapisan struktur organisasi adalah *pertama*, mengupayakan dan mengevaluasi terlaksananya sertifikasi, akreditasi, dan lisensi bagi pengukuhan kompetensi profesi guru. *Kedua*, menegakkan dan melaksanakan kode etik dan ikrar guru Indonesia sesuai peraturan organisasi. *Ketiga*, mengadakan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan, organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, dan atau

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 14

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 7 ayat a s.d s

organisasi kemasyarakatan umumnya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan/atau kebudayaan. *Keempat*, memelihara, membina, dan mengembangkan kebudayaan nasional serta memelihara kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional. *Kelima*, menyelenggarakan dan membina anak lembaga PGRI.

*Keenam*, memelihara dan mempertinggi kesadaran guru akan profesinya untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, pengabdian, prestasi dan kerjasama. *Ketujuh*, membentuk, memelihara, dan meningkatkan mutu kader organisasi PGRI. *Kedelapan*, membina usaha kesejahteraan guru dalam arti yang luas dan membantu serta memperjuangkan hak-hak anggota dalam bidang ketenagakerjaan. *Kesembilan*, melaksanakan prinsip dan pendekatan ketenagakerjaan dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat guru melalui peningkatan kesejahteraan anggota. *Kesepuluh*, memperkuat kedudukan, wibawa, dan martabat guru serta kesetiakawanan organisasi. *Kesebelas*, membina dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan organisasi guru luar negeri dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. *Kedua belas*, melakukan pengawasan sosial dan fungsional atas pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional.

### **Nahdlatul Ulama (NU)**

Nahdhatul Ulama (NU) merupakan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Begitu pula di Provinsi Jawa Barat. NU Jawa Barat berdiri seiring dengan berdirinya PB NU. Nahdlatul Ulama berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 yang diprakarsai oleh Kiai Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Hasyim Asy'ari

untuk mengorganisir Islam tradisional.<sup>29</sup> Kelahiran NU dilatarbelakangi pertentangan antara kaum tradisi dengan kaum pembaharu tentang pelaksanaan Syari'at Islam.<sup>30</sup> NU berkembang sangat pesat di bawah penjajahan Belanda tahun 1935. NU mempunyai 68 cabang di seluruh Hindia Belanda dengan 67.000 anggota. Tiga tahun kemudian dengan 99 cabang, NU berkembang ke luar Jawa, ke Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan.<sup>31</sup>

PW NU Jawa Barat secara struktural memiliki 25 Cabang, 278 Majelis Wakil Cabang (MWC) di tingkat kecamatan. Selain itu terdapat beberapa organisasi yang bernaung di bawah NU antara lain IPNU, IPPNU, GP Anshor, Muslimat NU, ISNU, dan PMII. NU juga sebagai kekuatan Islam tradisional berbasiskan kepada pondok pesantren Salafiyah. Pondok pesantren yang bernaung di bawah PW NU Jawa Barat tercatat ± 1.500 pesantren yang tersebar di Jawa Barat. Pondok pesantren NU dapat dilihat dari beberapa unsur, antara lain: pertama, tradisi keagamaan seperti wirid bersama, qunut, tahlilan, jiarah. Kedua, kitab-kitab yang dipelajari di pesantren seperti, Safinah, I'natuthalibin, Taqrib, Tafsir Jalalain. Ketiga, tradisi berpakaian senantiasa menggunkan sarung dan kopiah.<sup>32</sup>

NU sebagai organisasi Islam terbesar senantiasa menjadi perebutan elit politik untuk menarik NU di pentas politik bahkan NU secara organisasi pernah

---

<sup>29</sup> Abdul Halim, K.H., *Sejarah Perjuangan Kyai Abdul Wahab Chasbullah* (Bandung: Penerbit Baru, 1970) hlm 7-21

<sup>30</sup> Lihat Saifuddin Zuhri, K.H. A. *Wahab Chasbullah Bapak Pendiri NU* (Jakarta: Yamunu, 1972) hlm 40

<sup>31</sup> Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fiqih dalam Politik* ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998) hlm 141

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Sekretaris PW NU Jawa Barat pada tanggal 8 Novemer 2006 di Sekretariat NU Jawa Barat Jl. Sancang 10

terjun langsung dalam dunia politik dengan mendirikan partai politik. Pengalaman NU yang begitu panjang dalam pentas politik menjadikan kaum Nahdhiyin atau pengurus NU memiliki peluang untuk berkhirah di politik. Pada era reformasi ketika terjadi pemilihan langsung anggota DPD pada tahun 2004, terdapat beberapa tokoh NU terpilih sebagai anggota DPD antara lain di Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Barat.

Kiprah NU di pentas politik bermula dari bergabungnya NU dalam konfederasi MIAI (*Majelis Islam A'laa Indonesia*) bersama dengan organisasi-organisasi Islam moderat lainnya pada tahun 1937. Lewat para aktivis mudanya seperti Mahfudz Shiddiq dan Wahid Hasyim, NU semakin terlibat dalam perjuangan nasional. Ketika pada tahun 1939 parta-partai politik membentuk sebuah federasi GAPI (Gabungan Politik Indonesia), para aktivis muda ini terbawa ke panggung politik sebagai wakil NU dan MIAI.<sup>33</sup>

MIAI dibubarkan tahun 1943 dan diganti dengan Masyumi (*Madjlis Sjuro Muslimin Indonesia*) hanya Muhammadiyah dan NU yang diakui secara sah menjadi anggota Masyumi. Pada bulan Agustus 1944, Kiai Hasyim Asy'ari diangkat sebagai ketua *Shumubu* (Kantor Urusan Agama Islam buatan Jepang) dan NU mulai masuk urusan pemerintah untuk pertama kalinya. Tahun itu juga, wahid Hasyim seijin Jepang mendirikan *Hizbullah* dan *Sabilillah*.<sup>34</sup>

Pada tahun 1946, NU secara penuh mengambil bagian dalam pemerintahan dengan diberikannya jabatan menteri agama yang dibentuk pada tahun yang sama

---

<sup>33</sup> Deliar Noor, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1980) hlm290

<sup>34</sup> Andree Feillard, *NU Vis-à-vis Negara Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, (Yogyakarta: LKiS, 1999) hlm 29

tanggal 3 Januari.<sup>35</sup> Bagi NU, jabatan ini merupakan kunci yang membuatnya berada pada posisi yang sangat menguntungkan untuk jangka panjang karena memberikan landasan yang sah bagi aktivitas sosial keagamaannya.

Pada tahun 1949 terjadi konflik dalam tubuh Masyumi, kaum tradisional mulai menunjukkan pendirian yang lebih tegas setelah dipilihnya Kiai Wahab Hasbullah sebagai *Rais Am* pada tahun 1950 menyusul wafatnya Kiai Hasyim Asy'ari pada tahun 1947. NU akhirnya memisahkan diri dari Masyumi dan mendirikan partai politik sendiri pada muktamarnya di Palembang akhir April 1952.<sup>36</sup>

Pada bulan Juli 1953, NU masuk dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo, yang dipimpin PNI dan didukung oleh PKI. Sebaliknya, Masyumi dan PSI tampil sebagai oposisi. Di situ NU menambah peran politiknya: tidak hanya jabatan Menteri Agama juga Menteri Pertanian dan bahkan jabatan Wakil Perdana Menteri diserahkan pada NU. Pemimpin Masyumi kecewa melihat NU semakin kuat dan semakin dekat dengan Soekarno.

Pada Pemilu tahun 1955, NU mendapat sukses yang luar biasa, dari 8 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara meningkat menjadi 45 kursi dengan 18,4% suara, tepat di belakang Masyumi (20,9%), Partai Nasional Indonesia (22,3%) dan berada di depan Partai Komunis Indonesia (16,4%).<sup>37</sup> Partai-partai lain hanya mendapat kurang dari 3% suara. Keenam partai Islam bersama,

---

<sup>35</sup> Daniel S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia: a Study in the Political Bases of Legal Institutions* (Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1972) hlm 45

<sup>36</sup> Deliar Noor, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965* (Jakarta: Grafiti Press, 1987) hlm 101

<sup>37</sup> Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1962) hlm 434

termasuk NU, mencapai 43,9% suara. Suara terbanyak Nahdlatul Ulama diperoleh di pulau Jawa.

Pada masa Orde Baru NU memainkan peranan kunci dalam peralihan kekuasaan secara bertahap setelah dalam waktu beberapa hari saja jenderal Soeharto berhasil menumpas ‘Gerakan 30 September’. Di samping keikutsertaan para aktivis radikalnya dalam demonstrasi mahasiswa di tahun 1966,<sup>38</sup> NU juga memainkan peran yang sangat penting dalam pengambilalihan kekuasaan secara konstitusional oleh Jenderal Soeharto. Bagi para jenderal yang menekankan keabsahan peralihan kekuasaan, NU merupakan satu-satunya pasangan yang dapat dijadikan tumpuan harapan: Partai Nasional terlalu dekat hubungannya dengan Soekarno, Masyumi sudah dilarang tahun 1960 dan sangat dicurigai sementara partai-partai lainnya terlalu kecil untuk berperan. MPR dan DPR yang kembali mengalami perombakan tidak lama setelah peralihan kekuasaan kepada Soeharto tanggal 11 Maret 1966 sebagian diserahkan ke tangan NU. Jadi, terjalin satu kerjasama antara ABRI dan gerakan tradisional.

Jenderal Soeharto menduduki kursi kepresidenan secara bertahap dari tahun 1965 hingga 1968. selama masa itu, dua orang NU memainkan peran yang menentukan, yaitu Achmad Sjaichu di DPR-GR dan Subchan di MPRS. Sjaichu Menteri dan Wakil Ketua Parlemen yang diwariskan oleh Demokrasi Terpimpin, diangkat menjadi juru bicara Dewan tanggal 2 Mei 1966. NU tidak menduduki posisi penting ini sejak tahun 1963. Perannya sangat menentukan sebab mempermudah *reshuffle* yang dilakukan secara berturut-turut demi keuntungan

---

<sup>38</sup> Andree Feillard, *Op. Cit.*, hlm 95

kelompok politik yang dekat dengan Orde Baru dan membuat para Wakil Rakyat yang berhaluan komunis semakin terpojok. Di MPRS, Subchan diangkat sebagai salah seorang Wakil Ketua MPRS mewakili kelompok Islam mulai tahun 1966 sampai tahun 1971. Subchan menjadi tangan kanan Jenderal Nasution yang pada waktu itu sebagai Ketua MPRS.<sup>39</sup>

Pembersihan dalam tubuh DPR-GR telah dimulai sejak tahun 1966. Tanggal 8 April, reorganisasi pertama telah memaksa 62 anggota PKI meninggalkan DPR-GR. Kemudian pada tanggal 17 Mei 1966, lima belas hari setelah pengangkatan Ahmad Sjaichu sebagai Ketua DPR-GR, sekitar 136 komunis anggota Dewan yang terbunuh atau ditahan digantikan. DPR yang telah mengalami pembersihan inilah yang kemudian memerintahkan MPRS menyelenggarakan sidang tanggal 20 Juni hingga 6 Juli 1966 yang kemudian mengakibatkan jatuhnya Soekarno.

Pada pemilu 1971 NU masih membuktikan keunggulannya dibanding partai-partai Islam lainnya dengan menduduki pemenang kedua setelah Golkar yang meraih 56,7%, sedangkan NU 18,6% tidak jauh perolehannya pada pemilu 1955 sebesar 18,4%. Kemenangan Golkar yang mencolok menjadikan kekuatan bagi pemerintah untuk melakukan penyederhanaan partai politik dengan melalui fusi. Akhirnya NU pun melakukan fusi dengan partai-partai Islam lainnya seperti Parmusi, Perti dan PSII pada tahun 1973 menjadi PPP. Pada awalnya fusi itu memberi keuntungan kepada NU sebab fusi itu dilakukan ketika NU berhasil memperoleh suara yang mengungguli jauh partai-partai Islam lainnya. Dengan posisi 58 kursi dari seluruh kursi partai Islam 94 kursi, berarti NU mengantongi

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm 96-98

61% suara gabungan partai-partai Islam itu. Akan tetapi, menjelang pemilihan umum tahun 1982, posisi itu mulai digugat unsur MI dalam PPP. Konflik pun akhirnya pecah secara terbuka. Dengan dukungan pejabat-pejabat pemerintah gugatan MI berhasil mengurangi posisi perimbangan kekuatan NU tidak lagi dominan seperti sediakala. Kekecewaan yang dialami NU akibat konflik dengan unsur lain dalam PPP berkembang menjadi salah satu faktor pendorong yang mempercepat langkah NU menuju khittah 1926.

Keputusan Mukhtamar Situbondo tahun 1984 yang menjadikan NU kembali kekhittah 1926 menjadikan kiyai-kiyai NU bebas berpolitik tanpa terikat oleh organisasi NU sehingga ada kader yang aktif di Golkar di antaranya Abdurrahman Wahid sebagai anggota MPR RI anggota tambahan dari Golkar, Selamat Effendi Yusuf yang sampai sekarang masih menjadi anggota DPR RI dari partai Golkar. Di PPP terdapat Hamzah Haz dan Suryadarma Ali bahkan sekarang masuk menjadi anggota PPP Saefullah Yusuf.

Berakhirnya era Orde Baru tahun 1998 membawa angin segar kembali kepada NU untuk terjun ke dunia politik secara organisasi, karena diperbolehkan membentuk partai. Pada tahun 1998 NU membentuk partai yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diketuai oleh Matori Abdul Jalil sedangkan Abdurrahman Wahid yang pada waktu itu ketua tanfidziah PB NU menjadi ketua Dewan Syuro PKB. Pendirian partai tersebut untuk mengikuti pemilu yang diadakan pada tahun 1999 sebagai solusi akan krisis kepemimpinan nasional pasca turunnya Soeharto dari kursi Presiden dan diserahkan kepada B.J. Habibie sebagai wakil Presiden menjadi Presiden RI ke-3 karena kemelut itu

dilakukan pemilu dipercepat yang seharusnya pada tahun 2002 dimajukan pada tahun 1999 dengan terlebih dahulu melakukan reformasi undang-undang politik. Keberhasilan politik NU di era Reformasi adalah menjadikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI tahun 1999.

Keberhasilan itu tidak berlangsung lama pada tahun 2002 Abdurrahman Wahid diturunkan dari kursi Presiden melalui Sidang Istimewa MPR. Peristiwa itu berdampak pecahnya PKB menjadi PKB Gus Dur dan PKB Matori Abdul Jalil. Pasca pemilu 2004 PKB pecah kembali dengan munculnya PKB Muhaimin Iskandar-Abdurrahman Wahid dan PKB Alwi Syihab-Saefullah Yusuf. Berlikunya perjalanan politik NU akan memberikan kematangan tersendiri akan perpolitikan NU tinggal kita tunggu peran NU pada pemilu 2009.

dilakukan pemilu dipercepat yang seharusnya pada tahun 2002 dimajukan pada tahun 1999 dengan terlebih dahulu melakukan reformasi undang-undang politik. Keberhasilan politik NU di era Reformasi adalah menjadikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI tahun 1999.

Keberhasilan itu tidak berlangsung lama pada tahun 2002 Abdurrahman Wahid diturunkan dari kursi Presiden melalui Sidang Istimewa MPR. Peristiwa itu berdampak pecahnya PKB menjadi PKB Gus Dur dan PKB Matori Abdul Jalil. Pasca pemilu 2004 PKB pecah kembali dengan munculnya PKB Muhaimin Iskandar-Abdurrahman Wahid dan PKB Alwi Syihab-Saefullah Yusuf. Berlikunya perjalanan politik NU akan memberikan kematangan tersendiri akan perpolitikan NU tinggal kita tunggu peran NU pada pemilu 2009.

### **Alasan dukungan dan proses penentuan dukungan**

Pemilihan Umum DPD sebagaimana diuraikan di bab terdahulu adalah pemilu yang diikuti oleh peserta perseorangan. Hal tersebut menjadikan setiap kandidat mencari dukungan dari berbagai pihak baik dari elit, organisasi kemasyarakatan maupun langsung dari masyarakat pemilih. Dukungan itu muncul juga dari organisasi yang dipimpin oleh para kandidat. Dukungan itu tidak semata-mata hanya untuk meramaikan pemilu tahun 2004 yang merupakan pemilu yang demokratis tetapi, organisasi-organisasi itu mendukung dengan alasan tertentu sehingga dukungan itu ada yang diputuskan melalui mekanisme organisasi atau organisasi digunakan untuk meraih dukungan pemilih walaupun

tidak diputuskan melalui mekanisme organisasi tetapi lebih kepada kesepakatan di antara pengurus organisasi tersebut.

Ginandjar Kartasasmita didukung oleh organisasi kemasyarakatan kedaerahan terbesar di Jawa Barat yaitu Paguyuban Pasundan. Ketua Umum Paguyuban Pasundan H. A. Syafi'i mengatakan bahwa dukungan terhadap Ginandjar Kartasasmita oleh Paguyuban Pasundan merupakan dukungan yang diputuskan melalui mekanisme organisasi yaitu melalui rapat harian Pengurus Besar Paguyuban Pasundan sehingga keputusannya legal dan mengikat bagi organisasi di bawahnya dan bagi anggota Paguyuban Pasundan secara keseluruhan.<sup>40</sup>

Ketentuan pengambilan keputusan dalam organisasi Paguyuban Pasundan dilakukan dengan tiga tahapan yakni *pertama*, segala keputusan rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat bagi kepentingan organisasi. *Kedua*, Bila cara pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan ditentukan dengan cara pemungutan suara. *Ketiga*, Bilamana ternyata hasil voting sama kuat, pengambilan keputusan harus ditunda dan diadakan musyawarah kembali hingga mencapai mufakat.<sup>41</sup>

Keputusan dukungan oleh Pengurus Besar Paguyuban Pasundan terhadap Ginandjar Kartasasmita dilakukan dengan musyawarah mufakat pada rapat harian dengan dihadiri oleh ketua umum, para ketua, sekjen dan para sekretaris,

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan H. Syafi'i Ketua Umum Paguyuban Pasundan di kantor PB Paguyuban Pasundan pada tanggal 13 Desember 2006

<sup>41</sup> Lihat AD/ART Paguyuban Pasundan Pasal 26 dan 29

bendahara dan wakil bendahara. H. Syafi'i<sup>42</sup> mengatakan bahwa keputusan dukungan itu diambil dengan beberapa alasan dan pertimbangan yang antara lain: *Pertama*, permohonan resmi melalui surat pribadi dari Ginandjar Kartasasmita untuk memohon dukungan kepada Pengurus Besar Paguyuban Pasundan atas pencalonannya dalam pemilihan umum anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Barat. Ginandjar Kartasasmita adalah Ketua Dewan Pengapung Pengurus Besar Paguyuban Pasundan. Calon dari Pengurus Paguyuban Pasundan dalam pemilihan umum 2004 tidak hanya Ginandjar Kartasasmita tetapi juga ada Agus Muhyidin, Popong Otje Jundjunan, Karna Suwanda, Nanang Iskandar Ma'som, H.D. Sutisno dan Dindin S. Maulani. Keputusan Pengurus Besar Paguyuban Pasundan menetapkan dukungan terhadap Ginandjar Kartasasmita karena hanya beliau yang mengajukan secara resmi permohonan dukungan kepada organisasi sedangkan yang lainnya tidak mengajukan dukungan bahkan pihak Paguyuban Pasundan baru mengetahui setelah pengumuman peserta pemilu anggota DPD bahwa, ternyata pengurus Paguyuban Pasundan tidak hanya Ginandjar Kartasasmita.

*Kedua*, alasan dan pertimbangan keputusan Pengurus Besar Paguyuban Pasundan terhadap Ginandjar Kartasasmita adalah kualitas pribadi beliau. H. Syafi'i mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI merupakan lembaga baru sehingga harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kualitas yang terbaik dan Paguyuban Pasundan senantiasa mendukung orang yang memiliki kualitas yang terbaik. Ginandjar Kartasasmita adalah seorang intelektual Sunda yang mempunyai reputasi di tingkat nasional bahkan internasional.

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan H. Syafi'i pada tanggal 13 Desember 2006

Alasan dan pertimbangan *ketiga*, seperti dikatakan oleh H. Syafi'i, Ginandjar Kartasasmita memiliki pengalaman dan reputasi yang baik dalam pengelolaan lembaga negara karena beliau telah berpengalaman dalam lembaga kenegaraan. Alasan dan pertimbangan keempat, H. Syafi'i mengatakan bahwa beliau adalah orang Sunda asli. Ia berasal dari Kabupaten Sumedang. Bapaknya adalah seorang pejuang dan pendiri Pemuda Pasundan. Jadi beliau betul-betul berdarah Pasundan dan telah lama berkiprah di Paguyuban Pasundan sebagai penerus dari ayahandanya. Hanya beliau sering tinggal di Jakarta dan besar di Jakarta karena beliau senantiasa menjadi pejabat pemerintah pusat. Paguyuban Pasundan juga didirikan di Jakarta karena pada waktu itu Jakarta merupakan bagian dari wilayah Sunda atau Jawa Barat.

Dengan pengalaman, reputasi dan kualitas beliau maka layak kiranya Pengurus Paguyuban Pasundan menetapkan beliau sebagai wakil dari masyarakat Sunda atau Jawa Barat sehingga tidak mempermalukan orang Sunda, demikian kata H. Syafi'i. Berkaitan dengan isu negatif beliau yaitu keterlibatannya dengan kasus Freeport ia hanya berkilah bahwa secara hukum tidak terbukti bersalah, jadi itu hanya permainan dari orang-orang yang benci kepada Ginandjar Kartasasmita. Yang penting secara hukum ia telah terbebas.

Lebih lanjut H. Syafi'i berkilah, dalam politik biasa orang saling menghujat, saling menjatuhkan, ada yang suka dan ada pula yang membenci, tetapi Pengurus Paguyuban Pasundan melihat dengan objektif bahwa beliau itu adalah sosok yang

memiliki pribadi yang baik dan loyalitas serta dedikasinya cukup tinggi sehingga pantaslah kalau beliau ini menduduki kursi DPD dari Jawa Barat.<sup>43</sup>

Selain Organisasi Paguyuban Pasundan, Ginandjar Kartasasmita mendapat dukungan dari organisasi-organisasi kedaerahan Sunda lainnya. Nugraha Besoes mengatakan bahwa Ginandjar didukung empat organisasi yang bersifat kedaerahan Sunda yaitu pertama, organisasi Daya Masyarakat Sunda (Damas). Kedua, Angkatan Muda Siliwangi (AMS). Ketiga, Kemitraan Sunda. Keempat, Persatuan Pencak Silat.<sup>44</sup>

Keempat organisasi kedaerahan tersebut tidak sebesar Paguyuban Pasundan. Damas merupakan organisasi yang lebih berorientasi kepada pengembangan kebudayaan Sunda yang beranggotakan lebih banyak seniman Sunda. AMS merupakan organisasi putra-putri Korp Siliwangi di Jawa Barat yang hanya beranggotakan putra-putri TNI. Tetapi, di kalangan organisasi kepemudaan, AMS merupakan organisasi yang senantiasa memimpin organisasi kepemudaan seperti KNPI Jawa Barat. Kemitraan Sunda juga hanya berupa organisasi yang berada di Bandung dan lebih menitik beratkan kepada kebudayaan Sunda. Persatuan Pencak Silat juga hanya beranggotakan orang-orang Sunda yang melestarikan Silat Sunda.

Dalam penelitian ini tidak dikupas lebih lanjut keempat organisasi ini karena jangkauan politiknya tidak seperti yang dilakukan oleh Paguyuban Pasundan. Bahkan keempat organisasi ini berhasil digabungkan dengan Paguyuban Pasundan

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan H. Syafi'i di Kantor PB Paguyuban Pasundan pada tanggal 13 Desember 2006

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Nugraha Besoes yang merupakan ketua Tim Sukses Ginandjar Kartasasmita di Gedung PSSI karena searang beliau menjabat Sekjen PSSI. Wawancara dilakukan pada tanggal 15 November 2006

yang difasilitasi oleh Ginandjar Kartasasmita sehingga keempat organisasi tersebut menginduk dan berkoordinasi dengan Paguyuban Pasundan. Nugraha Besoes mengatakan bahwa Ginandjar Kartasasmita berhasil menyatukan organisasi-organisasi kedaerahan Sunda di bawah payung Paguyuban Pasundan yang dilakukan dalam temu masyarakat Sunda di Jakarta pada tanggal 10 November 2006.<sup>45</sup> Penggabungan itu karena lebih didasarkan pada kesamaan maksud dan tujuan dari organisasi itu sendiri, yaitu untuk memajukan orang Sunda (Ki Sunda) dan mengembangkan budaya Sunda, sehingga mereka mau bersatu dalam organisasi Paguyuban Pasundan sebagai lembaga koordinasi antar organisasi kedaerahan Sunda.

Ginandjar Kartasasmita juga mendapatkan dukungan dari Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat yaitu Rudy Gunawan. Ia mengatakan bahwa dukungan terhadap Ginandjar Kartasasmita memang tidak diputuskan melalui rapat organisasi tetapi secara pribadi. Ia mendukung pencalonan Ginandjar Kartasasmita yang dibuktikan dengan difasilitasinya Ginandjar Kartasasmita untuk bertemu dengan anggota HKTI dan pengurus HKTI di tingkat Cabang dan Ranting yang banyak menyebarkan atribut Ginandjar Kartasasmita.<sup>46</sup>

Alasan yang dikemukakan Rudy Gunawan antara lain, *pertama*, Ginandjar Kartasasmita merupakan orang Sunda sehingga pantas kalau orang Sunda

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Nugraha Besoes yang merupakan ketua Tim Sukses Ginandjar Kartasasmita pada tanggal 15 November 2006. Ungkapan ini dibenarkan juga oleh H. Syafi'i ketika penulis mewawancarainya pada tanggal 13 Desember 2006

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Ir. Rudy Gunawan Ketua Umum HKTI Jawa Barat di Kantor HKTI Jawa Barat pada tanggal 12 Januari 2007

mendukung orang Sunda. *Kedua*, Ginandjar Kartasasmita memiliki kualitas dan kapabilitas yang memadai untuk menduduki jabatan di legislatif bahkan harusnya beliau itu jadi Presiden RI. *Ketiga*, beliau memiliki pengalaman dalam berpolitik yang cukup panjang sehingga itu penting untuk menjadikan DPD sebagai media memajukan Jawa Barat. *Keempat*, ia kenal baik pak Ginandjar Kartasasmita, jadi ketika Ginandjar Kartasasmita mencalonkan ia langsung menghubungi beliau untuk mendukung pencalonannya.

Berbeda dengan Ginandjar Kartasasmita, Pangeran Arief Natadiningrat merupakan putra dari Kesultanan Cirebon. Dukungan terhadap beliau terdiri dari tiga kelompok. *Pertama*, dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat Jawa Barat dan tokoh masyarakat Cirebon. Tokoh-tokoh tersebut menyarankan dan akan mendukung pencalonan beliau pada pemilihan umum anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Barat.<sup>47</sup> Pengeran Arief Natadiningrat mengatakan bahwa ia hanya diuntungkan karena berada di lingkungan Keraton Cirebon sebagai putra mahkota Cirebon sehingga para tokoh Jawa Barat senantiasa berdatangan ke Keraton. Kedatangan para tokoh tersebut menjadikan Pengeran Arief lebih dikenal di kalangan tokoh-tokoh Jawa Barat dan tokoh nasional. Tokoh Jawa Barat yang pernah datang ke Keraton Cirebon antara lain Ketua Umum Partai Golkar Jawa Barat Uu Rukmana, H.R. Nuriana mantan Gubernur Jawa Barat, Hafidz Usman Ketua MUI Jawa Barat, Ketua PDIP Jawa Barat Rudi Harsa, dan Agus Muhyidin

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Pra. Arief Natadiningrat di Kantor DPD pada tanggal 7 November 2006.

mantan Ketua DPRD Jawa Barat. Tokoh-tokoh tersebut mendukung pencalonan Pangeran Arief pada pemilu DPD.<sup>48</sup>

Sedangkan tokoh-tokoh nasional yang pernah datang ke Keraton Cirebon di antaranya Hamzah Haz Ketua Umum PPP dan beliau akan memperjuangkannya terutama di kantong-kantong PPP seperti di Bogor, Cianjur dan Sukabumi. Tokoh lain yaitu dari Partai Golkar, Akbar Tanjung dengan ungkapan yang sama. Selain itu, Taufiq Kemas dari PDIP. Beliau pun akan mendukung pencalonan Pangeran Arief terutama di daerah pemilihannya yaitu Kabupaten Bandung.<sup>49</sup>

*Kedua*, dukungan dari keluarga besar Kesultanan Cirebon. Setelah mendapatkan dukungan dari beberapa tokoh tersebut ia berkonsultasi dengan keluarga besar Keraton Kasepuhan Cirebon. Keluarga Kesultanan Cirebon mendukung atas pencalonan beliau. Dukungan tersebut dengan alasan mewakili kebesaran keluarga Kesultanan sehingga nama kebesaran Kesultanan Cirebon dapat terangkat kembali.

*Ketiga*, dukungan dari organisasi Hipmi Jawa Barat dan Kosgoro Jawa Barat. Dukungan tersebut tidak diputuskan melalui mekanisme organisasi tetapi secara pribadi dari tokoh-tokoh organisasi tersebut. Pangeran Arief mendapatkan dukungan dari organisasi tersebut karena ia adalah pengurus dari kedua organisasi tersebut. Tidak diputuskannya secara organisasi karena banyak dari tokoh-tokoh kedua organisasi tersebut yang mencalonkan pada pemilu DPD. Untuk menghindari konflik internal organisasi maka setiap pengurus diberikan kebebasan untuk mendukung calon-calon dari kedua organisasi tersebut. Seperti

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara melalui telepon dengan Sekretaris Tim Sukses Pangeran Arief, Iwan Kustiawan pada tanggal 27 September 2007

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Pra. Arief Natadiningrat pada tanggal 7 November 2006

dukungan kepada Pangeran Arief Natadiningrat dari Ketua Hipmi Bekasi Wawan Muhwan dan dukungan dari Ketua Umum Kosgoro Kabupaten Bandung Dadang Naser.<sup>50</sup>

Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Barat lainnya adalah Mohammad Surya. Pencalonan beliau didukung oleh organisasi yang ia pimpin yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Beliau adalah Ketua Umum PP PGRI. Mohammad Surya<sup>51</sup> mengatakan bahwa pencalonannya untuk menjadi anggota DPD adalah bersifat pribadi hanya kebetulan saja ia sebagai Ketua PP PGRI konsekuensi logisnya PGRI mendukung pencalonannya, tetapi tidak ada keharusan organisasi PGRI memutuskan dukungannya. Hanya ketika Kongres PGRI di Semarang tahun 2003 dihimbau kepada PGRI Daerah pada saatnya pemilu diharapkan untuk mendukung calon-calon legislatif yang akan memperjuangkan guru, yang memperjuangkan guru pasti dari kalangan guru itu sendiri. Jadi PGRI berkewajiban mendukung calon yang dari PGRI di seluruh Indonesia.

Ketua Umum PGRI Jawa Barat Sahiri Hermawan<sup>52</sup> mengatakan bahwa dukungan kepada Mohammad Surya sebatas dukungan moral. Tetapi seluruh pengurus PGRI Jawa Barat berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan pemilu walaupun dukungan tersebut tidak melalui mekanisme organisasi. Tidak diputuskannya dukungan oleh PGRI Jawa Barat karena PGRI secara organisasi

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Pangeran Arief Natadiningrat pada tanggal 7 November 2006 di Kantor DPD RI Jakarta

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Dr. H. Mohammad Surya pada tanggal 5 Januari 2007 di Sekretariat DPD RI di Bandung.

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Sahiri Hermawan, MH pada tanggal 10 Oktober 2006 di Sekretariat PGRI Jawa Barat.

harus tetap independen, tetapi kalau secara individu-individu mendukung pencalonan Mohammad Surya tersebut tidak disalahkan. Ketentuan itu diambil dalam keputusan rapat harian pengurus PGRI Jawa Barat.

Ketentuan pengambilan keputusan di organisasi PGRI dengan melalui dua tahapan yakni *pertama*, keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat. *Kedua*, apabila upaya untuk mencapai mufakat tidak berhasil maka diputuskan dengan suara terbanyak. Pengambilan keputusan organisasi dapat melalui forum organisasi atau rapat-rapat pengurus. Forum organisasi di antaranya adalah Kongres dan konferensi Pusat (Konpus) untuk tingkat PGRI pusat di tambah kongres luar biasa apabila diperlukan. Di tingkat provinsi terdapat Konferensi PGRI Provinsi (Konprov) dan Konferensi Kerja PGRI Provinsi (Konkerprov) begitu pula untuk tingkat kabupaten, pada tingkat cabang sampai ke tingkat ranting. Forum organisasi merupakan forum yang dilakukan secara rutin ditingkat pusat lima tahun sekali begitu seterusnya. Forum organisasi merupakan forum musyawarah untuk reorganisasi, penggantian pengurus dan penyusunan program lima tahunan.<sup>53</sup>

Ketentuan dukungan moral terhadap Mohammad Surya ditetapkan dalam rapat harian PGRI Jawa Barat dengan beberapa alasan dan pertimbangan yang antara lain: *Pertama*, PGRI merupakan organisasi guru harus ikut menyokong proses demokratisasi bangsa dengan ikut berpartisipasi dalam pencalonan wakil PGRI sebagai peserta perseorangan dalam pemilu 2004 untuk memperebutkan kursi DPD RI. *Kedua*, harus ada perwakilan yang mengatasnamakan guru dalam

---

<sup>53</sup> Lihat AD/ART PGRI Pasal 44 dan Pasal 47

rangka memperjuangkan nasib guru di Indonesia. *Ketiga*, Mohammad Surya memiliki pengalaman legislasi karena ia pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. Dengan pengalaman di legislatif tersebut diharapkan akan mengangkat citra kapabilitas guru untuk menyusun, mengajukan dan mengusulkan yang berkaitan dengan nasib guru. *Keempat*, berdasarkan beberapa saran dan usulan dari PGRI cabang di setiap kabupaten/kota untuk mendukung pencalonan Mohammad Surya.<sup>54</sup>

K.H. Sofyan Yahya merupakan pemenang keempat dalam pemilihan anggota DPD RI dari provinsi Jawa Barat. Ia merupakan representasi dari Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan organisasi keagamaan terbesar di Jawa Barat bahkan di Indonesia. K.H. Sofyan Yahya pada waktu pencalonannya tengah menduduki jabatan Ketua Umum Pengurus Wilayah (PW) NU Jawa Barat. K.H. Sofyan Yahya mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak berminat untuk ikut mencalonkan diri menjadi anggota DPD, tetapi para ulama di Jawa Barat menyarankan beliau untuk ikut dalam pemilu mewakili kalangan ulama supaya kepentingan-kepentingan para ulama dapat ditampung melalui beliau.<sup>55</sup>

Ketentuan dukungan kepada K.H. Sofyan merupakan keputusan yang ditetapkan melalui mekanisme organisasi NU Jawa Barat, sehingga keputusan tersebut bersifat mengikat ke struktur internal organisasi di bawahnya, lembaga-lembaga otonom dan kepada anggota NU Jawa Barat. Pengambilan keputusan dukungan oleh NU Jawa Barat berdasarkan hasil rapat harian Pengurus Wilayah

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Sahiri Hermawan Ketua Umum PGRI Jawa Barat pada tanggal 10 Oktober 2006

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan K.H. Sofyan Yahya pada tanggal 7 November 2006 di Sekretariat DPD RI Jakarta.

NU (PW NU) Jawa Barat. Dalam konstitusi NU tidak dijelaskan secara rinci tingkatan pengambilan keputusan dan forum-forum pengambilan keputusan sehingga adanya suatu rapat bisa berdasarkan inisiatif dari pengurus NU di semua lapisan mulai tingkat nasional, wilayah, cabang, anak cabang dan ranting. Persyaratan qorum juga tidak dijelaskan sehingga NU lebih mengedepankan musyawarah mufakat.

Pencalonan K.H. Sofyan Yahya berdasarkan keputusan rapat PW NU Jawa Barat ditetapkan melalui musyawarah mufakat yang dihadiri Pengurus Syuriah NU Jawa Barat, Pengurus Mustasyar dan Pengurus Tanfidziah PW NU Jawa Barat. Musyawarah itu dihadiri hampir seluruh pengurus dalam struktur organisasi NU Jawa Barat sehingga keabsahannya tidak diragukan oleh pengurus Cabang maupun Ranting.<sup>56</sup> Keputusan tersebut merupakan ijtihad politik NU Jawa Barat dalam kerangka *amal ma'ruf nahyi munkar* (menjalankan kebaikan dan melarang kemunkaran) melalui DPD RI.

Alasan dan pertimbangan NU Jawa Barat mendukung pencalonan K.H. Sofyan antara lain: *Pertama*, dalam proses demokratisasi bangsa, ulama harus ikut ambil bagian sebagai bentuk dari misi *hubbul wathan* (cinta tanah air) dan sebagai sarana dakwah melalui jalur lembaga legislatif. K.H. Sofyan Yahya merupakan perwakilan dari ulama khususnya ulama Jawa Barat. *Kedua*, dukungan kepada K.H. Sofyan Yahya atas usulan dari kiai sepuh dan usulan Pengurus Cabang NU di Jawa Barat untuk mencalonkan seorang ulama di Dewan Perwakilan Daerah. *Ketiga*, dalam rangka memperjuangkan kepentingan umat dan para ulama

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Aep tim sukses K.H. Sofyan Yahya yang pada waktu itu menduduki sebagai wakil sekretaris PW NU Jawa Barat. Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Desember 2006

khususnya di Jawa Barat maka pencalonan K.H. Sofyan Yahya sebagai wahana perjuangan umat Nahdhiyin dan ulama. *Keempat*, K.H. Sofyan Yahya dianggap kredibel untuk mewakili ulama dan kaum Nahdhiyin karena beliau adalah Ketua Umum PW NU Jawa Barat. Di samping itu, ia juga sebagai sesepuh pondok pesantren Darul Ma'arif dan sebagai mubaligh yang namanya cukup dikenal di kalangan masyarakat Jawa Barat. *Kelima*, para ulama dan pengurus NU mengharapkan secara langsung ada perwakilan NU sehingga dapat memperjuangkan lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah yang di bawah naungan NU dengan pendekatan politik yang dalam hal ini DPD RI. *Keenam*, warga Nahdhiyin yang mayoritas di Jawa Barat dapat menjadi potensi untuk memenangkan pemilihan anggota DPD dan agar warga Nahdhiyin dapat memilih perwakilan yang sesuai dengan idologinya.<sup>57</sup>

Dengan menganalisis alasan dukungan kepada setiap anggota DPD dapat dikategorikan kepada empat kategori dukungan. *Pertama*, dukungan dengan pendekatan kesukuan. Seperti dukungan kepada Ginandjar Kartasasmita. Ia didukung oleh organisasi-organisasi kesukuan dan kebudayaan (kultural) Sunda yang antara lain Paguyuban Pasundan, Damas, Kemitraan Sunda dan organisasi Pencaksilat Sunda. *Kedua*, Pangeran Arief Natadiningrat lebih menggunakan pendekatan kharisma Kesultanan Cirebon. *Ketiga*, Mohammad Surya lebih dikategorikan kepada pendekatan profesi guru dan keempat, K.H. Sofyan Yahya lebih bernuansa pendekatan ikatan emosional keulamaan dan ke NU-an. Dengan

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan K.H. Sofyan Yahya di Kantor DPD RI pada tanggal 7 November 2006 dan hasil wawancara dengan Sekrearis tim sukses K.H. Sofyan Yahya yaitu Aep di kantor Perwakilan DPD RI yang berada di Bandung tepatnya Jl. Mundinglaya No 13 pada tanggal 12 Desember 2006



demikian, alasan dukungan lebih ditonjolkan perwakilan dari golongan masing-masing. Hal ini akan berdampak kepada jaringan, sasaran pemilih dan opini yang dibangun oleh masing-masing anggota DPD Jawa Barat yang akan di bahas dalam Bab IV.

### **Peran Organisasi Kemasyarakatan**

Peran organisasi kemasyarakatan dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan untuk mensukseskan salah satu calon yang diusungnya pada pemilihan anggota DPD Jawa Barat. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: *Pertama*, organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi secara struktural organisasi. *Kedua*, organisasi kemasyarakatan melakukan sosialisasi kandidat yang diusungnya kepada pengurus, anggota, keluarga pengurus dan anggota serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

### **Koordinasi intern Organisasi**

Koordinasi intern organisasi dilakukan oleh pengurus pusat atau pengurus wilayah. Koordinasi penting dilakukan dengan maksud *pertama*, untuk membangun kekompakkan di internal organisasi untuk mendukung salah satu calon yang telah ditetapkan oleh pengurus pusat atau wilayah organisasi yang bersangkutan. *Kedua*, menyukseskan kemenangan kandidat yang didukung atas keputusan organisasi. *Ketiga*, memberikan kepastian kepada seluruh pengurus organisasi tentang dukungan organisasi kepada salah satu anggota DPD. *Keempat*,

meminimalisir perpecahan organisasi apabila terjadi perbedaan dukungan oleh salah satu cabang, kelompok organisasi atau perorangan dalam organisasi.

Rapat koordinasi Pengurus Pusat Paguyuban Pasundan untuk mendukung Ginandjar Kartasasmita dilakukan di tingkat PP Paguyuban Pasundan, Komisaris Daerah (Komda), dan cabang. Di tingkat PP Paguyuban Pasundan diadakan di Gedung PP Paguyuban Pasundan pada tanggal 5 Juli 2003 dengan dihadiri oleh seluruh Pengurus Pusat Paguyuban Pasundan dan Pengurus Komda Paguyuban Pasundan. Dalam rapat koordinasi tersebut dibahas antara lain *pertama*, membahas hasil rapat pimpinan PP Paguyuban Pasundan yang memberikan dukungan kepada Ginandjar Kartasasmita dengan berbagai pertimbangannya di antara calon-calon dari pengurus Paguyuban Pasundan. *Kedua*, menginstruksikan kepada seluruh organisasi di bawahnya untuk mendukung hasil keputusan tersebut. *Ketiga*, merekomendasikan orang-orang yang akan duduk sebagai tim sukses Ginandjar Kartasasmita dan *keempat*, menginstruksikan seluruh Pengurus Komda untuk melakukan koordinasi dengan cabang-cabang Paguyuban Pasundan.<sup>58</sup>

Di tingkat Pengurus Komda diadakan rapat koordinasi dengan Pengurus Cabang Paguyuban Pasundan yang terdiri dari 34 Cabang terbagi kepada 7 Komda. Komda Priangan Tengah diadakan di Bandung yang berpusat di Gedung PP Paguyuban Pasundan pada tanggal 20 Juli 2003. Komda Priangan Barat di adakan di Bogor pada tanggal 18 Juli 2003, Komda Priangan Utara di adakan di Purwakarta pada tanggal 23 Juli 2003 dan Komda Priangan Timur diadakan di

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Ketua PP Paguyuban Pasundan H. Syafi'i di Gedung PP Paguyuban Pasundan pada tanggal 13 Desember 2006

Kuningan pada tanggal 26 Juli 2003. Dua Komda tidak melakukan rapat koordinasi karena berada di luar Provinsi Jawa Barat yaitu Komda Banten dan Komda DKI Jakarta.<sup>59</sup>

Dalam rapat koordinasi di tingkat Pengurus Komda dibahas sebagaimana dibahas dalam rapat koordinasi PP Paguyuban Pasundan dengan Pengurus Komda. Di bahas pula teknik pemenangan bagi Ginandjar dengan menggunakan segala fasilitas yang tersedia di Cabang Paguyuban Pasundan. Selain itu merekomendasikan beberapa nama untuk dijadikan tim sukses Ginandjar Kartasasmita supaya tidak mengganggu aktivitas paguyuban Pasundan di tingkat. Pengurus yang direkomendasikan menjadi tim sukses Ginandjar Kartasasmita adalah ketua-ketua cabang Paguyuban Pasundan di tingkat kabupaten/kota masing-masing.<sup>60</sup>

Di tingkat Cabang dilakukan juga rapat koordinasi dengan Pengurus Anak Cabang. Pengurus Anak Cabang Paguyuban Pasundan terdiri dari 492 Anak Cabang. Dalam rapat yang dilakukan oleh Pengurus Cabang dengan Pengurus Anak Cabang dibahas hasil-hasil rapat yang diadakan di Pengurus Pusat dan Pengurus Komda. Dibahas pula fungsi dari organisasi Cabang dan Anak Cabang untuk ikut mensukseskan kemenangan Ginandjar Kartasasmita menjadi anggota DPD Jawa Barat dengan menjadikan kantor Cabang dan Anak Cabang untuk menjadi tempat tim sukses di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.<sup>61</sup>

PW NU Jawa Barat melakukan juga rapat koordinasi untuk mengusung K. H. Sofyan Yahya (Ketua Umum PW NU) atas pencalonannya pada pemilu DPD

---

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> *Ibid*

tahun 2004. Rapat Koordinasi Cabang (Rakorcab) yang diadakan PW NU dihadiri oleh seluruh Pengurus Cabang NU di Jawa Barat yang terdiri dari 25 Cabang. Rakorcab diselenggarakan di sekretariat NU Jawa Barat Jl. Sancang No 10 pada tanggal 3 Agustus 2003. Dalam Rakorcab dibahas hasil rapat PW NU yang memutuskan K.H. Sofyan Yahya untuk mewakili NU pada pemilu DPD tahun 2004. Dalam Rakorcab tersebut dibahas pula teknik pemenangan untuk K.H. Sofyan Yahya dengan membentuk tim Sukses K.H. Sofyan Yahya yang diketuai langsung oleh Wakil Ketua PW NU, K.H. Yusuf Muhammad.<sup>62</sup>

Rapat koordinasi yang dilakukan oleh PW NU Jawa Barat dilakukan kedua kalinya dengan seluruh sesepuh NU (Kiai sepuh) yang bertempat tinggal di Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya. Pondok Pesantren Cipasung yang dipimpin K.H. Ilyas Ruhyat. K.H. Ilyas Ruhyat adalah salah satu sesepuh NU Jawa Barat. Ia adalah mantan Ketua Dewan Syariah PB NU pada masa Ketua Tanfidiyah PB NU Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pasantren Cipasung memiliki santri berjumlah 5.674 orang yang datang dari berbagai daerah di Jawa Barat dan luar Jawa Barat bahkan terdapat santri dari Irian Jaya, Ambon, dan Aceh.<sup>63</sup>

Dalam rapat koordinasi kedua merupakan penguatan terhadap hasil rapat koordinasi pertama atau lebih diistilahkan dengan deklarasi PW NU Jawa Barat atas pencalonan K.H. Sofyan Yahya pada pencalonan anggota DPD. Deklarasi ini dilakukan karena dari Pengurus NU banyak yang mencalonkan anggota DPD seperti Nanang Ma'soem dan Dindin Maolani. Selain itu Pengurus cabang NU Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon telah lebih dulu memutuskan dukungannya

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan K.H. Yusuf Muhammad di sekretariat PW NU Jawa Barat pada tanggal 27 Januari 2007

<sup>63</sup> *Ibid*

terhadap Pangeran Arief Natadiningrat guna menghindari kesimpangsiuran untuk warga NU maka PW NU Jawa Barat memutuskan K.H. Sofyan Yahya calon anggota DPD mewakili warga nahdiyyin.<sup>64</sup>

Rapat koordinasi dilakukan juga oleh Pengurus Cabang NU di setiap kabupaten/ kota. Rapat koordinasi Pengurus Cabang dihadiri oleh Majelis Wakil Cabang (MWC) NU. MWC NU di Jawa Barat berjumlah 278 MWC. MWC merupakan organisasi NU di tingkat kecamatan. Jumlah kecamatan di Jawa Barat sebanyak 535 kecamatan. Dengan demikian belum seluruh kecamatan berdiri MWC NU atau baru sekitar 52% MWC yang terbentuk di Jawa Barat.<sup>65</sup>

Dalam rapat koordinasi yang diadakan oleh Pengurus Cabang NU dengan MWC NU dibahas hasil rapat koordinasi di tingkat PW NU yang menginstruksikan untuk mendukung K.H. Sofyan Yahya pada pemilihan umum anggota DPD tahun 2004. Dibahas pula kesediaan setiap pengurus cabang dan MWC untuk menjadi tim sukses K.H. Sofyan Yahya. Dalam rapat koordinasi tersebut menginstruksikan pula untuk melakukan silaturahmi dan memberitahukan keputusan PW NU tersebut kepada pimpinan-pimpinan pondok pesantren yang ada di wilayahnya masing-masing. Kekuatan NU terletak kepada pondok pesantren tradisional sehingga pimpinan-pimpinan pondok pesantren tersebut harus mengetahuinya sebagai basis nahdiyyin.<sup>66</sup>

Rapat koordinasi juga dilakukan oleh PGRI Jawa Barat untuk pencalonan Mohammad Surya pada pemilihan umum anggota DPD tahun 2004. Sebagaimana di sebutkan di atas bahwa secara formal organisatoris PGRI tidak

---

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> *Ibid*

memutuskan pencalonan Mohammad Surya pada pemilu DPD tetapi secara perorangan pengurus PGRI mendukung pencalonan tersebut. Ketua tim sukses Mohammad Surya adalah Sahiri Hermawan yang merupakan Ketua Umum PGRI Jawa Barat begitu pula dengan ketua-ketua tim sukses di tingkat kabupaten dan kecamatan adalah ketua-ketua PGRI di masing-masing wilayahnya. Dengan demikian keputusan itu hanya untuk memanipulasi dan menjaga bahwa PGRI tidak berpolitik praktis dan PGRI adalah organisasi independen sesuai dengan AD/ART PGRI sebagaimana disebutkan di atas. Dalam melakukan rapat koordinasi yang dilakukan oleh Sahiri Hermawan dengan pendekatan organisasi PGRI yang dihadiri oleh ketua-ketua PGRI kabupaten/kota membahas kemenangan Mohammad Surya pada pemilihan umum anggota DPD tahun 2004.<sup>67</sup>

Demikian pula koordinasi yang dilakukan oleh Pangeran Arief Natadiningrat. Ia melakukan koordinasi dengan elemen kesultanan Cirebon yang terdiri dari tiga unsur keraton yakni Sultan Cirebon, kanoman dan Keraton Kasepuhan. Koordinasi ini dilakukan supaya seluruh elemen dalam wilayah kerajaan Cirebon mendukung atas pencalonan Pangeran Arief Natadiningrat pada pemilu anggota DPD RI dari Jawa Barat. Ketiga unsur dalam kesultanan Cirebon itu memiliki relasi dan pengaruh kemasing-masing daerah atau elit yang ada di Cirebon.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Sahiri Hermawan di sekretariat PGRI Jawa Barat pada tanggal 10 Oktober 2006

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Pangeran Arief Natadiningrat di Kantor DPD RI Jakarta pada tanggal 7 November 2006

Dengan demikian keempat anggota DPD Jawa Barat pada masa pencalonannya melakukan pengetatan atau koordinasi dalam wilayah basis dukungan masing-masing. Hal itu dapat memungkinkan bahwa kemenangan mereka pada pemilu anggota DPD lebih dipengaruhi pengaruh dari dukungan organisasi masing-masing. Walaupun Mohammad Surya tidak mendapatkan dukungan secara resmi organisasi atau berdasarkan keputusan organisasi tetapi hal itu dilakukan hanya untuk menghindari konflik internal organisasi. Posisi Mohammad Surya sebagai Ketua Umum PP PGRI dan Sahiri Hermawan sebagai Ketua Umum PGRI Jawa Barat adalah sosok yang sulit untuk dipisahkan antara pribadi dan sebagai Ketua Umum sehingga tetap memiliki pengaruh yang kuat atas kemenangan Mohammad Surya.

### **Sosialisasi ke seluruh elemen organisasi**

Sosialisasi dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan kepada internal organisasi mulai dari struktur organisasi sampai ke tingkat anggota organisasi. Kemenangan akan tercapai apabila dapat mensosialisasi secara baik dan benar serta efektif. Pemilihan umum langsung mengharuskan kandidat dikenal baik oleh pemilih, oleh karena itu sosialisasi adalah bagian dari memperkenalkan kandidat pada pemilih. Sosialisasi juga hampir sama dengan kampanye, hanya kampanye dibatasi waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi sedangkan sosialisasi dapat dilakukan sebelum masa kampanye walaupun lebih bersifat tertutup atau terbatas sehingga tidak dapat dikatakan mencuri star.

Sosialisasi kandidat dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat pemilih tentang kandidat itu sendiri. Walaupun masyarakat pemilih telah mengetahui kandidat dari sisi nama dan wajah yang bersangkutan karena kepopuleran kandidat bukan berarti tidak perlu melakukan sosialisasi. Sosialisasi itu diperlukan dengan tujuan *pertama*, untuk memperkenalkan secara jelas tentang identitas dan reputasi atau *progress report* kandidat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat pemilih dapat mengetahui bagaimana pengalaman kandidat dalam memperjuangkan masyarakat sekaligus sebagai daya tarik untuk memberikan kepercayaan masyarakat akan kemampuannya untuk mengemban wakil rakyat dalam lembaga legislatif seperti Pangeran Arief Natadiningrat mengatakan bahwa yang penting masyarakat mengetahui penalonan dirinya menjadi anggota DPD, Insya Allah mereka akan memilihnya.<sup>69</sup> Bahkan Pangeran Arief memprotes melalui media massa lokal bahwa KPU Jabar diskriminatif dan lamban, KPU lebih memprioritaskan pemilihan DPR tetapi untuk sosialisasi dan kampanye anggota DPD belum juga terjadwalkan sampai akhir januari, ia pun pernah mengajukan surat ke KPU tetapi tidak mendapat tanggapan sampai akhir januari 2004.<sup>70</sup>

*Kedua*, memberitahukan kepada masyarakat pemilih berkaitan dengan visi dan misi kandidat ikut serta dalam pemilihan anggota DPD, sehingga masyarakat dapat memahami niat baik dari kandidat sebagai perwakilan masyarakat pemilih. *Ketiga*, masyarakat pemilih berhak mengetahui siapa yang akan mewakilinya

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Pangeran Arief Natadiningrat di Sekretariat DPD RI Jakarta pada tanggal 7 November 2006

<sup>70</sup> Harian Pikiran Rakyat tanggal 7 Pebruari 2004

sehingga ketika pencoblosan dalam pemilu tidak terpengaruh oleh ajakan dan tekanan orang lain, untuk mencoblos yang masyarakat pemilih tidak mengetahuinya sebab sasaran dari pemilihan langsung adalah bagaimana masyarakat dapat mengetahui secara jelas siapa-siapa yang akan mewakilinya di lembaga legislatif.

*Keempat*, menyakinkan masyarakat akan pentingnya ada perwakilan mereka untuk merumuskan dan memperjuangkan kepentingan daerah yang sekaligus masyarakat pemilih dapat mengawasi dan mengevaluasi dari kinerja wakil mereka di DPD. *Kelima*, memberikan pilihan terhadap masyarakat pemilih di antara calon-calon yang sudah mereka ketahui sehingga masyarakat pemilih dapat memberikan aspirasinya sesuai dengan hati nuraninya dan kepentingan yang diharapkannya.

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang luas wilayahnya dengan 25 kabupaten/kota, 535 kecamatan dan 4.663 kelurahan/desa. Dari sisi pemilih Jawa Barat adalah kedua terbanyak di Indonesia.<sup>71</sup> Oleh karena itu, diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengelilingi Jawa Barat dan memperkenalkan kandidat kepada masyarakat pemilih yang tersebar di 25 kabupaten/kota tersebut. Apabila hanya mengandalkan waktu kampanye yang memiliki waktu relatif singkat selama 21 hari, untuk mendatangi 25 kabupaten/kota perhari saja masih kurang 4 hari apalagi mengelilingi sampai ke kecamatan atau desa.

Dalam melakukan sosialisasi yang dilakukan Paguyuban Pasundan di antaranya dengan membagikan kalender dan brosur kepada pengurus dan keluarga

---

<sup>71</sup> Lihat disertasi ini bab II tentang profil Jawa Barat

pengurus serta anggota Paguyuban Pasundan. Dengan demikian sosialisasi pertama dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan intern organisasi sehingga mereka mengenal lebih jauh tentang profil seorang Ginandjar Kartasasmita. Kalender dan brosur itu berisikan foto-foto Ginandjar Kartasasmita tengah melakukan beberapa kegiatan kenegaraan dan mengikuti kegiatan-kegiatan di Paguyuban Pasundan seperti foto beliau meresmikan gedung kuliah Universitas Pasundan pada tahun 2002, menyaksikan gelar seni mahasiswa Paguyuban Pasundan pada hari ulang tahun Paguyuban Pasundan dan foto kunjungan beliau ke beberapa sekolah serta sekretariat Paguyuban Pasundan.<sup>72</sup>

PGRI Jawa Barat melakukan sosialisasi untuk Mohammad Surya dengan mengadakan diskusi di kantor cabang PGRI Purwakarta dengan tema membahas undang-undang guru dan dosen. Dari diskusi tersebut selain mensosialisasikan undang-undang guru dan dosen juga melakukan beberapa evaluasi berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan. Kehadiran Mohammad Surya ke sekretariat Cabang PGRI Purwakarta atas undangan dari PGRI Cabang Purwakarta. Diskusi juga dilakukan di sekretariat PGRI Sukabumi pada tanggal 19 Maret 2003. Dalam diskusi terbuka yang dihadiri oleh guru-guru dan kepala sekolah tersebut membahas tema undang-undang guru dan kualitas pendidikan.<sup>73</sup>

Sosialisasi dilakukan juga dengan membagikan brosur Mohammad Surya kepada para guru. Brosur tersebut memuat foto dan profil Mohammad Surya. Brosur itu selain dibagikan kepada para guru dibagikan juga oleh pengurus PGRI maupun para guru kepada masyarakat yang bertetangga dengan mereka.

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Nugroho Besoes pada tanggal 15 November 2006

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Mohammad Surya di sekretariat DPD Bandung pada tanggal 5 Januari 2007

Dengan demikian Mohammad Surya dalam melakukan sosialisasi dengan pendekatan keluarga para guru juga dengan menyebar luaskan kepada masyarakat melalui para guru. Penyebaran tersebut telah dimulai sejak bulan Juli 2003.<sup>74</sup>

Sosialisasi dilakukan juga oleh Pangeran Arief Natadiningrat dengan menggunakan kekerabatan kesultanan Cirebon. Kerabat sultan Cirebon yang telah menyebar keberbagai daerah di Jawa Barat. Untuk daerah Cirebon dan Indramayu sosialisasi dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan organisasi yang mendukung pencalonan beliau sebagaimana di sebutkan di atas. Sedangkan untuk keluar dari daerah Cirebon menggunakan kerabat kerajaan yang ada diberbagai daerah. Kerabat Kerajaan Cirebon banyak yang menjadi pengusaha seperti di Bekasi, Cianjur dan Sukabumi serta Bogor. Di gunakan juga jaringan pengusaha melalui organisasi Hipmi. Alat sosialisasi yang digunakan berbentuk brosur beliau yang berisikan foto dan profil beliau dan buku saku beliau yang berisikan riwayat hidup beliau serta visi dan misi Pangneran Arief Natadiningrat.<sup>75</sup>

Sosialisasi yang dilakukan PW NU Jawa Barat untuk pencalonan K.H. Sofyan Yahya antara lain dengan mengundang beliau sebagai penceramah di pondok pesantren-pondok pesantren seperti untuk daerah Bandung di Pesantren al-Jawami yang merupakan pesantren tertua di Bandung. Al-Jawami dipimpin oleh K.H. Totoh Abdul Fatah. Ia adalah salah satu ketua MUI Pusat sampai sekarang. Di Sukabumi di pusatkan di pesantren al-Masturiyah yang dipimpin K.H. Fahrudin. Ia adalah salah satu sesepuh NU Jawa Barat bahkan pernah menjadi anggota Dewan Majelis Syuriah PB NU. Di Kabupaten Garut di pusatkan di

---

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> Pangeran Arief, *Op.Cit*

pondok pesantren Musyadadiyah yang dipimpin oleh K.H. Anwar Musyadad. Ia adalah sesepuh NU Jawa Barat bahkan pernah menjadi anggota Dewan Majelis Syuriah PB NU.<sup>76</sup>

Sosialisasi dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan dengan membuka langsung akses pada basis organisasi tersebut. Dengan demikian semakin jelas bahwa dukungan yang diberikan organisasi kemasyarakatan tersebut bukan hanya sekedar dukungan keputusan organisasi tetapi organisasi kemasyarakatan tersebut secara serius memperjuangkan kemenangan keempat anggota DPD Jawa Barat tersebut. Organisasi kemasyarakatan dapat dikatakan sebagai basis dukungan awal bagi setiap anggota DPD Jawa Barat.

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan K.H. Sofyan Yahya di Kantor DPD RI Jakarta pada tanggal 7 November 2006

**BAB IV**  
**PEMBENTUKAN TIM SUKSES**  
**DAN STRATEGI PEMENANGAN ANGGOTA DPD JAWA BARAT**  
**PADA PEMILU 2004**

Bab ini akan menguraikan strategi dan taktik yang dilakukan oleh masing-masing pemenang anggota DPD Jawa Barat yang meliputi pembentukan tim sukses dan kampanye. Uraian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran strategi dan taktik yang dilakukan oleh masing-masing anggota DPD dalam meraih dukungan dari masyarakat pemilih.

**Pembentukan Tim Sukses Anggota DPD Jawa Barat Pada Pemilu 2004**

Pemilihan anggota DPD yang bersifat perseorangan membutuhkan sebuah tim atau kelompok yang dapat mengelola dan mengorganisir kerja-kerja yang diharapkan mampu menghasilkan kemenangan untuk anggota DPD tersebut. Tim sukses bertujuan untuk terpilihnya seorang anggota DPD, oleh karenanya dibutuhkan sebuah tim yang profesional dan memiliki rancangan program yang tepat dan cermat. Jawa Barat merupakan provinsi yang cukup luas dengan tingkat pemilih sangat banyak yaitu 26.016.975 orang sebagaimana diuraikan dalam bab terdahulu. Untuk mengelilingi daerah Jawa Barat saja dibutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Oleh karenanya dibutuhkan sebuah

organisasi yang mampu mengefektifkan kandidat dalam melakukan kunjungan atau *road show* ke berbagai daerah untuk meraih dukungan pemilih.

Pembentukan tim sukses diperlukan oleh seorang calon anggota DPD dengan alasan: *pertama*, secara administratif diminta oleh KPU provinsi untuk mencantumkan tim sukses. *Kedua*, sebagai tim yang mempersiapkan kebutuhan kandidat baik yang berbentuk administratif maupun strategi pemenangan. *Ketiga*, untuk mewakili kandidat apabila kandidat berhalangan. *Keempat*, menghimpun dan mengorganisir seluruh kekuatan pendukung. *Kelima*, sebagai wahana diskusi, evaluasi dan solusi dalam melakukan kegiatan pemenangan. *Keenam*, sebagai media menyampaikan pesan dari kandidat kepada masyarakat pemilih, sehingga tim sukses dapat menjadi representasi dari kandidat itu sendiri. Pembentukan dan kegiatan yang dilakukan tim sukses akan dibahas berikut ini.

### **Ginandjar Kartasasmita**

Pembahasan pembentukan dan kegiatan yang dilakukan tim sukses Ginandjar Kartasasmita meliputi: *Pertama*, organisasi tim sukses. *Kedua*, perencanaan kegiatan pemenangan. *Ketiga*, pelaksanaan kegiatan-kegiatan tim sukses. *Keempat*, pengawasan kegiatan-kegiatan tim sukses.

### **Organisasi Tim Sukses**

Tim sukses adalah sekelompok orang yang dipercaya oleh seorang calon untuk mendukung kemenangan calon dalam pemilihan anggota DPD. Tim sukses dapat juga disebut sebagai tim pemenangan atau tim kampanye. Tim sukses Ginandjar Kartasasmita terbentuk satu tahun sebelum pemilu tepatnya pada bulan

Juli 2003 yang ditetapkan di Gedung PB Paguyuban Pasundan. Pembentukan tim sukses pada bulan-bulan tersebut sebatas tim sukses di tingkat provinsi belum dilengkapi dengan staf yang dibutuhkan sampai ke tingkat yang lebih bawah. Tim yang terbentuk sebatas ketua, sekretaris dan bendahara.

Ginandjar Kartasasmita membentuk tim sukses menggunakan langsung organisasi kemasyarakatan yang menjadi pendukung sekaligus sebagai basis dukungannya, sehingga pengelolaan tim sukses yang dilakukan lebih kepada menggunakan manajemen organisasi yang berlaku dalam organisasi yang bersangkutan. Ginandjar Kartasasmita menggunakan langsung pengurus Paguyuban Pasundan sebagai tim sukses.<sup>1</sup>

Pada bulan-bulan berikutnya tim sukses mulai disempurnakan. Struktur teratas sebagai penanggungjawab secara otomatis adalah Ketua Paguyuban Pasundan yakni H. Syafi'i. Untuk melaksanakan tugas tim sukses sehari-hari baik berkaitan dengan urusan internal organisasi maupun eksternal organisasi ditentukan seorang ketua tim sukses yang sangat dipercaya, memiliki integritas dan kapabilitas dalam bekerja.

Integritas dan kapabilitas seorang manajer tim sukses sangat dibutuhkan oleh seorang kandidat. Lebih jauh lagi seorang manajer tim sukses telah memiliki pengalaman politik sehingga akan lebih mempermudah kinerja tim sukses. Berdasar hal itu seorang kandidat senantiasa mempercayakan manajer tim suksesnya kepada teman dekat atau kerabatnya. Ginandjar Kartasasmita mengangkat Nugraha Besoes. Nugraha Besoes adalah orang dekat Ginandjar. Ia

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Nugraha Besoes pada tanggal 15 November 2006. Pernyataan Nugroho Besoes dibenarkan oleh Ketua PB Paguyuban Pasundan H. Syafi'i pada wawancara tanggal 13 Desember 2006 di Kantor PB Paguyuban Pasundan

merupakan teman sekelas Ginandjar mulai dari SD sampai di SMA. Beliau pernah menjadi anggota DPRD Jawa Barat pada tahun 1967-1977, anggota MPR/DPR RI tahun 1987-1992, staf ahli Wakil Ketua MPR RI tahun 1999-2004 dan sekarang sebagai staf ahli Ketua DPD-RI dan Sekjen PSSI.<sup>2</sup>

Struktur tim sukses dibentuk mulai dari tingkat provinsi sampai kepada tingkat yang lebih bawah/daerah. Struktur tim Sukses Ginandjar Kartasasmita sesuai dengan struktur yang terdapat dalam organisasi Paguyuban Pasundan. Kantor-kantor Paguyuban Pasundan menjadi sekretariat tim sukses sesuai strukturnya. Di tingkat provinsi kantor Paguyuban Pasundan berada di ibukota provinsi yakni Bandung dengan sekretariat di kantor pusat Paguyuban Pasundan di Jalan Sumatra nomor 3. Selanjutnya dibentuk di tiap-tiap kabupaten/kota koordinator-koordinator wilayah dan sebagai ujung tombak rekrutmen suara masyarakat dibentuk di tingkat kecamatan bahkan ada sebagian di tingkat desa atau kelompok-kelompok masyarakat.<sup>3</sup>

Struktur itu dibentuk dengan berbagai kepentingan yang antara lain: *pertama*, pengambilan keputusan tertinggi dilakukan di tingkat provinsi sedangkan tingkat kabupaten/kota bahkan kecamatan lebih kepada pelaksana teknis. *Kedua*, penyelesaian persyaratan administratif sebagai peserta pemilu cukup dilakukan oleh organisasi di tingkat provinsi. *Ketiga*, tingkat provinsi dibentuk untuk mengkoordinir seluruh organ di tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten/kota mengkoordinir tingkat kecamatan dan tingkat kecamatan dibentuk untuk mengkoordinir tingkat desa/kelurahan.

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Nugraha Besoes pada tanggal 15 November 2006.

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Iyus Rustandi pada tanggal 29 November 2006

Di tingkat provinsi struktur organisasi dibentuk lengkap sesuai dengan kebutuhan pemenangan yang dilengkapi pula dengan pembagian kerja. Struktur tersebut mulai dari ketua tim sukses yang bertugas sebagai pemimpin organisasi. Wakil ketua yang bertugas mendampingi ketua atau mewakili ketua apabila sedang berhalangan untuk menjalankan roda organisasi. Sekretaris yang bertugas melakukan perlengkapan kesekretariatan. Wakil sekretaris yang bertugas mewakili sekretaris apabila berhalangan. Bendahara yang bertugas mengatur keuangan. Wakil bendahara yang bertugas mewakili bendahara apabila berhalangan.<sup>4</sup>

Selain itu dibentuk divisi-divisi seperti divisi data dan kesekretariatan berfungsi mempersiapkan kebutuhan administrasi kandidat sebagai peserta pemilu. Divisi peralatan yang memiliki fungsi untuk mempersiapkan kebutuhan alat-alat sosialisasi Divisi sosialisasi dan kampanye yang berfungsi untuk melakukan sosialisasi baik ke tingkat elit, organisasi-organisasi dan kepada masyarakat pemilih dengan menggunakan alat-alat sosialisasi. Divisi sosialisasi dan kampanye juga bertanggungjawab untuk mempersiapkan kampanye. Waktu kampanye telah ditetapkan oleh KPU Provinsi. Divisi kerjasama dan lobi yang bertugas untuk melakukan hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak baik dengan organisasi masyarakat maupun dengan tokoh-tokoh masyarakat. Divisi penggalangan dana yang bertugas untuk mencari bantuan baik berbentuk uang

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Iyus Rustandi pada tanggal 29 November 2006

maupun alat-alat sosialisasi dari berbagai pihak. Divisi investigasi yang bertugas untuk melakukan koordinasi dan kontrol terhadap organ di kabupaten/kota.

Tim sukses di tingkat kecamatan atau desa bertugas untuk mengkoordinir kebijakan yang diambil di tingkat provinsi dan mempersiapkan kampanye di daerahnya. Hal itu dilakukan antara lain *pertama*, supaya lebih terfokus kepada sosialisasi dan peraihan suara. *Kedua*, tidak berbelit dalam pengambilan keputusan yang bersifat prinsipil di antara organ organisasi sehingga keputusan itu hanya diambil di tingkat pusat. *Ketiga*, supaya lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan program yang telah dirancang di tingkat provinsi.

Idealnya di antara penanggungjawab dan ketua tim sukses dibentuk suatu bagian khusus yang terdiri dari para ahli sebagai *think-thank* calon. Tim ahli ini berada dalam posisi konsultatif bukan instruktif terhadap tim sukses. Anggota tim ahli adalah orang-orang yang sehari-hari berkecimpung dalam bidangnya seperti pakar/pengamat/praktisi politik andal, pakar praktisi hukum berpengalaman, mereka yang sangat piawai menyusun konsep dan materi kampanye dan wartawan senior yang melakukan analisis pemberitaan pers melalui monitoring sepak terjang para pesaing. Jumlah tim ahli sekitar 5-7 orang dan dibantu oleh staf. Tim ahli memberi nasehat, saran dan rekomendasi kepada calon. Tetapi tim sukses keempat anggota DPD Jawa Barat menjadikan tim sukses itu sekaligus sebagai tim ahli. Jadi tidak ada yang secara spesifik sebagai tim ahli dengan fungsi sebagaimana disebutkan di atas.

Selain tim yang tercantum dalam struktur diperlukan juga para pembantu sukarela yang dianggap sebagai staf. Istilah staf dipakai dalam arti pegawai

bayaran yang bekerja penuh dan di dalamnya termasuk sukarelawan-sukarelawan yang secara resmi diterima selaku staf. Istilah sukarelawan, pegawai sukarela, pembantu sukarela atau tenaga sukarela mencakup kelompok/warga masyarakat yang menyumbangkan waktu mereka untuk membantu kesuksesan kandidat, akan tetapi tidak dianggap sebagai staf. Setiap orang yang menyumbangkan waktunya disebut sukarelawan, namun hanya sedikit saja di antara yang menyumbangkan waktunya menempati kedudukan staf sehubungan dengan keterbatasan struktur dan untuk keefektifan kerja tim sukses terutama di tingkat provinsi.

Dalam rangka memudahkan dan melancarkan kegiatan-kegiatan tim sukses, setiap staf tim sukses diberi gaji. Anggota-anggota staf tim sukses Ginandjar Kartasasmita diberi gaji atau hanya sekedar untuk ongkos dan biaya komunikasi seperti untuk membeli pulsa sekitar Rp 1.000.000-Rp 2.000.000 setiap bulan.<sup>5</sup> Tim sukses diciptakan untuk terpilihnya seorang calon anggota DPD. Tim sukses melakukan kegiatan-kegiatan untuk pemenangan calon sejak terbentuknya tim tersebut. Tim sukses berhenti berfungsi setelah hari pemilihan atau beberapa waktu sesudah itu. Bagi sang calon yang menang, tim sukses mungkin bertindak sebagai penyambung antara waktu pemilihan dan saat menduduki jabatan misalnya Sekretaris tim sukses Ginandjar Kartasasmita, Iyus Rustandi, diangkat menjadi asisten anggota DPD Jawa Barat Ginandjar Kartasasmita. Bahkan Nugraha Besoes (Ketua tim sukses Ginandjar) menjadi staf ahli Ketua DPD RI. Pasca pemilu, organisasi tim sukses dihapuskan dan urusan keuangan dibereskan. Laporan-laporan yang diwajibkan oleh berbagai peraturan harus dikirimkan

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Iyus Rustandi pada tanggal 29 November 2006

kepada KPU. Organisasi tim sukses bagi seorang calon anggota DPD adalah suatu kekuatan dinamis yang berhenti bekerja setelah hari pemilihan.

### **Perencanaan Tim Sukses**

Kandidat atau sang manajer pertama-tama harus menentukan apa yang ingin dikerjakannya. Ia harus menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang untuk organisasinya serta menentukan cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Oleh karena itu manajer tim sukses harus membuat rencana yang menyeluruh. Perencanaan melibatkan pembuatan anggaran karena pada hakikatnya satu rencana juga untuk membelanjakan sejumlah uang tertentu guna mencapai tujuan. Perencanaan mencakup menentukan perolehan suara, pembuatan alat-alat pengenalan calon, dan penggunaan anggaran.

### **Menentukan perolehan suara**

Penentuan perolehan suara penting untuk direncanakan oleh tim sukses supaya kebutuhan-kebutuhan teknis pemenangan dapat ditentukan misalnya kebutuhan kaos, spanduk, brosur serta dana yang diperlukan dapat terukur dengan baik. Selain itu direncanakan pula penyebaran perlengkapan pengenalan calon dan berapa jumlah yang dibutuhkan. Ketentuan kebutuhan perlengkapan tersebut minimal dua kali lipat jumlah perolehan suara yang akan di capai.

Perolehan suara Ginandjar Kartasmita direncanakan dapat mencapai 2.500.000 atau 10% suara yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.<sup>6</sup> Ginandjar Kartasmita dipersonifikasikan sebagai tokoh budaya Sunda sehingga

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Iyus Rustandi, *Ibid*

dukungan organisasi yang dicari adalah organisasi-organisasi yang berlatar belakang kesundaan. Hal ini dilakukan karena pemilihan DPD adalah pemilihan yang mengangkat martabat daerah di tingkat nasional sehingga Ginandjar Kartasasmita betul-betul dijadikan seorang figur orang Sunda. Nugraha Besoes bahkan mengatakan "Pak Ginandjar sampai belajar kembali bahasa Sunda karena ia telah banyak yang lupa mungkin karena ia telah lama tinggal di Jakarta jadi bahasa sehari-harinya bahasa Indonesia."<sup>7</sup> Pekerjaan sebagian besar orang Sunda adalah petani maka dukungan pun diperoleh dari organisasi petani yakni Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat<sup>8</sup> melalui ketua HKTI Jawa Barat Ir. Rudy Gunawan. Ia senantiasa mendampingi Pak Ginandjar ketika melakukan kunjungan ke setiap pelosok desa di Jawa Barat terutama pada desa-desa yang terdapat kelompok-kelompok tani.<sup>9</sup>

Alasan tim sukses Ginandjar Kartasasmita memperoleh suara 2.500.000 atau 10% jumlah pemilih di Jawa Barat antara lain *pertama*, peserta pemilu anggota DPD cukup banyak sehingga persaingan semakin ketat.<sup>10</sup> *Kedua*, keterbatasan personil tim sukses. *Ketiga*, keterbatasan dana. Iyus Rustandi mengatakan bahwa dengan memperoleh suara sebanyak 2.500.000 suara dipastikan dapat memenangkan pemilu sebab apabila jumlah pemilih sebanyak 26.000.000 dibagi kepada 42 calon berarti setiap calon dapat memperoleh sekitar 600.000 sampai

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Nugraha Besoes pada tanggal 15 November 2006

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Ir. Rudy Gunawan pada tanggal 12 Januari 2006

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Nugraha Besoes, *Op. Cit*

700.000 pemilih, jadi target perolehan suara Ginandjar sebanyak itu sudah pada kategori maksimal.<sup>11</sup>

### **Pembuatan alat-alat pengenalan calon**

Pembuatan alat-alat pengenalan calon dimaksud adalah pembuatan seperti kaos, spanduk, brosur, liflet, buku saku, stiker dan baliho. Pembuatan itu dimaksudkan antara lain *pertama*, untuk memberikan pengenalan lebih jauh kepada pemilih. *Kedua*, supaya masyarakat pemilih mudah mengingat wajah dan nama calon. *Ketiga*, untuk mengumumkan pencalonan dan permintaan dukungan kepada masyarakat pemilih.

Tim sukses Ginandjar Kartasasmita membuat alat-alat pengenalan calon dua kali lipat dari target suara yang ingin dicapai yakni sekitar 5.000.000-10.000.000 alat pengenal kemudian disebar ke 25 kabupaten/kota di Jawa Barat. Alat-alat pengenal itu lebih difokuskan di kabupaten/kota yang memiliki jumlah pemilih lebih banyak seperti Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi dan Kabupaten Sumedang yang merupakan tempat tinggal Ginandjar Kartasasmita. Alat-alat pengenal itu dalam bentuk kaos, spanduk, brosur, liflet, stiker dan baliho.<sup>12</sup>

### **Penggunaan anggaran**

Penggunaan anggaran penting untuk direncanakan supaya dana yang dikeluarkan itu berguna untuk proses pemenangan. Penggunaan anggaran itu antara lain *pertama*, untuk biaya pengadaan alat-alat pengenal. *Kedua*, biaya

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Iyus Rustandi, *Ibid*

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Iyus Rustandi pada tanggal 29 November 2006

pertemuan atau rapat. *Ketiga*, gaji para staf dan sukarelawan tim sukses. *Keempat*, biaya kunjungan ke daerah. *Kelima*, biaya operasional tim sukses di daerah.

Ketua Tim Sukses Ginandjar Kartasasmita, Nugroho Besoes, mengatakan bahwa Pak Ginandjar menghabiskan dana sekitar 1 Milyar rupiah belum termasuk bantuan dari rekan-rekannya berupa alat-alat pengenalan seperti kaos, spanduk, brosur, dan baliho.<sup>13</sup>

### **Kegiatan-Kegiatan Tim Sukses**

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tim sukses merupakan faktor penentu dalam keberhasilan mencapai kemenangan, sebab rencana yang baik dan anggaran yang besar akan menjadi *mubadzir* apabila tidak dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan yang serius dan terfokus. *Tahap pertama*, kegiatan yang dilakukan tim sukses adalah memenuhi persyaratan administratif pencalonan kandidat sebagai peserta pemilu anggota DPD ke KPU Provinsi Jawa Barat. Tim sukses harus memenuhi persyaratan pendaftaran anggota DPD Jawa Barat yang harus didukung oleh 5000 pemilih. Pendaftaran dimulai pada tanggal 8 Juli sampai dengan 8 September 2003, jadi hanya memiliki waktu 3 (tiga) bulan. Persyaratan calon anggota DPD Jawa Barat pada waktu pendaftaran harus didukung minimal 5000 pemilih sesuai dengan Undang-undang Pemilu Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 11, yang menetapkan bahwa jumlah penduduk lebih dari 15.000.000 jiwa, seorang anggota DPD harus didukung 5000 pemilih.

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Nugraha Besoes pada tanggal 15 November 2006

Provinsi Jawa Barat yang berpenduduk sekitar 38.175.571 jiwa pada tahun 2003, berimplikasi kepada pencalonan DPD. Setiap calon anggota DPD harus didukung 5000 pemilih. Dukungan itu dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan keterangan lain serta membubuhkan tanda tangan pada formulir yang sudah disediakan. Dukungan 5000 pemilih tersebut harus tersebar minimal 25% dari jumlah kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat.<sup>14</sup> Provinsi Jawa Barat pada tahun 2003 terdiri dari 25 kabupaten/kota, berarti dukungan pemilih minimal tersebar di 8 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Untuk memenuhi persyaratan tersebut berbagai cara yang dilakukan setiap calon karena muncul makelar-makelar KTP bahkan muncul isu tim sukses Ginandjar Kartasmita menawarkan per KTP dengan harga Rp 100.000,00. Tetapi isu tersebut dibantah oleh Nugraha Besoes. Ia menyatakan bahwa isu tersebut bohong, isu tersebut dilontarkan pesaing politik atau yang anti Ginandjar. Tim sukses mengumpulkan KTP untuk persyaratan Ginandjar Kartasmita berdasarkan sukarela dari masyarakat terutama anggota-anggota organisasi yang mendukung Ginandjar Kartasmita. Payuban Pasundan terdapat cabang-cabangnya di setiap kabupaten/kota di Jawa Barat, jadi dengan melalui Paguyuban Pasundan saja sudah cukup apalagi ditambah dengan organisasi lain seperti HKTI, Damas, AMS dan Mitra Sunda.<sup>15</sup> Ginandjar Kartasmita dapat mengumpulkan dukungan pemilih berjumlah 105.523 pemilih.

---

<sup>14</sup> Lihat UU Pemilu Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 11

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Nugraha Besoes di Gedung PSSI pada tanggal 15 November 2006

*Tahap kedua*, kegiatan yang dilakukan oleh tim sukses adalah mengikuti rapat-rapat dan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh KPU. Kegiatan-kegiatan tersebut tercantum dalam tabel kegiatan yang ditetapkan KPU di bawah ini:

Tabel 4  
Jadwal Kegiatan Pemilihan Anggota DPD Jawa Barat  
Pada Pemilihan Umum Tahun 2004<sup>16</sup>

No	Program/Kegiatan	Jadwal Waktu	Keterangan
1	Pendaftaran perseorangan calon anggota DPD	8 Juli s.d. 8 September 2003	
2	Penelitian administratif dan faktual perseorangan calon anggota DPD oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota	9 September s.d. 30 November 2003	
3	Pengumpulan berita acara penelitian administratif dan faktual	1-8 Desember 2003	
4	Penetapan perseorangan calon anggota DPD	9 Desember 2003	Dilakukan dalam Pleno KPU
5	Penetapan nomor urut perseorangan calon anggota DPD	16 Desember 2003	
6	Pengumuman perseorangan calon anggota DPD	17-18 Desember 2003	
7	Pencetakan dan pendistribusian daftar calon anggota DPD	19 Desember 2003 s.d. 10 Maret 2004	
8	Persiapan Kampanye a. Penyusunan jadwal pelaksanaan kampanye dengan peserta pemilu b. KPU memfasilitasi pertemuan antar peserta pemilu untuk merumuskan kesepakatan tentang pelaksanaan kampanye yang dilakukan dengan cara yang sopan, tertib dan edukatif c. Penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye d. Pengaturan pengamanan kampanye berkoordinasi dengan Polri dan instansi terkait lain.	2 Januari s.d. 28 Pebruari 2004	

<sup>16</sup> Laporan KPU Provinsi Jawa Barat atas penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2004

	e. Pengaturan pemberian kesempatan yang sama dan pemasangan iklan pemilu dalam rangka kampanye berkoordinasi dengan media cetak dan elektronik.		
9	Pelaksanaan Kampanye	11 Maret s.d. 1 April 2004	
10	Massa tenang	2 - 4 April 2004	Pembersihan alat-alat peraga kampanye
11	Pemungutan suara dan penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN di TPS/TPSLN dilaksanakan secara serentak	5 April 2004	1) Pemungutan suara dimulai pukul 08.00 – 14.00 waktu setempat 2) Setelah pukul 14.00 waktu setempat langsung diadakan penghitungan suara.
12	KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS	5 April 2004	Untuk kemudian diserahkan kepada PPS
13	Penetapan hasil pemilu	21-28 April 2004	Ditetapkan dengan keputusan KPU
14	Penetapan dan pengumuman calon terpilih anggota DPD	11-17 Mei 2004	
15	Pemberitahuan kepada calon terpilih anggota DPD oleh KPU	24-31 Mei 2004	Surat pemberitahuan calon terpilih anggota DPD disampaikan kepada yang bersangkutan
16	Peresmian keanggotaan DPD RI	Agustus, September 2004	Anggota DPD oleh Presiden RI
17	Pengucapan sumpah/janji anggota DPD	September 2004	

*Tahap ketiga*, kegiatan yang dilakukan tim sukses adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilih. Keempat pemenang anggota DPD Jawa Barat sebenarnya sudah dikenal oleh masyarakat Jawa Barat tetapi untuk menyakinkan bahwa mereka mencalonkan anggota DPD tetap perlu dilakukan sosialisasi sebagai upaya penguatan. Ginandjar Kartasasmita merupakan sosok

yang sangat dikenal oleh masyarakat karena beliau hampir 20 tahun menjadi pejabat negara. Ia sering dipublikasikan oleh media cetak maupun elektronik sewaktu menjadi pejabat negara.

Iyus Rustandi (sekretaris tim sukses Ginandjar Kartasasmita) mengatakan bahwa mencalonkan pak Ginandjar tidak sulit karena masyarakat telah mengenalnya. Tim sukses mensosialisasikan pak Ginandjar untuk memastikan dan memberitahukan pencalonannya menjadi anggota DPD kepada masyarakat.<sup>17</sup> Sosialisasi juga dilakukan ke internal organisasi Paguyuban Pasundan bahwa Ginandjar Kartasasmita didukung Pengurus Besar Paguyuban Pasundan berdasarkan rapat harian. Oleh karena itu seluruh jajaran organisasi harus mentaati dan mensosialisasikan kepada anggota-anggota Paguyuban Pasundan.<sup>18</sup>

### ***Pengawasan dan Evaluasi***

Pengawasan dan evaluasi penting dilakukan oleh manajer tim sukses atau calon itu sendiri. Pengawasan dan evaluasi merupakan upaya untuk mengontrol staf tim sukses agar tetap terfokus pada kemenangan pemilu. Menejer tim sukses memerlukan suatu mekanisme pengawasan yang secara terus-menerus mengikuti kemajuan tim sukses kearah tujuan terakhirnya, yakni kemenangan pada hari pemilihan.

Dalam melakukan pengawasan tim sukses dapat menentukan berapa baik pekerjaan itu telah dilaksanakan dan kemajuan apa yang telah dibuat. Pembuatan

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Iyus Rustandi di Sekretariat DPD Jawa Barat di Bandung pada tanggal 29 November 2006

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan H. Syafi'i ketua umum PB Paguyuban Pasundan di Kantor PB Paguyuban Pasundan pada tanggal 13 Desember 2006

laporan adalah suatu sarana pengawasan. Laporan itu dilakukan pada setiap rapat tim sukses yang bisa berlangsung satu minggu atau dua minggu sekali.

Pengawasan dilakukan secara bertingkat mulai dari manajer mengawasi kinerja dari divisi-divisi yang berada di bawahnya, begitu pula setiap divisi dapat mengawasi kinerja staf-staf yang berada di bawahnya. Tim sukses yang berada di daerah-daerah dapat di awasi oleh divisi koordinasi. Dengan demikian tingkat pengawasan menjadi ketat dan terukur. Ginandjar Kartasmita mendapatkan laporan dari menejer tim sukses saja atau bisa ikut dalam setiap rapat tim sukses.<sup>19</sup>

### **Pangeran Arief Natadiningrat**

Pembahasan pembentukan tim sukses Pangeran Arief Natadiningrat meliputi: *Pertama*, organisasi tim sukses. *Kedua*, perencanaan kegiatan pemenangan. *Ketiga*, pelaksanaan kegiatan-kegiatan tim sukses. *Keempat*, pengawasan kegiatan-kegiatan tim sukses.

### **Organisasi Tim Sukses**

Organisasi tim sukses Pangeran Arief Natadiningrat terbentuk pada bulan Juni 2003. Pembentukan tim sukses pada awalnya sebatas tim kecil yang terdiri dari keluarga dekat dan sahabat Pangeran Arief. Tim kecil tersebut dipimpin langsung oleh Pangeran Arief Natadiningrat. Tim kecil tersebut berfungsi sebagai kelompok diskusi guna menampung aspirasi dari berbagai tokoh masyarakat Cirebon di antaranya Bupati dan Walikota Cirebon, Ketua-Ketua partai politik, Ketua KNPI Cirebon, Ketua Kosgoro, tokoh agama dan dari beberapa tokoh Jawa

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Nugraha Besoes di Gedung PSSI pada tanggal 15 November 2006

Barat yang berada di Bandung. Tokoh-tokoh tersebut menganjurkan Pangeran Arief untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Barat pada pemilu 2004.<sup>20</sup>

Tim sukses Pangeran Arief Natadiningrat mulai disempurnakan pada bulan-bulan berikutnya setelah beliau mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD. Pangeran Arief Natadiningrat mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD sehari sebelum hari akhir pendaftaran pada tanggal 7 September 2003. Dalam rangka memenuhi persyaratan pendaftaran calon anggota DPD di antaranya harus mendapatkan dukungan dari masyarakat pemilih sebanyak 5.000 orang yang dibuktikan dengan foto copy KTP dan tanda tangan dalam formulir tertentu. Pangeran Arief beserta tim kecil tersebut berusaha memenuhi persyaratan pencalonan tersebut.

Pangeran Arief Natadiningrat menggunakan kerabat keraton sebagai tim sukses.<sup>21</sup> Struktur teratas sebagai penanggungjawab adalah Pangeran Arief Natadiningrat. Untuk melaksanakan kegiatan tim sukses Pangeran Arief menunjuk seorang Ketua tim sukses atau manajer tim sukses yang dipercayakan kepada keponakannya yakni Deni Natadiningrat. Deni Natadiningrat adalah keluarga besar kesultanan Cirebon keraton kasepuhan. Ia juga seorang aktivis di organisasi kepemudaan Kosgoro Cirebon dan wakil ketua Hipmi Cirebon. Ia juga adalah seorang pengusaha. Sekretaris tim sukses dipercayakan kepada Iwan Kustiawa, seorang aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Ia juga seorang

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Pangeran Arief Natadiningrat pada tanggal 7 November 2006. Pangeran Arief tidak mau menyebutkan nama-nama tokoh-tokoh tersebut.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Pangeran Arief Natadiningrat pada tanggal 7 November 2006

penulis artikel yang sudah cukup dikenal di koran daerah Cirebon sehingga setiap tulisan dan otobiografi Pangeran Arief di tulis oleh Iwan Kustiawan.<sup>22</sup>

Sekretariat pusat pemenangan tim sukses Pangeran Arief Natadiningrat bertempat di Kota Cirebon tepatnya di salah satu rumah kompleks Kasepuhan Cirebon. Tim Sukses Pangeran Arief memfokuskan perolehan suara di wilayah Cirebon dan Indramayu sehingga struktur tim sukses di wilayah tersebut disusun secara lengkap mulai dari tingkat kabupaten sampai kepada desa/kelurahan atau kelompok-kelompok masyarakat. Struktur tim sukses dibentuk pula di luar wilayah Cirebon seperti di Bandung, Sukabumi, Cianjur, Bogor, Karawang, Purwakarta, Bekasi dan Depok. Struktur tim sukses di luar wilayah Cirebon dibentuk kordinator-koordinators di tiap kabupaten/kota. Pembentukan tersebut dengan pendekatan keorganisasian Kosgoro dan Hipmi serta pendekatan kekeluargaan seperti koordinator Bekasi dipercayakan kepada saudaranya yang kebetulan adalah pengurus Hipmi Bekasi dan ia seorang pengusaha besar di Bekasi. Begitu pula di Bogor, Cianjur dan Sukabumi. Sedangkan di daerah Bandung dan Cimahi berdasarkan pendekatan Kosgoro dan Hipmi. Pengurus Kosgoro dan Hipmi Jawa Barat banyak yang menawarkan diri untuk menjadi koordinator untuk kesuksesan Pangeran Arief.<sup>23</sup>

Di tingkat provinsi struktur organisasi dibentuk sesuai dengan kebutuhan pemenangan yang dilengkapi pula dengan pembagian kerja. Struktur tersebut mulai dari ketua tim sukses yang bertugas sebagai pemimpin organisasi. Wakil

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Deni pada tanggal 17 November 2006

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Deni pada tanggal 17 November 2006

ketua yang bertugas mendampingi ketua atau mewakili ketua apabila sedang berhalangan untuk menjalankan roda organisasi. Sekretaris yang bertugas melakukan perlengkapan kesekretariatan. Wakil sekretaris yang bertugas mewakili sekretaris apabila berhalangan. Bendahara yang bertugas mengatur keuangan. Wakil bendahara yang bertugas mewakili bendahara apabila berhalangan.

Selain itu dibentuk divisi-divisi seperti divisi data dan kesekretariatan yang berfungsi mempersiapkan kebutuhan administrasi kandidat sebagai peserta pemilu. Divisi peralatan yang memiliki fungsi untuk mempersiapkan kebutuhan alat-alat sosialisasi Divisi sosialisasi dan kampanye yang berfungsi untuk melakukan sosialisasi baik ke tingkat elit, organisasi-organisasi dan kepada masyarakat pemilih dengan menggunakan alat-alat sosialisasi. Divisi sosialisasi dan kampanye juga bertanggungjawab untuk mempersiapkan kampanye. Waktu kampanye telah ditetapkan jadwalnya oleh KPU Provinsi. Dalam rangka memudahkan dan melancarkan kegiatan-kegiatan tim sukses, setiap staf tim sukses diberi gaji. Tim sukses Pangeran Arief Natadiningrat diberi gaji per bulan Rp 1.000.000.<sup>24</sup>

### **Perencanaan Tim Sukses**

Perencanaan terhadap langkah-langkah yang akan dilakukan tim sukses dan Kandidat merupakan faktor yang sangat penting. Sehingga apa yang dilakukan oleh kandidat dapat mencapai target yang diharapkan. Target dari sebuah tim

---

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Iwan Kustiawan pada tanggal 23 November 2006

sukses adalah kemenangan sang kandidat maka segala yang direncanakan harus mengarah kepada pemenangan kandidat itu sendiri. Perencanaan mencakup menentukan perolehan suara, pembuatan alat-alat pengenalan calon, dan penggunaan anggaran.

### **Menentukan perolehan suara**

Penentuan perolehan suara penting untuk direncanakan oleh tim sukses supaya kebutuhan-kebutuhan teknis pemenangan dapat ditentukan misalnya kebutuhan kaos, spanduk, brosur serta dana yang diperlukan dapat terukur dengan baik. Selain itu direncanakan pula penyebaran perlengkapan pengenalan calon tersebut dan berapa jumlah yang dibutuhkan. Ketentuan kebutuhan perlengkapan tersebut minimal dua kali lipat jumlah perolehan suara yang akan di capai.

Pangeran Arief Natadiningrat beserta tim suksesnya tidak menargetkan secara pasti berapa suara yang akan diperoleh tetapi ia hanya berkilah bahwa sebagai putra Cirebon ia harus unggul terutama di wilayah Kesultanan Cirebon.<sup>25</sup> Alasan Pangeran Arief Natadiningrat tidak menargetkan perolehan suara lebih dikarenakan supaya ia dan tim sukses tidak memiliki beban yang harus dicapai tetapi ikhtiar harus lebih optimal, hasil perolehan suara akan sangat tergantung pada ikhtiar yang dilakukan.<sup>26</sup> Tetapi Pangeran Arief dan tim suksesnya memiliki perhitungan apabila ingin memenangkan pemilu DPD dengan jumlah pemilih di Jawa Barat sekitar 26.000.000 pemilih maka ia harus memperoleh suara minimal 10% atau sekitar 2.600.000 suara. Apabila Kabupaten-Cirebon, Kota Cirebon dan

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Pangeran Arief Natadiningrat pada tanggal 7 November 2006

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Iwan Kustiawan (tim sukses Pangeran Arief Natadiningrat), *Op. Cit*

Kabupaten Indramayu dapat diraih secara optimal sudah dapat memenangkan pemilu, sedangkan suara dari kabupaten/kota di luar Cirebon sebagai tambahan karena dituntut oleh peraturan pemilu DPD.<sup>27</sup>

Oleh karenanya Pangeran Arief Natadiningrat lebih memfokuskan di wilayah Cirebon. Ia dipersonifikasikan sebagai kemunculan kembali kebesaran Kesultanan Cirebon sehingga wilayah yang menjadi fokus peraih suara lebih tertuju kepada wilayah-wilayah Kesultanan Cirebon. Hal ini terlihat dengan hampir 27,8% suara diperoleh dari Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon 34,6% dan Indramayu 7,4%.

### **Pembuatan alat-alat pengenalan calon**

Pembuatan alat-alat pengenalan calon dimaksud adalah pembuatan seperti kaos, spanduk, brosur, liflet, buku saku, stiker dan baliho. Pembuatan itu dimaksudkan antara lain *pertama*, untuk memberikan pengenalan lebih jauh kepada pemilih. *Kedua*, supaya masyarakat pemilih mudah mengingat wajah dan nama calon. *Ketiga*, untuk mengumumkan pencalonan dan permintaan dukungan kepada masyarakat pemilih.

Tim sukses Pangeran Arief Natadiningrat membuat alat-alat pengenalan sekitar 10.000.0000 buah dalam bentuk kaos, spanduk, brosur, liflet, buku saku, stiker dan baliho. Alat-alat pengenalan itu 50% tersebar di Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Deni pada tanggal 17 November 2006

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Deni pada tanggal 17 November 2006

### **Penggunaan anggaran**

Penggunaan anggaran penting untuk direncanakan supaya dana yang dikeluarkan itu berguna untuk proses pemenangan. Penggunaan anggaran itu antara lain *pertama*, untuk biaya pengadaan alat-alat pengenalan. *Kedua*, biaya pertemuan atau rapat. *Ketiga*, gaji para staf dan sukarelawan tim sukses. *Keempat*, biaya kunjungan ke daerah. *Kelima*, biaya operasional tim sukses di daerah. Pangeran Arief mengatakan bahwa ia menghabiskan dana sekitar 1 Milyar rupiah untuk keperluan pemenangan pemilu DPD.<sup>29</sup>

### ***Kegiatan-Kegiatan Tim Sukses***

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tim sukses merupakan faktor penentu dalam keberhasilan mencapai kemenangan, sebab rencana yang baik dan anggaran yang besar akan menjadi *mubadzir* apabila tidak dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan yang serius dan terfokus. *Tahap pertama*, Kegiatan yang dilakukan tim sukses adalah memenuhi persyaratan administratif pencalonan kandidat sebagai peserta pemilu anggota DPD ke KPU Provinsi Jawa Barat. Tim sukses harus memenuhi persyaratan pendaftaran anggota DPD Jawa Barat yang harus didukung oleh 5000 pemilih. Dukungan pemilih tersebut minimal tersebar di 8 kabupaten/kota di Jawa Barat atau 25% dari jumlah kabupaten/kota di Jawa Barat.

Iwan Kustiawan mengatakan bahwa kendala mencari dukungan dari masyarakat pemilih itu antara lain masyarakat banyak yang belum tahu DPD terutama tentang tugas dan fungsi DPD, sehingga mereka banyak bertanya tentang

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Pangeran Arief Natadiningrat pada tanggal 7 November 2006

pentingnya DPD dan cara pemilihannya. Tim sukses pada akhirnya banyak menjelaskan tentang DPD sekaligus meminta dukungan masyarakat akan calon yang diusungnya. Pangeran Arief Natadiningrat menyatakan "harusnya KPU berterimakasih kepada kandidat bahkan harus dibiayai kandidat itu, sebab yang mensosialisasikan DPD itu adalah para kandidat sedangkan KPU hanya mensosialisasikan pencoblosan saja, kilahnya".<sup>30</sup> Pangeran Arief Natadiningrat mendapatkan dukungan pada waktu pencalonannya berjumlah 8.881 orang.

*Tahap kedua*, kegiatan yang dilakukan oleh tim sukses adalah mengikuti rapat-rapat dan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh KPU sebagaimana disebutkan dalam pembahasan Ginandjar di atas.

*Tahap ketiga*, kegiatan yang dilakukan tim sukses adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilih. Pangeran Arief Natadiningrat merupakan sosok yang sangat dikenal terutama di masyarakat Cirebon. Ia tidak melakukan sosialisasi secara langsung tetapi tokoh-tokoh Cirebon yang mensosialisasikan beliau kepada masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Pangeran Arief menuturkan bahwa pencalonannya diminta oleh tokoh-tokoh Cirebon baik bupati/walikota, pimpinan partai politik, ulama maupun tokoh-tokoh pemuda. Ia mempersilahkan tokoh-tokoh Cirebon untuk sosialisasikan kepada masyarakat. Sedangkan ia memenuhi permintaan tokoh-tokoh Cirebon untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD".<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan Pangeran Arief di Sekretariat DPD Jawa Barat di Jakarta pada tanggal 7 November 2006

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Pangeran Arief Natadiningrat pada tanggal 7 November 2006

Yang lebih unik sosialisasi yang dilakukan oleh Pangeran Arief Natadiningrat adalah memberikan buku dan brosur yang berisikan riwayat hidup, visi dan misi Pangeran Arief Natadiningrat berkaitan dengan pencalonannya di DPD. Buku dan brosur itu diberikan kepada para peziarah yang datang ke makam Sunan Gunung Djati yang merupakan nenek moyang Pangeran Arief. Makam Sunan Gunung Djati senantiasa ramai didatangi masyarakat baik dari Jawa Barat maupun dari luar Jawa Barat terutama pada hari-hari besar Islam seperti hari *Maulid Nabi* dan hari *Isra Mi'raj* atau pada bulan *Rajab*. Dengan langkah seperti itu nama Pangeran Arief menjadi cepat menyebar ke seluruh pelosok Jawa Barat dengan diopinikan sebagai keturunan Sunan Gunung Djati.<sup>32</sup>

Dengan opini sebagai keturunan Sunan Gunung Djati untuk masyarakat yang meyakini tentang pentingnya ziarah akan terpengaruh bahwa ia adalah keturunan orang yang mereka muliakan. Di masyarakat Jawa Barat cukup merata masyarakat yang meyakini ziarah kubur kepada makam-makam yang dianggap keramat terutama para Nahdyyin (pengikut NU). Dengan isu tersebut memberikan dampak turunnya suara K.H. Sofyan Yahya sebagai Ketua Umum PW NU Jawa Barat terutama di daerah pantai utara Jawa Barat seperti Cirebon dan Indramayu.

### ***Pengawasan dan Evaluasi***

Langkah terakhir yang dilakukan oleh calon atau tim sukses adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh calon dan tim sukses. Evaluasi merupakan upaya untuk

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Deni pada tanggal 17 November 2006

mengontrol tim sukses agar tetap terfokus pada pemenangan pemilu. Menejer tim sukses memerlukan suatu mekanisme pengawasan yang secara terus-menerus mengikuti kemajuan tim sukses kearah tujuan terakhirnya, yakni kemenangan pada hari pemilihan. Pangeran Arief melakukan kontrol secara langsung terhadap kinerja tim suksesnya dengan menanyakan langsung atau melakukan rapat tertentu. Pangeran Arief mengatakan bahwa ia tidak mempercayakan penuh pemenangan ini kepada tim sukses, oleh karenanya ia turun langsung mengontrol dan terlibat dalam setiap kegiatan tim sukses.<sup>33</sup>

### **Mohammad Surya**

Pembahasan pembentukan tim sukses Mohammad Surya meliputi: *Pertama*, organisasi tim sukses. *Kedua*, perencanaan kegiatan pemenangan. *Ketiga*, pelaksanaan kegiatan-kegiatan tim sukses.

### **Organisasi Tim Sukses**

Mohammad Surya membentuk tim sukses satu tahun sebelum pemilu. Tim sukses Mohammad Surya berdiri pada bulan Juni 2003. Pembentukan tim sukses pada bulan tersebut sangat terbatas bahkan bisa dikatakan sebagai kelompok kerja, karena tim tersebut dibutuhkan untuk membantu memenuhi persyaratan pencalonan peserta pemilu DPD. Persyaratan pencalonan peserta pemilu DPD untuk Provinsi Jawa Barat harus mendapat dukungan 5.000 pemilih yang

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan Pangeran Arief Natadiningrat tanggal 7 Noveber 2006 di Kantor DPD RI Jakarta.

dibuktikan dengan foto copy KTP dan tanda tangan. 5.000 pemilih tersebut harus tersebar di 25% Kabupaten/Kota atau 8 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Pembentukan tim sukses secara lengkap dilakukan Mohammad Surya setelah resmi menjadi salah satu peserta pemilu DPD. Hal tersebut dilakukan karena masih terbatasnya kinerja. Tetapi apabila telah ditentukan secara resmi oleh KPU sebagai peserta pemilu membutuhkan tim work yang solid karena besarnya jumlah pemilih di Jawa Barat sekitar 26 Juta pemilih dengan wilayah yang sangat luas.

Realitas demografi dan geografis Jawa Barat seperti itu, untuk seorang calon membutuhkan tim sukses yang dapat menjadi perantara hubungan antara calon dengan pemilih, sehingga efektifitas dan efisiensi kampanye dapat terwujud. Mohammad Surya membentuk tim sukses menggunakan langsung organisasi kemasyarakatan yang menjadi pendukung sekaligus sebagai basis dukungannya sehingga pengelolaan tim sukses yang dilakukan lebih kepada menggunakan manajemen organisasi yang berlaku dalam organisasi yang bersangkutan. Mohammad Surya menjadikan pengurus PGRI Jawa Barat sebagai tim sukses.<sup>34</sup>

Walaupun secara organisatoris PGRI tidak memutuskan dukungan resmi kepada Mohammad Surya tetapi pengurus PGRI menjadi tim suksesnya mulai dari Ketua Umum PGRI Jawa Barat sampai kepada tingkat kecamatan. Ketua tim sukses Mohammad Surya adalah Sahiri Hermawan. Ia adalah Ketua Umum PGRI Jawa Barat. Ia mengatakan bahwa PGRI tetap independen sesuai dengan kedudukan organisasi PGRI tetapi secara pribadi-pribadi pengurus PGRI

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Sahiri Hermawan pada tanggal 10 Oktober 2006

mendukung pencalonan Mohammad Surya.<sup>35</sup> Dengan demikian tetap saja mesin politik yang digunakan Mohammad Surya adalah PGRI.

Organisasi kemasyarakatan yang sekaligus sebagai tim sukses menjadikan aspek kemandirian dan keprofesionalan dari tim sukses itu tidak tampak kepermukaan tetapi aspek kebesaran dari jajaran organisasi lebih dominan. Padahal kemajuan dalam politik dapat dilihat dari membangun sebuah tim sukses yang modern dan profesional sehingga kecakapan manajerial seorang calon akan lebih mengemuka bukan karena organisasi kemasyarakatan yang mengedepan.

Pada bulan-bulan berikutnya tim sukses mulai disempurnakan. Struktur teratas sebagai penanggungjawab secara otomatis adalah Mohammad Surya. Kandidat ini bertanggungjawab secara penuh baik dalam urusan internal organisasi tim sukses maupun secara eksternal. Untuk melaksanakan operasional tim sukses *day to day*, kandidat menunjuk seorang ketua tim sukses yang sangat dipercaya, memiliki integritas dan kapabilitas dalam bekerja. Istilah lain bisa juga dipakai misalnya manajer tim sukses.

Integritas dan kapabilitas seorang manajer tim sukses sangat dibutuhkan oleh kandidat. Lebih jauh lagi seorang manajer tim sukses telah memiliki pengalaman politik sehingga akan lebih mempermudah kinerja tim sukses. Berdasar hal itu kandidat senantiasa mempercayakan manajer tim suksesnya kepada teman dekat atau kerabatnya. Mohammad Surya mengangkat manajer tim suksesnya Ketua Umum PGRI Jawa Barat Sahiri Hermawan.

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Sahiri Hermawan pada tanggal 10 Oktober 2006

Struktur tim sukses dibentuk mulai dari tingkat provinsi sampai kepada tingkat yang lebih bawah/daerah. Di tingkat provinsi berada di ibukota provinsi yakni Kota Bandung. Selanjutnya dibentuk di tiap-tiap Kabupaten/Kota koordinator-koordinator wilayah dan sebagai ujung tombak rekrutmen suara masyarakat dibentuk di tingkat kecamatan bahkan ada sebagian di tingkat desa atau kelompok-kelompok masyarakat.

Selain itu dibentuk seksi-seksi seperti seksi kesekretariatan yang berfungsi mempersiapkan kebutuhan administrasi kandidat sebagai peserta pemilu. Seksi peralatan yang memiliki fungsi untuk mempersiapkan kebutuhan alat-alat sosialisasi. Seksi sosialisasi dan kampanye bertanggungjawab untuk mempersiapkan kampanye. Waktu kampanye telah ditetapkan jadwalnya oleh KPU Provinsi.

Mohammad Surya dalam menyusun tim sukses untuk tingkat provinsi relatif sama. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota menggunakan langsung pengurus cabang organisasi PGRI. Begitu pula di tingkat kecamatan menggunakan organisasi ranting atau anak cabang organisasi PGRI. Tim sukses di tingkat kecamatan atau desa bertugas untuk mengkoordinir pelaksana teknis kebijakan yang diambil di tingkat provinsi dan mempersiapkan kampanye di daerahnya. Hal itu dilakukan antara lain *pertama*, supaya lebih terfokus kepada sosialisasi dan peraihan suara. *Kedua*, tidak berbelit dalam pengambilan keputusan yang bersifat prinsipil di antara organ organisasi sehingga keputusan itu hanya diambil di tingkat pusat. *Ketiga*, supaya lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan program yang telah dirancang di tingkat provinsi.

Selain tim yang tercantum dalam struktur diperlukan juga para sukarelawan. Sukarelawan yang diminta oleh Mohammad Surya adalah kawan-kawan beliau yang beliau kenal baik itu di organisasi kemasyarakatan atau dipartai politik Golkar, karena ia pernah menjadi anggota DPRD Jawa Barat periode 1997-1999 dari Golkar sehingga banyak yang ia kenal. Ia pun menggunakan organisasi Ikatan Alumni IKIP Bandung, walaupun tidak memiliki cabang diberbagai daerah tetapi anggotanya terdapat di beberapa daerah yang banyak berprofesi sebagai dosen atau guru.

Dalam rangka memudahkan dan melancarkan kegiatan-kegiatan tim sukses, setiap staf tim sukses seharusnya diberi gaji. Tetapi tim sukses Mohammad Surya melakukan kegiatan dengan secara sukarela. Sahiri Hermawan menyatakan bahwa di kalangan guru banyak yang secara sukarela membantu menjadi tim sukses Moh. Surya dalam mensosialisasikannya untuk menjadi anggota DPD.<sup>36</sup>

Tim sukses diciptakan untuk terpilihnya seorang calon anggota DPD. Tim sukses melakukan kegiatan-kegiatan untuk pemenangan calon sejak terbentuknya tim tersebut. Tim sukses berhenti berfungsi setelah hari pemilihan atau beberapa waktu sesudah itu. Organisasi tim sukses merupakan suatu kekuatan dinamis berhenti bekerja setelah hari pemilihan.

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Sahiri Hermawan (Ketua Tim Sukses Moh. Surya) pada tanggal 10 Oktober 2006. Ungkapan ini dibenarkan oleh Moh Surya bahwa banyak di kalangan para pengurus PGRI atau para guru yang membantu saya tanpa pamrih, hasil wawancara dengan Moh. Surya pada tanggal 5 Januari 2007 di Sekretariat DPD RI di Bandung

### **Perencanaan Tim Sukses**

Kemenangan dalam pemilu adalah target dari terbentuknya tim sukses. Dalam mencapai tujuan tersebut dibutuhkan sebuah perencanaan yang matang oleh kandidat atau tim sukses. Perencanaan mencakup menentukan perolehan suara, pembuatan alat-alat pengenalan calon, dan penggunaan anggaran.

### **Menentukan perolehan suara**

Target perolehan suara penting untuk direncanakan oleh tim sukses, karena berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan alat-alat pengenalan calon misalnya kebutuhan kaos, spanduk, brosur serta dana yang diperlukan dapat terukur sesuai dengan kebutuhan atau mendekati kebutuhan dana tersebut. Selain itu berkaitan pula dengan prioritas penyebaran perlengkapan pengenalan calon tersebut. Ketentuan kebutuhan perlengkapan tersebut rata-rata minimal dua kali lipat jumlah perolehan suara yang akan di capai.

Mohammad Surya sebagai tokoh guru Jawa Barat. Ia sebagai Ketua Umum PP PGRI berkeyakinan akan memenangkan pemilihan anggota DPD karena para guru senantiasa menghendaki ada perwakilannya di DPD untuk memperjuangkan nasib para guru yang sampai sekarang masih menganggap ditelantarkan. Moh. Surya dianggap cakap untuk mewakili para guru dengan popularitasnya dan reputasi serta pengalaman pak Surya selama ini dalam mengabdikan menjadi pengurus PGRI yang hampir 35 tahun. Jadi ia mengetahui betul kebutuhan dan penderitaan para guru. Pak Surya tidak menargetkan berapa perolehan suara yang akan ditargetkan tetapi ia lebih mengedepankan keyakinan bahwa guru itu ada di

mana-mana baik di kota maupun di pedesaan dan ia berkeyakinan bahwa para guru akan mendukungnya.<sup>37</sup>

### **Pembuatan alat-alat pengenalan calon**

Pembuatan alat-alat pengenalan calon dimaksud adalah pembuatan seperti kaos, spanduk, brosur, liflet, buku saku, stiker dan baliho. Pembuatan itu dimaksudkan antara lain *pertama*, untuk memberikan pengenalan lebih jauh kepada pemilih. *Kedua*, supaya masyarakat pemilih mudah mengingat wajah dan nama calon. *Ketiga*, untuk mengumumkan pencalonan dan permintaan dukungan kepada masyarakat pemilih.

tim sukses Mohammad Surya membuat alat-alat pengenal sekitar 5.000.000 buah dalam bentuk kaos, spanduk, brosur, liflet, buku saku, stiker dan baliho. Alat-alat pengenal itu disebarakan terfokus di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Subang.<sup>38</sup>

### **Penggunaan anggaran**

Penggunaan anggaran penting untuk direncanakan supaya dana yang dikeluarkan itu berguna untuk proses pemenangan. Penggunaan anggaran itu antara lain *pertama*, untuk biaya pengadaan alat-alat pengenal. *Kedua*, biaya pertemuan atau rapat. *Ketiga*, gaji para staf dan sukarelawan tim sukses. *Keempat*, biaya kunjungan ke daerah. *Kelima*, biaya operasional tim sukses di daerah.

Anggaran yang diperlukan untuk memenangkan pemilu mungkin dibutuhkan dana yang sangat besar, karena banyaknya jumlah pemilih di Jawa

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Mohammad Surya pada tanggal 5 Januari 2007 di Sekretariat DPD Jawa Barat yang berada di Bandung.

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Sahiri Hermawan pada tanggal 10 Oktober 2006

Barat sekitar 26 juta pemilih serta luasnya wilayah Jawa Barat. Tetapi Mohammad Surya mengakui telah menghabiskan dana ± Rp. 700 juta. Selain itu ia dibantu oleh teman-temannya dalam bentuk spanduk, kaos atau stiker.<sup>39</sup>

### **Kegiatan-Kegiatan Tim Sukses**

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tim sukses merupakan faktor penentu dalam keberhasilan mencapai kemenangan, sebab rencana yang baik dan anggaran yang besar akan menjadi *mubadzir* apabila tidak dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan yang serius dan terfokus. *Tahap pertama*, Kegiatan yang dilakukan tim sukses adalah memenuhi persyaratan administratif pencalonan kandidat sebagai peserta pemilu anggota DPD ke KPU Provinsi Jawa Barat. Tim sukses harus memenuhi persyaratan pendaftaran anggota DPD Jawa Barat yang harus didukung oleh 5000 pemilih. Pendaftaran dimulai pada tanggal 8 Juli sampai dengan 8 September 2003, jadi hanya memiliki waktu 3 (tiga) bulan. Selain itu Provinsi Jawa Barat pada tahun 2003 terdiri dari 25 Kabupaten/Kota, berarti dukungan pemilih minimal harus tersebar di 8 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.<sup>40</sup>

Moh. Surya menyatakan bahwa ia tidak tahu menahu tentang persyaratan yang harus dipenuhi, para guru yang sekaligus sebagai anggota PGRI banyak yang menelponnya. Misalnya dari Ketua PGRI Kabupaten Garut yang menyatakan untuk Kabupaten Garut ia akan memenuhi persyaratan tersebut. Mohammad Surya mengucapkan terimakasih dan ia hanya bisa memberikan dana pengganti foto copy KTP saja. Mohammad Surya mengatakan kepada ketua PGRI

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Mohammad Surya pada tanggal 5 Januari 2007 di Sekretariat DPD RI di Bandung.

<sup>40</sup> Lihat UU Pemilu Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 11

Kabupaten Garut tersebut bahwa "ia tidak punya uang, ia hanya punya idealisme untuk memperjuangkan guru." Ketua PGRI Garut menjawab tidak apa-apa pokoknya dia mendukung pencalonan Mohammad Surya menjadi anggota DPD.<sup>41</sup> Mohammad Surya mendapatkan dukungan dari berbagai daerah pada pencalonannya berjumlah 13.790 pemilih.

Pada waktu memenuhi persyaratan tersebut adalah awal dari sosialisasi sebab masyarakat banyak bertanya untuk apa KTP dan tanda tangan. Setiap tim sukses secara seponan menjawab untuk memenuhi persyaratan pencalonan anggota DPD RI yang waktunya bersamaan dengan pemilihan anggota DPR dan DPRD pada pemilu 2004 yang dilaksanakan pada tanggal 5 April,

Masyarakat memang banyak yang belum tahu DPD terutama tentang tugas dan fungsi DPD, sehingga mereka banyak bertanya tentang pentingnya DPD dan cara pemilihannya. Tim sukses pada akhirnya banyak menjelaskan tentang DPD sekaligus meminta dukungan masyarakat akan calon yang diusungnya.

*Tahap kedua*, kegiatan yang dilakukan oleh tim sukses adalah mengikuti rapat-rapat dan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh KPU sebagaimana disebutkan dalam agenda KPU Provinsi Jawa Barat di atas.

*Tahap ketiga*, kegiatan yang dilakukan tim sukses adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilih. Mohammad Surya juga merupakan figur yang cukup populer. Di samping ia adalah Ketua Umum PP PGRI ia juga pernah mengisi acara psikologi keluarga di TVRI selama 5 tahun, pernah menjadi Rektor Universitas Terbuka (UT) selama 10 tahun, mengajar di berbagai perguruan tinggi

---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Mohammad Surya di Sekretariat DPD Jawa Barat di Bandung pada tanggal 5 Januari 2007

seperti UPI, Unpad, LAN dan Unpas, jadi sudah banyak murid Moh. Surya yang mengenalnya. Tim sukses Moh. Surya sebagian besar adalah pengurus PGRI sangat mudah mensosialisasikannya kepada masyarakat terutama kepada internal organisasi PGRI. Sosialisasi tetap dilakukan sebagai upaya konsolidasi dan penguatan akan pencalonannya.<sup>42</sup>

### **K.H. Sofyan Yahya**

Pembahasan pembentukan tim sukses K.H. Sofyan Yahya meliputi: *Pertama*, organisasi tim sukses. *Kedua*, perencanaan kegiatan pemenangan. *Ketiga*, pelaksanaan kegiatan-kegiatan tim sukses.

### **Organisasi Tim Sukses**

K.H. Sofyan Yahya membentuk organisasi tim sukses pada bulan Agustus 2003. Tim sukses pada awal pembentukannya adalah para pengurus PW NU Jawa Barat. Pembentukan itu berdasarkan hasil rapat PW NU Jawa Barat setelah ditetapkannya K.H. Sofyan Yahya mendapatkan dukungan untuk mencalonkan anggota DPD oleh PW NU Jawa Barat. Rapat PW NU menetapkan K.H. Sofyan Yahya serta menunjuk langsung tim suksesnya yakni Wakil Ketua PW NU K.H. Yusuf Muhammad dan Wakil Sekretaris PW NU Jawa Barat A.S. Padli sebagai Sekretaris tim sukses. Pembentukan tim sukses secara lengkap diserahkan langsung kepada Ketua dan Sekretaris tim sukses tersebut.

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Dr. H. Mohammad Surya pada tanggal 5 Januari 2007

K. H. Sofyan Yahya membentuk tim sukses menggunakan langsung organisasi kemasyarakatan yang menjadi pendukung sekaligus sebagai basis dukungannya sehingga pengelolaan tim sukses yang dilakukan lebih kepada menggunakan manajemen organisasi yang berlaku dalam organisasi yang bersangkutan. K.H. Sofyan Yahya menggunakan struktur NU menjadi tim sukses.<sup>43</sup>

Pada bulan-bulan berikutnya tim sukses mulai disempurnakan. Struktur teratas sebagai penanggungjawab secara otomatis adalah Ketua Umum PW NU K.H. Sofyan Yahya sekaligus sebagai calon anggota DPD itu sendiri. Kandidat ini bertanggungjawab secara penuh baik dalam urusan internal organisasi tim sukses maupun secara eksternal.

Struktur tim sukses dibentuk mulai dari tingkat provinsi sampai kepada tingkat yang lebih bawah/daerah. Di tingkat provinsi berada di ibukota provinsi yakni Kota Bandung dengan sekretariat tim sukses di kantor PW NU Jawa Barat Jalan Sancang Nomor 34. Selanjutnya dibentuk di tiap-tiap kabupaten/kota koordinator-koordinator wilayah dengan sekretariat di kantor PC NU di kabupaten/kota masing-masing. Begitu pula di tingkat kecamatan yang ada organisasi Anak Cabang NU (Organisasi NU tingkat kecamatan) dibentuk tim sukses dengan sekretariat di kantor Anak Cabang NU yang bersangkutan. Pondok-pondok pesantren yang menjadi loyalis NU dijadikan ujung tombak rekrutmen suara masyarakat pemilih.

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan K.H. Yusuf Muhammad pada tanggal 27 Januari 2007

Struktur itu dibentuk dengan berbagai ketentuan yang antara lain: *pertama*, dalam pengambilan keputusan tertinggi dilakukan di tingkat provinsi sedangkan di tingkat kabupaten/kota bahkan kecamatan lebih kepada pelaksana teknis. *Kedua*, untuk menyelesaikan kepentingan calon dalam memenuhi persyaratan administratif sebagai peserta pemilu cukup dilakukan oleh organisasi di tingkat provinsi. *Ketiga*, di tingkat provinsi dibentuk untuk mengkoordinir seluruh organ di tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten/kota untuk mengkoordinir tingkat kecamatan.

Di tingkat provinsi struktur organisasi dibentuk lengkap sesuai dengan kebutuhan pemenangan yang dilengkapi pula dengan pembagian kerja. Struktur tersebut mulai dari Ketua tim sukses yang bertugas sebagai pemimpin organisasi. Wakil Ketua yang bertugas mendampingi Ketua atau mewakili Ketua apabila sedang berhalangan untuk menjalankan roda organisasi. Sekretaris yang bertugas melakukan perlengkapan kesekretariatan. Wakil Sekretaris yang bertugas mewakili sekretaris apabila berhalangan. Bendahara yang bertugas mengatur keuangan. Wakil Bendahara yang bertugas mewakili Bendahara apabila berhalangan.

Selain itu dibentuk koordinator-kooordinaor seperti koordinator administrasi dan kesekretariatan yang berfungsi mempersiapkan kebutuhan administrasi kandidat sebagai peserta pemilu. Koordinator pengadaan perlengkapan yang memiliki tugas untuk mempersiapkan kebutuhan alat-alat sosialisasi Koordinator kampanye yang bertugas menyebarkan alat-alat pengenalan calon dan mempersiapkan kampanye. Waktu kampanye telah ditetapkan jadwalnya oleh

KPU Provinsi. Koordinator hubungan antar pondok pesantren yang memiliki tugas menghubungi kiai-kiai sepuh dan pondok-pondok pesantren.

Selain tim yang tercantum dalam struktur, PW NU menginstruksikan pula kepada organisasi-organisasi yang bernaung di bawah NU untuk mendukung pencalonan K.H. Sofyan Yahya. Organisasi-organisasi tersebut antara lain untuk tingkat ibu-ibu majllis ta'lim adalah Muslimat NU. Untuk tingkat pelajar adalah Ikatan Pelajar NU (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU). Tingkat Mahasiswa adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Tingkat Sarjana adalah Ikatan Sarjana NU (ISNU). Dan tingkat pemuda adalah Gerakan Pemuda Anshor (GP Anshor).

Keenam organisasi tersebut betugas untuk melakukan koordinasi internal organisasi masing-masing karena setiap Kabupaten/Kota memiliki cabang organisasi tersebut. Selain itu keenam organisasi tersebut beroperasi di organisasinya masing-masing dengan sekretariat di masing-masing organisasi. Sekretariat keenam organisasi tersebut senantiasa berada dalam satu kantor NU sehingga memudahkan komunikasi dan koordinasi antar organisasi.

Dalam rangka memudahkan dan melancarkan kegiatan-kegiatan tim sukses biasanya setiap staf tim sukses diberi gaji. Tetapi tim sukses K.H. Sofyan Yahya melakukan kegiatan dengan secara sukarela. A.S. Padli menyatakan bahwa di kalangan pengurus NU dan organisasi yang bernaung di bawah NU serta para

ulama NU secara sukarela menjadi anggota/staf tim sukses K.H. Sofyan Yahya serta bekerja tanpa mengharapkan imbalan/gaji.<sup>44</sup>

Tim sukses diciptakan untuk terpilihnya seorang calon anggota DPD. Tim sukses melakukan kegiatan-kegiatan untuk pemenangan calon sejak terbentuknya tim tersebut. Tim sukses berhenti berfungsi setelah hari pemilihan atau beberapa waktu sesudah itu. Bagi sang calon yang menang, organisasi tim sukses mungkin bertindak sebagai penyambung antara waktu pemilihan dan saat menduduki jabatan A.S. Padli (Sekretaris tim sukses K.H. Sofyan Yahya) menjadi asisten anggota DPD RI Provinsi Jawa Barat. Pasca pemilu, organisasi tim sukses dihapuskan dan urusan keuangan dibereskan serta membuat laporan yang diwajibkan oleh berbagai peraturan dikirimkan kepada KPU. Bagi seorang calon bahwa organisasi tim sukses merupakan suatu kekuatan dinamis berhenti bekerja setelah hari pemilihan.

### **Perencanaan Tim Sukses**

Perencanaan yang dilakukan oleh tim sukses beserta kandidat untuk mencapai kemenangan pemilu DPD mencakup antara lain: menentukan perolehan suara, pembuatan alat-alat pengenalan calon, dan penggunaan anggaran.

#### **Menentukan perolehan suara**

Penentuan perolehan suara penting untuk direncanakan oleh tim sukses supaya kebutuhan-kebutuhan teknis pemenangan dapat ditentukan misalnya kebutuhan kaos, spanduk, brosur serta dana yang diperlukan dapat terukur dengan baik. Selain itu direncanakan pula penyebaran perlengkapan pengenalan calon

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan A.S. Padli di Sekretariat DPD RI Bandung pada tanggal 12 Desember 2006

tersebut dan berapa jumlah yang dibutuhkan. Ketentuan kebutuhan perlengkapan tersebut minimal dua kali lipat jumlah perolehan suara yang akan di capai.

K.H. Sofyan Yahya sebagai representasi dari Nahdlatul Ulama (NU) dan sebagai perwakilan ulama Jawa Barat pada umumnya merencanakan bagaimana di kalangan para ulama terdapat wakilnya di DPD. NU merupakan organisasi terbesar di Jawa Barat. Pengurus NU Jawa Barat berkeyakinan bahwa kehadiran K.H Sofyan Yahya dapat menjadi pemenang dalam pemilihan anggota DPD. Dalam sejarah pemilu di Jawa Barat, NU senantiasa mendapatkan suara yang cukup besar di Jawa Barat mulai pemilu 1955 maupun pemilu 1999. Yang menjadi bidikan untuk meraih suara atau yang menjadi kantong suara bagi K.H. Sofyan Yahya adalah Kabupaten/Kota yang berbasiskan kaum santri seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Garut.<sup>45</sup> Perolehan suara untuk K.H. Sofyan Yahya tidak ditargetkan berapa yang akan dicapai tetapi lebih mengedepankan bagaimana terjadi konsolidasi warga Nahdiyyin di Jawa Barat untuk memberikan dukungan kepada K.H. Sofyan Yahya.<sup>46</sup> Alasan K.H. Sofyan Yahya tidak mentargetkan perolehan suara adalah kalau Allah menghendaki ia menjadi anggota DPD, tidak ada yang dapat menghalangi-Nya, jadi tidak perlu ditarget supaya tidak ada beban.<sup>47</sup>

### **Pembuatan alat-alat pengenalan calon**

Pembuatan alat-alat pengenalan calon dimaksud adalah pembuatan seperti kaos, spanduk, brosur, liflet, buku saku, stiker dan baliho. Pembuatan itu

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan K.H. Yusuf Muhammad pada tanggal 27 Januari 2007

<sup>46</sup> Ibid

<sup>47</sup> Ibid

dimaksudkan antara lain *pertama*, untuk memberikan pengenalan lebih jauh kepada pemilih. *Kedua*, supaya masyarakat pemilih mudah mengingat wajah dan nama calon. *Ketiga*, untuk mengumumkan pencalonan dan permintaan dukungan kepada masyarakat pemilih.

Tim Sukses K.H. Sofyan Yahya membuat alat-alat pengenalan berbentuk spanduk, brosur dan stiker yang berjumlah sekitar 2.000.000 buah. Alat-alat pengenalan itu disebar ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat melalui pesantren-pesantren yang dilakukan oleh pengurus NU Cabang atau Majelis Wakil Cabang. Alat-alat pengenalan itu mungkin bertambah di daerah-daerah sebab banyak umat Nahdhiyin yang ingin membantu membuatkan alat-alat pengenalan tersebut secara sukarela.<sup>48</sup>

### **Penggunaan anggaran**

Penggunaan anggaran penting untuk direncanakan supaya dana yang dikeluarkan itu berguna untuk proses pemenangan. Penggunaan anggaran itu antara lain *pertama*, untuk biaya pengadaan alat-alat pengenalan. *Kedua*, biaya pertemuan atau rapat. *Ketiga*, gaji para staf dan sukarelawan tim sukses. *Keempat*, biaya kunjungan ke daerah. *Kelima*, biaya operasional tim sukses di daerah.

Ketua tim sukses K.H. Yusuf Muhammad menyatakan bahwa ia mengaku telah menghabiskan dana sekitar Rp 200.000.000 sampai Rp 400.000.000 untuk mensukseskan terpilihnya K.H. Sofyan Yahya pada pemilu DPD.<sup>49</sup> Pernyataan itu dibenarkan pula oleh K.H. Sofyan Yahya bahwa ia mengaku hanya menghabiskan

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan A.S. Padli pada tanggal 12 Desember 2006

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan K.H. Yusuf Muhammad pada tanggal 27 Januari 2007

dana sekitar Rp 400.000.000<sup>50</sup> Dana tersebut digunakan sebagaimana disebutkan di atas.

### **Kegiatan-Kegiatan Tim Sukses**

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tim sukses merupakan faktor penentu dalam keberhasilan mencapai kemenangan, sebab rencana yang baik dan anggaran yang besar akan menjadi *mubadzir* apabila tidak dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan yang serius dan terfokus. *Tahap pertama*, Kegiatan yang dilakukan tim sukses adalah memenuhi persyaratan administratif pencalonan kandidat sebagai peserta pemilu anggota DPD ke KPU Provinsi Jawa Barat. Tim sukses harus memenuhi persyaratan pendaftaran anggota DPD Jawa Barat yang harus didukung oleh 5000 pemilih. Pendaftaran dimulai pada tanggal 8 Juli sampai dengan 8 September 2003, jadi hanya memiliki waktu 3 (tiga) bulan. Persyaratan calon anggota DPD Jawa Barat pada waktu pendaftaran harus didukung minimal 5000 pemilih sesuai dengan Undang-undang Pemilu Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 11, yang menetapkan bahwa jumlah penduduk lebih dari 15.000.000 jiwa, seorang anggota DPD harus didukung 5000 pemilih.<sup>51</sup> Di samping itu dukungan pemilih harus tersebar minimal di 8 kabupaten/kota dari 25 kabupaten kota di Jawa Barat. K.H. Sofyan Yahya mendapatkan dukungan pada pencalonannya berjumlah 9.999 orang.

*Tahap kedua*, kegiatan yang dilakukan oleh tim sukses adalah mengikuti rapat-rapat dan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan oleh KPU. Kegiatan-kegiatan tersebut sebagaimana disebutkan di atas.

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan K.H. Sofyan Yahya pada tanggal 7 November 2006

<sup>51</sup> Lihat UU Pemilu Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 11

*Tahap ketiga*, kegiatan yang dilakukan tim sukses adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilih. K. H. Sofyan Yahya sebenarnya sudah dikenal oleh masyarakat Jawa Barat tetapi untuk menyakinkan bahwa ia mencalonkan anggota DPD tetap perlu dilakukan sosialisasi sebagai upaya penguatan.

K.H. Sofyan Yahya adalah Ketua Umum PW NU Jawa Barat. Selain itu, ia adalah seorang *mubaligh* (juru dakwah) yang sering diundang masyarakat untuk berkhotbah. Seluruh Jawa Barat pernah ia kunjungi untuk berdakwah sehingga nama Sofyan Yahya cukup dikenal oleh masyarakat. Tim sukses Sofyan Yahya yang sekaligus sebagai pengurus PW NU Jawa Barat tetap melakukan sosialisasi terutama kepada para ulama, pimpinan pondok pesantren dan pengurus NU di tingkat cabang dan ranting supaya mereka mengetahui ada perwakilan resmi dari NU dan mereka dapat memberikan dukungan terhadap pencalonannya.<sup>52</sup>

Sosialisasi dilakukan oleh tim sukses K.H. Sofyan Yahya sedangkan ia tidak secara langsung melakukan sosialisasi karena tabu bagi beliau untuk meminta jabatan. K.H. Sofyan Yahya mengatakan bahwa "haram hukumnya bagi ulama meminta-minta jabatan tetapi kalau diberikan amanah pantang seorang ulama untuk menolaknya apabila ia mampu melaksanakannya. Ia belum pernah datang ke KPU bahkan yang mendaftarkannya adalah pengurus NU dan yang menghadiri setiap pertemuan adalah pengurus NU."<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan A.S. Padli (tim sukses K.H. Sofyan Yahya) pada tanggal 12 Desember 2006

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan K.H. Sofyan Yahya pada tanggal 7 November 2006

### **Strategi Tim Sukses Mempengaruhi Pemilih**

Pemilu DPD merupakan pemilihan langsung sehingga yang menjadi peserta pemilu DPD adalah peserta pemilu perseorangan. Berbeda dengan pemilu DPR dan DPRD. Pemilu DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan secara proporsional sehingga yang menjadi peserta pemilu adalah partai politik. Dalam hal memperoleh dukungan politik misalnya, pada pemilu DPR dan DPRD mesin politik partailah yang lebih banyak berperan. Sementara dalam pemilu DPD, praktis tidak ada mesin politik yang tersedia sehingga dukungan politik lebih banyak mengandalkan ketokohan individu calon anggota DPD itu sendiri.

Faktor ketokohan calon anggota DPD yang menjadi andalan dalam pemilu DPD, maka setiap calon anggota DPD beserta tim suksesnya membutuhkan strategi yang tepat untuk meraih kesuksesan pemilu. Strategi tim sukses mempengaruhi pemilih merupakan usaha-usaha dari tim sukses atau calon anggota DPD untuk mengerahkan segenap kemampuan dan potensi serta kekuatan yang dimiliki guna memenangkan kompetisi dalam pemilu. Memenangkan pemilu secara langsung berkaitan erat dengan optimalisasi mempengaruhi pemilih untuk menjatuhkan pilihan kepada calon yang bersangkutan pada hari pencoblosan. Dalam mempengaruhi pemilih tidak bisa hanya berspekulasi karena merasa populer atau mantan pejabat. Sebab popularitas dan jabatan bukan sesuatu yang mengikat sehingga orang belum tentu tertuju kepadanya, tetapi popularitas dan mantan pejabat merupakan bagian dari kredibilitas yang menunjang untuk mempercepat arus pengenalan pemilih kepada calon yang bersangkutan.

Mempertimbangkan faktor ketokohan atau popularitas individu dalam meraih dukungan politik ini. Qodari<sup>54</sup> menyebutkan lima kategori latar belakang calon anggota DPD yang berpeluang besar terpilih dalam kompetisi pemilu. *Pertama*, mantan pejabat karena nama mereka relatif dikenal luas oleh masyarakat. *Kedua*, pengusaha besar karena memiliki banyak dana dan karyawan yang dapat mereka mobilisasi. *Ketiga*, tokoh dari organisasi agama karena jenis organisasi yang paling banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia adalah organisasi agama. *Keempat*, figur yang merupakan tokoh etnis karena disokong oleh solidaritas emosional yang dibentuk oleh kesamaan identitas kesukuan. *Kelima*, veteran pengurus partai karena selain berpengalaman dalam membina konstituen dan menggalang dukungan, ia juga dapat memanfaatkan jaringan partainya untuk memobilisasi dukungan politik.

Dalam rangka mempengaruhi pemilih dipentingkan sebuah strategi dengan beberapa alasan antara lain *pertama*, untuk melakukan usaha konkrit bagi setiap kandidat untuk meraih dukungan suara pemilih. *Kedua*, sebagai fokus sasaran dalam kampanye sehingga ada segmen pemilih yang jelas. *Ketiga*, agar dapat memprediksi perolehan suara yang harus diraih. *Keempat*, untuk menindaklanjuti upaya-upaya konkrit pendekatan terhadap pemilih sehingga jelas pemilih mana yang harus disantuni dan didengar aspirasinya, dan *kelima*, memperjelas peta kekuatan politik yang dimiliki calon dan kekuatan pesaing politik lainnya.

Proses pemilu DPD yang berlangsung di Jawa Barat telah memunculkan sejumlah model pendekatan mempengaruhi pemilih yang dilakukan para calon

---

<sup>54</sup> Muhammad Qodari, Menghitung Peluang Calon Anggota DPD, dalam Harian Suara Pembaharuan, 22 April 2004.

anggota DPD dalam rangka menggalang dukungan suara. Setidaknya, ada empat pola pendekatan mempengaruhi pemilih yang dilakukan oleh para calon selama proses pemilu. *Pertama*, pendekatan melalui jalur solidaritas agama, pendekatan ini dilakukan oleh organisasi-organisasi keagamaan. *Kedua*, pendekatan melalui jalur solidaritas kedaerahan atau kekerabatan. *Ketiga*, pendekatan melalui jalur jaringan organisasi masyarakat atau LSM. *Keempat*, pendekatan dengan melakukan komunikasi politik yang intens dengan seluruh lapisan dan komponen masyarakat dengan menawarkan isu-isu spesifik untuk memperoleh dukungan politik.

### **Ginandjar Kartasasmita**

Strategi yang dilakukan Ginandjar Kartasasmita beserta tim suksesnya dalam rangka meraih simpati pemilih diantaranya dengan melakukan beberapa pendekatan antara lain; pendekatan keagamaan, pendekatan kedaerahan dan kekerabatan, pendekatan organisasi dan LSM serta pendekatan komunikasi langsung dengan masyarakat pemilih.

### **Pendekatan Keagamaan**

Pendekatan keagamaan dimaksud adalah calon anggota DPD Jawa Barat melakukan pendekatan kepada pemilih melalui lembaga-lembaga keagamaan, tokoh-tokoh agama dan forum-forum keagamaan. Ginandjar Kartasasmita beserta tim suksesnya melakukan pendekatan kepada pemilih dengan pendekatan

keagamaan, di antaranya melalui lembaga-lembaga keagamaan dan tokoh-tokoh agama.

Ginandjar Kartasasmita beserta tim suksesnya melakukan silaturahmi dan memberikan bantuan kepada beberapa tokoh agama dan pondok pesantren seperti kunjungan dan memberikan bantuan kepada K.H. Abdullah Syafi'i pimpinan pondok pesantren Ummul Qura Sumedang, K.H. Ilyas Ruhayat pimpinan pondok pesantren Cipasung Tasikmalaya, K.H. Irfan Hilmi pimpinan pondok pesantren Darussalam Ciamis, K.H. Musyadad pimpinan pondok pesantren Musyadadiyah Kabupaten Garut, K.H. Ceng Nuh pimpinan pondok pesantren Gentur Kabupaten Cianjur, K.H. Ahmad Sanusi pimpinan pondok pesantren Gunung Puyuh Sukabumi dan K.H. Totoh Abdul Fatah pimpinan pondok pesantren Al-Jawami Bandung.<sup>55</sup>

Dalam silaturahmi kepada tokoh-tokoh agama dan pondok pesantren tersebut ada dilakukan langsung oleh Ginandjar Kartasasmita, ada pula yang diwakili oleh tim suksesnya. Dalam kunjungan kepada setiap pondok pesantren senantiasa dilakukan dialog dengan para kiai tentang perkembangan bangsa dengan menekankan pentingnya lembaga DPD dalam sistem keparlemen di Indonesia. Ginandjar melakukan hal ini bukan saja ingin memperoleh simpati dari para kiai dan masyarakat pemilih tetapi hal tersebut dilakukan sekaligus memberikan informasi perkembangan bangsa dan pendidikan politik kepada para

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan H. Syafi'i pada tanggal 13 Desember 2006 di Kantor PB Paguyuban Pasundan

tokoh agama tersebut, sehingga peran dan kiprah para kiai dalam percaturan bernegara tetap diharapkan oleh bangsa ini.<sup>56</sup>

### **Pendekatan Kedaerahan dan Keekerabatan.**

Pendekatan kedaerahan dan keekerabatan dimaksud adalah mempengaruhi pemilih dengan pendekatan kedaerahan dan kekeluargaan atau persahabatan. Model ini digunakan oleh Ginandjar Kartasasmita. Pendekatan kedaerahan atau tempat kelahiran dan tempat asal tinggal menjadi prioritas utama dalam peraihan suara dengan cara membentuk opini putra daerah Sumedang. Opini tersebut berhasil membentuk fanatisme kedaerahan sehingga masyarakat Sumedang merasa berkewajiban untuk mendukung putra terbaik Sumedang Ginandjar Kartasasmita.

Masyarakat Kabupaten Sumedang senantiasa berkeyakinan bahwa putra-putra terbaik Sunda selalu berasal dari Sumedang. Oleh karena harus ada perwakilan dari Sumedang. Tokoh-tokoh nasional yang berasal dari Sumedang antara lain, Umar Wirahadikusumah (mantan Wakil Presiden RI), Amir Mahmud (mantan Menteri Dalam Negeri) Yogi S. Memet (mantan Menteri Dalam Negeri), Muhtar Kusumaatmadja (mantan Menteri Luar Negeri, dan Solihin GP (mantan Gubernur Jawa Barat).

Kemenangan Ginandjar diperoleh di daerah tempat tinggalnya Kabupaten Sumedang yang merupakan wilayah tempat tinggal nenek moyangnya dan sekarang masih banyak saudara-saudaranya yang tinggal di Kabupaten Sumedang. Ia memperoleh suara di Kabupaten Sumedang dengan jumlah 168.566 suara atau

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Nugroho Besoes pada tanggal 15 November 2006 di Kantor PSSI Jakarta

28,4% mengungguli jauh dari kompetitor politik lainnya, disusul di urutan kedua oleh Mohammad Surya dengan memperoleh suara 50.861 suara atau 8,6% dari jumlah pemilih yang mencoblos pada pemilu 2004 sebanyak 594.134 pemilih.

Kabupaten Sumedang juga merupakan basis dari perkembangan NU bahkan merupakan pusat perkembangan Islam di daerah Priangan dengan kerajaan Islam Sumedanglarang di bawah kekuasaan Cirebon yang secara tradisi keagamaan sangat relevan dengan tradisi NU sehingga sering dikatakan basis NU. Selain itu, banyak pondok pesantren yang bermodelkan tradisi NU di Kabupaten Sumedang. Tetapi memposisikan K.H. Sofyan Yahya dalam urutan kelima dengan perolehan suara 28.905 suara atau 4,9%. Peraih suara terbanyak ketiga adalah Popong Otje Djundjuran memperoleh 31.738 suara atau 5,3%, keempat Mubiar Purwasasmita memperoleh 29.482 suara atau 4,9%. Sedangkan Pangeran Arief Natadiningrat berada pada urutan keenam dengan perolehan suara 21.473 atau 3,6%.

Ginandjar Kartasasmita juga menang di daerah Bandung sebagai tempat kelahirannya. Di Kota Bandung ia memperoleh 164.975 suara atau 13,8% dari jumlah pemilih yang mencoblos pada pemilu 2004 sebesar 1.193.425 pemilih. Di Kabupaten Bandung Ginandjar Kartasasmita memperoleh 223.835 suara atau 10,5% dari jumlah pemilih yang mencoblos pada pemilu 2004 sebesar 2.134.482 pemilih. Begitu pula kemenangan suara terbanyak di raih Ginandjar Kartasasmita di Kota Cimahi. Kota Cimahi adalah Kota pemekaran dari Kabupaten Bandung. Ginandjar Kartasasmita memperoleh 40.395 suara atau 16,8% dari jumlah pemilih yang mencoblos di Kota Cimahi pada pemilu 2004 sebesar 241.145 pemilih.

Kota Bandung merupakan kota yang diperebutkan oleh sebagian besar anggota DPD, karena banyak anggota DPD bertempat tinggal di Kota Bandung dengan jumlah pemilih sekitar 1.620.217 pemilih. Calon anggota DPD yang bertempat tinggal di Kota Bandung sebanyak 18 orang atau 42,9% di antaranya, K.H. Sofyan Yahya, Dindin S. Maolani, Sidiq Aminullah, Muhammad Taufiq Ridha, H.D. Sutisno, Mohammad Surya, Mubiar Purwasasmita, Walid Syaikhun, Sanusi Uwes, Karna Suwanda, Paskah Irianto, Agus Muhyidin, Nanang Iskandar Ma'soem, Yuyu Udin, Dudi S. Sutandi, Rosyidi Ranggawidjaya, Ahmad Hanafiah, Popong Otje Djundjunan.

### **Pendekatan Organisasi dan LSM**

Pendekatan organisasi dan LSM dimaksud adalah calon anggota DPD Jawa Barat menggunakan ikatan organisasi secara struktural untuk mendekati pemilih terutama anggota organisasi yang bersangkutan. Ikatan organisasi merupakan salah satu pendekatan yang efektif untuk menarik pemilih dan dapat menyebarkan atribut calon secara cepat ke seluruh daerah yang terdapat cabang atau ranting organisasi tersebut.

Pentingnya organisasi kemasyarakatan menjadi salah satu strategi pendekatan terhadap pemilih dengan beberapa alasan antara lain, *pertama*, organisasi memiliki struktur dari tingkat pusat sampai ke tingkat kecamatan bahkan desa sehingga memungkinkan informasi tentang calon cepat menyebar ke tingkat lapisan yang paling bawah. *Kedua*, pendekatan melalui organisasi kemasyarakatan bisa lebih efektif dan efisien dalam melakukan penggalangan pemilih sebab, di samping memiliki struktur yang jelas juga memiliki personil

yang dapat dikontrol dari pusat. *Ketiga*, pendekatan melalui jalur organisasi kemasyarakatan akan melahirkan ikatan yang kuat bagi pengurus dan anggota dengan berdasarkan keputusan organisasi atau ikatan emosional keorganisasian untuk mengikat anggota, partisipan dan pengikut organisasi tersebut sehingga muncul arogansi dan fanatisme keorganisasian. *Keempat*, dengan pendekatan organisasi kemasyarakatan tidak perlu membentuk struktur dan personil tim sukses baru cukup melalui jalur organisasi tersebut sehingga bisa otomatis pengurus sekaligus tim sukses calon anggota DPD yang bersangkutan. *Kelima*, pendekatan organisasi kemasyarakatan untuk calon anggota DPD yang bersangkutan telah mendapat langsung kepastian suara terutama dari pengurus dan anggota organisasi tersebut sebagai modal awal perolehan suara, tinggal mencari tambahan suara pemilih dari elemen-elemen masyarakat pemilih lainnya.

Pendekatan organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh seluruh anggota DPD Jawa Barat yang menang dalam pemilu 2004. Ginandjar Kartasasmita menggunakan organisasi Paguyuban Pasundan.<sup>57</sup> Paguyuban Pasundan merupakan organisasi kesukuan Sunda terbesar di Jawa Barat. Paguyuban Pasundan yang berdiri sebelum kemerdekaan yaitu di zaman kolonialisme Belanda pada tahun 1914 dengan dinamika organisasi sebagaimana di bahas dalam bab III tentang organisasi sebagai basis dukungan.

Kantor Pengurus Besar (PB) Paguyuban Pasundan bertempat di Bandung tepatnya di Jl. Sumatra Nomor 13 Bandung. Paguyuban Pasundan memiliki cabang sebanyak 34 cabang yang terbagi kepada tiga provinsi yakni Provinsi Jawa

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Iyus Rustandi pada tanggal 29 November 2006

Barat, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten. Ketiga provinsi ini merupakan wilayah orang-orang Sunda dan dalam sejarahnya senantiasa di bawah kekuasaan kerajaan Sunda.<sup>58</sup> Namun sekarang secara administratif pemerintahan telah terpisah menjadi provinsi yang berbeda sedangkan organisasi Paguyuban Pasundan telah lebih dulu berdiri maka batasan administratif tidak menghalangi roda organisasi Paguyuban Pasundan. Dengan demikian organisasi Paguyuban Pasundan tidak berdasarkan provinsional tetapi lebih dikarenakan kesukuan Sunda.<sup>59</sup>

Paguyuban Pasundan di Provinsi DKI Jakarta memiliki 5 cabang, di provinsi Banten terdapat 7 cabang dan di Provinsi Jawa Barat terdapat 22 cabang. Di Provinsi Jawa Barat yang belum berdiri cabang di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu dari 25 kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat. Dari 34 cabang tersebut terbagi kepada 7 Komisararis Daerah (Komda) yaitu Komda DKI, Komda Bogor, Komda Purwakarta, Komda Priangan Barat dan Komda Priangan Timur. Di bawah organisasi cabang yang merupakan organisasi di tingkat kabupaten/kota terdapat organisasi di bawahnya yaitu organisasi di tingkat kecamatan yang disebut organisasi anak cabang dengan jumlah 492 anak cabang.<sup>60</sup>

Dengan 22 cabang dan 492 anak cabang di Provinsi Jawa Barat menjadikan organisasi Paguyuban Pasundan sebagai media mobilisasi pemilih yang efektif

---

<sup>58</sup> Lihat disertasi ini bab II tentang profil Jawa Barat, struktur kekuasaan di Jawa Barat dan Bab III tentang sejarah berdirinya Paguyuban Pasundan

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan H.Syafi'I bertempat Gedung PB Paguyuban Pasundan pada tanggal 13 Desember 2006

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Kabag TU Paguyuban Pasundan di Gedung PB Paguyuban Pasundan pada tanggal

dalam pemilu anggota DPD yang dimanfaatkan kandidat yang didukung Paguyuban Pasundan secara organisatoris yakni Ginandjar Kartasasmita. Ginandjar Kartasasmita dengan namanya yang cukup populer sebagai politisi partai Golkar sebagaimana dibahas dalam bab III ditambah yang menyokong pencalonannya adalah organisasi yang cukup besar di Jawa Barat yakni Paguyuban Pasundan maka semakin kuatlah posisi Ginandjar Kartasasmita untuk memenangkan pemilihan anggota DPD Jawa Barat. Hal ini terbukti dengan perolehan suara yang mengungguli calon-calon lainnya. Ia keluar sebagai peraih suara terbesar di Jawa Barat dari 42 calon anggota DPD dengan mengantongi suara berjumlah 1.869.767 suara atau 9,83% dari jumlah pemilih yang sah 19.030.245 pemilih. Nugraha Besoes mengatakan bahwa perolehan itu masih di bawah target, sebenarnya Ginandjar di rugikan oleh KPU Provinsi karena mencantumkan foto yang berbeda dengan yang diajukan oleh tim sukses sehingga, foto yang disebarakan berbeda dengan foto yang ada pada kartu suara, begitu juga menuliskan nama pak Ginandjar salah pada kartu suara, jadi dengan peristiwa tersebut Pak Ginandjar merasa dirugikan dengan berdampak turunnya suara pak Ginandjar.<sup>61</sup>

Ginandjar Kartasasita menang di 11 Kabupaten/kota yang berada di Jawa Barat dan kebanyakan di kota-kota besar antara lain di kota kelahirannya yakni di Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi sebagaimana disebutkan di atas.

---

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Nugraha Besoes pada tanggal 15 November 2006. Keberatan itu dimuat juga dalam Harian Pikiran Rakyat edisi 20 Maret 2004 dengan ungkapan Ginandjar protes KPU soal foto dan namanya. Protes itu dilakukan oleh Ginandjar yang diwakili tim suksesnya Nugraha Besoes dengan lontara keberatan sebagaimana di sebutkan di atas.

Selain itu, Ginandjar Kartasasmita memperoleh kemenangan di Kota Sukabumi dengan perolehan suara sebanyak 16.081 suara atau 11,96%, disusul Mohammad Surya memperoleh 12.076 suara atau 8,98%. Di Kabupaten Sukabumi Ginandjar Kartasasmita menduduki posisi ketiga dengan perolehan suara 68.639 atau 6,9%, posisi pertama diraih Mohammad Surya dengan memperoleh 122.265 suara atau 12,3%.

Kemenangan Ginandjar Kartasasmita selanjutnya di Kota Bogor dengan memperoleh 59.154 suara atau 14,4% dari jumlah pemilih yang mencoblos pada pemilu 2004 sebanyak 412.168 pemilih. Disusul Pangeran Arief Natadiningrat dengan memperoleh 25.203 suara atau 6%. Sedangkan dalam wilayah yang sama yakni di Kabupaten Bogor, Ginandjar Kartasasmita mengalami kekalahan dengan memperoleh 138.687 suara atau 8,4%, Kabupaten Bogor dimenangkan Pangeran Arief Natadiningrat dengan memperoleh 144.760 suara atau 8,8% dari jumlah pemilih yang mencoblos pada pemilu 2004 sebanyak 1.653.885 pemilih.

Kabupaten/Kota yang dimenangkan Ginandjar Kartasasmita selain yang disebutkan di atas antara lain di Kota Depok. Ia memperoleh 79.286 suara atau 12% dari jumlah pemilih 656.536 orang. Disusul pada urutan suara terbanyak kedua Taufiq Ridha dengan perolehan suara 71.194 atau 10,8%, Pangeran Arief Natadiningrat yang menduduki posisi ketiga dengan memperoleh 35.754 suara atau 5,4%, Popong Otje Djundjungan memperoleh 33.885 suara atau 5,2%, Mohammad Surya memperoleh 33.575 suara atau 5% dan K.H. Sofyan Yahya memperoleh 26.390 suara atau 4%.

Di Kota Bekasi Ginandjar Kartasasmita dapat mengungguli lawan-lawan politiknya dengan perolehan suara 109.568 atau 12,5% suara dari jumlah pemilih yang mencoblos sebanyak 876.799 pemilih. Pada urutan selanjutnya disusul Taufiq Ridha memperoleh 83.417 suara atau 9,5%, Popong Otje Djundjuran memperoleh 54.744 suara atau 6,2%, Pangeran Arief Natadiningrat memperoleh 52.217 suara atau 5,9%, Zaenal Muttaqin memperoleh 41.764 suara atau 4,8%, K.H. Sofyan Yahya memperoleh 28.450 suara atau 3,2% dan Mohammad Surya memperoleh 26.436 suara atau 3%.

Begitu pula di Kabupaten Bekasi, Ginandjar Kartasasmita mengungguli lawan-lawannya dengan memperoleh 76.852 suara atau 8,6% meninggalkan jauh pesaing-pesaingnya. Disusul Taufiq Ridha memperoleh 65.692 suara atau 7,3%, Pangeran Arief Natadiningrat memperoleh 61.316 suara atau 6,8%, Popong Otje Djundjuran memperoleh suara 54.265 suara atau 6,1%, Walid Syaikhun memperoleh 49.970 suara atau 5,6%, Mohammad Surya memperoleh 41.277 suara atau 4,6% dan K.H. Sofyan Yahya memperoleh 31.068 suara atau 3,5%.

Di Kabupaten yang berdampingan dengan Bekasi adalah Kabupaten Karawang, Ginandjar Kartasasmita juga memperoleh 76.399 suara atau 7,7% dari jumlah pemilih yang mencoblos sebanyak 991.871 pemilih. Pangeran Arief Natadiningrat memperoleh 57.803 suara atau 5,8%, K.H. Sofyan Yahya memperoleh 38.019 suara atau 3,8% dan Mohammad Surya memperoleh 27.614 suara atau 2,8%.

Kabupaten Karawang merupakan kabupaten dengan sarat persaingan yang ketat. Di Kabupaten Karawang terdapat tokoh nasional yakni Jenderal Tayo

Tarmadi (mantan anggota MPR RI dan mantan Pangdam III Siliwangi). Ia pernah mencalonkan Gubernur Jawa Barat pada tahun 2003 yang didukung PKB dan PDIP tetapi kalah dari calon yang diusung Golkar dan PPP yakni Gubernur sekarang, Dani Setiawan. Tayo Tarmadi didukung Bupati Karawang dalam pencalonan menjadi anggota DPD dengan mengeluarkan surat resmi dukungan kepadanya. Bupati Karawang menyerukan seluruh elemen masyarakat Karawang agar mendukung pak Tayo. Surat dukungan itu bernomor 270/2/752 –Bup, perihal pemberian dukungan keanggotaan DPD, yang di tujukan kepada para camat, kepala desa/lurah di Kabupaten Karawang. Surat dukungan tersebut menjadikan Tayo Tarmadi unggul di Karawang dengan memperoleh 189.521 suara atau 14,6%.

Kabupaten Karawang juga merupakan salah satu daerah basis NU, karena karawang merupakan pintu masuk pertama masuknya Islam dan berdirinya pesantren pertama di Jawa Barat yaitu pesantren Quro yang dipimpin Syekh Hasanuddin atau dipanggil dengan nama Syekh Quro pada abad ke-14 sebagaimana di jelaskan dalam bab II tentang awal masuknya Islam di Jawa Barat. Basis NU Karawang tidak menjadikan suara K.H. Sofyan Yahya lebih dominan bahkan ia berada di urutan ke tiga dengan memperoleh 38.353 suara atau 3,8%. Besar kemungkinan NU di Karawang terpecah karena lebih mendukung Tayo Tarmadi yang pernah dekat dengan beberapa sesepuh NU di Karawang sewaktu ia akan mencalonkan Gubernur Jawa Barat atau mungkin juga karena ada beberapa calon yang mengatasnamakan NU sebagaimana di sebutkan di atas.

Selanjutnya, Kemenangan Ginandjar di peroleh di Kabupaten Ciamis dengan perolehan suara mengungguli jauh lawan-lawan politiknya dengan perolehan suara 155.531 atau 18,4% suara dari jumlah pemilih yang mencoblos pada tanggal 5 April 2004 sebanyak 847.261 pemilih. Disusul pada urutan kedua oleh K. H. Sofyan Yahya dengan memperoleh suara berjumlah 66.633 suara atau 7,9%, Mohammad Surya memperoleh 59.021 suara atau 6,96%, Pangeran Arief Natadiningrat memperoleh 52.964 suara atau 6,3%.

Kabupaten Ciamis merupakan kabupaten kelahiran dan tempat tinggal ketua tim sukses Ginandjar Kartasasmita yakni Nugraha Besoes sehingga kemenangan Ginandjar di Ciamis merupakan bagian dari reputasi Nugraha Besoes. Di samping itu istri Nugraha Besoes mencalonkan anggota DPR RI dari Ciamis yang berada pada urutan ke-2 dari Partai Golkar. Istri pak Nugraha memperoleh kursi DPR RI dari Ciamis untuk periode 2004-2009.

Selain itu, Kabupaten Ciamis merupakan daerah nenek moyang dari Ginandjar Kartasasmita sehingga masih banyak sanak famili Ginandjar di Ciamis sebab sejarah menak Ciamis yang berasal dari Kerajaan Galuh senantiasa berkolaborasi dengan Kerajaan Sumedanglarang yang pada waktu itu menjadi kerajaan terbesar di Priangan setelah runtuhnya Kerajaan Galuh. Kerjasama itu dilakukan untuk menghadapi ekspansi Kesultanan Cirebon yang ingin menghancurkan sisa-sisa Kerajaan Padjadjaran yang pada waktu itu Kerajaan Sumedanglarang mendeklarasikan Sumedanglarang sebagai penerus Kerajaan Padjadjaran, kemudian hubungan itu berdampak adanya hubungan baik antara

menak Ciamis dengan menak Sumedang sebagaimana di uraikan dalam bab II tentang menak di Jawa Barat.

Pada masa sekarang hubungan itu masih terjalin dengan baik. Hal itu terbukti ketika pemilihan Bupati Ciamis pada tahun 2003, di mana tokoh-tokoh Ciamis dan ulama-ulama Ciamis menolak pencalonan kembali Ketua Umum DPD Golkar Ciamis menjadi Bupati yang kedua kalinya yakni Omo Supadmo. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah Ginandjar Kartasasmita dan Solihin GP yang keduanya berasal dari Sumedang. Perkumpulan itu berhasil menghadang pencalonan Omo Supadmo bahkan sekarang Omo Supadmo menjadi terdakwa kasus korupsi APBD Ciamis.

Kemenangan terakhir Ginandjar Kartasasmita adalah di Kota Banjar. Kota Banjar merupakan kota termuda yang ditetapkan pada tahun 2002 sebagai kota pemekaran dari Kabupaten Ciamis, jadi besar kemungkinan masih terkait dengan peta politik Ciamis. Ginandjar Kartasasmita memperoleh suara mayoritas yakni 35.904 suara atau 40,5% dari jumlah pemilih yang mencoblos sebanyak 88.675 pemilih. Disusul pada urutan kedua yakni Pangeran Arief Natadiningrat memperoleh 4.678 suara atau 5,3%, K.H. Sofyan Yahya memperoleh 4.220 suara atau 4,8% dan Mohammad Surya memperoleh 2.635 suara atau 2,97%.

Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar merupakan daerah yang kuat ke-Islamannya terbukti dengan banyaknya pondok pesantren, tetapi yang lebih berkembang adalah Islam yang tidak terkotak-kotak oleh organisasi keagamaan walaupun banyak pesantren bertradisi NU tetapi tidak melahirkan arogansi ke-NU-an bahkan pesantren terbesar di Ciamis adalah pesantren Darus Salam yang

dipimpin oleh K.H. Irfan Hilmi merupakan pesantren yang mengkader seluruh organisasi keagamaan. Hal ini terbukti dengan alumninya yang aktif di seluruh organisasi keagamaan bahkan mungkin yang terbanyak di organisasi keagamaan Muhammadiyah. Sebagian besar pimpinan pesantren di Ciamis dan Banjar adalah alumni Darus Salam. Darus Salam merupakan salah satu pesantren unggulan pada waktu Menteri Agama Munawir Sadjali tahun 1988-1993 dengan membentuk Madrasah Aliyah Pendidikan Khusus (MAPK) sampai sekarang masih ada. K.H. Irfan Hilmi secara politik merupakan tokoh Golkar. Ia pernah aktif semasa Sekber Golkar dan ia pernah menjadi anggota MPR/DPR RI dari Golkar. Pencalonan Ginandjar Kartasasmita didukung oleh K. Irfan,<sup>62</sup> sehingga bisa saja pengaruh K. Irfan Hilmi kemenangan telak Ginandjar Kartasasmita di kedua Kabupaten/Kota tersebut.

#### **Pendekatan komunikasi politik langsung dengan masyarakat pemilih.**

Pendekatan komunikasi langsung dengan seluruh elemen masyarakat dilakukan oleh seluruh kandidat anggota DPD Jawa Barat dengan mengambil isu-isu yang rasional dan spesifik. Mobilisasi ini terutama dilakukan pada masa-masa kampanye karena kampanye yang dilakukan oleh calon anggota DPD kebanyakan tidak menggunakan pawai, iring-iringan dan pengumpulan massa yang bersifat keramaian. Kampanye politik anggota DPD lebih difokuskan kepada dialog-dialog dengan seluruh elemen masyarakat.

Pendekatan dengan model komunikasi langsung lebih menjadikan pendidikan politik yang positif dan konstruktif kepada masyarakat dengan mengajak

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Nugraha Besoes pada tanggal 15 November 2006

masyarakat pemilih untuk berpikir secara jernih dan rasional untuk pengembangan bangsa khususnya Provinsi Jawa Barat. Isu yang dikembangkan oleh masing-masing kandidat anggota DPD sesuai dengan visi dan misi yang akan mereka kembangkan dalam lembaga DPD apabila terpilih. Ginandjar Kartasasmita, Guru Besar Ilmu Administrasi merumuskan visinya sebagai anggota DPD yakni mewujudkan lembaga perwakilan yang berwibawa, kuat, modern dan mampu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dan daerah dalam bingkai NKRI. Selain itu, visi beliau adalah mewujudkan kehidupan masyarakat dan daerah yang demokratis, maju, sejahtera, dan adil.

Ginandjar Kartasasmita sebagai salah satu Wakil Ketua MPR RI yang pada massanya melahirkan lembaga DPD dalam keanggotaan MPR RI, sangat mengetahui benar ke mana arah dari DPD dan apa yang melatarbelakangi lahirnya DPD, sehingga ia tidak mendapatkan kesulitan yang berarti, ketika harus memaparkan apa DPD dan bagaimana DPD kepada konstituennya. Pemikiran tersebut disampaikannya ketika menghadiri seminar kelembagaan negara yang diadakan Universitas Pasundan (Unpas) di kampus Unpas yang dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat mulai dari cendikiawan, tokoh organisasi kemasyarakatan, LSM dan mahasiswa. Kegiatan ini dilakukan pada waktu sebelum pemilu tepatnya pada tanggal 22 Oktober 2003.<sup>63</sup>

Begitu pula Ginandjar dapat memaparkan dengan jelas manfaat dari lahirnya DPD untuk pengembangan daerah-daerah di Indonesia khususnya di Jawa Barat kepada masyarakat pemilih ketika waktu massa kampanye. Ia

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Nugraha Besoes pada tanggal 15 November 2006

memaparkan pentingnya DPD dengan mengkaitkan misi Ginandjar ikut mencalonkan anggota DPD yang relatif diadakan kampanye secara dialogis seperti yang dilakukanya di GOR Saparua Bandung. Ia memaparkan misinya sebagai anggota DPD adalah *pertama*, meningkatkan akomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat dan daerah menjadi kebijakan dan putusan di tingkat nasional (pusat). *Kedua*, mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan daerah dalam pembangunan daerah dan nasional, mengembangkan demokrasi di tingkat daerah dan nasional, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dan daerah dalam pembangunan dan menjaga keutuhan NKRI. Dan *ketiga*, mengupayakan agar putusan dan kebijakan nasional (pusat) senantiasa sejalan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat dan daerah.<sup>64</sup>

Dengan kerangka berpikir seperti itu, Ginandjar Kartasasmita nampak menunjukkan jiwa nasionalismenya sebagai warga Sunda yang telah lama berkiprah di pentas nasional sehingga ia lebih menonjolkan aspek nasionalisme dengan selalu mengumandangkan pentingnya DPD dalam wadah NKRI. Demokratisasi yang dikemas Ginandjar adalah dengan menumbuhkan potensi daerah dan mewujudkan hubungan yang baik antara pusat dan daerah dengan berkerangka aspirasi daerah sebagai tonggak kebijakan nasional menunjukkan bahwa ia lebih mendorong demokratisasi yang ideal untuk Indonesia. Isu lain yang ditonjolkan oleh Ginandjar Kartasasmita adalah pengembangan sektor ekonomi yang berprinsip pada pengentasan kemiskinan, pengembangan pendidikan dan keadilan.

---

<sup>64</sup> *Ibid*



### **Pengeran Arief Natadiningrat**

Strategi yang dilakukan Pangeran Arief Natadiningrat beserta tim suksesnya dalam rangka meraih simpati pemilih di antaranya dengan melakukan beberapa pendekatan antara lain; pendekatan keagamaan, pendekatan kedaerahan dan kekerabatan, pendekatan organisasi serta pendekatan komunikasi langsung dengan masyarakat pemilih.

### **Pendekatan keagamaan**

Pangeran Arief Natadiningrat beserta tim suksesnya melakukan pendekatan keagamaan dalam upaya meraih suara masyarakat pemilih. Hal tersebut dilakukan karena Pangeran Arief masih melihat bahwa eksistensi para tokoh agama dan pendekatan forum-forum keagamaan masih kuat pengaruhnya di tengah masyarakat Jawa Barat. Oleh karenanya pendekatan tersebut tidak bisa dilewatkan. Di daerah Cirebon saja apabila berkaitan dengan hari besar Islam seperti Maulid Nabi dan Isra Mi'raj senantiasa ramai dikunjungi masyarakat Cirebon.<sup>65</sup>

Tokoh-tokoh agama Cirebon sepakat mendukung pencalonan Pangeran Arief Natadiningrat seperti Ketua PC NU Kota Cirebon, Ketua PC NU Kabupaten Cirebon, pimpinan pondok pesantren Ciwaringin dan Buntet yang merupakan pondok pesantren terbesar di Cirebon. Melalui para tokoh tersebut Pangeran Arief mengajak pemilih untuk mendukung pencalonannya. Sehingga hal tersebut berdampak pada turunnya suara K.H. Sofyan Yahya di wilayah Cirebon.

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Pangeran Arief Natadiningrat pada tanggal 7 November 2006 di Kantor DPD RI Jakarta

Pimpinan pondok pesantren Ciwaringin dan Pesanten Buntet bahkan menyanggupi untuk menyebarkan brosurnya kepada murid-muridnya yang tersebar di Jawa Barat. Pesantren Ciwaringin telah melahirkan banyak ulama dan pemimpin pondok di berbagai daerah seperti pesantren al-Falah di Sukabumi, pesantren Al-Bayan di Bandung dan pesantren As-Salam di Depok. Para pemimpin pesantren tersebut sering berkunjung ke Ciwaringin untuk bersilaturahmi. Begitu pula dengan pesantren Buntet telah melahirkan beberapa ulama seperti pimpinan pondok pesantren An-Nur di Cianjur, pesantren Al-Kutub di Bogor dan pesantren Ibn Sabil di Bekasi.<sup>66</sup>

Pangeran Arief senantiasa diuntungkan karena beliau masih keturunan Sunan Gunung Djati sehingga apabila bertepatan dengan hari-hari besar banyak yang berkunjung ke keraton, baik negararawan maupun para ulama sehingga ia banyak mengenal ulama di Jawa Barat dari pertemuannya di Keraton Kasepuhan, di mana para ulama senantiasa meminta ijin untuk berziarah di makam Sunan Gunung Djati. Dari perkenalan-perkenalan itulah pangeran Arief mengetahui dari mana saja para ulama yang datang. Kemudian pada waktu pemilu DPD, Pangeran Arief atau tim suksesnya mengunjungi pesantren/ulama yang bersangkutan.

Para Kiai/ulama yang Pangeran Arief datangi antara lain pesantren Cikalama Sumedang yang dipimpin K.H. Enjang, beliau memiliki santri sekitar 5000 santri dari berbagai penjuru Jawa Barat. Pesantren Nurul Yakin di Kabupaten Bandung yang dipimpin K.H. Ahmad Sadeli, Pesantren Darut Thalib di Sukabumi yang dipimpin K.H. Daruqutni, Pesantren Mutmainnah di Bogor yang dipimpin Habib

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Pangeran Arief Natadiningrat pada tanggal 7 November 2006 di Kantor DPD RI Jakarta

Umar, Pesantren Suryalaya Tasikmalaya yang dipimpin K.H. Abah Anom. Ia adalah pemimpin tarekat Qadariah Naqsabandiyah. Pesantren Darul Muttaqin Bekasi yang dipimpin Habib Husein al-Jurjawi dan Pesantren Al-Munawir di Garut yang dipimpin K.H. Nuruddin.<sup>67</sup>

Pertemuan dengan beberapa ulama tersebut Pangeran Arief memberikan bantuan untuk pembangunan atau renopasi bangunan pesantren yang diberikan melalui para kiai tersebut. Bantuan yang diberikan rata-rata sekitar Rp. 5.000.000, selain itu Pangeran Arief memohon dukungan kepada para kiai tersebut atas pecalonan pada pemilu DPD. Pada pertemuan tersebut juga menitipkan atribut Pangeran Arief untuk disebarakan kepada jama'ah atau santri seperti buku saku visi dan misi, striker dan brosur.

Selain kiai yang didatangi langsung oleh Pangeran Arief terdapat pula beberapa pondok pesantren yang dikunjungi oleh beberapa utusan dari pangeran Arief. Hal tersebut dilakukan karena waktu yang terbatas serta padatnya jadwal agenda pangeran Arief, sehingga kedatangan pangeran Arief ke beberapa pondok pesantren cukup diwakili oleh tim sukses yang membawa pesan dari pangeran Arief beserta atribut-atribut pangeran Arief yang diminta untuk disebarakan kepada jama'ah atau masyarakat sekitar. Pesan yang dibawa oleh utusan pangeran Arief adalah mohon doa dan dukungannya atas pencaloan Pangeran Arief pada pemilu DPD. Atribut yang diberikan seperti buku saku visi dan misi pangeran Arief, brosur, dan striker.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Deni pada tanggal 17 Januari 2007

<sup>68</sup> *Ibid*

Kunjungan dan penyebaran tersebut memberikan dampak positif pada peraihan suara Pangeran Arief di berbagai Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang sering disebut daerah santri, seperti di Kabupaten Garut Pangeran Arief memperoleh 71.270 suara atau 6,6% dari jumlah pemilih yang datang ke TPS pada pemilu 2004 sebanyak 1.077.366 pemilih. Perolehan suara tersebut mampu menyaingi perolehan suara calon-calon anggota DPD dari Kabupaten Garut seperti Ahmad Zaky Sirodj (mantan anggota MPR RI periode 1999-2004) memperoleh 38.396 suara atau 3,6%, A.A. Dani Saliswijaya memperoleh 40.807 suara atau 3,8%, dan Samudi Bahrudin memperoleh 6.358 suara atau 0,6%.

Perolehan suara di Kabupaten Garut, walaupun tidak menjadikan Pangeran Arief sebagai peraih suara terbanyak tetapi perolehan tersebut cukup besar dibanding calon-calon lainnya. Pangeran Arief berada di posisi kelima peraih suara terbanyak di Kabupaten Garut. Peraih suara terbanyak di Kabupaten Garut adalah Mohammad Surya dengan perolehan suara 114.346 atau 10,6% suara, disusul K.H. Sofyan Yahya memperoleh 83.329 suara atau 7,7%, Sidiq Aminullah memperoleh 77.629 suara atau 7,2%, dan Ginandjar Kartasmita memperoleh 74.587 suara atau 6,9%.

Perolehan suara Pangeran Arief Natadiningrat di Kabupaten Tasikmalaya adalah 62.975 suara atau 7,5% dari jumlah pemilih yang datang ke TPS sebanyak 839.106 pemilih. Perolehan tersebut memposisikan Pangeran Arief sebagai peraih suara keempat terbanyak di Kabupaten Tasikmalaya. Peraih suara terbanyak adalah Mohammad Surya dengan memperoleh 172.651 suara atau 20,6%, disusul K.H. Sofyan Yahya memperoleh 102.644 suara atau 12,2%, Sidiq Aminullah

memperoleh 92.830 suara atau 11% dan Ginandjar Kartasasmita memperoleh 35.511 suara atau 4,2%.

Sedangkan di Kota Tasikmalaya Pangeran Arief memperoleh 14.540 suara atau 4,6% dari jumlah pemilih 316.967 yang mencoblos pada pemilu 2004. Perolehan tersebut memposisikan Pangeran Arief diposisi kelima peraih suara terbanyak di Kota Tasikmalaya. Peraih suara terbanyak adalah Sidiq Aminullah dengan perolehan suara 103.662 atau 32,7% suara, disusul K.H. Sofyan Yahya memperoleh suara 35.134 suara atau 11%, Ginandjar Kartasasmita memperoleh 27.933 suara atau 8,8% dan Mohammad Surya memperoleh 23.023 suara atau 7,3%.

Begitu pula di Kabupaten Ciamis Pangeran Arief memperoleh 52.964 suara atau 6,3% dari jumlah pemilih yang mencoblos sebanyak 847.261 pemilih. Perolehan tersebut memposisikan Pangeran Arief sebagai peraih suara terbanyak keempat di Kabupaten Ciamis. Peraih suara terbanyak adalah Ginandjar Kartasasmita dengan perolehan suara 155.531 atau 18,4%, disusul K.H. Sofyan Yahya memperoleh 66.633 suara atau 7,9%, Mohammad Surya memperoleh 59.021 suara atau 6,96%, Sidiq Aminullah memperoleh 42.281 suara atau 4,99%, Taufiq Ridha memperoleh 35.352 suara atau 4,2% dan Walid Syaikhun memperoleh 33.546 suara atau 3,95%.

Sedangkan di Kota Banjar Pangeran Arief memperoleh 4.678 suara atau 5,3% dari jumlah pemilih 88.675 orang yang mencoblos pada pemilu 2004 di Kota Banjar. Kota Banjar adalah pemekaran dari Kabupaten Ciamis. Perolehan suara tersebut memposisikan Pangeran Arief sebagai peraih suara terbanyak kedua

di Kota Banjar. Peraih suara terbanyak adalah Ginandjar Kartasasmita dengan perolehan suara 35.904 atau 40,5%, K.H. Sofyan Yahya memperoleh 4.220 suara atau 4,8%, Mubiar Purwasasmita memperoleh 3.955 suara atau 4,5%, Taufiq Ridha memperoleh 3.313 suara atau 3,7%, Walid Syaikhun memperoleh 3.038 suara atau 3,4%, Popong Otje Djundjuran memperoleh 2.925 suara atau 3,3%, Sidiq Aminullah memperoleh 2.964 suara atau 3,3% dan Mohammad Surya memperoleh 2.635 suara atau 2,97%.

#### **Pendekatan Kedaerahan dan Kekkerabatan.**

Pendekatan kedaerahan dan kekerabatan dimaksud adalah mempengaruhi pemilih dengan pendekatan kedaerahan dan kekeluargaan atau persahabatan. Model ini digunakan oleh keempat pemenang anggota DPD Jawa Barat. Pendekatan kedaerahan dapat terlihat bahwa keempat pemenang anggota DPD Jawa Barat menang di daerah kelahirannya masing-masing kecuali K.H. Sofyan Yahya.

Pangeran Arief Natadiningrat menang di Cirebon baik Kota Cirebon maupun Kabupaten Cirebon. Perolehan suara Pangeran Arief di Kota Cirebon meninggalkan jauh kompetitor lainnya dengan memperoleh 66.190 suara atau 47,7% dari jumlah pemilih yang mencoblos pada pemilu 2004 tanggal 5 April sebesar 138.798 pemilih. Disusul pada urutan kedua peraih suara terbanyak di Kota Cirebon adalah Ginandjar Kartasasmita memperoleh 7.384 suara atau 5,3%, Popong Otje Djundjuran memperoleh 5.685 suara atau 4,1%, Mohammad Surya memperoleh 5.302 suara atau 3,8%, Mubiar Purwasasmita memperoleh 4.332 suara atau 3,1%, Walid Syaikhun memperoleh 3.544 suara atau 2,6%, Taufiq

Rudha memperoleh 3.466 suara atau 2,5%, Sidiq Aminullah memperoleh 3.418 suara atau 2,5% dan K.H. Sofyan Yahya memperoleh 2.436 suara atau 1,8%.

Sedangkan di Kabupaten Cirebon Pangeran Arief Natadiningrat meraih suara terbanyak dengan perolehan suara sebesar 375.902 suara atau 39% dari jumlah pemilih yang mencoblos pada pemilu 2004 sebanyak 962.317 pemilih. Disusul Mubiar Purwasasmita memperoleh 57.894 suara atau 6%, K.H. Sofyan Yahya memperoleh 48.687 suara atau 5%, Mohamad Surya memperoleh 42.802 suara atau 4,4% dan Popong Otje Djundjuna memperoleh 33.712 suara atau 3,5%.

Cirebon merupakan basis NU terbesar tetapi tidak menempatkan posisi K.H. Sofyan Yahya sebagai peraih suara terbanyak, dari Cirebon banyak tokoh-tokoh NU dengan pesantren terbesar adalah pesantren Ciwaringin dan pondok pesantren Buntet yang banyak melahirkan ulama-ulama NU tingkat nasional seperti K.H. Said Agil Sirodj (Wakil Ketua PB NU sekarang).

Pengaruh ikatan ke-NU-an seperti tidak membekas di Cirebon dengan munculnya Pangeran Arief Natadiningrat yang ikut mencalonkan menjadi anggota DPD. Bahkan seluruh tokoh Cirebon baik Bupati/Walikota, tokoh-tokoh partai politik, LSM, organisasi-organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat memintanya untuk mencalonkan anggota DPD. Tokoh-tokoh tersebut berjuang untuk kemenangan Pangeran Arief sebagai simbol kebesaran daerah Cirebon.<sup>69</sup>

Kemenangan Pangeran Arief juga diperoleh di Kabupaten Indramayu. Kabupaten Indramayu merupakan Kabupaten yang berdampingan dengan Cirebon

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Pangeran Arief Natadiningrat pada tanggal 7 November 2006

bahkan antara Cirebon dengan Indramayu merupakan dua daerah yang memiliki kesamaan bahasa dan budaya. Bahasa di Cirebon dan Indramayu adalah campuran antara bahasa Sunda dan bahasa Jawa yang akhirnya melahirkan bahasa yang khas Cirebon-Indramayu karena dilihat dari Bahasa Sunda berbeda dengan Sunda Priangan begitu pula dengan bahasa Jawanya berbeda juga dengan bahasa Jawa yang berada di Jawa Tengah. Cirebon-Indramayu adalah daerah perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, sehingga mereka melahirkan bahasa yang khas Cirebon-Indramayu.

Perolehan suara Pangeran Arief Natadiningrat di Kabupaten Indramayu sebanyak 84.341 suara atau 10,4% dari jumlah pemilih yang mencoblos pada hari pemilihan umum sebesar 807.853 pemilih. Peraih suara terbanyak kedua adalah K.H. Sofyan Yahya memperoleh 76.458 suara atau 9,5%. Kemudian Mohammad Surya memperoleh 72.692 suara atau 8,9%, Walid Syaikhun memperoleh 50.983 suara atau 6,3%, Mubiar Purwasasmita memperoleh 42.286 suara atau 5,2%, dan Ginandjar Kartasasmita memperoleh suara 39.809 atau 4,9%.

Kabupaten Indramayu juga adalah basis NU bahkan Ketua PW NU sekarang berasal dari Indramayu menggantikan K.H. Sofyan Yahya yaitu K.H. Dedi Wahidi (mantan Ketua PC NU Indramayu dan mantan Wakil Bupati Indramayu). Di Kota Cirebon K.H. Sofyan Yahya memperoleh 2.436 suara atau 1,8%, di Kabupaten Cirebon K.H. Sofyan Yahya memperoleh 48.687 suara atau 5% dan di Kabupaten Indramayu memperoleh 76.458 suara atau 9,5%. Dengan demikian kuatnya ikatan kedaerahan dan kekerabatan Pangeran Arief di Cirebon mampu

memutuskan kekuatan emosional keagamaan NU dengan terbukti kekalahan jauh K.H. Sofyan Yahya di Cirebon.

Kemenangan Pangeran Arief di beberapa daerah seperti di Kabupaten Cianjur. Pangeran Arief Natadiningrat memperoleh suara di Kabupaten Cianjur sebesar 91.165 suara atau 9,4%. Perolehan suara tersebut merupakan perolehan suara terbanyak di Kabupaten Cianjur dari jumlah pemilih yang mencoblos pada hari pemilu sebanyak 972.013 pemilih. Peraih suara selanjutnya adalah Ginandjar Kartasasmita memperoleh 87.518 suara atau 9%, Walid Syaikhun memperoleh 77.179 suara atau 7,9%, K.H. Sofyan Yahya memperoleh 72.633 suara atau 7,5%, Mohammad Surya memperoleh 60.628 suara atau 6,2% dan Mubiar Purwasasmita memperoleh 54.563 suara atau 5,6%.

Kemenangan suara terbanyak diraih pula Pangeran Arief Natadiningrat di Kabupaten Bogor. Pangeran Arief Natadiningrat memperoleh 144.760 suara atau 8,8% dari jumlah pemilih yang mencoblos pada pemilu 2004 sebanyak 1.653.885 pemilih. Peraih suara terbanyak selanjutnya adalah Ginandjar Kartasasmita memperoleh 138.687 suara atau 8,4%, Mohammad Surya memperoleh 106.548 suara atau 6,4%, Walid Syaikhun memperoleh 104.657 suara atau 6,3%, Taufiq Ridha memperoleh 103.862 suara atau 6,3%, Popong Otje Djundjungan memperoleh suara 84.475 suara atau 5,1%, Zaenal Mutaqin memperoleh suara 83.380 suara atau 5%, Mubiar Purwasasmita memperoleh 81.598 suara atau 4,9%, dan K.H. Sofyan Yahya memperoleh 53.808 suara atau 3,3%.

Kemenangan Pangeran Arief Natadiningrat di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor lebih disebabkan oleh mobilisasi dengan pendekatan

kekerabatan. Perolehan suara Pangeran Arief di Kabupaten Cianjur sebanyak 91.165 suara atau 9,4%, di Kabupaten Bogor memperoleh 144.760 suara atau 8,8% mengalahkan pesaing utamanya Ginandjar Kartasasmita yang memperoleh suara berjumlah 138.687 suara atau 8,4%. Kedua kabupaten tersebut merupakan basis dari PPP sedangkan pangeran Arief sangat dekat bahkan bersahabat dengan putra Ketua Umum PPP Hamzah Haz. Putra Hamzah Haz menjanjikan akan memaketkan Pangeran Arief dengan calon anggota DPR RI dari PPP untuk wilayah pemilihan kabupaten tersebut sehingga Pangeran Arief dipromosikan oleh calon-calon anggota DPR dari PPP di kabupaten yang bersangkutan sekaligus ketika menyebarkan atribut-atribut Pangeran Arief di wilayah tersebut. Kabupaten Bogor yang merupakan tempat tinggal dari putra Hamzah Haz tersebut.<sup>70</sup> Kemenangan di dua kabupaten tersebut juga karena ditunjang oleh banyak saudara-saudara Pangeran Arief yang menjadi pengusaha sehingga melalui pendekatan persaudaraan Pangeran Arief memperoleh kemenangan.<sup>71</sup>

Kemenangan Pangeran Arief di Kabupaten Bogor, selain mampu mengalahkan suara pesaing utamanya juga mampu mengalahkan putra-putra daerah Bogor antara lain Dedi Ekadibrata yang memperoleh suara sebanyak 23.081 suara atau 1,4%, dan A. Zaenal Muttaqiin memperoleh 83.380 suara atau 5%. Dengan demikian kemenangan Pangeran Arief di Bogor membuktikan hubungan kekerabatan yang cukup kuat, walaupun secara geografis Bogor dan

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Pangeran Arief Natadiningrat pada tanggal 7 November 2006 beliau tidak mau menyebutkan nama putra Hamzah Haz tersebut, sehingga penulis tidak menuliskan namanya.

<sup>71</sup> *Ibid*

Cirebon sangatlah jauh tetapi dengan kekerabatan mampu menjadikan Pangeran Arief cukup dikenal di masyarakat Bogor.

Sedangkan di Kota Bogor Pangeran Arief Natadiningrat berada diposisi ketiga peraih suara terbanyak dengan perolehan suara sebanyak 25.203 suara atau 6% dari jumlah pemilih yang mencoblos sebanyak 412.168 pemilih. Peraih suara terbanyak dimenangkan Ginandjar Kartasmita dengan perolehan suara sebanyak 59.154 suara atau 14,4%. Kemudian Taufiq Ridha memperoleh 30.340 suara atau 7,4%, Popong Otje Djundjuna memperoleh 23.790 suara atau 5,8%, Mohammad Surya memperoleh 23.382 suara atau 5,7% dan K.H. Sofyan Yahya memperoleh 11.973 suara atau 2,9%.

### **Pendekatan Organisasi**

Pendekatan organisasi dimaksud adalah calon anggota DPD Jawa Barat menggunakan ikatan organisasi secara struktural untuk mendekati pemilih terutama anggota organisasi yang bersangkutan. Pendekatan organisasi dilakukan pula oleh Pangeran Arief Natadiningrat. Pangeran Arief Natadiningrat menggunakan organisasi Hipmi Jawa Barat untuk memperoleh dukungan pemilih. Pangeran Arief adalah mantan Ketua Cabang Hipmi Cirebon dan sekarang sebagai Ketua Penasehat Hipmi Jawa Barat. Pengurus dan anggota Hipmi adalah direktur-direktur perusahaan sehingga pengurus Hipmi memiliki massa yakni para buruh. Seperti yang dilakukan Ketua Hipmi Bekasi. Ia memiliki beberapa perusahaan di Bekasi. Ia menyuruh seluruh karyawannya untuk memilih Pangeran Arief pada pemilu DPD 5 April 2004. Ketua Hipmi Bekasi juga adalah saudara

Pangeran Arief.<sup>72</sup> Dukungan tersebut ternyata cukup signifikan dengan perolehan suara Pangeran Arief Natadiningrat di Kabupaten Bekasi sebesar 61.316 suara atau 6,8 % dari jumlah pemilih yang mencoblos pada hari pemilihan umum pada tanggal 5 April 2004 sebanyak 896.224 pemilih. Peraih suara terbanyak adalah Ginandjar Kartasasmita dengan perolehan suara 76.852 atau 8,6%, K.H. Sofyan memperoleh 31.068 suara atau 3,5% dan Mohammad Surya memperoleh 41.277 suara atau 4,6 %.

Sedangkan di Kota Bekasi Pangeran Arief memperoleh 52.217 suara atau 5,9% dari jumlah pemilih 876.799 orang yang mencoblos pada 5 April 2004. Mohammad Surya memperoleh 26.436 suara atau 3% dan K.H. Sofyan Yahya 28.450 suara atau 3,2%. Peraih suara terbanyak adalah Ginandjar Kartasasmita dengan perolehan suara 109.568 atau 12,5% suara. Selain itu Pangeran Arief mampu mengalahkan putra daerah Bekasi yang antara lain Wawan Ridwanullah dengan perolehan suara sebanyak 27.962 suara atau 3% di Kabupaten Bekasi dan di Kota Bekasi memperoleh 14.604 suara atau 1,7%.

Begitu pula Pangeran Arief mendapatkan dukungan dari Ketua Hipmi Cimahi sehingga berpengaruh besar terhadap perolehan suara di Kota tersebut. Pangeran Arief memperoleh suara di Kota Cimahi sebesar 10.317 suara atau 4,3% dari jumlah pemilih 241.145 pemilih. Pangeran Arief mampu mengalahkan tokoh-tokoh Cimahi lainnya seperti Bunyamin Idjuddin yang memperoleh suara sebanyak 7.311 atau 3%, dan Mochammad Mochtar memperoleh 2.726 suara atau 1,4%. Di samping itu Pangeran Arief mampu mengalahkan kompetitor yang

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Pangeran Arief Natadiningrat pada tanggal 7 November 2006 di Kantor DPD RI Jakarta. Dalam wawancara tersebut Pangeran Arief tidak mau menyebutkan nama Ketua Hipmi Bekasi dan nama perusahaannya.

berasal dari Bandung lainnya sebab Kota Cimahi merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung. Di Kota Cimahi Pangeran Arief diposisi pemenang suara terbanyak ke 6. Peraih suara terbanyak di raih Ginandjar Kartasasmita dengan memperoleh 40.395 suara atau 16,8%, K.H. Sofyan Yahya memperoleh 13.709 suara atau 5,7%, Mohammad Surya memperoleh 10.205 suara atau 4,2%.

Selain itu Pangeran Arief mendapat dukungan pula dari organisasi Kosgoro. Kosgoro merupakan organisasi kuno Golkar. Kosgoro secara organisasi tidak memutuskan dukungannya kepada salah satu calon anggota DPD karena terlalu banyak mantan pengurus dan anggota Golkar yang mencalonkan diri pada pemilu DPD seperti Ginandjar Kartasasmita, Agus Muhyidin, Pangeran Arief, Mohammad Surya, Popong Otje Djundjunan, Karna Suwanda, dan Abai Mulyono. Oleh karenanya dukungan Kosgoro terhadap Pangeran Arief bersifat pribadi masing-masing pengurus Kosgoro. Tetapi Pangeran Arief diuntungkan karena ia mantan Ketua Umum Kosgoro Cirebon dan ia masih pengurus Kosgoro Jawa Barat sebagai Penasehat.

Begitu pula kemenangan Pangeran Arief di Depok dimotori oleh organisasi Hipmi dan Kosgoro sehingga Pangeran Arief mampu memenangkan suara di Depok. Perolehan suara Pangeran Arief di Depok sebesar 35.754 suara atau 5,4% dari jumlah pemilih 656.536 pemilih yang mencoblos pada pemilu 2004. Ginandjar Kartasasmita memperoleh 79.286 suara atau 12%, Mohammad Surya memperoleh 33.575 suara atau 5%, K.H. Sofyan Yahya memperoleh 26.390 suara atau 4%. Peraih suara terbanyak kedua di Kota Depok adalah Taufiq Ridha. Ia memperoleh suara sebanyak 71.194 suara atau 10,8%.

Hubungan pribadi yang kemudian membawa organisasi mendukung Pangeran Arief Natadiningrat inilah yang menguntungkan ia mendapatkan dukungan dari mayoritas pengurus Kosgoro seperti yang dilakukan Ketua Kosgoro Kabupaten Bandung Dadang Naser. Ia memobilisasi pengurus Kosgoro Kabupaten Bandung untuk mendukung dan mensosialisasikan Pangeran Arief Natadiningrat sebagai calon anggota DPD Jawa Barat.<sup>73</sup> Hal tersebut terbukti dengan perolehan suara Pangeran Arief di Kabupaten Bandung sebesar 104.154 suara atau 4,9% dari jumlah pemilih 2.134.482 pemilih. Perolehan tersebut secara jumlah tidak memenangkan suara tetapi mampu mengalahkan calon-calon yang berasal dari Kabupaten Bandung seperti Muhammad Taufiq Ridha memperoleh 86.324 suara atau 4%, Dindin S. Maolani memperoleh 60.711 suara atau 2,8%, Nanang Iskandar Ma'soem memperoleh 46.100 suara atau 2,2%, Ipin Arifin memperoleh 41.962 suara atau 1,9%, dan HR. Maulany memperoleh 11.857 suara atau 0,6%.

#### **Pendekatan dialog dengan masyarakat pemilih.**

Pendekatan komunikasi langsung dengan seluruh elemen masyarakat dilakukan oleh seluruh kandidat anggota DPD Jawa Barat dengan mengambil isu-isu yang rasional dan spesifik. Pendekatan dengan model komunikasi langsung lebih menjadikan pendidikan politik yang positif dan konstruktif kepada masyarakat dengan mengajak masyarakat pemilih untuk berpikir secara jernih dan rasional untuk pengembangan bangsa khususnya Provinsi Jawa Barat. Isu yang

---

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Deni pada tanggal 17 Januari 2007

dikembangkan oleh masing-masing kandidat anggota DPD sesuai dengan visi dan misi yang akan mereka kembangkan dalam lembaga DPD apabila terpilih.

Pangeran Arief Natadiningrat melakukan dialog dengan masyarakat pemilih antara lain diseleggarakan di Pendopo Keraton Kasepuhan Cirebon pada bulan Pebruari 2004. Hadir pada acara tersebut tokoh-tokoh Cirebon.<sup>74</sup> Dalam dialog tersebut, Pangeran Arief Natadiningrat sebagai tokoh aristokrat lokal yang memegang kekuasaan Kesultanan Cirebon mengemas isu politik yang akan diembannya dengan mengedepankan potensi-potensi daerah. Beliau akan memperjuangkannya di tingkat nasional yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat Jawa Barat dengan senantiasa bersandar pada program Provinsi Jawa Barat. Tetapi yang perlu menjadi catatan penting ia juga senantiasa mengembangkan keutuhan nasional dengan berpegang pada perkembangan daerah.

Isu politik itu ia kemas dalam visi dan misinya yakni memperjuangkan daerah dan masyarakat Jabar di tingkat nasional dalam kerangka cita-cita negara Republik Indonesia yang Adil, makmur, dan sejahtera. Sedangkan misinya, *pertama*, memperjuangkan otonomi daerah yang ideal. *Kedua*, menyeimbangkan keuangan pusat dan daerah dengan adil. *Ketiga*, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan masyarakat daerah. *Keempat*, menyempurnakan fungsi, tugas, dan wewenang DPD. Dan *kelima*, memperjuangkan visi dan misi provinsi Jabar.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Deni pada tanggal 17 Januari 2007

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Pangeran Arief Natadiningrat pada tanggal 7 November 2006



## **Mohammad Surya**

Strategi yang dilakukan Pangeran Areif Natadiningrat beserta tim suksesnya dalam rangka meraih simpati pemilih di antaranya dengan melakukan beberapa pendekatan antara lain; pendekatan keagamaan, pendekatan kedaerahan dan kekerabatan, pendekatan organisasi dan LSM serta pendekatan komunikasi langsung dengan masyarakat pemilih.

### **Pendekatan Keagamaan**

Mohammad Surya melakukan pula strategi dengan pendekatan keagamaan terhadap masyarakat pemilih. Pendekatan keagamaan yang dilakukan oleh Mohammad Surya lebih berbentuk kunjungan atau silaturahmi dan memberikan bantuan kepada pesanten atau mesjid-mesjid yang beliau dan tim suksesnya kenal. Pendekatan tersebut terutama dilakukan di daerah sekitar lingkungan Mohammad Surya dan di Kabupaten Kuningan sebagai tempat asal kelahiran Mohammad Surya.

Mohammad Surya mengatakan bahwa sudah biasa ia membantu pembangunan mesjid di daerahnya walaupun tidak seberapa sekitar Rp. 1000.000-Rp. 2.000.000. Begitu pula terhadap pondok pesantren. Pondok pesantren yang pernah ia bantu antara lain pesantren Al-Amanah di Kuningan, pesantren An-Nur juga di Kuningan, pesantren Nailullqiroom di Bandung, pesantren Al-Bayan di Bayongbong Garut, pesantren tersebut berada di sekitar tempat tinggal asal istrinya. Dan Pesantren Al-Muqorrobiin di Subang.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Mohammad Surya pada tanggal 5 Januari 2007 di Kantor DPD RI Bandung

Pimpinan-pimpinan pondok pesantren dan Ketua DKM tersebut ada yang mengenal beliau sehingga mereka langsung berkomunikasi dengan Mohammad Surya. Ada pula yang dikenalkan oleh tim sukses Mohammad Surya. Ketika melakukan kunjungan ke beberapa mesjid dan pesantren Mohammad Surya hanya memohon doa dan dukungannya serta melakukan dialog dengan pimpinan pondok pesantren tentang pentingnya DPD baik dari sisi kelembagaan, tugas, fungsi dan kewenangannya bagi pembangunan masyarakat Jawa Barat. Pimpinan pondok pesantren banyak yang belum mengetahui tentang DPD, tetapi dengan adanya dialog para pimpinan pesantren menjadi mengetahui dan memahami akan adanya lembaga baru dalam lembaga legislatif hasil dari amandemen keempat UUD 1945 tersebut.<sup>77</sup>

Mohammad Surya dengan pendekatan keagamaan mampu meraih sukses perolehan suara di kabupaten-kabupaten yang terkenal sebagai basis keagamaan bahkan daerah-daerah tersebut dalam sejarahnya sebagai basis DI/TII di Jawa Barat, seperti di Kabupaten Garut, Mohammad Surya mendapatkan suara terbanyak dengan memperoleh 114.346 suara atau 10,6% dari jumlah pemilih yang mencoblos pada pemilu 2004 sebesar 1.077.366 pemilih. Perolehan suara tersebut mengalahkan perolehan suara K.H. Sofyan Yahya. Padahal Garut selalu dianggap sebagai basisnya NU, K.H. Sofyan Yahya hanya memperoleh suara di urutan kedua dengan memperoleh 83.329 suara atau 7,7%. Peraih suara selanjutnya adalah Sidiq Aminullah memperoleh 77.629 suara atau 7,2%,

---

<sup>77</sup> Hasil wawancara dengan Sahiri Hermawan pada tanggal 10 Oktober 2006 di Gedung PGRI Jawa Barat

Ginandjar Kartasasmita memperoleh 74.587 suara atau 6,9% dan Pangeran Arief Natadiningrat memperoleh 71.270 suara atau 6,6%.

Kemenangan diraih pula Mohammad Surya di Kabupaten Tasikmalaya dengan suara mayoritas. Mohammad Surya memperoleh 172.651 suara atau 20,6% mengalahkan K.H. Sofyan Yahya yang memperoleh 102.644 suara atau 12,2%, padahal Tasikmalaya sangat terkenal kental ke-NU-annya. Ginandjar Kartasasmita di Kabupaten Tasikmalaya memperoleh suara terendah di antara empat pemenang anggota DPD tersebut. Ginandjar Kartasasmita memperoleh 35.511 suara atau 4,2%. Sebelumnya adalah Sidiq Aminullah memperoleh 92.830 suara atau 11%, Pangeran Arief Natadiningrat memperoleh 62.975 suara atau 7,5% dan Taufiq Ridha memperoleh 34.335 suara atau 4%.

### **Pendekatan Kedaerahan.**

Pendekatan kedaerahan dan kekerabatan dimaksud adalah mempengaruhi pemilih dengan pendekatan kedaerahan dan kekeluargaan atau persahabatan. Model ini digunakan oleh keempat pemenang anggota DPD Jawa Barat. Pendekatan kedaerahan dapat terlihat bahwa keempat pemenang anggota DPD Jawa Barat menang di daerah kelahirannya masing-masing kecuali K.H. Sofyan Yahya.

Mohammad Surya berasal dari Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan adalah tempat kelahiran dan tempat tinggal di waktu kecil bersama keluarganya. Di Kabupaten Kuningan ia menang jauh suaranya dari pesaing-pesaing politik lainnya dengan perolehan suara sebanyak 195.135 suara atau 39,4% dari jumlah

pemilih 494.904 pemilih yang mencoblos pada pemilu 2004. Ginandjar Kartasasmita yang merupakan pesaing terkuat di Kabupaten Kuningan memperoleh 16.614 suara atau 3,4%. Kabupaten Kuningan juga merupakan basis dari NU walaupun di Kuningan sempat muncul aliran *Madrais* yang merupakan aliran yang memadukan antara ajaran Islam dengan Sunda Wiwitan yang diprakarsai oleh Menak Sunda yaitu Raden Madrais. Aliran Madrais pengaruhnya cukup besar di era tahun 1980-an kemudian berhenti setelah dikeluarkannya fatwa MUI bahwa aliran Madrais adalah aliran sesat. Di Kabupaten Kuningan K.H. Sofyan Yahya memperoleh suara berjumlah 28.247 suara atau 5,7% mengalahkan perolehan suara Ginandjar Kartasasmita.

Kabupaten Kuningan yang berdampingan dengan Cirebon dengan bahasa dan budaya yang sama menempatkan Pangeran Arief sebagai peraih perolehan suara kedua dengan memperoleh suara sebanyak 33.617 suara atau 6,8%. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan primordial kedaerahan sangat kuat padahal dalam sejarahnya Kuningan merupakan bagian dari wilayah Kesultanan Cirebon bahkan pada masa Hindia Belanda termasuk Keresidenan Cirebon.<sup>78</sup> Begitu pula ikatan keorganisasian keagamaan NU dapat dipatahkan dengan ikatan kedaerahan. K.H. Sofyan Yahya menduduki urutan ketiga perolehan suara di Kabupaten Kuningan.

Ketokohan dan strategi pendekatan yang tepat yang dilakukan Mohammad Surya di Kabupaten Kuningan menjadikan beliau mampu mengalahkan tokoh-tokoh kuningan lainnya yang mencalonkan diri pada pemilu DPD antara lain Tony Gumilar dengan memperoleh suara sebanyak 5.873 suara atau 1,2%. Tony

---

<sup>78</sup> Lihat dalam disertasi ini, bab III tentang Kesultanan Cirebon

Gumilar merupakan tokoh muda Kuningan. Ia aktifis pemuda yakni mantan pengurus KNPI Kuningan. Ia aktif di AMPI Kuningan.

### **Pendekatan Organisasi**

Pendekatan organisasi kemasyarakatan digunakan pula oleh Mohammad Surya. Ia adalah Ketua Umum PP PGRI, dukungan terhadap Mohammad Surya oleh PGRI walaupun tidak diputuskan langsung melalui mekanisme organisasi tetapi dukungan itu sebatas dukungan moral. Mohammad Surya mengatakan bahwa yang mendukung pencalonannya adalah guru begitu juga yang menjadi tim sukses beliau adalah guru, namun kebetulan guru tersebut sebagai pengurus PGRI di masing-masing daerah, jadi bukan organisasi tetapi dukungan pribadi.<sup>79</sup> Ia berkilah bahwa PGRI adalah organisasi independen dan tidak memasuki jalur politik praktis sesuai dengan AD/ART-nya.<sup>80</sup>

PGRI Jawa Barat membawahi 25 organisasi PGRI kabupaten/kota. PGRI kabupaten/kota membawahi 723 Cabang di tingkat kecamatan. PGRI Jawa Barat pun memiliki 6.842 Ranting yang dalam struktur organisasi di bawah koordinasi PGRI kecamatan. PGRI Ranting dibentuk berdasarkan unit-unit pendidikan. Jumlah anggota PGRI Jawa Barat tercatat berjumlah 164.324 orang.<sup>81</sup>

Tim sukses Mohammad Surya yakni Sahiri Hermawan adalah Ketua Umum PGRI Jawa Barat. Tim sukses di daerah-daerah juga adalah pengurus PGRI setempat. Forum-forum yang digunakan oleh Mohammad Surya untuk

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Prof. Dr. H. Mohammad Surya pada tanggal 5 Januari 2007

<sup>80</sup> Lihat disertasi ini, bab III tentang PGRI

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Umum PGRI Jawa Barat Sahiri Hermawan yang juga ketua tim sukses Mohammad Surya, pada tanggal 10 Oktober 2006

mensosialisasikan pencalonannya adalah forum-forum PGRI. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PGRI menjadi media mobilisasi bagi kemenangan Mohammad Surya. Kemenangan Mohammad Surya terletak di 6 kabupaten/kota di Jawa Barat. Kemenangan Mohammad Surya di daerah kelahirannya yakni di Kabupaten Kuningan dengan memperoleh 195.135 suara atau 39,4% disusul pada urutan kedua oleh Pangeran Arief Natadiningrat dengan memperoleh 33.617 suara atau 6,8%.

Di Kabupaten Garut mobilisasi untuk Mohammad Surya dilakukan langsung oleh Ketua PGRI Garut. Garut dianggap oleh Mohammad Surya sebagai tempat tinggalnya karena istri Moh. Surya berasal dari Garut. Di Kabupaten Garut, Mohammad Surya mendapatkan suara terbanyak dengan memperoleh 114.346 suara atau 10,6% mengalahkan K.H. Sofyan Yahya. Padahal Garut selalu dianggap sebagai basisnya NU, K.H. Sofyan Yahya memperoleh suara di urutan kedua dengan perolehan suara sebanyak 83.329 suara atau 7,7%.

Mohammad Surya menang pula di Kabupaten Tasikmalaya dengan suara mayoritas. Di Kabupaten Tasikmalaya dilakukan pula mobilisasi pemilih oleh organisasi PGRI Tasikmalaya yang sangat loyal kepada Mohammad Surya. Ketua PGRI Kabupaten Tasikmalaya Asep Rustandi adalah murid Mohammad Surya ketika ia menempuh sarjana di IKIP Bandung, sehingga ia sangat mengenal Mohammad Surya karena pada waktu mahasiswa sebagai dosen pembimbing sekripsinya. Mohammad Surya memperoleh suara sebanyak 172.651 suara atau 20,6% mengalahkan K.H. Sofyan Yahya yang memperoleh suara 102.644 suara atau 12,2%, padahal Tasikmalaya sangat terkenal kental ke-NU-annya. Ginandjar

Kartasamita di Kabupaten Tasikmalaya memperoleh suara terendah di antara empat pemenang anggota DPD tersebut. Ginandjar Kartasasmita memperoleh suara berjumlah 35.511 suara atau 4,2%.

Sedangkan di Kota Tasikmalaya Mohammad Surya berada pada urutan keempat peraih suara terbanyak. Mohammad Surya memperoleh 23.023 suara atau 7,3% dari jumlah pemilih yang mencoblos pada pemilu 2004 di Kota Tasikmalaya sebanyak 316.967. Peraih suara terbanyak adalah Sidiq Aminullah dengan perolehan suara sebanyak 103.662 suara atau 32,7%, K.H. Sofyan Yahya memperoleh 35.134 suara atau 11%, Ginandjar Kartasasmita memperoleh 27.933 suara atau 8,8% dan Pangeran Arief Natadiningrat memperoleh 14.540 suara atau 4,6%.

Mohammad Surya memperoleh suara terbanyak di Kabupaten Sukabumi dengan perolehan suara sebanyak 122.265 suara atau 12,3% dari jumlah pemilih yang mencoblos pada pemilu 5 April 2004 sebanyak 993.318 pemilih. Peraih suara terbanyak kedua adalah Pangeran Arief Natadiningrat. Ia memperoleh 98.865 suara atau 9,95%. Kemudian, Walid Syaikhun memperoleh 80.880 suara atau 8,14%, Ginandjar Kartasasmita memperoleh 68.639 suara atau 6,9% dan K.H. Sofyan Yahya memperoleh 53.696 suara atau 5,4%.

Sedangkan di wilayah yang sama di Kota Sukabumi Mohammad Surya dikalahkan Ginandjar Kartasasmita. Mohammad Surya menduduki posisi kedua peraih suara terbanyak dengan perolehan suara sebesar 12.076 suara atau 8,98%. Adapun Ginandjar Kartasasmita sebagai peraih suara terbanyak di Kota Sukabumi memperoleh 16.081 suara atau 11,96% dari jumlah pemilih yang mencoblos pada

pemilu 2004 sebesar 134.438 pemilih. Peraih suara terbanyak ketiga adalah Popong Otje Djundjuran dengan perolehan suara sebanyak 9.328 suara atau 6,9%. Kemudian, Pangeran Arief Natadiningrat memperoleh 9.322 suara atau 6,9%, Sidiq Aminullah memperoleh 8.748 suara atau 6,5% dan K.H. Sofyan Yahya memperoleh 5.228 suara atau 3,9%.

Mohammad Surya meraih kemenangan atas lawan-lawan politiknya di Kabupaten Subang. Mohammad Surya memperoleh 75.283 suara atau 10,1% dari jumlah pemilih yang mencoblos pada hari pemilihan umum tanggal 1 April 2004 sebanyak 743.621 pemilih. Peraih suara terbanyak kedua adalah Ginandjar Kartasasmita dengan perolehan suara sebesar 64.431 suara atau 8,7%. Kemudian, Popong Otje Djundjuran memperoleh 62.832 suara atau 8,4%, Mubiar Purwasasmita memperoleh 57.387 suara atau 7,7%, Pangeran Arief memperoleh 54.447 suara atau 7,3% dan K.H. Sofyan Yahya memperoleh 46.411 suara atau 6,2%.

Pangeran Arief Natadiningrat berada pada posisi kelima perolehan suara terbanyak di Kabupaten Subang dengan meraih 54.447 suara atau 7,3%, padahal Kabupaten Subang berdekatan dengan Indramayu yang merupakan basis Pangeran Arief. Kabupaten Subang berdampingan pula dengan Kabupaten Sumedang yang menjadi lumbung suara Ginandjar Kartasasmita. Sedangkan K.H. Sofyan Yahya berada dalam urutan keenam perolehan suara terbanyak dengan memperoleh 46.411 suara atau 6,2%. Kabupaten Subang memang bukan merupakan basis NU walaupun tradisi keagamaan NU lebih melekat di Subang, hal ini lebih disebabkan tidak adanya pesantren-pesantren NU bahkan NU kurang berkembang di Subang.

Yang terkenal di Subang adalah tarekat-tarekat seperti tarekat Abah Umar yang lahir di Subang di daerah Binong. Tarekat Abah Umar sempat menghebohkan kalangan agamawan walaupun beraliran *tarekat Qadariah Naqsabandiah*, karena prakteknya yang dianggap bertentangan dengan Islam oleh MUI setempat.

Kemenangan diraih juga oleh Mohammad Surya di Kabupaten Majalengka dengan perolehan suara sebanyak 77.731 suara atau 13%. Bersaing ketat dengan Pangeran Arief Natadiningrat yang memperoleh 70.830 suara atau 11,9%. Kabupaten Majalengka memang merupakan Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dari arah Barat sebagai basis suara Ginandjar Kartasasmita, dari arah utara berbatasan dengan Cirebon sebagai basis suara Pangeran Arief dan dari arah selatan berbatasan dengan Kuningan yang merupakan lumbung suara Mohammad Surya. Tetapi dalam sejarah tercatat bahwa Kabupaten Majalengka merupakan bagian dari kekuasaan kerajaan Sumedanglarang dan termasuk wilayah Priangan Timur.<sup>82</sup>

Ginandjar Kartasasmita sendiri di Kabupaten Majalengka menduduki suara ketiga perolehan suara terbanyak di antara empat pemenang anggota DPD dengan memperoleh 44.613 suara atau 7,5%. Sedangkan K.H. Sofyan Yahya berada dalam urutan keempat peraih suara terbanyak di Kabupaten Majalengka dengan memperoleh 36.738 suara atau 6,2%.

K.H. Sofyan Yahya tidak dapat meraih suara terbanyak di Kabupaten Majalengka, karena di Kabupaten tersebut NU tidak berkembang secara pesat. Di Kabupaten Majalengka walaupun tradisi pesantren dan tradisi keagamaan

---

<sup>82</sup> Lihat disertasi ini bab II tentang struktur kekuasaan di Jawa Barat

masyarakat mirip dengan NU tetapi mereka kebanyakan bukan pengikut NU. Di Kabupaten Majalengka lebih berkembang secara pesat adalah organisasi keagamaan Persatuan Umat Islam (PUI). PUI berdiri di Majalengka oleh K.H. Abdul Halim pada tahun 1917 sebagaimana dibahas dalam bab II tentang kekuatan politik Islam di Jawa Barat.

Di Kabupaten Majalengka banyak berdiri pesantren dan sekolah PUI yang bermadzhabkan Imam Syafi'i sehingga ada kemiripan dengan tradisi NU. Oleh karenanya, K.H. Sofyan Yahya tidak mampu menembus ke ranah masyarakat PUI yang lebih mengambil moderat dalam keputusan politik dan pengikut PUI lebih meyakini bahwa organisasinya adalah organisasi Islam modern yang berdiri di Jawa Barat khususnya di Majalengka. Masyarakat Majalengka lebih bangga sebagai umat PUI ketimbang organisasi keagamaan lainnya.

#### **Pendekatan dialog langsung dengan seluruh lapisan masyarakat.**

Pendekatan dialogis antara calon anggota DPD dengan masyarakat pemilih adalah salah satu pendekatan yang lebih mengedepankan rasionalitas sehingga kualitas calon dapat teruji oleh pemilih baik dari sisi integritas maupun intelektualitas. Mohammad Surya melakukan pendekatan dialog langsung dalam rangka meraih suara dengan masyarakat pemilih. Mohammad Surya telah terbiasa berdiskusi maupun seminar sehingga tidak ada kesulitan baginya untuk melakukan pendekatan tersebut.

Dialog yang pernah dilakukan oleh Mohammad Surya antara lain di Kabupaten Subang. Dialog yang diselenggarakan oleh organisasi PGRI Kabupaten Subang mengambil tema "prospek pendidikan pasca lahirnya UU Guru

dan Dosen". Dialog tersebut dihadiri oleh keluarga besar PGRI Kabupaten Subang yang terdiri dari guru-guru SD, SMP dan SMA atau yang sederajat. Mohammad Surya mengupas akan perlunya perwakilan guru dalam lembaga legislatif untuk memperjuangkan kepentingan guru sehingga ia membahas tentang DPD. Dialogpun akhirnya lebih terfokus tentang tugas, fungsi dan kewenangan DPD. Dalam dialog tersebut Mohammad Surya menyatakan permohonan doa dan dukungannya untuk mencalonkan diri pada pemilu DPD yang bersamaan dengan pemilu DPR/DPRD pada tanggal 5 April 2004.<sup>83</sup>

Dialog yang berlangsung pada bulan Oktober 2003 tersebut berhasil efektif untuk mempengaruhi pemilih terutama di kalangan guru di Kabupaten Subang. Hal tersebut terbukti dengan keunggulan Mohammad Surya di Kabupaten Subang dengan memperoleh suara 75.283 suara atau 7,7% dari jumlah pemilih sebanyak 753.213 pemilih. Kemenangan Mohammad Surya di Kabupaten Subang mengalahkan tokoh asal Subang yakni Dr. K.H. Sanusi Uwes, M.Pd. Dr. K.H. Sanusi Uwes, M.Pd adalah Ketua Muhammadiyah Jawa Barat, pencalonannya didukung oleh Muhammadiyah tetapi organisasi Muhammadiyah kurang berkembang di Kabupaten Subang. Sehingga ia hanya dapat memperoleh suara di Kabupaten Subang 20.345 suara atau 2,3%, di tingkat Jawa Barat ia berada pada urutan ke 19. dengan perolehan suara. 245.123 atau 1.2%.

Kemenangan Mohammad Surya di Kabupaten Subang juga mampu meninggalkan jauh pesaing-pesaing politik lainnya seperti Ginandjar Kartasmita dengan memperoleh 64.431 suara atau 6,6%. Pangeran Arief Natadiningrat pada

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Mohammad Surya pada tanggal 5 Januari 2007 di Kantor DPD RI Bandung

posisi ketiga perolehan suara di Kabupaten Subang dengan meraih 54.447 suara atau 5,6% dan K.H. Sofyan Yahya berada dalam urutan keempat perolehan suara terbanyak dengan memperoleh 46.411 suara atau 4,8%.

Mohammad Surya merupakan tokoh dari profesi guru senantiasa mengemas isu yang akan diemban dalam keanggotaan DPD RI, ketika melakukan dialog dengan berbagai elemen masyarakat terutama pada masa kampanye ia senantiasa mengembangkan pentingnya DPD sebagai wahana untuk memperjuangkan peningkatan kebijakan pendidikan yang berkualitas. Ia sebagai pelaku pendidikan yang telah lama berkiprah sebagai guru dan dosen merasakan betul diskriminasi dan menomorduakan aspek pendidikan dalam kebijakan nasional, sehingga dengan munculnya DPD dapat menjadi ajang untuk memunculkan tokoh-tokoh yang berprofesi guru sebagai pengambil kebijakan politik tanpa harus melalui persaingan atau ikatan terhadap ideologi atau ikatan kepentingan partai politik tertentu.

Isu politik kepentingan dunia pendidikan ia kemas dalam visi dan misinya yakni visi beliau menjadi anggota DPD yang aspiratif dan komunikatif dalam memperjuangkan kepentingan daerah dalam kerangka pembangunan nasional. Sedangkan misi yang akan ia jalankan antara lain, *pertama*, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPD dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki. *Kedua*, menjadi wakil masyarakat Jawa Barat dalam memajukan daerah. *Ketiga*, menjadi wakil dunia pendidikan dalam mewujudkan pendidikan nasional.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Mohammad Surya pada tanggal 5 Januari 2007



### **K.H. Sofyan Yahya**

Strategi yang dilakukan K.H. Sofyan Yahya beserta tim suksesnya dalam rangka merah simpati pemilih di antaranya dengan melakukan beberapa pendekatan antara lain; pendekatan keagamaan, pendekatan kedaerahan dan kekerabatan, pendekatan organisasi serta pendekatan dialog dengan masyarakat pemilih.

### **Pendekatan Keagamaan**

K.H. Sofyan Yahya adalah seorang mubaligh (penceramah agama Islam), pimpinan pondok pesantren Al-Ma'arif Cigondewah Bandung dan Ketua Umum PW NU Jawa Barat. Oleh karena itu pendekatan keagamaan untuk mempengaruhi pemilih senantiasa akan lebih diprioritaskan karena kesehariannya bergelut dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Pendekatan keagamaan dimaksud adalah melakukan pendekatan dengan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ceramah di majlis ta'lim, memberikan bantuan dan bersilaturahmi kepada tokoh-tokoh agama.<sup>85</sup>

K.H. Sofyan Yahya sebagai seorang mubaligh telah terbiasa berceramah di tengah masyarakat. Seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat pernah ia kunjungi untuk berceramah berdasarkan undangan dari masyarakat, pondok pesantren maupun organisasi NU. Sehingga jadwal kesehariannya padat dengan jadwal ceramah terutama pada bulan-bulan Islam seperti bulan *Maulid*, bulan *Rajab*, bulan *Ramadhan*, bulan *Syawal*, bulan *Dzulhijjah*, dan bulan *Muharram*. Pada

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan K.H. Sofyan Yahya pada tanggal 7 November 2006 di Kantor DPD RI Jakarta

bulan-bulan tersebut sering diadakan *tabligh akbar* oleh masyarakat muslim di Jawa Barat terutama masyarakat pedesaan. K.H. Sofyan Yahya mengatakan masyarakat/umat membutuhkan kiai mulai dari melahirkan anak sampai meninggal. Pada waktu melahirkan minta di adzanin sampai ekah begitu pula ketika meninggal mulai dari memandikan sampai pasa menguburkan atau tahlil, sehingga kiai itu bekerja tanpa henti di tengah masyarakat.<sup>86</sup>

K.H. Sofyan Yahya setelah ditetapkan sebagai calon anggota DPD pada pemilu DPD tahun 2004, kegiatan berceramah semakin diintensifkan baik di Bandung maupun di luar Bandung. Tim sukses K.H. Sofyan Yahya semakin gencar mendatangi beberapa tokoh agama di Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk memberikan waktu kepada K.H. Sofyan Yahya agar tampil dalam setiap momentum pertemuan dengan umat dan para tokoh pesantren lainnya.

Pertemuan yang sengaja diadakan oleh beberapa pondok pesantren antara lain istighosah alumni pesantren, bathsul masa'il, dan maulid pesantren. Kegiatan tersebut dilakukan ada yang prakarsa pesantren ada pula yang diminta oleh tim sukses K.H. Sofyan Yahya. Tim sukses K.H. Sofyan Yahya membantu dana untuk kelancaran acara tersebut seatas untuk persiapan atau konsumsi yang berkisar antara Rp. 1.000.000-Rp 2.000.000.<sup>87</sup>

Kegiatan maulid pesantren diadakan di pesantren Al-Masturiyah Sukabumi. Pesantren Al-Masturiyah dipimpin K.H. Fahrudin. Ia adalah salah satu sesepuh NU dan kiai yang sering dimintai pendapatnya oleh Gus Dur. Pesantren Al-Masturiyah adalah salah satu pesantren tertua di Sukabumi. Alumni pesantren Al-

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan K.H. Sofyan Yahya di Kantor DPD RI Jakarta pada tanggal 7 November 2006

<sup>87</sup> *Ibid*

Masturiyah antara lain tersebar di Sukabumi, Bogor, Cianjur, dan Bandung. Maulid pesantren Al-Masturiyah diselenggarakan pada bulan Ramadhan tahun 2003 sekaligus dalam rangka memperingati Nuzulul Qur'ah. Pada moment tersebut K.H. Fahrudin memperkenalkan K.H. Sofyan Yahya kepada seluruh ulama yang datang. Selain itu, K.H. Fahrudin memohon do'a dan dukungan kepada para kiai alumni Al-Masturiyah untuk mendukung K.H. Sofyan Yahya pada pemilu DPD untuk mewakili warga Nahdhiyin. Pada acara tersebut K.H. Sofyan Yahya diberi kesempatan untuk menyampaikan misi dan visi beliau menjadi anggota DPD. Pada acara tersebut tidak terjadi dialog karena dilanjutkan dengan pengajian.<sup>88</sup>

Perolehan suara K.H. Sofyan Yahya di Kota Sukabumi sebesar 5.228 suara atau 3,9% dari 134.438 pemilih, sedangkan di Kabupaten Sukabumi sebesar 53.696 suara atau 5,4% dari 993.318 pemilih. Perolehan tersebut belum mengantarkan suara K.H. Sofyan Yahya sebagai peraih suara terbanyak di Kota/Kabupaten Sukabumi tetapi perolehan suara tersebut telah mengantarkan kemenangan K.H. Sofyan Yahya sebagai anggota DPD Jawa Barat. Peraih suara terbanyak di Kota Sukabumi adalah Ginandjar Kartasmita dengan memperoleh 16.081 suara atau 11,96%, disusul Mohammad Surya dengan memperoleh 12.076 suara atau 8,98% dan Pangeran Arief Natadiningrat memperoleh 9.322 suara atau 6,9%.

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan K.H. Yusuf Muhammad pada tanggal 12 Januari 2007

Kegagalan K.H. Sofyan Yahya di Kota Sukabumi antara lain dipengaruhi adanya persaingan dengan kandidat lain yang melakukan pendekatan gerakan keagamaan (tokoh agama) seperti Taufiq Ridha. Ia adalah seorang mubaligh dan didukung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia memperoleh suara 6.677 atau 4,96%. Selain itu Walid Syaikhun. Ia adalah tokoh Tarekat Syahadattain, pada pemilu DPD di Kota Sukabumi memperoleh suara 5.334 atau 3,96%. Kemudian Siddiq Aminullah (Ketua Umum PP Persis) dengan perolehan suara 8.748 atau 6,5%. Persaing-pesaing lain yang mengantongi suara melebihi K.H. Sofyan Yahya antara lain Popong Otje Djundjuran (tokoh wanita Sunda dan istri mantan Walikota Bandung) dengan memperoleh suara 9.328 atau 6,9%. Di samping itu R.H. Martoyo Male Wiranatakusumah, SE memperoleh suara 9.238 atau 6,9%.

Kegiatan Istighosah alumni pesantren diselenggarakan juga di Cianjur yang diprakarsai pondok pesantren Al-I'annah. Pesantren Al-I'annah merupakan pesantren terbesar dan salah satu pesantren tertua di Cianjur. Pesantren Al-I'annah dipimpin K.H. Nana Masduki. Pesantren tersebut telah mengalami perkembangan dengan menjadi pesantren plus sekolah formal. Sekolah yang terselenggara mulai dari tingkat Ibtida'iyah, Tsanawiyah, Aliyah dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-I'annah. Alumni pesantren Al-I'annah sudah tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat dan di luar Jawa Barat. Kegiatan istighosah terselenggara pada bulan Muharram tahun 2003. Pada kegiatan tersebut K.H. Nana Masduki memberikan waktu kepada K.H. Sofyan Yahya untuk memberikan ceramah. Kemudian K.H. Nana Masduki memohon dukungan seluruh ulama NU yang hadir untuk mendukung K.H. Sofyan Yahya pada pemilu DPD tahun 2004 mewakili NU.

Dalam istighosah tersebut juga tidak terselenggara dialog tetapi diakhiri dengan melakukan doa bersama untuk keselamatan umat, bangsa dan negara.<sup>89</sup>

Perolehan suara K.H. Sofyan Yahya di Kabupaten Cianjur sebesar 72.633 suara atau 7,5% dari jumlah pemilih yang mencoblos sebesar 972.013 pemilih. K.H. Sofyan Yahya berada pada posisi keempat peraih suara terbanyak. Peraih suara terbanyak adalah Pangeran Arief Natadiningrat sebesar 91.165 suara atau 9,4%, disusul Ginandjar Kartasasmita dengan perolehan suara 87.518 atau 9% dan ketiga walih Syaikh dengan memperoleh 77.179 suara atau 7,9%. Mohammad Surya berada pada posisi kelima peraih suara terbanyak dengan memperoleh 60.628 suara atau 6,2%.

#### **Pendekatan Kedaerahan dan Kekerabatan.**

Pendekatan kedaerahan dan kekerabatan dimaksud adalah mempengaruhi pemilih dengan pendekatan kedaerahan dan kekeluargaan atau persahabatan. Pendekatan kedaerahan adalah pendekatan dengan mengedepankan asal daerah. Sedangkan kekerabatan berdasarkan hubungan keluarga atau perkawanan. Model ini digunakan oleh keempat pemenang anggota DPD Jawa Barat. Pendekatan kedaerahan dapat terlihat bahwa keempat pemenang anggota DPD Jawa Barat menang di daerah kelahirannya masing-masing kecuali K.H. Sofyan Yahya.

K.H. Sofyan Yahya berasal dari Kabupaten Bandung. Ia gagal memenangkan suara di Kabupaten Bandung dengan memperoleh suara 167.182 suara atau 7,8%% dari jumlah pemilih 2.134.482 pemilih yang mencoblos. K.H.

---

<sup>89</sup> Ibid

Sofyan Yahya berada pada posisi peraih suara terbanyak kedua. Peraih suara terbanyak adalah Ginandjar Kartasmita dengan memperoleh 223.835 suara atau 10,5%. Mohammad Surya memperoleh 119.565 suara atau 5,6% dan berada pada posisi keempat. Sedangkan Pangeran Arief Natadiningrat memperoleh 104.154 suara atau 4,9% dan berada pada posisi keenam peraih suara terbanyak.

Kegagalan K.H. Sofyan Yahya di daerah tempat tinggalnya antara lain pertama, banyaknya calon anggota DPD yang bertempat tinggal di Bandung sehingga tingkat kompetisi sangat ketat. Kedua, di Bandung terdapat beberapa organisasi besar yang memberikan dukungan kepada salah satu calon. Ketiga, Kabupaten Bandung senantiasa menjadi rebutan pemilih karena jumlah pemilih terbesar di Jawa Barat.

Tokoh-tokoh yang ikut bersaing di Kabupaten Bandung selain yang disebutkan di atas antara lain Taufiq Ridha (tokoh yang didukung PKS) memperoleh suara 86.324 suara atau 4%, Dindin S. Maolani (Ketua Umum Dewan Mesjid Indonesia (DMI) Jawa Barat) memperoleh 60.711 suara atau 2,8%, Siddiq Aminullah (Ketua Umum PP Persis) memperoleh 166.664 suara atau 7,8%, Walid Syaikhun (tokoh Tarekat Syhadattain) memperoleh 115.931 suara atau 5,4%, H.D. Sutisno (pengusaha Pasar Induk Caringin Bandung dan mantan anggota MPR RI dari utusan daerah) memperoleh 100.367 suara atau 4,7%, Popong Otje Djundjunan (tokoh waniota Sunda) memperoleh 107.107 suara atau 5%, dan Mubiar Purwasmita (dosen ITB) memperoleh 96.250 suara atau 4,5%. Dengan demikian K.H. Sofyan Yahya walalupun gagal memperoleh suara

terbanyak tetapi mampu mengalahkan tokoh-tokoh ternama lainnya di Kabupaten Bandung.

Pendekatan kekerabatan juga dilakukan oleh K.H. Sofyan Yahya. Pimpinan-pimpinan pondok pesantren atau para ulama di Bandung atau di daerah lain merupakan saudara dari K.H. Sofyan Yahya seperti pimpinan pondok pesantren Sumur Bandung yang merupakan pesantren besar di Bandung adalah paman dari K.H. Sofyan Yahya begitu pula dengan pesantren al-Amin di Lembang Bandung merupakan paman dari K.H. Sofyan Yahya.<sup>90</sup>

Dalam kultur pondok pesantren biasanya teman satu pondok atau alumni dari satu pesantren sering dianggap bagian dari saudara seguru atau bagian dari pesantren yang bersangkutan. Pesantren al-Ma'arif yang dipimpin K.H. Sofyan Yahya telah melahirkan beberapa ulama, baik di Bandung maupun di luar Bandung. Hal itu dapat terlihat ketika hari jum'at setelah *shalat ashar* sering diadakan *batsul masa'il* yang di pimpin K.H. Sofyan Yahya. Peserta yang hadir adalah pimpinan-pimpinan pondok pesantren terutama alumni al-Ma'arif. Setelah selesai mencari ilmu di al-Ma'arif kemudian para alumni pesantren al-Ma'arif mendirikan pesantren sendiri di daerah masing-masing. Pondok pesantren yang didirikan oleh alumni pesantren al-Ma'arif terdapat di berbagai daerah di Jawa Barat seperti di Bandung, Purwakarta, Garut, Tasikmalaya, Cianjur dan Sukabumi. Kebanyakan pimpinan-pimpinan pondok pesantren yang hadir adalah murid dari ayahanda K.H. Sofyan Yahya yakni K.H. Nazmuddin (almarhum).

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan K.H. Yusuf Muhammad pada tanggal 12 Januari 2007

Pendekatan kekerabatan yang dilakukan oleh K.H. Sofyan Yahya melalui kekeluargaan dan jaringan pondok pesantren merupakan pendekatan yang cukup efektif sehingga dapat mengantarkan K.H. Sofyan Yahya ke kursi DPD RI. K.H. Sofyan Yahya banyak diundang ke beberapa pesantren di Jawa Barat sehingga ia cukup dikenal di kalangan pondok pesantren sebagai ulama dan Ketua Umum PW NU Jawa Barat. Pendekatan ini melahirkan kerelaan dan keikhlasan jamaah, santri dan para pimpinan pondok pesantren untuk mendistribusikan atribut-atribut K.H. Sofyan Yahya tanpa mengharap imbalan. Dalam pemahaman santri bahwa salah satu yang melancarkan dan mempercepat pemahaman ilmu adalah taat dan hormat kepada guru/kiai/ajengan. Dengan pemahaman seperti itu menjadikan para santri tunduk dan patuh atas perintah guru/ajengan tanpa berpikir lagi.

K. H. Sofyan Yahya menuturkan bahwa atribut-atribut yang disebarakan merupakan shadakah dari santri dan jama'ah pengajian beliau. Atribut-atribut tersebut antara lain spanduk, kaos, dan brosur. Santri dan jama'ah banyak yang menawarkan untuk membuat atribut tersebut. Jama'ah minta restu untuk membuatnya dan model apa yang dikehendaki serta minta foto dan logo atau moto-moto lainnya. Jama'ah datang ke pesantren tanpa diundang dan disuruh seperti yang dilakukan oleh salah satu orang tua santri di Purwakarta kebetulan ia adalah pedagang kain di Pasar Purwakarta. Ia datang ke pesantren dan menyanggupi akan membuat beberapa spanduk untuk K.H. Sofyan Yahya. Ia meminta model dan bentuknya saja. Begitu pula yang terpampang di sekitar

Bandung, Karawang dan Bogor banyaknya pemberian dari murid dan jama'ah pengajian.<sup>91</sup>

K.H. Sofyan Yahya adalah adik kandung dari Ketua Umum PPP Jawa Barat Nu'man Abdul Hakim dan sekarang menjabat Wakil Gubernur Jawa Barat. K.H. Sofyan Yahya dan tim suksesnya melakukan pendekatan kekerabatan dengan beberapa anggota anggota DPR/DPRD dari PPP. Pendekatan itu antara lain memaketkan K.H. Sofyan Yahya sebagai calon DPD yang didukung PPP sehingga penyebaran atribut K.H. Sofyan Yahya dititipkan atau dibarengkan dengan penyebaran calon anggota DPR/DPRD dari PPP.

Walaupun penyebaran tersebut tidak mengantarkan K.H. Sofyan Yahya sebagai peraih suara terbanyak tetapi dengan penyebaran tersebut telah memberikan kesempatan untuk mendapatkan suara dan mengantarkan kemenangan K.H. Sofyan Yahya sebagai anggota DPD. Misalnya di Kota Bogor, persaingan yang begitu ketat antar kontestan sehingga K.H. Sofyan Yahya memperoleh suara 11.973 suara atau 2,9% dari jumlah pemilih yang mencoblos pada hari pemilihan sebanyak 412.168 pemilih. Peraih suara terbanyak adalah Ginandjar Kartasmita sebesar 59.154 suara atau 14,4%, disusul Taudiq Ridha memperoleh 30.340 suara atau 7,4%, Pangeran Arief Natadiningrat memperoleh 25.203 suara atau 6%, Popong Otje Djundjunan memperoleh 23.790 suara atau 5,8%, Mohammad Surya memperoleh 23.382 suara atau 5,8%, Zaenal Muttaqin memperoleh 17.467 atau 4,2%, Sidiq Aminullah memperoleh 15.091 suara atau 3,7% dan Walid Syaikhun memperoleh 15.251 suara atau 3,7%.

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan K.H. Sofyan Yahya pada tanggal 7 November 2006

Sedangkan di Kabupaten Bogor K.H. Sofyan Yahya memperoleh 53.808 suara atau 3,3%. Peraih suara terbanyak adalah Pangeran Arief Natadiningrat sebesar 144.760 suara atau 8,8% dari jumlah pemilih yang mencoblos sebanyak 1.653.885 pemilih. Disusul Ginandjar Kartasasmita sebesar 138.687 suara atau 8,4%, Mohammad Surya memperoleh 106.548 suara atau 6,4%, Walid Syaikhun memperoleh 104.657 suara atau 6,3%, Taufiq Ridha memperoleh 103.862 suara atau 6,3%, Popong Otje Djundjuran memperoleh 84.475 suara atau 5,1% dan Zaenal Muttaqin (tokoh Bogor) memperoleh 83.380 suara atau 5%.

### **Pendekatan Organisasi**

Pendekatan organisasi adalah pendekatan melalui jaringan atau struktur organisasi sebagai mesin politik untuk mendulang suara pemilih. K.H. Sofyan Yahya sebagai Ketua Umum PW NU Jawa Barat dan mendapat dukungan dari NU memanfaatkan organisasi tersebut sebagai jaringan untuk memperoleh suara. Selain K.H. Sofyan Yahya pendekatan organisasi keagamaan dilakukan pula oleh tokoh agama lainnya seperti Siddiq Aminullah Ketua Umum PP Persis, Sanusi Uwes Ketua Muhammadiyah Jawa Barat, dan Walid Syaikhun tokoh Tarekat Syhadattain.

K. H. Sofyan Yahya sebagai Ketua Umum Tanfidiyah PW NU Jawa Barat dengan berbekal keputusan dari keputusan rapat PW NU yang memutuskan untuk mencalonkannya menjadi anggota DPD perwakilan dari NU. Ia dan tim suksesnya mengelilingi Jawa Barat bertemu dengan tokoh-tokoh NU di cabang-cabang yang ada di Jawa Barat untuk mensosialisasikan keputusan PW NU Jawa Barat

tersebut. Sebab selain dari K.H. Sofyan Yahya, tokoh NU yang mencalonkan diri antara lain Nanang Iskandar Ma'som, Dindin S. Maolani, dan Ahmad Hanafiah.

Tim sukses K.H. Sofyan Yahya berkeyakinan akan meraih suara mayoritas pengikut NU, sebab NU di Jawa Barat merupakan organisasi terbesar dengan berbasiskan pondok pesantren dan sekolah NU yang bernaung dalam Yayasan al-Ma'arif. PW NU Jawa Barat membawahi Pengurus Cabang (PC) NU di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat dengan jumlah Cabang 25 Cabang sesuai dengan jumlah kabupaten/kota di Jawa Barat. PC NU membawahi Majelis Wakil Cabang (MWC) di tingkat kecamatan yang berjumlah 278 MWC dari 535 kecamatan di Jawa Barat. MWC membawahi organisasi Ranting di tingkat kelurahan/desa yang berjumlah 2.761 Ranting NU dari 5.681 kelurahan/desa yang ada di Jawa Barat. Jumlah pengikut NU menurut PW NU Jawa Barat mengklaim 75% muslim Jawa Barat pengikut NU.<sup>92</sup>

Selain itu, NU memiliki beberapa organisasi yang bernaung di bawah NU seperti Muslimat NU untuk jamaah majlis ta'lim, Ikatan Sarjana NU (ISNU), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) untuk tingkat mahasiswa, Ikatan Pelajar NU (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri NU (IPPNU) untuk tingkat pelajar serta Gerakan Pemuda Anshor. Keenam organisasi di bawah NU tersebut diinstruksikan oleh PW NU Jawa Barat untuk mendukung pencalonan K.H. Sofyan Yahya pada pemilu DPD tanggal 5 April 2004.

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Sekretaris Umum PW NU Jawa Barat, Drs. Yusuf Wibisana di Sekretariat NU Jawa Barat Jl. Sancang No 8 Bandung pada tanggal 27 Desember 2006

Struktur organisasi NU dengan skala yang cukup besar bahkan sampai ke tingkat pedesaan/kelurahan menjadikan NU rebutan seluruh calon anggota DPD. Oleh karena itu, tim sukses K.H. Sofyan Yahya yang sekaligus sebagai pengurus PW NU Jawa Barat, K. H. Yusuf Muhammad beserta staf tim sukses mensosialisasikan keputusan NU Jawa Barat supaya ditaati oleh seluruh pengurus NU sampai ke tingkat Ranting. Langkah tersebut dilakukan dengan harapan masyarakat NU tidak terbawa atau terpecah oleh kandidat lain baik kandidat yang mengatasnamakan NU maupun kandidat yang merekrut massa NU. Surat keputusan tersebut diharapkan pula untuk masyarakat NU memiliki kepastian siapa calon yang dipilih dalam pemilihan anggota DPD yaitu K.H. Sofyan Yahya.

Tim sukses K.H. Sofyan Yahya berkeyakinan peraihan suara minimal dapat diperoleh sesuai dengan peraihan suara yang di peroleh partai-partai NU pada pemilu 1999 apabila pada waktu itu tidak terjadi perpecahan dalam tubuh NU mungkin perolehan suaranya lebih besar tetapi karena NU terpecah menjadi beberapa partai yang antara lain PKB, PNU dan PKU menjadikan suara masyarakat NU terpecah-pecah, belum lagi banyak tokoh-tokoh NU yang dulu di rekrut Golkar dan PPP, secara politik tokoh-tokoh NU tersebut masih bergabung dalam partai yang bersangkutan.

Pemilihan anggota DPD yang bersifat perseorangan, besar kemungkinan akan terhindar dari konflik antar kekuatan partai politik yang mengatasnamakan NU. Kemunculan K.H. Sofyan Yahya merupakan keputusan NU sebagai wadah organisasi keagamaan yang menjadi induk dari partai-partai yang bertikai dengan mengatasnamakan NU. Tim sukses K.H. Sofyan Yahya berkeyakinan tidak akan

muncul konflik dalam tubuh NU untuk pencalonan K.H. Sofyan Yahya menjadi anggota DPD. NU pasti akan bersatu untuk mendukung pencalonan K.H. Sofyan Yahya dan semua elemen NU yang aktif di berbagai partai politik pasti akan mendukungnya.<sup>93</sup>

K.H. Sofyan Yahya menang di Kota Tasikmalaya dengan meraih 35.134 suara atau 8,9%, dan Kabupaten Purwakarta dengan meraih 38.019 suara atau 7,6% mengungguli pesaing-pesaing politik lainnya. Di daerah kelahirannya di Bandung bersaing ketat dengan Ginandjar Kartasasmita yang memperoleh suara di Kota Bandung sebanyak 164.975 suara atau 10,2%, K.H. Sofyan Yahya memperoleh suara di Kota Bandung sebanyak 79.088 suara atau 4,9% sedangkan di Kabupaten Bandung bersaing juga dengan Ginandjar Kartasasmita yang memperoleh 223.835 suara atau 8,3%, K.H. Sofyan Yahya memperoleh suara 167.182 suara atau 6,2%. Di Kota Cimahi yang merupakan kota pemekaran dari Kabupaten Bandung K.H. Sofyan Yahya bersaing juga dengan Ginandjar Kartasasmita yang memperoleh 40.395 suara atau 11,8% sedangkan K.H. Sofyan Yahya berada di urutan ketiga dengan memperoleh 13.709 suara atau 4,1%.

Di Bandung juga K.H. Sofyan Yahya bersaing dengan tokoh agama lainnya yakni Shiddiq Aminullah Ketua Umum PP Persis yang berkantor di Kota Bandung. Persis berdiri di Bandung pada tahun 1920-an atas prakarsa H. Zamzam, Muhammad Junus dan A. Hasan sebagaimana dibahas dalam bab II tentang kekuatan-kekuatan politik Islam di Jawa Barat. Persis memiliki pengikut tidak terlalu banyak khususnya di Bandung walaupun banyak sekolah-sekolah

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan K.H. Yusuf Muhammad pada tanggal 27 Januari 2007

Persis sehingga menempatkan Shiddiq Aminullah sebagai pemenang ke 7 dalam urutan pemenangan anggota DPD Jawa Barat dengan jumlah keseluruhan suara 914.286 suara. Shiddiq Aminullah meraih suara di Kota Bandung sebanyak 90.171 suara atau 5,7%, di Kabupaten Bandung sebanyak 166.664 suara atau 6,2% dan di Kota Cimahi memperoleh 16.322 suara atau 4,8%.<sup>94</sup>

K.H. Sofyan Yahya mendapatkan tambahan suara di daerah lain yang menjadi basis NU tetapi bersaing ketat dengan kandidat lain seperti di Kabupaten Garut memperoleh 83.329 suara atau 5,9% bersaing dengan Mohammad Surya yang memperoleh suara pertama dengan perolehan suara 114.346 atau 8,1%. Di Kabupaten Tasikmalaya bersaing juga dengan Mohammad Surya yang memperoleh 172.651 suara atau 15,9%, K.H. Sofyan Yahya memperoleh 102.644 suara atau 9,4%. Begitu pula di daerah Ciamis yang dikategorikan basis NU, K.H. Sofyan Yahya bersaing dengan Ginandjar Kartasasmita yang memperoleh 155.531 suara atau 14,4%. K.H. Sofyan Yahya memperoleh 66.633 suara atau 6,2%.

Di daerah pantai Utara yaitu Kabupaten Cirebon dan Indramayu yang merupakan basis NU tetapi basis dari Pangeran Areif Natadiningrat sebagai Sultan Cirebon. K.H. Sofyan Yahya bersaing dengan Pangeran Arief yang memperoleh suara di Kabupaten Cirebon meninggalkan jauh pesaing-pesaingnya dengan perolehan suara 375.902 atau 27,8%. K.H. Sofyan Yahya diurutan kedua dengan memperoleh 48.687 suara atau 3,6%. Di daerah Indramayu bersaing dengan

---

<sup>94</sup> Shiddiq Aminullah juga melakukan mobilisasi dengan pendekatan keagamaan. Ia memadukan kampanye dengan tabligh yang dilakukan di GOR Padjajaran Bandung pada tanggal 28 Maret 2004 dengan menghadirkan muballigh kondang K.H. Abdul Kodir Shoddiq. Kampanye ini dimuat di Harian Pikiran Rakyat edisi tanggal 29 Maret 2004.

Pangeran Arief Natadiningrat dengan memperoleh 84.341 suara atau 7,4%. K.H. Sofyan Yahya memperoleh 76.458 suara atau 6,7%.

Jama'ah NU memang cukup merata di Jawa Barat artinya tidak berkumpul dalam satu daerah tetapi kemenangannya di Tasikmalaya menunjukkan bahwa pengaruh Kiai Ilyas Ruhiat sebagai sesepuh PB NU bahkan pernah menjabat Ketua Syuri'ah NU pada periode Abdurrahman Wahid yang mengeluarkan fatwa berdirinya PKB. Di pesantren Kiai Ilyas Ruhiat yaitu pondok pesantren Cipasung penggodogan pemenangan K.H. Sofyan Yahya diadakan oleh tim sukses dengan para ulama.<sup>95</sup>

Kekalahan K.H. Sofyan Yahya di kantong-kantong NU lainnya seperti di Garut lebih dipengaruhi oleh banyaknya tokoh Garut yang mencalonkan anggota DPD seperti Ahmad Zaky Siradj (mantan anggota MPR RI), Dindin S. Maolani (Ketua Dewan Mesjid Jawa Barat juga aktifis NU), H.U. Mohammad Muchtar (pensiunan PNS), A.A. Dani Saliswijaya, S.H. (Pengacara), H.D. Sutisno (mantan anggota MPR RI dan pengusaha), Drs. Walid Syaikhun (mewakili *tarikat Syahadatain*, ia adalah pemenang ke 8 calon anggota DPD) dan H.R. Maulany (Purnawirawan).

Begitu pula di Kabupaten Tasikmalaya, K.H. Sofyan Yahya bersaing dengan tokoh-tokoh Tasik seperti H. Shiddiq Aminullah (Ketua Umum PP Persis), dan Nanang Iskandar Ma'soem (Pengusaha dan aktifis NU). Kekalahan di daerah kelahirannya di Bandung lebih disebabkan perebutan yang begitu ketat antara kandidat karena mayoritas (75%) kandidat bertempat tinggal di Bandung sehingga

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan A.S. Padli pada tanggal 12 Desember 2006

terjadi perebutan suara pemilih secara ketat. Begitu pula kekalahannya di daerah-daerah basis NU lainnya lebih disebabkan persaingan dengan putra daerah setempat dan aktifis NU daerah setempat atau aktifis keagamaan lainnya. Dengan demikian kemenangan dari K.H. Sofyan Yahya lebih menggunakan pendekatan mobilisasi keagamaan NU sebagai organisasi kaum ulama (ajengan dalam bahasa Sunda). Pendekatan tersebut ternyata lebih efektif dengan membangun solidaritas keulamaan dan ke-NU-an. Sehingga isu politik yang dibangun tim sukses K.H. Sofyan Yahya adalah K.H. Sofyan Yahya merupakan representasi ulama Jawa Barat.

#### **Pendekatan dialog langsung dengan seluruh lapisan masyarakat.**

K.H. Sofyan Yahya melakukan pendekatan dialogis dengan masyarakat pemilih. Pendekatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencari dukungan dari masyarakat dengan terlebih dahulu memberikan pemahaman tentang DPD. Masyarakat belum memahami secara jelas tentang DPD. Masyarakat banyak bertanya tentang tugas dan fungsi serta kewenangan DPD. K.H. Sofyan Yahya menjelaskan secara rinci tentang di DPD kepada masyarakat pemilih. Dialog yang dilakukan K.H. Sofyan Yahya senantiasa bertempat di madrasah-madrasah atau tempat-tempat majlis ta'lim. Dalam dialog tersebut ia pun meminta do'a kepada jama'ah atas pencalonannya. Dialog yang pernah beliau lakukan antara lain di pesantren Nurul Iman Bekasi pada bulan Pebruari 2004.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan A.S. Padli pada tanggal 12 Desember 2006

K. H. Sofyan Yahya adalah seorang kiai dan tokoh agama sehingga ketika melakukan dialog dengan masyarakat pemilih ia senantiasa mengembangkan isu politiknya yang lebih menitik beratkan aspek moralitas dalam mewujudkan negara Indonesia yang adil dan makmur. Pentingnya moralitas tersebut maka para tokoh agama bisa memasuki lembaga negara tanpa terikat ideologi dan kepentingan partai politik, tokoh agama bisa berperan dalam rangka menjaga dan mengawasi moralitas bangsa melalui lembaga baru yakni DPD. Oleh karenanya, NU Jawa Barat mengusung beliau untuk mewakili ulama Jawa Barat dalam melakukan peran *hubbul wathan* (cinta tanah air).<sup>97</sup>

K. H. Sofyan Yahya sebagai tokoh agama daerah sangat menampakkan keberpihakannya kepada Jawa Barat dengan senantiasa merujuk pemikirannya kepada program Jawa Barat. Tetapi beliau tetap mementingkan unsur nasional dalam perannya di DPD. Hal ini dapat terlihat dari visi dan misinya yang akan ia lakukan. Visinya adalah terbangunnya tatanan masyarakat yang bermoral, berdaya, berkeadilan dan demokratis. Visi ini tidak lepas dari visi Jawa Barat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No 1 Tahun 2003 dan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2004 yaitu, Jawa Barat dengan iman dan taqwa sebagai provinsi termaju di Indonesia dan mitra terdepan Ibukota Negara tahun 2010.<sup>98</sup>

Untuk mewujudkan visi tersebut, sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh anggota DPD, Sofyan Yahya menetapkan misi antara lain, memperjuangkan nilai-nilai moral dan agama sebagai landasan perjuangan yang akan diraih melalui upaya membangun komitmen bersama

---

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan K.H. Sofyan Yahya pada tanggal 7 November 2006

<sup>98</sup> *Ibid*

segenap elemen bangsa terutama pembuat perundang-undangan yang mempunyai moral dan menghayati nilai-nilai agama serta memberikan contoh tauladan dalam aflikasinya. Selain itu memperjuangkan perimbangan keuangan pusat dan daerah dapat dicapai melalui pedoman pembagian keuangan dengan prinsip-prinsip asas manfaat dan daya guna dengan prioritas pada kesejahteraan rakyat juga memperjuangkan visi Jawa Barat yaitu: Jawa Barat dengan iman dan taqwa sebagai provinsi termaju di Indonesia dan mitra terdepan Ibukota Negara tahun 2010, sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> *Ibid*

**BAB V**  
**KAMPANYE ANGGOTA DPD JAWA BARAT**  
**PADA PEMILU 2004**

Kampanye merupakan salah satu kegiatan peserta pemilu tahun 2004. Kampanye berguna untuk memperkenalkan calon kepada khalayak dan menyampaikan visi, misi dan program kerja. Kegiatan ini diharapkan dapat menarik simpatik publik sehingga pada waktu pencoblosan dapat memilih calon yang berkampanye tersebut. Penjelasan tentang kampanye anggota DPD Jawa Barat dianggap penting untuk dibahas karena, untuk mengetahui bentuk kampanye dan isu yang dilontarkan masing-masing calon anggota DPD Jawa Barat pada pemilu 2004. Dalam memaparkan kampanye anggota DPD Jawa Barat meliputi *pertama*, ketentuan-ketentuan kampanye pada pemilu 2004. *Kedua*, Pelaksanaan kampanye anggota DPD.

**Ketentuan-Ketentuan Kampanye Pada Pemilu 2004**

Kampanye pemilu 2004 di Jawa Barat dilaksanakan mulai tanggal 11 Maret sampai dengan 1 April 2004. Kegiatan kampanye dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Selama 3 hari terhitung mulai tanggal 2 sampai dengan 4 April merupakan masa tenang, sehari kemudian pada tanggal 5 April 2004 dilaksanakan pencoblosan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Laporan KPU Provinsi Jawa Barat atas penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2004

Kegiatan kampanye dilakukan oleh peserta pemilu tahun 2004 selama 21 hari. Dengan 21 hari tersebut seorang peserta pemilu harus mampu memanfaatkan waktu dengan tepat dan efektif sehingga kampanye yang dilakukan dapat membuahkan hasil yang memuaskan dengan melihat hasil perolehan suara pada hari pencoblosan. Kampanye merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, dan tingkah laku objek (komunikan). Dengan demikian tujuan dari kampanye adalah penyampaian pesan-pesan politik berupa program dan pandangan kandidat kepada masyarakat agar mereka mengetahuinya dan tertarik. Setelah tertarik, massa pemilih diharapkan akan menjatuhkan pilihannya pada kandidat tersebut pada hari pencoblosan.<sup>2</sup>

Dalam menguraikan berkaitan dengan ketentuan kampanye yang telah ditetapkan KPU pada pemilu 2004 meliputi dua aspek: *Pertama*, bentuk-bentuk kampanye. *Kedua*, Ketentuan larangan dan sanksi dalam kampanye pemilu 2004.

### **Bentuk-Bentuk Kampanye**

Bentuk-bentuk kampanye pada pemilu 2004 telah ditetapkan oleh KPU dengan berdasarkan Undang-undang pemilu tahun 2003. Di bawah ini dijelaskan secara rinci tentang kampanye yang dikutip dari draf keputusan KPU tentang petunjuk teknis kampanye pemilihan umum anggota DPD yang disusun dan disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum,<sup>3</sup> sebagai berikut :

- a. Pertemuan terbatas
- b. Tatap muka

---

<sup>2</sup> Maswadi Rauf, *Konsensus dan Konflik Politik Sebuah Penjajagan Teoritis* (Jakarta: DIKTI, 2001) hlm 131-136

<sup>3</sup> Keputusan itu berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 12 Tahun 2003, Pasal 72

- c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
- d. Penyiaran melalui radio dan/atau televisi
- e. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
- f. Pemasangan alat peraga di tempat umum
- g. Rapat umum dan
- h. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan

Untuk lebih jelas setiap bagian teknis kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu akan dibahas lebih lanjut, sebagai berikut:

**a). Pertemuan Terbatas**

Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup. Jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk. peserta yang menghadiri antara lain para pendukung dan undangan lainnya. Dalam pertemuan terbatas dibenarkan membawa atau menggunakan atribut seperti nomor urut, foto calon, brosur, buku, simbol-simbol, dan atau umbul-umbul dari calon yang mengadakan kampanye dipertemuan terbatas tersebut. Atribut calon tersebut dipasang di halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas, dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau pertemuan terbatas. Dalam kampanye bentuk pertemuan terbatas harus disertai dengan undangan tertulis.

**b). Tatap Muka dan Dialog**

Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog dilaksanakan dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui

kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk. Peserta yang menghadiri kampanye tatap muka dan dialog antara lain para pendukung dan undangan lainnya. Dalam kampanye tersebut diadakan dialog yang sifatnya interaktif. Dalam kampanye tersebut dibenarkan membawa atribut kampanye seperti foto calon, simbol-simbol, dan atau bendera atau umbul-umbul dari calon yang mengadakan kampanye. Atribut pasangan calon tersebut dipasang di halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog, dan tidak dibenarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan tatap muka dan dialog sampai jarak dengan jarak 200 (dua ratus) meter. Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog harus disertai dengan undangan tertulis.

**c). Penyebaran melalui Media Cetak dan Media Elektronik**

Kampanye dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan media elektronik dilaksanakan melalui media cetak dan media elektronik dengan memberi kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi dan program kampanye dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional. Materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta media elektronik dan media cetak dapat menyediakan rubrik khusus bagi para calon sehingga penyelenggaraan dan penyampaian visi, misi dan program kampanye oleh dan/atau melalui media massa pada masa kampanye dapat dilakukan sepanjang disertai penjelasan kelebihan dan kekurangan metodologi yang digunakan, misalnya jajak pendapat umum (*polling*) dan survey,

sehingga tidak mengelabui masyarakat. Batas pemasangan iklan kampanye melalui media cetak ditentukan :

- Kampanye untuk setiap pasangan calon pada surat kabar atau harian secara kumulatif adalah 1 (satu) halaman untuk tiap minggu/tiap surat kabar atau harian.
- Kampanye untuk setiap pasangan calon pada surat kabar atau majalah atau tabloid atau mingguan secara kumulatif adalah 2 halaman setiap terbit.

**d). Penyiaran melalui Radio dan/atau Televisi**

Kampanye dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/atau televisi dilaksanakan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh seorang calon tidak dapat dimanfaatkan oleh calon lainnya. Dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif), apabila yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya). Penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi melalui media cetak atau media elektronik kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum melalui kampanye.

Kampanye dalam bentuk promosi dilarang:

- Menyerang, menghina, melecehkan pasangan calon lainnya
- Menggunakan efek-efek bunyi atau gambar yang dapat menimbulkan ketakutan, kegelisahan, atau menyesatkan
- Menggunakan bahasa atau kalimat yang tidak sopan, tidak senonoh, pornografi, atau oleh masyarakat umum dianggap tidak pantas atau tidak lazim

- Memuat materi yang menghina suku, agama, ras, antar golongan tertentu
- Menayangkan pada siaran atau program untuk anak-anak.

Lembaga Penyiaran berhak menentukan tarif secara khusus untuk iklan calon dan/atau tim kampanye yang berlaku bagi setiap pasangan calon dan/atau tim kampanye, tanpa kecuali. Lembaga penyiaran wajib menayangkan iklan kampanye, sesuai dengan kesempatan antara lembaga penyiaran dan calon dan/atau tim kampanye. Biaya produksi dan penayangan iklan kampanye ditanggung oleh calon dan/atau tim kampanye dengan kewajiban membayar di muka sebelum iklan ditayangkan.

Isi siaran kampanye wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Format siaran iklan kampanye calon dan/atau tim kampanye bersifat bebas kreatif dan selanjutnya diatur oleh lembaga penyiaran. Format siaran iklan kampanye yang mirip, menyerupai dan/atau dapat ditafsirkan seperti siaran informasi, pendidikan, hiburan, dan jajak pendapat wajib terlebih dahulu diberitahukan kepada pemirsa/pendengar dengan mencantumkan kata “IKLAN” pada layar untuk televisi dan pemberitahuan iklan di awal dan di akhir segmen siaran iklan pada radio.

Untuk dapat menjamin peluang yang adil bagi setiap calon, frekuensi dan durasi siaran iklan diatur:

- 1). Iklan pendek di waktu yang utama (*prime time*), tiap calon dapat menayangkan paling banyak 5 tayangan dengan durasi paling lama 90 detik setiap hari di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye.
- 2). Iklan pendek di waktu tayang biasa (*regular time*), tiap calon dapat menayangkan paling banyak 10 tayangan dengan durasi paling lama 90 detik setiap hari di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye.

- 3). Iklan panjang (*advertorial*) di waktu tayang utama, tiap calon dapat menayangkan paling banyak 3 tayangan dengan durasi paling lama 180 detik setiap hari di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye.
- 4). Iklan panjang (*advertorial*) di waktu tayang biasa, tiap calon dapat menayangkan paling banyak 3 tayangan dengan durasi paling lambat 180 detik setiap hari di setiap lembaga penyiaran selama masa kampanye.
- 5). Acara dialog (*talkshow*), tiap calon dapat menayangkan paling banyak 1 tayangan dengan durasi paling lama 90 menit setiap minggu di setiap lembaga penyiaran selama kampanye.
- 6). Frekuensi dan durasi paling lama tayangan iklan kampanye calon sebagaimana dimaksud pada a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e termasuk bonus yang diberikan oleh lembaga penyiaran.

Pihak lain di luar calon dan/atau tim kampanye dilarang memesan iklan kampanye untuk pasangan calon yang bersangkutan di lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran wajib membuka kesempatan siaran iklan gratis pada tiap calon berdurasi 2 (dua) menit paling banyak 1 (satu) kali setiap hari selama masa kampanye. Biaya produksi untuk iklan gratis ditanggung oleh calon dan/atau tim kampanye. Ketentuan format dan materi ditentukan oleh lembaga penyiaran.

**e). Penyebaran bahan kampanye kepada umum**

Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan atau di tempat-tempat umum yaitu berupa selebaran, stiker, kaos, topi, barang-barang cinderamata (korek api, gantungan kunci, pin, asesoris, minuman dan atau barang-barang lain) dengan logo nomor urut dan foto calon.

**f). Pemasangan alat peraga di tempat umum**

Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum, ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh pemerintah

daerah setempat, serta tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah), jalan-jalan protokol dan jalan bebas hambatan, serta tempat milik perseorangan atau badan swasta kecuali izin pemilik tempat yang bersangkutan serta harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan (Peraturan Daerah). Pemasangan alat peraga kampanye calon berjarak sekurang-kurangnya 1 meter dari alat peraga peserta pemilihan lainnya. Alat peraga kampanye tersebut harus sudah dibersihkan oleh peserta pemilihan yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, khususnya pada radius 200 m dari tempat-tempat pemungutan suara.

**g). Rapat Umum**

Kampanye dalam bentuk rapat umum dilaksanakan pada ruang terbuka (lapangan, stadion, alun-alun) yang dihadiri oleh massa dari pendukung dan warga masyarakat lainnya dengan tetap memperhatikan kapasitas (daya tampung tempat-tempat tersebut), dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 16.00 waktu setempat. Dalam kampanye rapat umum harus menyesuaikan dengan hari dan waktu ibadah agama di Indonesia serta membawa atau menggunakan gambar calon, spanduk, brosur, baliho dan umbul-umbul.

#### **h) Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Peraturan Perundang-undangan**

Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu seperti acara ulang tahun, kegiatan sosial/budaya, perlombaan olah raga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan masa pada satu tempat tertentu.

#### **Ketentuan Larangan dan Sanksi dalam Kampanye Pemilu 2004**

Perubahan sikap dan perilaku pemilih sehingga mendukung kandidat yang ditawarkan dalam kampanye yang dibuktikan pada hari pencoblosan merupakan target dari sebuah kampanye. Persaingan yang ketat antar kontestan pemilu dengan pencapaian target yang sama memungkinkan kampanye dapat menjadi sebuah konflik yang terbuka. Untuk menghindari wahana kampanye sebagai ajang pendidikan politik berubah menjadi konflik terbuka maka diperlukan sebuah aturan yang menjadi rambu-rambu untuk mencegah munculnya konflik. Ketentuan larangan dalam sebuah kampanye selain merujuk UU Pemilu nomor 12 tahun 2004 juga disepakati oleh seluruh peserta pemilu DPD yang difasilitasi KPU Provinsi. Ketentuan itu antara lain:

- 1) Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu yang lain.
- 3) Menghasut dan mengadu domba antar perseorangan maupun antar kelompok masyarakat.
- 4) Mengganggu ketertiban umum.
- 5) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan atau peserta pemilu yang lain.
- 6) Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta lain.

- 7) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Selanjutnya di dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum tahun 2004 dilarang melibatkan:

- 1) Ketua/wakil ketua/ketua muda/Hakim Agung/Hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim-hakim pada semua badan peradilan.
- 2) Ketua/wakil ketua dan anggota Badan pemeriksa Keuangan.
- 3) Gubernur, Deputy Gubernur dan Deputy Gubernur Bank Indonesia.
- 4) Pejabat BUMN/BUMD.
- 5) Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri.
- 6) Kepala desa atau sebutan lain.

Di samping hal-hal tersebut di atas bagi pejabat negara yang berasal dari partai politik, yaitu Presiden/Wakil Presiden/Menteri/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/ Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota di dalam pelaksanaan kampanye harus memenuhi kriteria atau ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
- 2) Menjalankan cuti di luar tanggungan negara.
- 3) Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara.
- 4) Menyampaikan tembusan surat cuti tersebut sesuai dengan tingkatannya kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

Demikian pula bagi pejabat negara tersebut di atas dilarang menggunakan dana, personalia, inventaris, peralatan atau sumber daya berupa fasilitas negara lainnya untuk pelaksanaan kampanye pemilihan umum, kecuali yang telah secara khusus diwajibkan atau diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Bagi pejabat negara tersebut yang akan melaksanakan kampanye wajib melaporkan

secara tertulis waktu dan tempat kampanye selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kampanye kepada KPU sesuai tingkatannya.

Selama masa kampanye sampai dilaksanakan pemungutan suara calon anggota DPR, DPD dan DPRD dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Bagi anggota DPD yang mendapatkan sumbangan besarnya lebih dari Rp. 5.000.000,00 diwajibkan melaporkan sumbangan tersebut berikut identitas penyumbang selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah kampanye yakni pada hari selasa tanggal 6 April 2004. Kepada peserta pemilu yang tidak melaporkan sumbangan dana kampanye diberikan teguran tertulis.

Sehubungan dengan pelaksanaan kampanye pemilu 2004 di Jawa Barat menurut data dari Panwaslu Provinsi Jawa Barat banyak terjadi pelanggaran antara lain pelanggaran lalu lintas 40%, melibatkan anak-anak di bawah umur 7 tahun 28%, pemasangan atribut dan alat peraga 10%, masa memasuki daerah pemilihan lain 9% dan kampanye di luar jadwal 2%.<sup>4</sup>

Terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut KPU Provinsi Jawa Barat telah memberikan sanksi berupa peringatan tertulis kepada peserta pemilu yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) surat peringatan. 2 (dua) di antaranya ditujukan kepada calon DPD yang melibatkan PNS dalam pelaksanaan kampanye.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Laporan Panwaslu Jawa Barat pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2004 di Provinsi Jawa Barat halaman 76

<sup>5</sup> Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2004 di Provinsi Jawa Barat oleh KPU Provinsi Jawa Barat halaman 78-82

### **Pelaksanaan Kampanye Anggota DPD Jawa Barat Pada Pemilu 2004**

Kampanye anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Provinsi Jawa Barat akan dibahas dalam bab ini dengan menguraikan satu persatu anggota DPD Jawa Barat. Pembahasan ini dengan maksud untuk menganalisa dan menggambarkan efektifitas kampanye terhadap perolehan suara yang diraih oleh masing-masing anggota DPD. Pembahasan tersebut meliputi bentuk-bentuk kampanye dan isu kampanye.

#### **Ginandjar Kartasasmita**

Pembahasan kampanye yang dilakukan oleh Ginandjar Kartasasmita beserta tim suksesnya meliputi bentuk-bentuk kampanye yang dilaksanakan dan isu kampanye atau isu politik yang dilontarkannya.

#### **Bentuk-Bentuk Kampanye**

Ginandjar Kartasasmita melakukan beberapa bentuk kampanye yang telah ditentukan oleh KPU antara lain pertemuan terbatas, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga ditempat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

##### **a). Pertemuan Terbatas**

Ginandjar Kartasasmita dan tim suksesnya melakukan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas antara lain di Kota Bandung. Kampanye terbatas diadakan di gedung olah raga Sagarua dengan undangan yang terbatas pada

tanggal. 22 Maret 2004. Peserta yang hadir dalam kampanye terbatas tersebut kebanyakan dari pengurus Paguyuban Pasundan beserta keluarga ditambah dengan tokoh-tokoh sepuh yang berada di Kota Bandung. Dalam orasinya Ginandjar Kartasasmita lebih mengedepankan pentingnya DPD dalam percaturan politik nasional yang diharapkan dapat lebih memajukan daerah khususnya Jawa Barat. Ia mengemukakan visi dan misi serta program kerja yang akan dilakukan apabila terpilih sebagai anggota DPD sebagaimana telah disebutkan dalam bab III.

Pertemuan tersebut diisi pula dengan panggung seni khas Jawa Barat seperti Tarling (gitar dan suling) dan tari Jaipongan. Dalam pertemuan tersebut dibagikan atribut-atribut beliau baik foto, brosur maupun buku visi, misi dan program kerja beliau. Ginandjar berharap dan meminta dukungan dari undangan yang hadir untuk mencoblos beliau pada waktu hari pencoblosan pada pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004.<sup>6</sup>

Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas yang dilakukan Ginandjar Kartasasmita diadakan juga diberbagai daerah. Namun tidak bisa seluruh kabupaten/kota dapat dikunjungi karena terbatasnya waktu. Jadwal kampanye hanya 21 hari sedangkan kabupaten/kota di Jawa Barat terdapat 25 kabupaten/kota. Solusi yang diambil oleh tim sukses adalah dengan menggabungkan kabupaten/kota yang berdekatan seperti Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung, Sukabumi dengan Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor, Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Tasik dengan Kabupaten Tasikmalaya.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan ketua tim sukses Ginandjar Kartasasmita yaitu Nugraha Besoes pada tanggal 15 November 2006.

**b). Penyebaran bahan kampanye kepada umum**

Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan atau di tempat-tempat umum yaitu menyebarkan selebaran stiker, kaos, topi, barang-barang cinderamata (gantungan kunci, pin, dan asesoris) dengan logo nomor urut Ginandjar Kartasasmita yakni nomor 26 dan foto Ginandjar Kartasasmita.<sup>7</sup>

Tim sukses Ginandjar Kartasasmita menyebarkan pula bahan-bahan kampanye melalui struktur tim sukses yang lebih bawah yakni melalui struktur tingkat cabang dan kelompok-kelompok masyarakat pemilih seperti kaos disebarakan kepada seluruh pengurus dan anggota Paguyuban Pasundan, seluruh anggota HKTI, seluruh anggota AMS. Selain itu kaos-kaos disebarakan ke berbagai terminal seperti di terminal Leuwipanjang Bandung, Terminal Tasikmalaya, terminal Bogor, dan terminal Sukabumi. Pada kaos tersebut bergambarkan foto Ginandjar Kartasasmita dan nomor urut 26.

Bahan-bahan kampanye yang lain disebarakan pula oleh tim sukses Ginandjar Kartasasmita seperti stiker. Stiker ditempel di kendaraan-kendaraan umum seperti angkot diseluruh Bandung, Kabupaten Bandung dan Cimahi seantiasa ditempel stiker Ginandjar Kartasasmita. Stiker tersebut berlogokan coblos Ginandjar Kartasasmita nomor 26 disertai dengan nama dan foto serta nomor urut Ginandjar Kartasasmita. Begitu pula di angkutan luar kota seperti Bandung-Cirebon, Bandung Sukabumi, Bandung-Jakarta dan Bandung Sukabumi.

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Iyus Rustandi pada tanggal 29 November 2006

Stiker juga ditempel di setiap rumah pengurus Paguyuban Pasundan, pengurus dan anggota HKTI, pengurus dan anggota AMS dan rumah-rumah masyarakat yang bersedia untuk ditemplei stiker Ginandjar Kartasasmita. Di Kabupaten Sumedang setaip rumah dan gang di masyarakat senantiasa akan ditemui stiker Ginandjar Kartasasmita.<sup>8</sup>

Begitu pula disebarakan kepada masyarakat brosur Ginandjar Kartasasmita dengan bertuliskan "Tong Hilap Coblos No 26. Prof. Dr. H. Ginandjar Kartasasmita Calon Anggota DPD Jawa Barat." Selain itu terpampang juga liflet yang dipasang ditempat-tempat umum antara lain di tempat halte Bus, Terminal dan Mall dengan bertuliskan "Percantenkeun wae ka Wakil nu tos pangalaman Prof. Dr. H. Ginandjar Kartasasmita Calon Anggota DPD Jawa Barat No. 26."

### **c). Pemasangan alat peraga di tempat umum**

Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum, ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh pemerintah daerah setempat, serta tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah), jalan-jalan protokol dan jalan bebas hambatan, serta tempat milik perseorangan atau badan swasta kecuali izin pemilik tempat yang bersangkutan serta harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan (Peraturan Daerah).

---

<sup>8</sup> *Ibid*

Kampanye dengan menggunakan media pemasangan alat peraga di tempat umum digunakan oleh seluruh kandidat anggota DPD Jawa Barat tidak terlepas keempat pemenang pemilu. Pemasangan berbentuk spanduk atau baliho dipasang di tempat-tempat yang menjadi keramaian umum seperti terminal, pasar, swalayan, perempatan jalan raya dan di jalan-jalan yang ramai dilewati oleh pengendara roda empat atau roda dua. Rata-rata alat peraga tersebut berisikan nomor urut, foto Ginandjar Kartasasmita dan mohon dukungan yang ditulis secara singkat dan padat seperti spanduknya Ginandjar Kartasasmita yang terpampang di tugu perjuangan Unpad Bandung bertuliskan "Calon anggota DPD Jawa Barat Ginandjar Kartasasmita." Nomor Urut 26 disertai dengan foto beliau. Begitu pula spanduk yang terpampang di perempatan tol padalarang. Perempatan tersebut adalah tempat keluar masuknya kendaraan dari Bandung ke arah Jakarta, Sukabumi, Cianjur, Purwakarta, dan Bogor. Di perempatan tersebut terpampang spanduk Ginandjar Kartasasmita.<sup>9</sup>

Selain itu di perempatan Cileunyi terpampang juga spanduk Ginandjar Kartasasmita. Perempatan Cileunyi adalah tempat keluar masuknya kendaraan arah Bandung ke Sumedang, Majalengka, Cirebon, Tasikmalaya, Garut Ciamis, dan Banjar. Spanduk-spanduk tersebut bertuliskan "Calon anggota DPD Jawa Barat Prof.Dr. H. Ginandjar Kartasasmita" nomor urut 26 disertai dengan foto beliau. Spanduk-spanduk tersebut juga antara lain terpampang di sekitar kota Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi dan Sumedang.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*

#### **d) Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Peraturan Perundang-undangan**

Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu seperti acara ulang tahun, kegiatan sosial/budaya, perlombaan olah raga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan masa pada satu tempat tertentu.

Ginandjar Kartasasmita menggunakan kegiatan sosial/budaya sebagai ajang kampanye seperti yang dilakukannya terhadap anggota HKTI di Majalengka dengan melakukan dialog langsung dan memberikan benih padi serta pupuk secara gratis kepada petani.<sup>11</sup> Begitu pula beliau melakukan kegiatan budaya dengan menghadiri gelar seni budaya yang diadakan Paguyuban Pasundan di Gedung Aula Unpas. Serta mengunjungi tempat-tempat perguruan silat yang berada di sekitar Bandung seperti kunjungannya terhadap perguruan pencak silat Tajimalela di Ujungberung Bandung.<sup>12</sup>

#### **Isu Kampanye**

Kampanye pada dasarnya adalah penyampaian pesan-pesan dari pengirim kepada masyarakat pemilih. Pesan-pesan tersebut dapat disampaikan dalam berbagai bentuk mulai dari poster, spanduk, baligo (*billboard*), pidato, diskusi, iklan, hingga selebaran. Apapun bentuknya, pesan-pesan selalu menggunakan simbol, baik verbal maupun nonverbal, yang diharapkan dapat memancing respon masyarakat pemilih.

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Umum HKTI Jawa Barat Ir. Rudy Gunawan pada tanggal 12 Januari 2007

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Iyus Rustandi pada tanggal 29 November 2006

Tujuan kampanye hanya dapat dicapai bila khalayak memahami pesan-pesan yang ditujukan pada mereka. Ketidakmampuan mengkonstruksi pesan sesuai dengan khalayak sasaran yang dihadapi merupakan awal dari kegagalan sebuah program kampanye bahkan lebih jauh lagi dapat menjadi *boomerang effect*.

Isu kampanye yang dilontarkan Ginandjar Kartasasmita tertuang dalam rumusan visinya sebagai anggota DPD yakni mewujudkan lembaga perwakilan yang berwibawa, kuat, modern dan mampu memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dan daerah dalam bingkai NKRI. Selain itu, adalah mewujudkan kehidupan masyarakat dan daerah yang demokratis, maju, sejahtera, dan adil.

Derivasi dari visi Ginandjar tercermin dalam misinya. Ia merumuskan misi sebagai anggota DPD adalah meningkatkan akomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat dan daerah menjadi kebijakan dan putusan di tingkat nasional (pusat). Selain itu, mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan daerah dalam pembangunan daerah dan nasional, mengembangkan demokrasi di tingkat daerah dan nasional, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dan daerah dalam pembangunan dan menjaga keutuhan NKRI. Juga mengupayakan agar putusan dan kebijakan nasional (pusat) senantiasa sejalan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat dan daerah.

Menurut Ginandjar, tantangan yang dihadapi sebagai anggota DPD adalah lemahnya wewenang DPD sebagaimana diatur dalam UUD 1945, mengaburkan tujuan dibentuknya DPD sekaligus menjadikan lembaga ini lebih sulit dan berat dalam menjalankan tugasnya. Terutama jika dikaitkan dengan

kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politik kepada pemilih dan daerah pemilihannya. DPD secara bertahap harus diusahakan agar mempunyai kewenangan yang seimbang dengan kewajiban dan harapan masyarakat atas kehadirannya.

Dengan demikian isu yang dilontarkan Ginandjar Kartasasmita dapat terbagi kepada dua aspek. Pertama adalah pembaharuan kelembagaan DPD. DPD dalam pandangan Ginandjar tidak membawa kekuatan politik untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan daerah sehingga diperlukan penguatan akan kewenangan DPD. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. DPD sebagai lembaga yang menampung aspirasi daerah dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memudahkan kepentingan daerah masuk dalam kebijakan nasional.

Dalam rangka memuluskan visi dan misi supaya dapat mudah dipahami oleh masyarakat maka Ginandjar Kartasasmita menuangkan dalam alat-alat kampanye yang ditulis secara singkat, padat dan menarik. Akan tetapi kampanye pemilihan anggota DPD Jawa Barat lebih mengedepankan pendekatan emosional kedaerahan dan keorganisasian. Tim sukses Ginandjar Kartasasmita ketika melakukan kampanye di Aula Tajimalela Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang merupakan tempat tinggal Ginandjar Kartasasmita. Dalam kampanye tersebut mengembangkan isu kampanye yang mengangkat emosi kedaerahan seperti yang terpampang dalam spanduk dan baliho yang dipasang di Aula Tajimalela Kabupaten Sumedang. Dalam spanduk dan baliho tersebut tertulis "Hayu Urang dukung Pak Ginandjar Kartasasmita calon asli orang Sumedang jadi anggota DPD" terpampang juga tulisan "Ginandjar Kartasasmita Putra Terbaik dari

Sumedang" selain itu tertulis nomor urut calon dan foto Ginandjar. Pada kampanye tersebut dibagikan juga brosur Ginandjar yang memuat nomor urut calon, foto dan riwayat singkat Ginandjar.<sup>13</sup>

Spanduk-spanduk Ginandjar Kartasasmita yang terpampang untuk daerah-daerah di luar Sumedang terpampang di jalan-jalan raya protokol, di pasar-pasar, terminal-terminal dan di mall-mall. Spanduk-spanduk tersebut bertuliskan "Prof. Dr. Ir. H. Ginandjar Kartasasmita calon anggota DPD dari Provinsi Jawa Barat" dilengkapi dengan foto dan nomor urut Ginandjar. Begitu pula brosur-brosur yang beredar di masyarakat berisikan riwayat singkat, nomor urut dan foto Ginandjar dengan terpampang dilembar depannya seperti pada spanduk di atas. Stiker-stiker yang ditempel di angkutan-angkutan umum berisikan foto, nomor urut calon dengan tulisan besar di atasnya "Prof. Dr. Ir. H. Ginandjar Kartasasmita calon anggota DPD dari Provinsi Jawa Barat".<sup>14</sup>

Kata-kata yang terpampang pada Spanduk di Kabupaten Sumedang lebih mengarah kepada primordialisme daerah. Masyarakat diarahkan untuk memilih putra terbaik Sumedang, Ginandjar Kartasasmita. Sedangkan Spanduk yang terpampang di luar Sumedang hanya mengajak masyarakat Jawa Barat untuk memilih Ginandjar atau lebih bersifat memberi tahu kepada masyarakat Jawa Barat bahwa Ginandjar Kartasasmita mencalonkan diri menjadi anggota DPD dari Jawa Barat.

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Iyus Rustandi pada tanggal 29 November 2006

<sup>14</sup> *Ibid*

Ginandjar dan tim suksesnya mencoba mengangkat Ginandjar sebagai tokoh Jawa Barat yang telah berpengalaman dalam politik dan memiliki keunggulan intelektual serta integritas yang tinggi kepada Jawa Barat. Hal ini dapat dilihat dari Spanduk yang terpampang di Kota Sukabumi bertuliskan "Prof.Dr. H. Ginandjar Kartasasmita Tokoh Jawa Barat Calon Anggota DPD". Selain itu terdapat pula spanduk yang bertuliskan "Pilihlah Anggota DPD Jawa Barat Anu Pinter, Nyunda jeung Bageur, Prof. Dr. H. Ginandjar Kartasasmita". Spanduk itu terpampang di Alun-alun Soreang Kabupaten Bandung. Terdapat pula spanduk yang bertuliskan "Warga Pasundan Ngadukung Prof. Dr. H. Ginandjar Kartasasmita Janten Anggota DPD Ngawakilan Jawa Barat." Spanduk-spanduk tersebut dilengkapi dengan foto dan nomor urut Ginandjar Kartasasmita.

### **Pangeran Arief Natadiningrat**

Pembahasan tentang kampanye anggota DPD Jawa Barat pada pemilu 2004 yang dilakukan Pangeran Arief Natadiningrat meliputi bentuk-bentuk kampanye dan isu kampanye.

### **Bentuk-Bentuk Kampanye**

Bentuk-bentuk kampanye yang dilakukan Pangeran Arief Natadiningrat untuk meraih simpatik masyarakat pemilih antara lain penyebaran melalui media cetak dan elektronik, penyiaran melalui radio dan/atau televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, rapat umum dan kegiatan lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

**a) Penyebaran melalui Media Cetak dan Media Elektronik**

Pangeran Arief Natadiningrat melakukan kampanye dengan menggunakan media cetak untuk meraih suara pemilih. Media cetak yang digunakan Pangeran Arief Natadiningrat adalah media cetak daerah Cirebon yaitu Pikiran Rakyat edisi khusus Cirebon. Media cetak tersebut tersebar di wilayah Cirebon, Indramayu, Kuningan dan Subang. Tulisan dalam media tersebut antara lain memuat foto, visi, dan misi beliau menjadi anggota DPD serta meminta dukungan masyarakat Cirebon untuk mendukungnya menjadi anggota DPD RI. Kampanye melalui media cetak dilakukan satu kali karena Pangeran Arief yakin bahwa asal masyarakat Cirebon tahu bahwa beliau mencalonkan diri pasti masyarakat akan mendukungnya.<sup>15</sup>

**b) Penyiaran melalui Radio dan/atau Televisi**

Kampanye melalui penyiaran radio dan televisi tidak banyak digunakan oleh keempat anggota DPD Jawa Barat. Di antara yang menggunakannya adalah Pangeran Arief Natadiningrat. Ia hanya menggunakan satu kali di radio swasta Cirebon dalam acara dialog interaktif dengan pemirsa. Pangeran Arief Natadiningrat hanya membeberkan visi, misi dan program kerja apabila ia terpilih menjadi anggota DPD RI. Terjadi dialog dengan pendengar tentang DPD berkaitan dengan landasan berdiri DPD, tugas dan fungsi DPD. Dalam siaran tersebut masyarakat Cirebon mengharapkan Pangeran Arief mewakili Cirebon.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Pangeran Arief Natadiningrat pada tanggal 7 November 2006

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Pangeran Arief Natadiningrat pada tanggal 7 November 2006

### **c) Penyebaran bahan kampanye kepada umum**

Pangeran Arief Natadiningrat melakukan pula kampanye dengan menyebarkan bahan kampanye kepada masyarakat pemilih. Bahan kampanye yang disebarkan antara lain berupa selebaran, stiker, kaos, topi, barang-barang cinderamata (korek api, gantungan kunci, pin, dan asesoris). Bahan-bahan kampanye tersebut berisikan calon anggota DPD, nomor urut 5 dan foto Pangeran Arief Natadiningrat.

Tim sukses Pangeran Arief Natadiningrat menyebarkan bahan-bahan kampanye tersebut antara lain di masyarakat Cirebon, di setiap rumah ditemplei stiker Pangeran Arief dan setiap gang senantiasa terpampang poster Pangeran Arief. Penyebaran ini dilakukan oleh aparat RT/RW setempat, karena seluruh tokoh di Cirebon mendukung pencalonannya. Bahan-bahan kampanye juga disebarkan ditempat-tempat yang sering dikunjungi masyarakat antara lain di terminal Cirebon dan Indramayu sebagai titik fokus peraihan suara. Stiker dan brosur tersebut diberikan kepada setiap yang datang ke terminal begitu juga di mall-mall yang berada di Cirebon bahkan stiker ditempel di setiap kendaraan angkutan umum baik angkutan kota, bis maupun metromini.<sup>17</sup>

Bahan-bahan kampanye juga disebarkan dibeberapa daerah seperti di Bekasi melalui jaringan pengusaha yang tergabung dalam Hipmi Bekasi. Begitu pula di Bandung melalui perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Hipmi. Bahan-bahan kampanye juga disebarkan melalui kawan-kawan Pangeran Arief yang aktif di partai politik seperti untuk daerah Bogor, Sukabumi dan Cianjur.

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan deni pada tanggal 17 Januari 2007

Bahan-bahan kampanye tersebut antara lain biografi, visi dan misi Pangeran Arief Natadiningrat dalam berbentuk buku saku. Buku saku tersebut berisikan riwayat keluarga Pangeran Arief Natadiningrat sebagai keturunan dari Sunan Gunung Djati dan penerus tahta Kesultanan Cirebon. Selain itu dikemukakan visi dan misi Pangeran Arief sebagai anggota DPD sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya.

#### **d) Pemasangan alat peraga di tempat umum**

Kampanye dengan menggunakan media pemasangan alat peraga di tempat umum digunakan oleh Pangeran Arief Natadiningrat. Pemasangan berbentuk spanduk atau baliho dipasang di tempat-tempat yang menjadi keramaian umum seperti terminal, pasar, swalayan, perempatan jalan raya dan di jalan-jalan yang ramai dilewati oleh pengendara roda empat atau roda dua. Alat-alat peraga tersebut berisikan nomor urut 5, foto Pangeran Arief dan mohon dukungan yang ditulis secara singkat dan padat seperti spanduknya Pangeran Arief Natadiningrat di Terminal Leuwipanjang Bandung, di jalan tol Cileunyi, di terminal Cicaheum Bandung, di sepanjang jalan kota Cirebon dan Indramyu. Spanduk dan baliho tersebut bertuliskan "Calon anggota DPD Jawa Barat", dilengkapi nama, nomor urut 5 dan foto Pangeran Arief Natadiningrat. Spanduk.<sup>18</sup>

Pangeran Arief Natadiningrat mencoba menarik primordialisme daerah dengan memasang baliho di pintu masuk Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon dengan terpampang foto Pangeran Arief dengan dilatari foto keraton Kesultanan

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Iwan Kustiawan pada tanggal 23 November 2006

Cirebon. Dalam baliho tersebut tertulis "Kesultanan Cirebon Tanda Kebesaran Cirebon, Pilih Raja Kesultanan Cirebon Menjadi Anggota DPD, Pangeran Arief Natadiningrat No. 5." Tulisan tersebut ingin menggugah kembali soliditas orang Cirebon untuk mengangkat kembali harkat dan martabat orang Cirebon yang telah lama tenggelam seiring dengan tenggelamnya Kesultanan Cirebon.

Terpampang pula spanduk disekitar Subang dan Indramayu yang merupakan daerah perbatasan dengan Cirebon dan termasuk wilayah Pantai Utara Jawa Barat. Spanduk yang terpasang sepanjang jalan protokol tersebut bertuliskan "Pangeran Arief Natadiningrat satu-satunya calon Calon Anggota DPD Jawa Barat dari wilayah Pantura Pilih No. 5," tulisan tersebut dilengkapi pula dengan foto Pangeran Arief Natadiningrat.

Spanduk-spanduk tersebut bermaksud untuk mengangkat girah dan primordialisme masyarakat wilayah pantai utara Jawa Barat untuk memiliki wakil dari Jawa Barat untuk anggota DPD. Masyarakat pantura yang senantiasa merasa dinomorduakan dalam pembangunan Jawa Barat, digugah kembali oleh Pangeran Arief dan tim suksesnya supaya masyarakat pantura solid mendukung pencalonan Pangeran Arief Natadiningrat menjadi anggota DPD mewakili wilayah pantura.

#### **e) Rapat Umum**

Kampanye dalam bentuk rapat umum dilaksanakan pada ruang terbuka (lapangan, stadion, alun-alun) yang dihadiri oleh massa dari pendukung dan warga masyarakat lainnya dengan tetap memperhatikan kapasitas (daya tampung tempat-tempat tersebut), dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 16.00

waktu setempat. Dalam kampanye rapat umum harus menyesuaikan dengan hari dan waktu ibadah agama di Indonesia serta membawa atau menggunakan gambar calon, spanduk, brosur, baliho dan umbul-umbul.

Kampanye dalam bentuk rapat umum tidak banyak dilakukan oleh peserta pemilu DPD, karena di samping memerlukan biaya yang mahal juga memerlukan massa yang banyak. Di antara pemilu anggota DPD Jawa Barat yang menggunakan pemilu dengan model rapat umum antara lain dilakukan oleh Pangeran Arief Natadiningrat. Pangeran Arief Natadiningrat mengadakan kampanye dengan bentuk rapat umum diadakan di alun-alun keraton Cirebon dan di alun-alun Indramayu dengan terpampang foto serta nomor urut Pangeran Arief dalam bentuk spanduk, baliho dan umbul-umbul di sekitar lapangan alun-alun. Pengunjung sangat banyak bahkan padat karena selain diisi orasi dari Pangeran Arief juga dilengkapi dengan hiburan dangdutan yang menampilkan artis-artis daerah baik dari Cirebon maupun Indramayu.<sup>19</sup>

#### **f) Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Peraturan Perundang-undangan**

Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu seperti acara ulang tahun, kegiatan sosial/budaya, perlombaan olah raga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan masa pada satu tempat tertentu.

Kegiatan kampanye dalam bentuk kegiatan yang tidak melanggar peraturan yang antara lain disebutkan di atas digunakan oleh sebagian anggota DPD di

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Deni (tim sukses Pangeran Arief Natadiningrat) pada tanggal 17 Januari 2007.

antaranya adalah kegiatan sosial/budaya dan kegiatan keagamaan seperti yang dilakukan Pangeran Arief Natadiningrat. Pangeran Arief juga menggunakan kegiatan sosial/budaya sebagai ajang kampanye. Beliau menghadiri gelar seni dan budaya Cirebon yang diadakan kelompok seni IAIN Cirebon yang bertempat di Gedung Aula IAIN Cirebon. Ia pun menggunakan kegiatan agama seperti haul Sunan Gunung Djati sebagai bagian dari kampanye yang selanjutnya tim sukses membagi-bagikan brosur Pangeran Arief kepada jama'ah yang hadir.<sup>20</sup>

### **Isu Kampanye**

Isu kampanye merupakan pesan yang akan menjadi daya tarik masyarakat pemilih terhadap calon yang bersangkutan. Isu kampanye tersebut dapat disampaikan dalam berbagai bentuk mulai dari poster, spanduk, baligo (*billboard*), pidato, diskusi, iklan, hingga selebaran. Apapun bentuknya, pesan-pesan selalu menggunakan simbol, baik verbal maupun nonverbal yang diharapkan dapat memancing respon masyarakat pemilih.

Pangeran Arief Natadiningrat melontarkan isu kampanye atau isu politik akan memperjuangkan kepentingan masyarakat Jawa Barat, baik dari aspek kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan keadilan. Perjuangan itu melalui optimalisasi otonomi daerah dan visi, misi provinsi Jawa Barat yang akan ia perjuangkan di tingkat kebijakan nasional melalui lembaga DPD apabila ia terpilih.

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Iwan Kustiawan pada tanggal 23 November 2006

Isu kampanye yang dikemukakan Pangeran Arief Natadiningrat dikemas ke dalam visi dan misi. Visi Pangeran Arief menjadi anggota DPD RI adalah memperjuangkan daerah dan masyarakat Jabar di tingkat nasional dalam kerangka cita-cita negara Republik Indonesia yang Adil, makmur, dan sejahtera. Sedangkan misinya, *pertama*, memperjuangkan otonomi daerah yang ideal. *Kedua*, menyeimbangkan keuangan pusat dan daerah dengan adil. *Ketiga*, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan masyarakat daerah. *Keempat*, menyempurnakan fungsi, tugas, dan wewenang DPD. Dan *kelima*, memperjuangkan visi dan misi provinsi Jabar.

Pangeran Arief Natadiningrat mencanangkan sejumlah program di antaranya memperjuangkan hasil Komisi Konstitusi untuk mengamandemen UUD 1945. juga menyempurnakan dan merevisi semua UU yang bertentangan dengan otonomi daerah demi keseimbangan keuangan pusat dan daerah berdasarkan aspirasi daerah. Selain itu memperjuangkan hasil sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

Dalam rangka menarik simpatik masyarakat terutama masyarakat Cirebon, Pangeran Arief Natadiningrat mengedepankan kebesaran Cirebon di bawah Kesultanan Cirebon di masa silam sehingga dalam brosur atau bukunya selalu mencantumkan keagungan Sunan Gunung Djati. Ia sebagai keturunannya. Tetapi ada variasi yang dilakukan Pangeran Cirebon ketika melakukan kampanye terbuka atau berbentuk rapat umum yang diadakan di alun-alun Kesultanan Cirebon yaitu di samping menyampaikan pesan politik juga diiringi dengan musik dangdut. Musik dangdut merupakan musik yang sangat digemari di wilayah Cirebon

sehingga masyarakat yang hadir dikampanye tersebut tidak merasa jenuh dengan mendengarkan pidato politik tetapi, masyarakat bergembira karena dengan alunan musik tersebut. Begitu pula dilakukan tim sukses Pangeran Arief Natadiningrat pada kampanye terbuka di Indramayu.<sup>21</sup>

Pesan kampanye yang disampaikan Pangeran Arief Natadiningrat dan tim suksesnya tersebut dengan menggugah perasaan masyarakat Cirebon adalah mengangkat kembali kebesaran Kesultanan Cirebon yang zaman dulu Cirebon pernah berjaya pada masa awal Kesultanan Cirebon.

Selain itu Pangeran Arief Natadiningrat mengangkat isu etnik bahwa hanya satu-satunya calon anggota DPD yang mewakili daerah pantai Utara Jawa Barat sedangkan yang lainnya banyak berasal dari daerah Priangan. Jawa Barat tidak identik dengan Bandung atau Priangan tetapi Jawa Barat melingkupi Cirebon dan Indramayu oleh karena itu harus ada calon yang mewakili daerah pantai Utara (pantura) Jawa Barat.<sup>22</sup> Dengan isu kampanye seperti demikian telah mengantarkan Pangeran Arief meraih dukungan yang cukup besar dari masyarakat Cirebon dan Indramayu.

### **Mohammad Surya**

Keberhasilan Mohammad Surya sebagai anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari bentuk kampanye yang dilakukan oleh Moh. Surya dan tim suksesnya. Pembahasan ini akan menguraikan kampanye yang dilakukan

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Pangeran Arief Natadiningrat pada tanggal 7 November 2006 dan tim suksesnya yaitu Deni pada tanggal 17 Januari 2007

<sup>22</sup> *Ibid*

Mohammad Surya dan tim suksesnya yang meliputi bentuk-bentuk kampanye dan isu kampanye.

### **Bentuk-Bentuk Kampanye**

Bentuk-bentuk kampanye yang dilakukan oleh Mohammad Surya beserta tim suksesnya antara lain; tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum dan kegiatan yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

#### **a) Tatap Muka dan Dialog**

Mohammad Surya mengadakan kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog. Kampanye dalam bentuk tatap dan dialog tersebut dilaksanakan dalam ruangan tertutup. Peserta yang menghadiri kampanye tatap muka dan dialog Mohammad Surya antara lain para pendukung dan undangan lainnya yang sengaja diundang oleh tim sukses Mohammad Surya, sebab kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog harus disertai dengan undangan tertulis. Dalam kampanye tersebut diadakan dialog yang sifatnya interaktif. Dalam kampanye tersebut disebarkan atribut-atribut kampanye seperti foto calon, simbol-simbol, dan atau bendera atau umbul-umbul Mohammad Surya. Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog harus disertai dengan undangan tertulis.

Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog yang dilakukan oleh Mohammad Surya antara lain di Kabupaten Garut pada tanggal 16 Maret 2004. Ia melakukan dialog dan tatap muka yang dilakukan di Kabupaten Garut bertempat

di GOR KONI Garut dengan peserta undangan yang hadir dalam pertemuan tersebut kebanyakan para guru. Dalam dialog itu diwacanakan tentang pentingnya ada perwakilan guru guna memperjuangkan nasib guru yang sampai hari ini masih dianggap dipinggirkan. Selain dikemukakan peran Mohammad Surya dalam organisasi guru, dikemukakan juga visi, misi dan program kerja beliau apabila terpilih menjadi anggota DPD. Mohammad Surya lebih menyentuh fanatisme kaum guru untuk bersatu berjuang dalam wadah politik DPD dengan mendukungnya menjadi anggota DPD RI.<sup>23</sup>

#### **b) Penyebaran bahan kampanye kepada umum**

Mohammad Surya dan tim suksesnya menyebarkan bahan-bahan kampanye kepada masyarakat Jawa Barat untuk mendapatkan dukungan pada pemilu DPD 2004. Bahan-bahan kampanye tersebut antara lain brosur, stiker, dan kaos. Bahan-bahan kampanye seperti kaos dan stiker berisikan tulisan "calon anggota DPD", dilengkapi nomor urut 13 dan foto Mohammad Surya. Sedangkan bahan kampanye seperti brosur berisikan riwayat hidup Mohammad Surya serta visi dan misinya, dilengkapi juga dengan tulisan sebagaimana pada stiker.

Bahan-bahan kampanye tersebut disebarkan kepada masyarakat langsung oleh tim sukses Mohammad Surya seperti yang dilakukan di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sukabumi. Bahan-bahan kampanye yang disebarkan seperti kaos dibagikan kepada para pendukung dan undangan dalam kampanye tertutup, hanya sebagian kecil kaos

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Mohammad Surya di Kantor DPD RI Bandung pada tanggal 5 Januari 2007.

yang dibagikan kepada masyarakat, karena jumlahnya cukup terbatas. Sedangkan stiker dan brosur disebarakan secara serampangan kepada masyarakat.<sup>24</sup>

Kaos-kaos yang disebarakan tim sukses Mohammad Surya berisi foto mohammad Surya dengan nomor urut 13. Sedangkan berosur yang dibagikan berisi riwayat dan pengalaman singkat Mohammad Surya, dilengkapi foto dan nomor urut Mohammad Surya. Selain itu terdapat tulisan "mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Jawa Barat pada pemilu DPD." Tulisan tersebut lebih bersifat netral tanpa mengangkat aspek-aspek primordial atau emosional yang membacanya tetapi tulisan itu terkesan merendahkan tetapi pasti.

### **c) Pemasangan alat peraga di tempat umum**

Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum, ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh pemerintah daerah setempat, serta tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung sekolah), jalan-jalan protokol dan jalan bebas hambatan, serta tempat milik perseorangan atau badan swasta kecuali izin pemilik tempat yang bersangkutan serta harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan (Peraturan Daerah).

Tim sukses Mohammad Surya melakukan pemasangan alat peraga kampanye di tempat-tempat umum seperti di terminal ledeng Bandung (berdekatan dengan kampus UPI Bandung), terminal Cicaheum Bandung,

---

<sup>24</sup> *Ibid*

terminal Kuningan dan sepanjang jalan di raya di Kuningan, dan diterminal Garut. Spanduk dan baliho yang terpasang hanya berisikan tulisan "calon anggota DPD RI dari Jawa Barat," dilengkapi dengan nama Prof. Dr. H. Mohammad Surya, nomor urut 13 dan foto beliau.<sup>25</sup>

Spanduk-spanduk Mohammad Surya kebanyakan bertuliskan "Prof. Dr. H. Mohammad Surya Calon Anggota DPD Jawa Barat dengan nomor urut 13" dilengkapi foto Mohammad Surya dengan diakhiri "ulah hilap kaping 5 April coblos wae nomor 13." Terdapat beberapa spanduk yang menggugah emosional yang membacanya antara lain spanduk yang bertuliskan "Prof. Dr. H. Mohammad Surya Tokoh dan Pejuang Guru" Cobloslah nomor 13 pada pemilu DPD tanggal 5 April 2004. Tulisan tersebut mengagkat primordialisme dan solidaritas para guru untuk mendukung Mohammad Surya sebagai calon anggota DPD Jawa Barat.

#### **d) Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Peraturan Perundang-undangan**

Mohammad Surya melakukan kegiatan kampanye yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan antara lain menghadiri acara-acara diskusi yang diadakan oleh PGRI Kabupaten/Kota. Ia diundang sebagai narasumber di antaranya dilakukan oleh PGRI Kuningan, PGRI Garut dan PGRI Cianjur. Ia berdiskusi sekitar persoalan dunia pendidikan sekaligus menjadi ajang mohon do'a restu dan dukungan para guru dengan membagikan brosur oleh tim

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Sahiri Hermawan (ketua tim sukses Prof. Muhammad Surya) pada tanggal 10 Oktober 2006.

suksesnya kepada peserta diskusi. Diskusi itu tepat dilakukan pada jadwal kampanye.<sup>26</sup>

### **Isu Kampanye**

Mohammad Surya dan tim suksesnya mengembangkan isu kampanye yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Mohammad Surya di isukan sebagai sosok yang mewakili profesi guru dan sebagai sosok yang akan memperjuangkan dunia pendidikan. Isu tersebut dibangun karena Mohammad Surya telah dikenal di masyarakat sebagai tokoh PGRI.

Di antara peserta pemilu perseorangan atau pemilu DPD tahun 2004 yang berprofesi sebagai guru dan dosen tidak hanya Mohammad Surya. Peserta pemilu perseorangan yang berprofesi sebagai guru dan dosen sebanyak 8 orang (19%) dari 42 orang peserta. Akan tetapi sosok Mohammad Surya sebagai Ketua Umum PP PGRI dan telah dikenal oleh para guru dengan pengabdianya di PGRI Jawa Barat selama 35 tahun menjadikannya memiliki legitimasi kuat sebagai tokoh guru.

Dalam rangka memperjuangkan dunia pendidikan secara politik. Mohammad Surya berpendapat bahwa kebijakan politik sangat mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia khususnya Jawa Barat. Oleh karena itu, ia akan menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah dan menjalankan program lembaga DPD secara optimal sesuai dengan pengalaman dan kemampuan yang

---

<sup>26</sup> *Ibid*

dimilikinya. Dengan konsep seperti itu dunia pendidikan di Indonesia khususnya Jawa Barat akan lebih maju dan berkualitas.

Isu kampanye atau isu politik yang dikemukakan Mohammad Surya dapat dilihat dari paparan visi, misi dan program-programnya sebagai anggota DPD. Visinya menjadi anggota DPD yang aspiratif dan komunikatif dalam memperjuangkan kepentingan daerah dalam kerangka pembangunan nasional. Sedangkan misinya adalah *pertama*, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPD dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki. *Kedua*, menjadi wakil masyarakat Jawa Barat dalam memajukan daerah. *Ketiga*, menjadi wakil dunia pendidikan dalam mewujudkan pendidikan nasional.

Visi dan misi Mohammad Surya dirinci ke dalam beberapa program kerja yang akan ia lakukan ketika menjadi anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Barat. Program-program kerja yang disusun oleh Mohammad Surya antara lain, *Pertama*, mengkaji berbagai permasalahan yang dihadapi oleh daerah Jawa Barat melalui berbagai strategi. *Kedua*, menjalin kemitraan dengan berbagai elemen baik pemerintah maupun non pemerintah dalam program pembangunan daerah. *Ketiga*, berperan serta secara aktif dalam keseluruhan program kerja yang telah ditetapkan oleh DPD, DPR, dan MPR. *Kelima*, memperjuangkan perwujudan pendidikan nasional.

Walaupun demikian Mohammad Surya menyadari bahwa terdapat tantangan yang dihadapi sebagai anggota DPD antara lain; *pertama*, tuntutan reformasi di segala bidang yang memerlukan kesiapan dan potensi untuk menghadapinya.

*Kedua*, dinamika masyarakat yang lebih mengarah pada keterbukaan dalam alam demokrasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. *Ketiga*, harapan masyarakat pemilih yang menginginkan perubahan dan peningkatan hidup.

Demikian pula isu atau pesan kampanye yang dilakukan tim sukses Mohammad Surya tersebar melalui bahan-bahan kampanye dan alat peraga kampanye sebagaimana disebutkan di atas. Tulisan-tulisan yang terpampang dalam spanduk-spanduknya tertulis "Prof. Dr. H. Mohammad Surya calon anggota DPD dari Provinsi Jawa Barat" dilengkapi dengan nomor urut 13 dan foto. Spanduk-spanduk tersebut terpampang di jalan-jalan raya protokol, di pasar-pasar, terminal-terminal dan di mall-mall. Begitu pula dengan brosur-brosur yang beredar di masyarakat berisikan riwayat singkat Mohammad Surya, nomor urut dan foto dengan terpampang di halaman depan seperti pada spanduk di atas. Stiker-stiker yang ditempel di angkutan-angkutan umum berisikan foto, nomor urut calon dengan tulisan besar di atasnya "Prof. Dr. H. Mohammad Surya calon anggota DPD dari Provinsi Jawa Barat". Bahkan ada tulisan yang lebih ekstrim lagi yang terpampang dalam spanduk di Kabupaten Subang bertuliskan, "Prof. Dr. H. Mohammad Surya Tokoh dan Pejuang Guru Jawa Barat"<sup>27</sup>

Dengan tulisan yang terpampang dalam spanduk tersebut menunjukkan bahwa Mohammad Surya melontarkan isu primordialisme dan solidaritas guru. Sehingga bagi para guru beserta keluarganya di daerah-daerah menjadi tahu bahwa ada perwakilannya mencalonkan anggota DPD. Guru di pedesaan senantiasa mendapat tempat terhormat dan mulia. Posisi itulah yang dapat

---

<sup>27</sup> *Ibid*

mempengaruhi masyarakat pemilih untuk mencoblos Mohammad Surya nomor urut 13. Mohammad Surya yang telah lama berkecimpung di dunia pendidikan telah banyak muridnya yang tersebar di Jawa Barat, baik pada waktu ia menjadi guru di Kuningan sampai ia menjadi dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dan sebagai Rektor Universitas Terbuka (UT). Dengan potensi tersebut ia dan tim suksesnya akan mudah mendapatkan dukungan masyarakat.

Bahkan di Alun-alun Kabupaten Kuningan terpasang baliho yang berisi foto Mohammad Surya dilengkapi dengan nomor urut 13 dengan berlatar sekolah. Baliho itu bertuliskan "Prof. Dr. H. Mohammad Surya Kawit ti Kuningan, Warga Kuningan urang Rojong Sasarengan Mantena Janten Anggota DPD Jawa Barat." Tulisan dalam baliho tersebut mengugah primordialisme dan solidaritas daerah warga Kuningan untuk mendukung pencalonannya. Dengan baliho seperti itu pantaslah apabila Mohammad Surya memperoleh suara mayoritas di Kuningan.

### **K.H. Sofyan Yahya**

Pembahasan di bawah ini akan menguraikan langkah-langkah K.H. Sofyan Yahya untuk meraih suara pemilih melalui kampanye politik pada pemilu DPD tahun 2004. Pembahasan ini meliputi bentuk-bentuk kampanye dan isu kampanye.

### **Bentuk-Bentuk Kampanye**

Bentuk-bentuk kampanye yang dilakukan K.H. Sofyan Yahya antara lain kampanye tatap muka dan dialog, penyebaran bahan-bahan kampanye kepada

umum, pemasangan alat peraga kampanye ditempat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

#### **a) Tatap Muka dan Dialog**

K.H. Sofyan Yahya dan tim suksesnya melakukan kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog. Ia tidak melakukan kampanye secara terbuka tetapi kampanye dilakukan dalam ruangan tertutup yakni dalam bentuk pengajian-pengajian keagamaan yang diadakan di pesantren atau madrasah-madrasah. K.H. Sofyan Yahya menggunakan acara-acara keagamaan sebagai wahana kampanye walaupun berisi ceramah keagamaan tetapi diakhiri dengan permohonan dukungan kepada jamaah pengajian. K.H. Sofyan Yahya yang kesehariannya sebagai mubaligh tidak begitu sulit untuk memberikan ceramah dalam pengajian-pengajian ibu-ibu maupun umum yang difasilitasi oleh para ulama/kiai setempat. Dalam tatap muka tersebut beliau hanya mengatakan bahwa para ulama di Jawa Barat meminta beliau untuk mencalonkan anggota DPD, apabila jama'ah merestui, beliau mohon do'a restu dari jama'ah. Ungkapan itu disambut gembira oleh jama'ah.<sup>28</sup>

K.H. Sofyan Yahya tidak mau menjanjikan apapun kepada jama'ah tetapi ia meyakinkan apabila terpilih ia akan menjaga amanah yang diberikan jama'ah kepadanya. Visi dan misi yang hendak memperjuangkan umat Nahdliyin pada khususnya umumnya kaum muslimin. Ia berharap mudah-mudahan apabila Allah menghendaki keinginan dan harapan kaum muslimin untuk menjadikannya wakil

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan K.H. Sofyan Yahya pada tanggal 7 November 2006

kaum Nahdhiyin pasti Allah akan menjadikannya, jadi yang menjadikan ia adalah Allah SWT.

Dalam pertemuan dialog dan tatap muka K.H. Sofyan Yahya tidak banyak mendialogkan tentang kinerja DPD tetapi jama'ah masih banyak mempertanyakan dan membahas apa yang dimaksud dengan DPD beserta tugas dan fungsinya. Di antara dialog yang dilakukan oleh K.H. Sofyan Yahya adalah di Pesantren Cipasung Tasikmalaya. Pesantren Cipasung adalah pesantren yang diasuh oleh sesepuh NU, yaitu K.H. Ilyas Ruhyat. Di Kabupaten Bandung sebagai daerah kelahirannya diselenggarakan di pesantrennya yaitu di Pesantren Cigondewah Darul Ma'arif dan di pesantren Sumur Bandung.<sup>29</sup>

#### **b) Penyebaran bahan kampanye kepada umum**

Penyebaran bahan kampanye K.H. Sofyan Yahya dilakukan oleh tim suksesnya keberbagai daerah. Daerah-daerah yang menjadi prioritas adalah daerah priangan antara lain; Bandung, Garut, Tasukalaya, Cianjur, Purwakarta, Majalengka dan Sumedang. Hal tersebut dilakukan karena terbatasnya dana dan bahan kampanye yang dimiliki tim Sukses K.H. Sofyan Yahya. Bahan-bahan kampanye yang dibagikan kepada masyarakat berupa kaos, brosur dan stiker. Bahan kampanye kaos dan stiker berisikan tulisan "Calon Anggota DPD Jawa Barat," dilengkapi dengan nama lengkap K.H. Sofyan Yahya, nomor urut 22 dan foto.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan K.H. Yusuf Muhammad pada tanggal 27 Januari 2007

Bahan-bahan kampanye tersebut disebarakan keberbagai daerah melalui kantor-kantor cabang NU yang menjadi tim suksesnya, kemudian disebarakan ke pesantren-pesantren. Dari pesantren-pesantren tersebut menyebar ke masyarakat atau jamaah. Penyebaran oleh pimpinan atau pengurus pondok pesantren diberikan ketika diadakan pengajian mingguan. Bahan kampanye yang paling banyak disebarakan adalah buku saku, stiker dan brosur. Brosur berisikan riwayat hidup K.H. Sofyan Yahya, visi dan misi serta dilengkapi dengan nomor urut 22 dan foto. Stiker-stiker disebarakan juga di terminal-terminal seperti terminal Guntur Garut, terminal Purwakarta, terminal Tasikmalaya dan di terminal Leuwipanjang Bandung.<sup>31</sup>

Tim sukses K.H. Sofyan Yahya menyebarkan buku saku K.H. Sofyan Yahya yang berisikan riwayat hidup K.H. Sofyan Yahya, visi dan misi, dilengkapi juga dengan foto dan nomor urut 22. Buku ini lebih bersifat mengenalkan K.H. Sofyan Yahya kepada khalayak, tetapi bagi kaum nahdiyyin mungkin menjadi daya tarik tersendiri sebab K.H. Sofyan Yahya selama hidupnya mengabdikan diri di Pondok Pesanterennya, Darul Ma'aruf dan sebagai pengurus NU Jawa Barat. Buku ini juga memberikan pesan kepada para pembaca tentang pandangan serta misinya menjadi anggota DPD dari Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu buku saku dan stiker serta brosur lebih disebarakan di pesantren-pesantren yang bernaung di bawah NU sehingga akan muncul solidaritas dan primordialisme ke-NU-an dengan berefek kepada dukungan atas pencalonan K.H. Sofyan Yahya.

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan A.S. Padli pada tanggal 12 Desember 2006

Selain itu dibagikan juga kaos-kaos yang bergambarkan K.H. Sofyan Yahya beserta nomor urut 22. Kaos-kaos itu pun disebarke kepada para santri melalui para kiai-kiai pimpinan pondok pesantren, kepada para pengurus NU mulai di tingkat PW NU sampai MWC NU, kepada masyarakat terutama kepada para sopir, tukang ojeg. Kaos-kaos itu tidak diberikan tulisan tertentu sehingga berefek hanya mengenalkan dan mengumumkan pencalonan K.H. Sofyan Yahya sebagai anggota DPD dari Provinsi Jawa Barat pada pemilu 2004.

### **c) Pemasangan alat peraga di tempat umum**

Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum dilakukan pula oleh tim sukses K.H. Sofyan Yahya. Pemasangan alat peraga kampanye K.H. Sofyan Yahya antara lain berbentuk spanduk atau baliho dan poster-poster. Alat-alat peraga tersebut dipasang di tempat-tempat yang menjadi tempat keramaian umum seperti terminal, pasar, swalayan, perempatan jalan raya dan di jalan-jalan yang ramai dilewati oleh pengendara roda empat atau roda dua. Rata-rata alat peraga tersebut berisikan nomor urut, foto calon dan mohon dukungan yang ditulis secara singkat dan padat seperti spanduknya K.H. Sofyan Yahya yang bertuliskan, “mohon do’a restu seluruh warga Jawa Barat untuk pencalonan DPD”. Spanduk ini di pasang di perempatan kopo, pasar Caringin dan di Soreang Kabupaten Bandung.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan A.S. Padli (tim sukses K.H. Sofyan Yahya) pada tanggal 12 Desember 2006

Selain itu, di setiap kantor NU dari mulai PW NU Jawa Barat, Cabang dan anak cabang di kecamatan-kecamatan penuh dengan poster K.H. Sofyan Yahya. Begitu juga pesantren-pesantren yang mendukung pencalonan K.H. Sofyan Yahya dipenuhi posternya seperti di pesantren Al-Huda Garut, pesantren Cipasung Tasikmalaya, pesantren Gentur Cianjur, pesantren Al-Masturiyah Sukabumi dan pesantren Al-Hidayah Purwakarta.

#### **d) Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Peraturan Perundang-undangan**

Kampanye dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu seperti acara ulang tahun, kegiatan sosial/budaya, perlombaan olah raga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan masa pada satu tempat tertentu.

Kegiatan kampanye dalam bentuk kegiatan yang tidak melanggar peraturan yang antara lain disebutkan di atas digunakan oleh sebagian anggota DPD di antaranya adalah kegiatan sosial/budaya dan kegiatan keagamaan seperti yang dilakukan K.H. Sofyan Yahya lebih sering menggunakan kampanye dengan menggunakan kegiatan keagamaan seperti pengajian mingguan ibu-ibu. Pengajian mingguan diadakan di setiap mesjid, ada yang pada waktu siang hari maupun malam hari.<sup>33</sup>

K.H. Sofyan Yahya di samping memiliki waktu pengajian sendiri di pesantrennya yang dilakukan pada hari kamis untuk ibu-ibu dan *batsul masa'il* pada hari jum'at. *Batsul masa'il* banyak dihadiri oleh kiai-kiai terutama yang

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan A.S. Padli (tim sukses K.H. Sofyan Yahya) pada tanggal 12 Desember 2006

berada di sekitar wilayah Bandung. Ia pun diundang oleh jama'ah-jama'ah baik yang berada di sekitar Bandung maupun luar Bandung untuk mengisi pengajian mingguan tersebut. Pada waktu kampanye beliau lebih inten mengisi pengajian di berbagai mesjid, madrasah maupun pondok pesantren.<sup>34</sup>

### **Isu Kampanye**

K.H. Sofyan Yahya sebagai sosok ulama dan aktivitas keseharian senantiasa berkaitan dengan masalah keagamaan. Ia melontarkan isu kampanye atau isu politik yang lebih menitik beratkan kepada aspek moralitas. Ia dan tim suksesnya mengemas isu demokrasi yang bermoral serta akan ikut serta dalam mewujudkan visi Jawa Barat yakni Jawa Barat dengan iman dan taqwa sebagai provinsi termaju di Indonesia dan mitra terdepan Ibu Kota Negara tahun 2010.

K. H. Sofyan Yahya dan tim suksesnya merumuskan isu kampanye atau isu politiknya melalui visi, misi dan program-programnya. Visinya adalah terbangunnya tatanan masyarakat yang bermoral, berdaya, berkeadilan dan demokratis. Visi ini tidak lepas dari visi Jawa Barat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No 1 Tahun 2003 dan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2004 yaitu, Jawa Barat dengan iman dan taqwa sebagai provinsi termaju di Indonesia dan mitra terdepan Ibu Kota Negara tahun 2010.

Untuk mewujudkan visi tersebut, sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh anggota DPD, Sofyan Yahya menetapkan misi antara lain, memperjuangkan nilai-nilai moral dan agama sebagai landasan

---

<sup>34</sup> *Ibid*

perjuangan yang akan diraih melalui upaya membangun komitmen bersama segenap elemen bangsa terutama pembuat perundang-undangan yang mempunyai moral dan menghayati nilai-nilai agama serta memberikan contoh tauladan dalam aflikasinya. Selain itu memperjuangkan perimbangan keuangan pusat dan daerah dapat dicapai melalui pedoman pembagian keuangan dengan prinsip-prinsip asas manfaat dan daya guna dengan prioritas pada kesejahteraan rakyat juga memperjuangkan visi Jawa Barat yaitu: Jawa Barat dengan iman dan taqwa sebagai provinsi termaju di Indonesia dan mitra terdepan Ibu Kota Negara tahun 2010, sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

Mengacu pada visi, misi dan strategi, maka muncullah program-program yang telah disiapkan Sofyan Yahya antara lain, mendengarkan pendapat agamawan dan budayawan sebelum membahas peratutan perundang-undangan sehingga segala aturan sejalan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama serta tidak mengabaikan nilai budaya yang ada. Juga program pembuatan peraturan perundang-undangan yang memberikan penekanan pada pentingnya pelaksanaan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang lebih bijaksana dan berkeadilan. Serta pembuatan peraturan perundang-undangan yang memberikan penekanan pada pemberian keleluasaan untuk mengembangkan pendidikan yang berlandaskan kepada agama dan budaya serta potensi daerah.

Lebih lanjut ia memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi anggota DPD. Menurutnya, *Pertama*, dengan kekuatan dan peluang yang dimiliki dapat dilakukan lobi ke DPR untuk meningkatkan kekuatan voting dalam joint session. *Kedua*, dengan kekuatan dan peluang yang dimiliki dapat ditumbuhkan

kepercayaan daerah. *Ketiga*, sinergi antara DPD dan pemerintah daerah Jawa Barat yang sangat mungkin dicapai dalam waktu yang singkat dan akan memperkuat posisi daerah. *Keempat*, pencitraan yang positif mengenai ulama yang berkiprak di parlemen. *Kelima*, perluasan pemahaman akan pentingnya pendekatan substansial kultural berupa kesalehan sosial dalam penyebaran ajaran.

Pesan/isu kampanye yang disampaikan tim Sukses K.H. Sofyan Yahya yang dilontarkan melalui alat-alat kampanye lebih menggugah emosional keulamaan dan ke-NU-an. Tim Sukses K.H. Sofyan Yahya mengemukakan bahwa di antara wakil Jawa Barat harus ada ulama yang mewakili masyarakat Jawa Barat sebagai masyarakat yang mayoritas Islam. Lembaga DPD dapat menjadi bagian dari kiprah ulama dalam menjaga kemashlahatan umat. NU merupakan organisasi berbasis pondok pesantren harus memiliki wakilnya di DPD sebagai perwakilan ulama dan pondok pesantren. Masyarakat NU harus mendukung K. Sofyan sebagai ulama yang akan mengangkat citra pondok pesantren dan sebagai bentuk dari perwujudan bahwa ulama dan pondok pesantren mempunyai pengaruh dan andil yang besar dalam melakukan perubahan masyarakat Jawa Barat menuju Jawa Barat sebagai provinsi termaju di Indonesia dan mitra terdepan ibukota Negara tahun 2010 dengan dilandasi iman dan takwa.<sup>35</sup> Hal ini sesuai dengan misi dan visi K.H. Sofyan Yahya yang diungkap dalam bab III.

Spanduk-spanduk K.H. Sofyan Yahya banyak bertuliskan "Warga NU mendukung K.H. Sofyan Yahya sebagai anggota DPD dari Provinsi Jawa Barat" selain itu tertulis nomor dan foto K.H. Sofyan Yahya. Spanduk itu dipampang di

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan K.H. Sofyan Yahya pada tanggal 7 November 2006 dan dengan tim suksesnya yaitu A.S. Padli pada tanggal 12 Desember 2006

antaranya di Terminal Kabupaten Garut, di Terminal Tasikmalaya, di jalan raya Purwakarta dan di Pasar Cianjur. Tim sukses K.H. Sofyan Yahya juga membagi-bagikan buku saku yang berisikan tentang riwayat hidup K.H. Sofyan Yahya beserta visi dan misi beliau serta tulisan dukungan dari kiai-kiai sepuh NU yang antara lain tertulis dukungan dari K.H. Ilyas Ruhayat pimpinan pondok pesantren Cipasung Tasikmalaya, K.H. Aceng Nuh pimpinan pondok pesantren Gentur Cianjur, K.H. Totoh Abdul Fatah pimpinan pondok pesantren al-Jawami Bandung, dan K.H. Fahrudin pimpinan pondok pesantren al-Masturiyah Sukabumi. Tim sukses K.H. Sofyan Yahya membagi-bagikan juga brosur yang berisikan nomor dan foto K.H. Sofyan Yahya dilengkapi dengan tulisan doa-doa. Alasan memakai tulisan doa-doa supaya tidak dibuang atau disimpan di mana saja oleh masyarakat yang menerima brosur tersebut.<sup>36</sup>

Spanduk yang bertuliskan warga NU mendukung K.H. Sofyan Yahya menunjukkan bahwa tim sukses K.H. Sofyan Yahya ingin membangun primordialisme dan solidaritas ke-NU-an, sehingga bagi masyarakat NU dapat tertarik dan mendukung pencalonannya. NU merupakan organisasi tradisional dimana lebih mengembangkan aspek emosional. Primordialisme dan solidaritas senantiasa terbangun dengan pendekatan emosional ke-NU-an. Terlebih terdapat spanduk yang bertuliskan: "PW NU Jawa Barat mendukung pencalonan K.H. Sofyan Yahya, Calon anggota DPD Jawa Barat." Spanduk tersebut di sebelah

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan A.S. Padli pada tanggal 12 Desember 2006

kanan berlambangkan NU yakni bintang sembilan, disebelah kiri foto K.H. Sofyan Yahya dan dilengkapi dengan nomor 22.<sup>37</sup>

Begitu pula dengan buku saku yang di dalamnya terdapat dukungan dari sesepuh NU. Warga NU merupakan umat yang sangat hormat kepada kiai. Tim sukses K.H. Sofyan Yahya ingin mempengaruhi pemilih terutama warga NU dengan menggunakan kharisma ketokohan sesepuh NU. Apalagi pondok pesantren NU biasanya menjadi jaringan pesantren asalnya dimana sang kiai menunutut ilmu. Dengan cara yang demikian diharapkan warga NU dapat bersimpati kepada K.H Sofyan Yahya.

---

<sup>37</sup> *Ibid*

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

Bab kesimpulan ini merupakan konseptualisasi dari bab-bab sebelumnya. *Pertama*, faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan keempat anggota DPD Jawa Barat. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor ketokohan dan popularitas, dukungan organisasi, kedaerahan dan isu kampanye. *Kedua*, Implikasi teori yang meliputi; teori komunikasi politik, teori kekuasaan, teori primordialisme, teori aristokrat lokal dan teori sosial kapital. Teori-teori tersebut dapat digunakan untuk menganalisis studi tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tahun 2004 dengan kasus Provinsi Jawa Barat.

#### **Kesimpulan**

Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada pemilihan umum 2004 merupakan bangunan sistem perwakilan daerah setelah adanya amandemen UUD 1945 keempat pada tahun 2002. DPD merupakan lembaga legislatif baru di MPR RI. Keanggotaan MPR sampai dengan pemilu 1999 terdiri dari anggota DPR, utusan daerah, utusan golongan dan unsur tambahan dari partai politik. Pasca amandemen UUD 1945 tahun 2002, MPR terdiri dari dua lembaga yakni DPR dan DPD.

Proses pengisian keanggotaan DPD dilakukan melalui pemilu langsung dengan memilih orang karena pemilihan anggota DPD merupakan peserta pemilu perseorangan. Sementara pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota yang menjadi peserta pemilunya adalah partai politik. Dengan demikian terdapat dua unsur peserta pemilu pada pemilu 2004 yakni pertama DPD yang mewakili daerah/wilayah. Setiap provinsi diwakili oleh 4 orang. Kedua DPR sebagai unsur yang mewakili partai politik dengan keterwakilan proporsional sesuai dengan jumlah penduduk.

Peserta pemilu perseorangan pernah juga dilakukan pada era Orde Lama yakni pada pemilu pertama di Indonesia tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan anggota Konstituante. Akan tetapi keanggotaan lembaga tersebut bukan untuk mewakili daerah atau wilayah. Peserta pemilu perseorangan untuk anggota DPD adalah untuk mewakili daerah atau wilayah. Jumlah penduduk tidak menjadi penentu jumlah wakil DPD, namun unsur semua provinsi memiliki jumlah wakil DPD yang sama yakni 4 orang.

Pemilihan anggota DPD juga untuk mengisi lembaga tersendiri sebagai bagian dari MPR, sedangkan pemilihan dalam perseorangan pada pemilu tahun 1955 untuk anggota Konstituante tidak ada lembaga tersendiri. Konstituante tidak sama pula dengan MPR. Konstituante apabila telah selesai menetapkan Konstitusi atau Undang-Undang Dasar maka tugasnya selesai dan lembaga ini bubar dengan sendirinya, sedangkan MPR berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen 2002 Pasal 3, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 37 memiliki kewenangan yaitu: *Pertama*, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. *Kedua*, melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, dalam sidang paripurna MPR. *Ketiga*, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah

Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. *Keempat*, melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. *Kelima*, memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari. *Keenam*, memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari. *Ketujuh*, menetapkan peraturan dan kode etik MPR.

Dengan demikian MPR terdiri dari dua lembaga yakni DPR dan DPD yang secara teoritis disebut sistem bikameral walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 hasil amandemen tahun 2002. Lembaga MPR menjadi lembaga legislatif yang khas Indonesia karena tidak menganut pada kerangka teori secara utuh, hal ini terlihat dari lemahnya bahkan Sangay lemah kewenangan yang dimiliki oleh DPD.

Dalam sistem keparlemenan di dunia, dikenal dua istilah yang biasa digunakan oleh negara-negara demokrasi yaitu unikameral dan bikameral. Unikameral adalah sistem parlemen satu kamar sedangkan bikameral adalah sistem parlemen dua kamar. Sistem bikameralisme ditandai oleh adanya dua

kamar (*chambers*) yang memiliki nama masing-masing. Kamar pertama atau biasa disebut *lower house* biasanya selalu lebih penting dari kamar kedua (*upper house*).

Lijphart membagi ke dalam tiga kecenderungan bikameralisme yaitu: *Pertama*, kamar kedua memiliki kecenderungan menjadi lebih kecil daripada kamar pertama. *Kedua*, Periode keanggotaan dari kamar kedua biasanya lebih panjang dibandingkan dengan kamar pertama. *Ketiga*, pemilihan atau seleksi anggotanya lebih kepada perwakilan kepentingan baik sosial, ekonomi maupun teritori. Ia juga menegaskan bahwa terdapat dua model utama dari bikameralisme yaitu: (1) Bikameralisme kuat (*strong bicameralisme*); dan (2) Bikameralisme lunak (*weak bicameralisme*).

Keparlemanan (khas) Indonesia yang tercermin dalam MPR terdiri dari dua kamar yaitu DPR dan DPD tetapi MPR pun tetap memiliki kamar tersendiri dengan kewenangan tersendiri, sebenarnya keparlemanan Indonesia menjadi 3 kamar. Ketika MPR bersidang pun bukan menjadi *joint session* tetapi hanya sidang bersama anggota MPR. Terlepas dari itu, dilihat dari aspek keanggotaan maka parlemen Indonesia terdiri dari dua kamar DPR dan DPD. DPD memiliki anggota lebih sedikit yakni sepertiga atau 128 orang dari 32 Provinsi. DPD memiliki periode keanggotaan sama dengan DPR, 5 tahun. DPD mewakili teritorial/provinsi. DPD memiliki tugas dan kewenangan yang terbatas dibandingkan dengan DPR. DPD tidak memiliki kewenangan legislasi tetapi hanya sebatas mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Oleh karenanya

dapat dikatakan sistem keparlemenan Indonesia lebih menggunakan sistem bikameralisme lunak (*weak bicameralisme or soft bicameralisme*). Bahkan termasuk kategori Sangat lunak.

Pada masa Orde Lama Indonesia pernah menggunakan sistem dua kamar, ketika terbentuk RIS tahun 1949-1950. Parlemen Indonesia terdiri dari DPR dan Senat. Dengan demikian Indonesia memiliki pengalaman dalam bentuk dua kamar, namun dengan waktu yang relatif singkat Senat belum membuktikan kinerjanya karena Indonesia kembali menjadi NKRI. Maswadi Rauf mengatakan bahwa dilihat dari sejarah politik Indonesia modern, lembaga negara yang khusus mewakili kepentingan daerah bukanlah sebuah ide baru karena Indonesia pernah memiliki Senat semasa Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun perlu dicatat bahwa Senat praktis tidak mempunyai kesempatan yang cukup banyak untuk bekerja karena munculnya berbagai kemelut politik yang menuntut dihapuskannya RIS dan dibentuknya kembali NKRI.

Beberapa kali perubahan dalam sistem keparlemnan Indonesia membuktikan bahwa proses demokratisasi Indonesia tengah terus berjalan maju, sebagai upaya memperbaiki sistem politik Indonesia menuju kepada yang lebih baik. Amandemen yang dilakukan sebagai upaya maksimal yang patut dihormati walaupun dengan segala keterbatasannya. Keterbatasan kewenangan DPD dapat terus tersempurnakan apabila diisi oleh anggota-anggota DPD yang memiliki kredibilitas ketokohan, skill yang memadai dan memiliki integritas kebangsaan sehingga tidak melahirkan ekses-ekses primordialisme daerah yang berlebihan yang berdampak negatif terhadap NKRI.

Keanggotaan DPD dari Provinsi Jawa Barat sebagai kasus dalam disertasi ini mencerminkan keberhasilan demokratisasi di Indonesia dengan terbukanya peluang bagi orang-orang baru di pentas politik nasional. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang mendukung Anggota DPD Jawa Barat di atas, sehingga dapat memenangkan pemilihan umum tahun 2004 adalah popularitas ketokohan, dukungan organisasi, primordialisme kedaerahan dan faktor isu politik yang ditawarkan lebih menarik bagi pemilih. Ginandjar Kartasasmita adalah mantan politisi yang pernah menduduki beberapa jabatan politik serta didukung oleh organisasi besar di Jawa Barat yakni Paguyuban Pasundan. Moh. Surya mantan anggota DPRD Jawa Barat dan sekarang menduduki Ketua Umum PP PGRI. Pangeran Arief Natadinigrat adalah raja Kesultanan Cirebon yang pengaruhnya masih cukup kuat di daerah pantai Utara serta di dukung organisasi Hipmi dan Gapensi. Begitu juga K.H. Sofyan Yahya, seorang mubligh dan pada waktu itu menjabat Ketua Umum PW NU. NU merupakan organisasi keagamaan terbesar di Jawa Barat. K.H. Sofyan Yahya sangat berpeluang untuk meraih kesuksesan dalam pemilu 2004, karena NU mendukung sepenuhnya melalui keputusan organisasi NU Jawa Barat.

Kemenangan suara mayoritas diraih mereka di masing-masing tempat kelahiran dan tempat tinggalnya, kecuali K.H. Sofyan Yahya menang di daerah basis NU yakni di Tasikmalaya dan Purwakarta. Di daerah kelahirannya (Bandung) ia dikalahkan oleh Ginandjar Kartasasmita yang ia juga dilahirkan di Bandung kemudian bertempat tinggal di Sumedang. Di Kabupaten Sumedang, Ginandjar Kartasasmita meraih suara mayoritas. Begitu pula dengan Moh. Surya

di Kabupaten Kuningan sebagai tempat asalnya dan Pangeran Arief Natadiningrat memperoleh suara mayoritas di daerah Cirebon.

Penggalangan politik yang dilakukan oleh para calon anggota DPD tidaklah terbatas pada satu pola, namun menggabungkan beberapa pola untuk mempengaruhi pemilih antara lain variabel ketokohan/elit, variabel kegiatan keagamaan, variabel solidaritas organisasi, variabel primordialisme kedaerahan dan kekerabatan serta pola komunikasi langsung dengan konstituen. Dengan demikian beberapa faktor dan variabel yang disebutkan di atas adalah merupakan pola dari model kemenangan Pemilu DPD 2004 Provinsi Jawa Barat.

### **Implikasi Teoritis**

Dari studi yang dilakukan, ditemukan berbagai implikasi teori, baik yang bersifat relevansi, revisi, maupun dalam bentuk proposisi teori baru. *Pertama*, teori yang dikemukakan Maswadi Rauf bahwa artikulasi kepentingan sangat tergantung pada komunikasi politik. Tanpa adanya komunikasi politik, artikulasi kepentingan adalah benda mati, karena artikulasi itu sendiri tidak ada. Oleh karenanya dalam mewujudkan sebuah kepentingan politik akan sangat ditentukan oleh bentuk komunikasi politik yang dibangun oleh komunikator kepada komunikan yang ada. Komunikasi politik diartikan sebagai penyampaian pesan-pesan politik dari komunikator kepada komunikan.

Lebih lanjut Maswadi Rauf mengatakan komunikasi politik bertujuan untuk menghasilkan efektivitas, yaitu diterimanya pesan-pesan komunikasi oleh komunikan dengan pemahaman yang lebih kurang sama dengan komunikator. Ia

juga menegaskan bahwa saluran komunikasi yang dipergunakan bisa berbentuk media massa tetapi dapat juga berbentuk tatap muka atau pertemuan langsung yang kedua bentuk tersebut sama pentingnya.

Pemilihan umum 2004 membuka ruang kepada masyarakat untuk menjadi peserta pemilu terutama pada pemilihan anggota DPD. Pintu politik yang terbuka lebar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat di Jawa Barat sehingga semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota DPD. Pada realitasnya yang dapat memenangkan pemilihan anggota DPD adalah kandidat mampu melakukan komunikasi politik terhadap kekuatan-kekuatan politik dan masyarakat pemilih. Dengan demikian teori yang dikemukakan oleh Maswadi Rauf dapat menjelaskan keterkaitan kemenangan anggota DPD Jawa Barat dengan kekuatan-kekuatan politik dan masyarakat pemilih melalui komunikasi politik..

*Kedua*, teori yang dikemukakan Dan Nimmo dan Maswadi Rauf tentang pendekatan persuasif. Dan Nimmo mengatakan bahwa pendekatan persuasif dimaksud untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat pemilih dengan pendekatan dialog, menanamkan opini baru, dan usaha yang disadari untuk mengubah sikap, kepercayaan, atau perilaku orang melalui transformasi pesan. Dengan pendekatan tersebut serta dilakukan secara terus-menerus dengan berbagai model komunikasi diharapkan berdampak kepada konstituen yakni; *Pertama*, akan mengenal apa yang diinformasikan. *Kedua*, informasi yang diberikan akan tertanam. *Ketiga*, orang tersebut akan terpengaruh. *Keempat*, informasi akan diterima sebagai satu kebenaran. *Kelima*, propaganda yang

disampaikan menimbulkan kesetiaan kepada seorang kandidat. Pendapat Dan Nimmo relevan dengan pendapat Maswadi Rauf yang mengatakan bahwa salah satu kaidah terpenting dari demokrasi adalah digunakannya cara-cara persuasif dalam memperjuangkan aspirasi. Pendekatan secara koersif hanyalah akan merusak proses demokratisasi.

Dalam pemilihan umum anggota DPD Jawa Barat tahun 2004 melahirkan pendidikan politik yang cukup berharga bagi masyarakat. Di mana kampanye dilakukan dengan melalui dialog antara kandidat atau tim sukses dengan masyarakat pemilih. Sehingga tercermin menjadi kampanye yang tertib, aman, rasional dan sopan sehingga melahirkan kerelaan bagi konstituen untuk mendukung dan memilihnya. Pemilihan anggota DPD sebagai bagian dari proses demokratisasi pasca rezim Orde Baru telah melahirkan bentuk pemilu yang selektif, dialogis, dan akomodatif sehingga pesan yang disampaikan masing-masing kandidat mudah dipahami konstituen. Dengan demikian teori yang dikemukakan Dan Nimmo dan Maswadi Rauf dapat menjelaskan kemenangan anggota DPD Jawa Barat dengan pendekatan persuasif.

*Ketiga*, teori yang dikemukakan Miriam Budiardjo dan Suzanne Keller. Miriam Budiardjo menyatakan bahwa sumber-sumber kekuasaan itu bisa berupa kedudukan, status kekayaan, kepercayaan, agama, kekerabatan, kepandaian, dan keterampilan. Teori yang dikemukakan Miriam Budiardjo relevan dengan teori yang dikemukakan Suzanne Keller.

Suzanne Keller mengemukakan bahwa dalam masyarakat modern jelas nampak tidak hanya satu dimensi kekuasaan, tetapi beberapa dimensi. Dalam setiap bidang kegiatan kemasyarakatan – baik di dalam maupun di luar pemerintahan – terdapat satu atau lebih elit khusus yang menonjol karena memiliki keahlian atau keterampilan di bidang tertentu; mereka oleh Suzanne Keller dinamakan "elite strategis". Misalnya ada elite politik, elite ekonomi, militer, dan pengetahuan, elite pendidikan, falsafat, dan agama, elite kesenian dan kesusastraan. Secara kolektif elite-elite ini dapat dinamakan "kelas berkuasa" (*ruling-class*) dalam masyarakat.

Pemilihan anggota DPD Jawa Barat pada tahun 2004 melahirkan pemenang yang berasal dari kalangan elit politik, elit pendidikan, elit agama, elit budaya dan elit ekonomi. Pemilihan anggota DPD yang terbuka ruang bagi setiap masyarakat untuk tampil menjadi elit baru, pada realitasnya membuktikan bahwa yang dapat memanfaatkan kesempatan itu adalah kandidat-kandidat yang memiliki sumber-sumber kekuasaan yakni kepercayaan, kedudukan, ekonomi, agama dan kekerabatan. Pada waktu pemilu kandidat yang memiliki sumber-sumber tersebut lebih mudah mengakses ke wilayah pemilih di Jawa Barat. Dengan demikian teori yang dikemukakan Miriam Budiardjo dan Suzanne Keller dapat menjelaskan hubungan antara sumber-sumber kekuasaan dengan faktor-faktor yang membawa kemenangan anggota DPD Jawa Barat.

Keempat, teori yang dikemukakan Burhan D. Magenda tentang *networking politic* (jaringan politik). Ia mengemukakan bahwa di samping parpol dan organisasi kemasyarakatan (ormas) jaringan lain yang bisa dimanfaatkan adalah

dimilikinya *social capital* berupa kelas sosial dan jaringan keluarga. Kelas sosial yang penting adalah kelompok adat dan aristokrat lokal yang menjalin hubungan *patron-client* secara tradisional dengan massa pemilih. Para tokoh agama masuk dalam kelompok ini. Kalangan aristokrat banyak yang terpilih menjadi anggota DPR dan DPD, seperti Sultan Ternate, Mudhafar Sjah beserta istri, Ratu Hemas dari Yogya, Aji Farida dari Kaltim, Yanti Baramuli dari Sulawesi Utara, serta tokoh-tokoh Nahdhatul Ulama (NU) dari Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pemilihan anggota DPD Jawa Barat dimenangkan oleh kandidat yang memiliki jaringan politik yang cukup luas. Jaringan politik dimaksud antara lain jaringan partai politik, jaringan organisasi masyarakat dan jaringan sosial kapital berupa kelas sosial dan jaringan keluarga. Kelas sosial yang penting adalah kelompok adat dan aristokrat lokal. Ginandjar Kartasasmita adalah mantan politisi Partai Golkar. Ia pun didukung ormas besar Paguyuban Pasundan dan ia memiliki hubungan dengan kelompok adat dan aristokrat lokal karena ia pun adalah termasuk kaum menak Sunda. Mohammad Surya juga mantan politisi dari Partai Golkar. Ia pernah menjadi anggota DPRD Jawa Barat dari Partai Golkar. Ia pun adalah Ketua Umum PP PGRI. Dengan demikian kemenangannya didukung jaringan politik yang telah terbentuk sebelumnya.

Begitu pula dengan kemenangan Pangeran Arief Natadiningrat sebagai Sultan Cirebon. Ia adalah aristokrat lokal dan didukung organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti Hipmi, Gapensi, dan jaringan keluarga keraton Cirebon. K.H. Sofyan Yahya adalah Ketua Umum PW NU Jawa Barat. Ia menggunakan

jaringan pondok pesantren dan struktur NU beserta organisasi-organisasi yang bernaung di bawah NU seperti PMII, IPPNU, IPNU, Muslimat NU, dan ISNU. Pemilihan anggota DPD Jawa Barat menunjukkan bahwa kemenangan diraih oleh kandidat yang memiliki jaringan politik, baik jaringan politik dengan partai politik, ormas maupun sosial kapital. Dengan demikian teori yang dikemukakan oleh Burhan D. Magenda dapat menjelaskan keterkaitan *networking politic* dengan kemenangan anggota DPD Jawa Barat.

*Kelima*, teori yang dikemukakan Karl D. Jackson dan Hiroko Hirokoshi bahwa integrasi politik di kalangan orang Sunda bergantung kepada sistem hubungan kewibawaan tradisional yang menjiwai kehidupan sosial desa serta mempertalikan setiap desa dengan dunia politik daerah dan nasional yang ada di balik pintu gerbang desa. Boleh dikatakan semua orang desa Sunda terorganisasi ke dalam jaringan hubungan diadik (berpasangan) yang bersifat pribadi, menyebar, penuh perasaan dan lestari. Jackson menyamakan kewibawaan tradisional dengan *sistem patron klien*.

Teori Karl D. Jackson relevan dengan teori Hiroko Horikoshi yang menjelaskan bahwa Kiai menduduki posisi sentral dalam masyarakat Islam pedesaan dan menyatakan berbagai golongan hingga mampu melakukan tindakan kolektif, jika diperlukan. Dia mengambil peran sebagai poros hubungan antara umat dengan Tuhan. Pada pandangan sebagian besar pengikutnya, kiai adalah contoh muslim ideal yang ingin mereka capai. Dia seorang yang dianugrahi pengetahuan dan rahmat Tuhan. Sifat hubungan antara kiai dengan masyarakat

adalah kolektif. Kiai terkesan sebagai pemimpin simbolis yang tak gampang ditiru oleh orang biasa.

Pemilihan anggota DPD Provinsi Jawa Barat menumbuhkan kembali tokoh-tokoh lokal untuk muncul kembali dalam pentas politik nasional. K.H. Sofyan Yahya yang menggunakan jaringan kekhawanan/keulamaan tidak mendapat suara mayoritas di daerah-daerah yang terkenal sebagai daerah basis ulama atau kiai seperti di Garut, Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Sukabumi. Padahal daerah-daerah tersebut merupakan basis Islam pedesaan yang *nota bene* lebih menggunakan tradisi Islam tradisional atau NU. K.H. Sofyan Yahya hanya menang tipis di Kota Tasik dan Kabupaten Purwakarta.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa teori yang dikemukakan oleh Karl D. Jackson dan Hiroko Hirokosi membutuhkan revisi. Argumentasi yang mendasari bahwa Islam pedesaan memosisikan kiai sebagai tokoh sentral dengan alasan: *pertama*, kiai dianggap mampu menghubungkan manusia dengan yang ghaib dan *kedua*, kiai yang pernah melakukan mobilisasi ke luar dari desanya. Sehingga di anggap memiliki pengetahuan yang lebih. Alasan itu tidak dapat menjadi dasar argumentasi sebab kiai telah mengalami pergeseran seiring dengan perkembangan baik dari aspek pendidikan, ekonomi maupun politik. Sehingga kiai pada dekade ini hanya menjadi pemimpin spiritual tetapi tidak menjadi ketergantungan kehidupan masyarakat. Anggapan pertama mungkin masih bisa berjalan sampai sekarang tetapi untuk anggapan kedua masyarakat dengan pengetahuannya telah melakukan mobilisasi sendiri ke luar dari desanya. Selain itu telah bermunculan berbagai bentuk kekuasaan yakni kekuasaan pemerintahan, elit ekonomi, elit

pendidikan dan elit politik. Sehingga berdampak adanya pergeseran kepercayaan kepada kiai selain dari memimpin ritual keagamaan.

Begitu pula dengan teori yang dikemukakan Karl D. Jackson diperlukan adanya revisi karena kepemimpinan formal yang diteliti oleh beliau yakni kepala desa, kepala dusun, RW dan RT pada masa itu dipimpin oleh orang yang memiliki kekayaan/tuan tanah sebagai peninggalan dari zaman kolonial sehingga melahirkan hubungan patron klien. Pada era sekarang kepemimpinan itu menjadi bagian dari kepemimpinan administratif warga, seiring dengan perubahan pemerintahan desa dan tidak dipimpin oleh tuan tanah sehingga tidak melahirkan ketergantungan masyarakat pada pemimpin atas kehidupannya tetapi hanya terbatas aspek administratif saja.

*Keenam*, teori yang dikemukakan Burhan D. Magenda menjelaskan secara singkat bagaimana Orde Baru dapat bertahan dengan kuat, ia menilai bahwa di antara kekuatan Orde Baru adalah dibangunnya aliansi antara kaum adat seluruh Indonesia oleh kaum priyayi sehingga kelas aristokrat ini mendominasi politik Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Dominasi kaum adat ini, terutama di pedesaan lebih dimungkinkan oleh adanya *floating mass*.

Dalam pemilihan anggota DPD Jawa Barat, kemenangan diraih oleh kaum aristokrat atau menak Sunda dan kiai. Dalam budaya politik Jawa Barat senantiasa bersaing antara kaum menak dan kiai. Kaum menak senantiasa meraih kepemimpinan formal/birokrasi dengan senantiasa mempertahankan budaya Sunda sedangkan kiai dengan pengetahuan Islam merubah kultur tersebut dan mendapat simpati dari masyarakat. Sehingga melahirkan dua pola perjuangan

yang berbeda di Jawa Barat. Kaum menak menggunakan pendekatan diplomatik dengan menjadi birokrasi kolonial sedangkan kiai melakukan pemberontakan-pemberontakan. Oleh karenanya pemberontakan-pemberontakan di Jawa Barat pada masa kolonial selalu dipimpin oleh kiai atau pemuka agama bukan oleh para menak. Pemenang dalam pemilihan anggota DPD terdiri dari tiga menak dan satu kiai. Pangeran Arief Natadiningrat sebagai Sultan Cirebon, Ginandjar Kartasasmita dan Mohammad Surya adalah menak yang tidak memiliki institusi menak tetapi dapat dikenal dari gelar kemenakan yakni gelar Karta dan gelar Surya. Dengan demikian teori yang dikemukakan oleh Burhan D. Magenda dapat menjelaskan bahwa aristokrat lokal masih memiliki pengaruh dalam realitas politik di Jawa Barat dan nasional

*Ketujuh*, teori yang dikemukakan Maurice Duverger dan Dahrendorf. Maurice Duverger mengatakan bahwa komunitas yang terbentuk melalui kesamaan dapat memiliki ikatan yang kuat antar individu sehingga dapat membentuk norma/nilai bersama yang dapat mengendalikan dan memberikan solidaritas yang utuh. Ia mengistilahkan dengan *solidaritas proximitas*. *Solidaritas proximitas* terbentuk berdasarkan teritorial, kelompok-kelompok berdasarkan korporat, dan kelompok-kelompok yang berdasarkan ideologis.

Teori tersebut relevan dengan yang dikemukakan Dahrendorf dengan mengambil istilah kuasi-kelompok. Kuasi-kelompok ini akan berubah menjadi kelompok strategis, karena secara strategis pula mereka mempunyai arti yang penting untuk perkembangan politik, situasi konflik, reformasi ataupun revolusi dalam masyarakat masing-masing. Secara aktif mereka mewakili tujuan politik

atau ekonominya sendiri. Mereka cenderung menunjang kegiatan-kegiatan pemimpinya yang muncul dari kalangan sendiri, atau pemimpin-pemimpin yang dianggapnya mewakili keinginan-keinginannya. Dengan demikian, kelompok strategis merupakan lahan untuk mengerahkan pemimpin-pemimpin politik dan sekaligus merupakan *Pressure Group* (yang berkuasa).

Dalam pemilihan anggota DPD Jawa Barat pada pemilu 2004, realitasnya dimenangkan oleh kandidat-kandidat yang berbasiskan organisasi-organisasi strategis sehingga isu politik yang terbangun adalah kandidat yang bersangkutan merupakan perwakilan dari organisasi yang mengusungnya. Isu tersebut melahirkan ikatan atau solidaritas di dalam organisasi tersebut. Ginandjar Kartasasmita didukung organisasi kedaerahan terbesar di Jawa Barat yakni Paguyuban Pasundan. Mohammad Surya di dukung pengurus dan anggota PGRI dan K.H. Sofyan Yahya di dukung oleh NU. Dengan demikian teori yang dikemukakan Maurice Duverger dan Dahrendorf dapat menjelaskan keterikatan solidaritas kelompok dengan kemenangan anggota DPD Jawa Barat.

*Kedelapan*, teori yang dikemukakan Clifford Geertz bahwa solidaritas dalam kelompok primordial menghasilkan fanatisme yakni kesetiaan yang amat kuat kepada kelompok dan anggota-anggota kelompok serta penghormatan yang tinggi terhadap nilai budaya kelompok. Ikatan primordial adalah keterikatan seseorang terhadap kelompoknya yang didasarkan atas nilai-nilai yang *given* yang disebabkan hubungan darah dan persamaan dalam hal agama, suku, bahasa, asal daerah, dan adat istiadat.

Pemenang dalam pemilihan anggota DPD Jawa Barat rata-rata meraih suara mayoritas di daerah-daerah tempat kelahirannya. Ginandjar Kartasmita menang di Bandung sebagai tempat kelahirannya dan menang di Kabupaten Sumedang sebagai tempat tinggalnya. Mohammad Surya menang di daerah kelahiran dan tempat asalnya di Kabupaten Kuningan. Begitu pula dengan Pangeran Arief menang di daerah kelahiran dan tempat tinggal di Cirebon. Kecuali K.H. Sofyan Yahya yang lahir dan tinggal di Bandung harus bersaing dengan Ginandjar Kartasmita sehingga beliau kalah dan menduduki urutan kedua terbesar di Bandung. Dengan demikian teori yang dikemukakan Geertz dapat menjelaskan pengaruh primordialisme terhadap kemenangan anggota DPD Jawa Barat.

Studi ini menemukan bahwa pemilihan langsung anggota DPD Jawa Barat memberikan peluang dan kesempatan kepada kandidat-kandidat yang memiliki komunikasi (jaringan) kepada kekuatan-kekuatan politik di Jawa Barat. Kekuatan-kekuatan politik tersebut antara lain, elit politik, elit partai politik maupun elit organisasi-organisasi kemasyarakatan (organisasi keagamaan, kedaerahan maupun profesi). Realitas pemenang anggota DPD Jawa Barat adalah sosok-sosok yang sebelumnya telah terjalin komunikasi (jaringan) dengan kekuatan-kekuatan tersebut.

Dari uraian tersebut dapat dirumuskan suatu konsep teori bahwa meraih kemenangan sebuah jabatan politik harus memiliki *networking* politik. Argumen ini dengan berdasarkan calon-calon anggota DPD yang terdaftar banyak dari kaum profesional, pengusaha atau mantan pejabat publik. Ternyata dimenangkan

oleh kandidat yang masing-masing memiliki jaringan komunikasi yang saling membutuhkan antar pihak.

Studi ini juga menemukan bahwa pemilihan anggota DPD secara langsung bukan hanya unsur kepopuleran dan ketokohan kandidat tetapi harus di lengkapi dengan unsur organisasi yang mampu menembus kepada lapisan pemilih yang paling bawah. Organisasi tersebut sekaligus menjadi tim sukses dari kandidat DPD yang bersangkutan. Dari penemuan tersebut dapat dirumuskan suatu konsep teori bahwa dalam pemilihan secara langsung yang memiliki peluang kemenangan adalah popularitas ketokohan yang ditunjang organisasi besar.

Selain itu, studi ini menemukan bahwa ikatan primordial kedaerahan lebih dominan ketimbang ikatan-ikatan primordialisme lainnya. Dalam pemilihan anggota DPD Jawa Barat dapat terlihat bahwa di daerah tempat asalnya meraih suara yang cukup telak mengalahkan pesaing-pesaing politik lainnya. Dengan demikian pemilihan secara langsung mengangkat ikatan kedaerahan masing-masing kandidat untuk mendapatkan perwakilannya di lembaga perwakilan daerah sebagai sebuah kehormatan dan kebesaran daerah.

Dari uraian tersebut dapat dirumuskan suatu konsep teori bahwa ikatan kedaerahan mampu memutuskan mata rantai ikatan-ikatan organisasi. Ikatan organisasi akan lebih efektif dalam daerah yang tidak memiliki calon atau memiliki calon yang ketokohnya tidak populer di mata masyarakat daerah tersebut.

Dengan demikian studi ini menemukan bahwa faktor yang paling menentukan dalam kemenangan pemilu anggota DPD Jawa Barat secara langsung tahun 2004 adalah ketokohan dan popularitas calon, primordialisme daerah dan solidaritas organisasi. Sementara isu kampanye masih belum menjadi daya tarik dalam meraih suara pemilih. Hal ini dapat terlihat bahwa setiap calon kurang memiliki isu kampanye yang khas dan dituangkan dalam kreativitas dan inovasi karya bahan kampanye. Bahan kampanye dikemas sebagaimana lazimnya dalam suatu pemilu tidak ada keunikan yang khas dari masing-masing calon.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, *The Political Behavioral of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1989.
- \_\_\_\_\_, dan Nazaruddin Sjamsuddin, (eds), *Propil Budaya Politik Indonesia*, Jakarta: PT. Grafitti Press, 1991
- \_\_\_\_\_, dan Nazaruddin Sjamsuddin, (eds), *Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia*, cetakan pertama, Jakarta PT. Rajawali Press, 1988
- Allardt dan Littunen, Yijo (eds.), *Cleavages, Ideologies, and Party System*, Helsinki: Academic Bookstore, 1964.
- Almond, Gabriel A & Powell, Jr. G. Bingham, *Comparative Politics: System, Process, and Policy*, 2<sup>nd</sup> ed., Boston, Toronto: Little Brown and Company, 1978.
- \_\_\_\_\_, *The Study of Comparative Politics*, dalam *Comparative Politics Today*, Boston: Little, Brown & Company, 1974.
- \_\_\_\_\_, & Coleman, James S. *The Politics of the Developing Areas*, Princeton New Jersey: Princeton University Press, 1960.
- \_\_\_\_\_, dan Sidney Verba, *Budaya Politik: Tingkahlaku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*, Terjemahan Sahat Simamora, Jakarta: Bina Aksara, 1984
- Anderson, Benedict and Audrey Kahid (ed), *Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributors to Debate*, Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Language and Power, Exploring Political Cultures in Indonesia*, Chicago: The Wilder House Board of Editors and the University of Chicago.
- Apter, David E. *Pengantar Analisa Politik*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

- Barber, Benjamin R, *Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age*, Barkeley: Univercity of California Press, 1984.
- Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif, Perspektif Mikro*, cetakan pertama, SurabayaL Insan Cendikia, 2002
- Benda, Harry J, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit, Islam di Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.
- Bendix, Reihard, *Max Weber, An Intellectual Portrait*, London: Metthuen and Co.Ltd, 1966
- Berling dan Totten, *Modernisasi, Masalah Model Pembangunan*, JakartaL PT. Rajawali Press, 1984
- Boland, B.J, *Pergumulan Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 1985.
- Brown, David, *The State and Ethnic Politics in South-East Asia*, New York and London: Routletge, 1994
- Brown, Michael E, *Nationalism and Etnic Conflict*, London, 1998
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1991
- \_\_\_\_\_, *Demokrasi Di Indonesia Demokrasi Parlementer Dan Demokrasi Pancasila*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991
- Budiman, Arief, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Teori Negara; Negara Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta: PT. Gramedia Putaka Utama, 1999
- Bulkin, Farchan, *Pengantar Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Cahyono, Heru, *Peranan Ulama dalam Golkar 1971-1980, dari Pemilu Sampai Malari*, Jakarta: Sinar Harapan, 1992.
- Chilcote, Ronald H, *Theories of Comparative Politics*, Colorado: Westview Press, 1981.

- Christophersen, Jens A., *The Meaning of "Democracy" as Used in European Ideologies from the French to the Russian Revolution*, Universitets forlaget, 1968.
- Combe, Jamnes E. Combe & Dan Nimmo, *Propaganda Baru Kediktatoran Perundingan Dalam Politik Masa Kini*, Bandung: Rosda Karya, 1994.
- Crouch, Harold, *Perkembangan Politik dan Modernisasi*, Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1982  
 \_\_\_\_\_, *Militer dan Politik*, Jakarta: Sinar Harapan, 1986.
- Diamon, Larry dkk, *Consolidating The Third Wave Democratic*, Baltimore: John Hopkins Univercity Press, 1997.
- Duverger, Maurice, *Patai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan*, Terjemahan Laila Hasyim, Jakarta: Bina Aksara, 1984  
 \_\_\_\_\_, *Sosiologi Politik*, Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 2003.
- Ecomora, J. Eliseo, *Nasionalisme Mencari Ideologi*, Jakarta: Grafiti, 1991.
- Emmerson, Donald K. *Indonesi's Elite: Political Culture and Cultural Politics*, Ithaca: Cornell University Press, 1976.  
 \_\_\_\_\_, *The Bureaucracy in Indonesia*, Cambridge, Mass: Center For International Studies, MIT, 1974.  
 \_\_\_\_\_, *Indonesia Beyond Soeharto*, Jakarta: PT. Gramedia, 2001.
- Ever, Hans Dieter dan Tilman Sciel, *Kelompok-kelompok Strategis, Studi Tentang Negara, Birokrasi, dan Pembentukan Kelas di Dunia Ketiga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, edisi kedua, terjemahan Aan Efendi, 1992
- Feillard, Andree, *NU Vis-a-Vis Negara Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Yogyakarta: LkiS, 1999
- Feith, Herbert, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, second edition, Ithaca, New York: Cornell Univercity Press, 1971.  
 \_\_\_\_\_, *The Indonesian Election of 1955*, Ithaca: Modern Indonesia Project, 1971.

- Finkle Jason, L. Richard W. Gable, *Political Development and Social Change*, Second Edition, New York: John Wiley and Sons. Inc, 1971
- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa* Cet. III, Jakarta: Pustaka Jaya, 1989.
- \_\_\_\_\_, (ed.), *Old Societies and New States*, New York: Free Press, 1963.
- Gellner, Ernest, *Membangun Masyarakat Sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan*, Bandung: Mizan, 1994.
- Gibbon, Michael, T., (ed), *Tafsir Politik, Telaah Hermeneutis Wacana Sosial Politik Kontemporer*, alih bahasa Ali Noer Zaman, Yogyakarta: Qalam, 1987
- Giddens, Anthony, *The Constitution of Society, Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*, alih bahasa Adi Loka Sujono, Pasuruan: Pedati, 2003
- \_\_\_\_\_, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern suatu Analisis Karya-tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*, penerjemah Soeheba Kramadibrata, Jakarta: UI Press, 1986
- Gould, Carol C, *Demokrasi Ditinjau Kembali*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1993.
- Greesntein, Fred dan Nelson Polsby (eds), *Handbokk of Political Science*, Vol 3. Reading Mass, Addison-Wesley, 1977.
- Gregory, Ann, *Recruitment and Factional Patterns of the Indonesian Political Elite, Guided Democracy and the New Order*, Michigan, Ann Arbor: University Microfilm International, 1978.
- Gunawan, Jamil, Yunanto, Sutoro Eko, et. Al (eds), *Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*, Jakarta: LP3ES, 2005
- Hadiz, Vedi R, *Politik, Budaya dan Perubahan Sosial*, Ben Anderson dalam *Studi Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Haidar, M Ali, *Nahdatul Ulama Dan Islam Di Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994
- Hiroko Horikoshi, *Kiyai dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa, Jakarta: P3M, 1987

- Holt, Claire (ed), *Culture and Politics in Indonesia*, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1972.
- Huntington, Samuel P. *Political Order in Changing Societies*, New Haven: Yale University Press, 1973.
- \_\_\_\_\_, *The Third Wave, Democratization in Late Twentieth Century*, Norma and London: university of Oklahoma Press, 1991.
- \_\_\_\_\_, *The Clash of Civilization: Remaking of World Order*, New York: Touchston Book, 1997
- \_\_\_\_\_, *Partisipasi Politik di Dunia Ketiga: Tak ada pilihan Mudah*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1984
- Ingleson, John, *Jalan ke Pengasingan*, Jakarta: LP3ES, 1983.
- Isaacs, Harold R., *Pemujaan Terhadap Kelompok Etnis: Identitas Kelompok Dan Perubahan Politik*, alih bahasa, Canisyus Maran, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993
- Jackson, Karl D. and Lucian W. Pye, *Political Power and Communication in Indonesia*, Berkeley: University of California Press, 1978.
- \_\_\_\_\_, *Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan, Kasus Darul Islam Jawa Barat*, Jakarta: Grafiti, 1990.
- Jaylani, A. Timur, *The Sarekat Islam: its Contribution to Indonesia Nasionalism*, M.A. Thesis, Montreal: Institute of Islamic Studies, 1959.
- Jeffry M. Paige, *Political Orientation and Riot Participation*” dalam *American Sociological Review*, 1971.
- Joenarto, *Sejarah Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta: Gajah Mada, 1966.
- Kahin, Goerge McTurnan, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pengajaran Malaysia, 1980.
- Kana, Nico L., et al, *Dinamika Politik Lokal di Indonesia*, Yogyakarta: Percik Press, 2002
- Karim, M. Rusli, *Perjalanan Partai Politik, Sebuah Potret Pasang Surut*, Jakarta: Rajawali, 1983.

- \_\_\_\_\_, *Dinamika Islam di Indonesia, Suatu Tinjauan Sosial dan Politik*, Yogyakarta: Hanindita, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Peranan ABRI dalam Politik*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1983.
- Kartodirjo, Sartono, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, 1975.
- \_\_\_\_\_, *Elite Dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: LP3ES, 1981
- \_\_\_\_\_, *Kepemimpinan Dalam Dimensi Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1984
- Keller, Suzanne, *Penguasa Dan Kelompok Elit Peranan Elit-Penentu dalam Masyarakat Modern*, alih bahasa Zahara D. Noer, Jakarta: PT RajaGrafinso Persada, 1995
- \_\_\_\_\_, *Pemberontakan Petani Banten 1988*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.
- Koentjaraningrat, *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*, Jakarta: UI Press, 1993
- \_\_\_\_\_, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Koeber, A.P.E, *Sarekat Islam, gerakan Ratu Adil?*, Jakarta: Graffiti Pers, 1985.
- Krisantono (ed), *Pandangan Presiden Soeharto Tentang Pancasila*. Jakarta: CSIS, 1976.
- Kurasawa, Aiko, *Mobilisasi Dan Kontrol Studi Tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945*, alih bahasa Hermawan Sulistyono, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993
- Kweit, Mary Grisez dan Robert W. Kweit, *Konsep dan Metode Analisa Politik*, alih bahasa Dra. Ratnawati, Jakarta: Bina Aksara, 1986
- Legowo, TA, dkk., *Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia Studi Dan Analisis Sebelum Dan Setelah Perubahan UUD 1945 (kritik, Masalah, dan Solusi)*, Jakarta: FORMAPPI, 2005
- Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, *Pemilihan Umum 1999: Demokrasi atau Rebutan Kursi*, Jakarta: LSPP, 1999
- Lester Milbrath & M.L. Goel, *Political Participation*, Chicago: Rand McNally College Publishing Co, 1977.

- Lev, Daniel S, *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957-1959*, Ithaca: modern Indonesian Project, 1966.
- Liddle, R. Wiliam (ed), *Political Participation in Modern Indonesia*, Monograph Series No. 19, New Haven: Southeast Asia Studies, Yale University Press, 1973.
- \_\_\_\_\_, *Leadership and Culture in Indonesian Politics*. Sydney: Asian Studies Association of Australia in association with Allen & Unwin, 1996.
- Lijphart, Arend, *Patterns of Democracy Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, New Haven and London: Yale University Press, 1999
- Lipman, Walter, *Opini Umum*, Jakarta: Obor, 1998.
- Lukes, Steven (ed), *Readings in Social and Political Theory: Power*, Oxford: Blackwell, 1992.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah kenegaraan, Studi Tentang Percaturan Politik dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- \_\_\_\_\_, *Islam dan Politik Indonesia pada Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.
- Mahfud M.D, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998.
- Marbun, B.N., *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005
- Mas'oed, Mohtar, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: UGM Press, 2001.
- Mendoza, Democrito T., *Kampanye Isu & Cara Melobi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Miles, Matthew B dan Michael Huberman, *Analisa Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, terjemahan Tjejep Rohendi Rohidi, 1992
- Mochtar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Yayasan Karya Dharma Institut Ilmu Pemerintahan, 1999.
- Moleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhaimin, Yahya dan Colin McAndrew, (eds), *Masalah-masalah Pembangunan Politik*, Jogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991

- Mulyana, Deddy, *Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001
- Nasution, Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 1995.
- Neuman, W. Lawrence, *Social Research Methods Quallitative and Quantitative Approaches*, Allyn and Bacon: 1997.
- Niel, Robert Van, *Munculnya Elit Modern Indoensia*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
- Nimmo, Dan, *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan, dan Media*, Bandung : Rosda Karya, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*, Bandung: Rosda Karya, 2000
- Noer, Deliar, *Partai-Partai Islam Di Pentas Nasional*, Jakarta” Grafiti Pers, 1987
- \_\_\_\_\_, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1980
- \_\_\_\_\_ & Akbarsyah, *KNIP; Komite Nasional Indonesia Pusat Parlemen Indonesia 1945-1950*, Jakarta: Yayasan Risalah, 2005
- Nursal, Adnan, *Political Marketing*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004).
- O’Donnell, Guillermo dan C. Schmitter, Philippe, *Transisi Menuju Demokrasi*, Jakarta: LP3ES, 1993.
- Pateman, Carole, *Participation and Democratic Theory*, Cambridge Univercity Press, 1970.
- Penning, Paul et al, *Doing Research in Political Science*, London: SAGE Publications, First Publication, 1999
- Piliang, Indra J dan Bivitri Susanti, *Untuk Apa DPD RI*, Jakarta: Kelompok DPD di MPR RI, 2006
- Rauf, Maswadi, *Konsensus dan Konflik Politik Sebuah Penjajagan Teoritis*, Jakarta: DIKTI Diknas, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Teori Demokrasi dan Demokratisasi*, Naskah Pidato Pada Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. 1 November 1997.

- \_\_\_\_\_, *Indonesia dan Komunikasi Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Teori Pembangunan Politik: Kasus Partisipasi Politik*, Orasi ilmiah pada Perayaan Dies Natalis Universitas Indonesia
- Riff, Michael A., *Kamus Ideologi Politik Modern*, alih bahasa Miftahuddin dan Hartian Silawati, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1995
- Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Sanit, Arbi, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Saragih R, Bintan, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Pranan DPR GR Periode 1965-1971*, Bandung: Disertasi Unpad
- Sartori, Giovanni, *The Theory of Democracy Resivited*, Chatham Hous: 1987.
- Sastropoetro, Santoso, *Propaganda Salah Satu Bentuk Komunikasi Massa*, Bandung: Alumni, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Pendapat Publik, Pendapat Umum, dan Pendapat Khalayak Dalam Komunikasi Sosial*, Bandung: Remaja Karya, 1987.
- Sekretariat DPR-RI, *10 Tahun Parlemen RI 1950-1960*, Jakarta: 1960.
- \_\_\_\_\_, *Ruang Lingkup Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (laporan Hasil penelitian)*, Jakarta: Setjen DPR RI, 2003
- Sekretariat Jenderal MPR RI, *Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sidang MPR RI Akhir Masa Jabatan Periode 1999-2004*, Jakarta: Setjen MPR RI, 2004
- Sekretariat Jenderal MPR/DPD RI, *Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia & Profil Anggota DPD RI 2004-2009*, Jakarta: Setjen MPR/DPD RI, 2005
- \_\_\_\_\_, *Hasil Seminar Nasional Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Penguatan Demokrasi di Indonesia*, Jakarta, Setjen DPD RI, 2006

- \_\_\_\_\_, *Sekilas Mengenal Dan Memahami Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Jakarta: Setjen DPD RI, 2006
- \_\_\_\_\_, *Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Setjem MPR & UNDP, 2003
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Sjamsuddin, Nazaruddin, *Integrasi Politik di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Somantri, Sri, *Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Bandung: Alumni, 1974.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, terjemahan M. Shodiq dan Imam Muttaqin, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Steinberg, Arnold, *Kampanye Politik Dalam Praktek*, alih bahasa M. Sidarto, Jakarta: PT. Intermasa, 1981
- Strong, C.F., *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah & Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Bandung, Nuansa & Nusamedia, 2004
- Sudarsono, Juwono, *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991
- Suhadi, Imam, *Pemilu 1955, 1971, 1977; Cita-cita dan Kenyataan Demokrasi*, Yogyakarta: UII, 1981.
- Sukirman, *Tentang Pemilihan Umum*, Jakarta: Yayasan Pembaharuan, 1952.
- Sumarno AP, *Dimensi-Dimensi Komunikasi Politik*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989
- Suparlan, Parsudi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PPS UI, 1994.
- Tim Sekretariat DPR RI, *DPR-GR Seperempat Abad DPR RI*, Ed, Rev, Jakarta: Sekretariat DPR-RI, 1983.

- Venus, Antar, *Manajemen Kampanye*, Bandung: Simbiosis Rakatama Media, 2004.
- Wahyono, Padmo (ed.), *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Wijaya, Albert dalam Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990.
- Woodward, Mark R., *Islam Jawa Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*, alih bahasa Hairus Salim HS, Yogyakarta: LKiS, 1999
- Yin, Robert K, Studi Kasus, *Desain dan Metode*, terjemahan M. Djauzi Muzakir, Cetakan Kelima, Jakarta: Rajawali Press, 2004

### **Hasil Penelitian dan Makalah**

- Magenda, Burhan D., Ethnicity and State-Building In Indonesia: The Cultural Base of the New Order, dalam Remo Guidieri dkk (editor), *Ethnicities and Nations: Processes of Interethnic Relations In Latin America, Southesat Asia, and the Pacific*, University of Texas Press, Austin, 1983
- \_\_\_\_\_, “Perubahan dan Kesenambungan Dalam Pembelahan Masyarakat Indonesia”, dalam Prisma No. 4, 1990
- \_\_\_\_\_, “Putera Daerah” Dalam Integrasi Nasional, Makalah disampaikan pada Simposium Internasional “Globalization and Local Culture: A Dialectic Towards the New Indonesia, Padang, Indonesia, 18-21 Juli 2001 di Universitas Andalas
- \_\_\_\_\_, Pilkada dalam Kerangka Hubungan Pusat dan Daerah, dalam *Jurnal Politika*, Mei 2005
- \_\_\_\_\_, Hubungan Eksekutif dan Legislatif yang Kondusif untuk Stabilitas Politik dan Pembangunan Nasional, makalah disampaikan pada kuliah dan ceramah umum pada Kursus Singkat Angkatan XIII LEMHANAS di Jakarta, 5 April 2005
- Mar’iyah, Chusnul, *Urban Political Conflict in Australia: The Redevelopment of Inner Sydney*, Disertasi Ph.D. Departemen of Government, The University of Sydney

Nur Hidayat, Dedy, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Kumpulan Bahan Kuliah), Jakarta: PPs UI, 2003

Rauf, Maswadi, Otonomi Daerah dan Pembangunan Nasional, makalah disampaikan dalam seminar tentang “Otonomi dan Pembangunan Daerah” kerjasama antara PP AIPI, PC AIPI, dan Pemda Tk. II Kampar, tanggal 1-3 November 1995 di Bangkinang Riau, 1995

\_\_\_\_\_, Dasar-Dasar Kesatuan Bangsa Indonesia, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional tentang “Tinjauan Kritis tentang Integrasi Bangsa” yang diadakan oleh Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UI di Pusat Studi Jepang, UI Depok, pada tanggal 16-17 Januari 1996

\_\_\_\_\_, “Teori Demokrasi dan Demokratisasi”, Pidato pengukuhan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Salemba Raya 6, 1 November 1997

\_\_\_\_\_, Impian Akselerasi Aktualisasi Pancasila, dalam Kompas, 10 Juni 2006

#### **Jurnal dan Surat Kabar:**

Jurnal Politika, Mei 2005

Jurnal Parleментарia, 2005-2006

Jurnal Prisma No. 4, 1990

Jurnal Studi Ilmu Politik UI dan Mizan, 1998-2000

Surat Kabar Nasional dan Lokal

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Penjelasannya

Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik

Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD

Keputusan KPU No. 16 Tahun 2004 Tentang Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004

Keputusan KPU No. 636 Tahun 2003 Tentang perubahan terhadap Keputusan KPU No. 100 Tahun 2003 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2003

Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat No 4/SK/KPU-JB/II/2004 Tentang Jadwal Kampanye Peserta Pemilu Pada Pemilu 2004